



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* (CSR)
PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, Tbk.
(Studi Evaluasi terhadap Program Unit Pelayanan Kebersihan
(UPK) di Kelurahan Puspanegara, Citereup, Bogor)**

SKRIPSI

**ISA TRISYASUMA
0806348053**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* (CSR)
PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, Tbk.
(Studi Evaluasi terhadap Program Unit Pelayanan Kebersihan
(UPK) di Kelurahan Puspanegara, Citereup, Bogor)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial**

**ISA TRISYASUMA
0806348053**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM REGULER 2008
DEPOK
JUNI 2012**

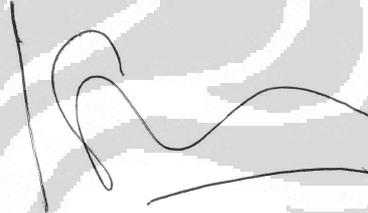
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Isa Trisyasuma

NPM : 0806348053

TandaTangan :



Tanggal : Juni 2012

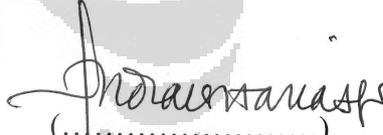
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Isa Trisyasuma
NPM : 0806348053
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : Evaluasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. (Studi Evaluasi terhadap Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK) di Kelurahan Puspanegara, Citereup, Bogor)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kesejahteraan Sosial pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

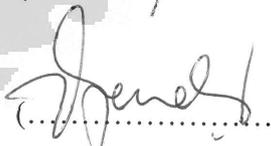
Pembimbing : Dra. Indra Lestari Fawzi, M. Si


(.....)

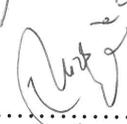
Penguji : Arif Wibowo, S. Sos, S. Hum, M. Hum


(.....)

Penguji : Dra. Djoemeliarasanti Djoekardi, M. A


(.....)

Penguji : Kania Saraswati H., S. Sos, M. Kesos


(.....)

Ditetapkan di : FISIP UI
Tanggal : 28 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul "Evaluasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk. (Studi Evaluasi terhadap Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK) di Kelurahan Puspanegara, Citereup, Bogor)".

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyelesaian proposal penelitian, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan proposal ini. Olehkarenaitu, atasbantuandorongan yang telahdiberikanolehberbagaipihak, penelitiinginmenyampaikanucapanterimakasihkepada:

1. Kedua orang tua, Apa (Syafiril, S.Pt), Ama (Julastri, S.Pt) dan Adikku (Ranigeo Ladisa) untuk kasih sayang, inspirasi, dukungan semangat, pengertian dan perhatian tanpa batas yang selalu diberikan tiada henti. *Knowing that i could never find at all wich anyone other than you all.*
2. Keluarga besarJajak Kabau dan Parak Jua yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama masa perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini.
3. Ketua Program SI Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ibu Dra. Ety Rahayu, M. Si yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
4. Pembimbing Skripsi, Dra. Indra Lestari Fauzi, M.Si yang telah meluangkan waktu, membimbing dan memberikan berbagai ilmu bermanfaat demi selesainya skripsi ini.
5. Pembimbing Akademik, Sari Viciawati Machdum S.Sos., M.Si. yang telah membimbing penulis selama 4 tahun masa perkuliahan.
6. Seluruh tim pengajar dan staf Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
7. Keluarga besar *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk. Pak Dedy, Pak Fajar, Pak Ayi, Pak Rommy, Pak Bambang, pekerja UPK dan bapak-bapak lainnya yang selalu menyediakan waktu untuk menjelaskan berbagai hal mengenai CSR dan

UPK. Terima Kasih untuk berbagai informasi bermanfaat yang telah diberikan

8. Muhammad Izzan Perdana, *thank'sfor your care, your understanding, your support, and your way for my happiness. For the first time, you're the only one reminds me that nothing else matter in this life.*
9. Teman-teman terbaikku, Etika Prabandari, Miranti Dwiputri, Ade Syafitri, Efron Gisyard Apituley, dan Priliana Ramadhani yang selalu menjadi penghibur, memberikan bantuan, perhatian dan semangat dalam pengerjaan skripsi dan masa-masa perkuliahan.
10. Sahabatku, Yohanna Safetri, Hanifah Rahim dan Risky Hanika Syafar untuk komunikasi dan energi positif yang selalu berusaha dijalin walau tidak berdekatan.
11. Teman-teman "Mawar", yang selalu bersedia membantu, berbagi, menjadi tempat berkeluh-kesah selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini : Wulandari, Rahayu Ratih Maretta, Suri, Mela Oktavia, Meizi Syafitri, Stefani, Giska Novellya Desinta.
12. Teman-teman Kesejahteraan Sosial FISIP UI angkatan 2008. Teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini Nofan, Shinta, Madina, Icha, Gino, Afra, Uchi, Avi, Randi, Steven, Selvi, Alia, Ebeth, Fara, Jenny, Jihad, Anto, Dezy, dan lain-lain.

Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan semoga proposal ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isa Trisyasuma
NPM : 0806348053
Program Studi : S1 Reguler
Fakultas : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Evaluasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. (Studi Evaluasi terhadap Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK) di Kelurahan Puspanegara, Citereup, Bogor)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Juni 2012
Yang Menyatakan,



(Isa Trisyasuma)

ABSTRAK

Nama : Isa Trisyasuma
Fakultas : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul : Evaluasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. (Studi Evaluasi terhadap Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK) di Kelurahan Puspanegara, Citereup, Bogor)

Penelitian ini membahas evaluasi pelaksanaan program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK) yang dilaksanakan oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. (ITP) serta menjabarkan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program tersebut. Yang dievaluasi pada penelitian ini dimulai dari perencanaan program, proses pengambilan sampah dari rumah tangga, proses pengolahan sampah menjadi *Sorted Municipal Waste* (SMW) dan kompos, pengiriman SMW dan kompos ke ITP, pemeliharaan mesin *crusher*, *screen* dan kendaraan operasional serta proses monitoring dan evaluasi. Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan UPK dengan konsep penerapan CSR dan terdapat 4 faktor penghambat dan 2 faktor pendukung pelaksanaan program.

Kata kunci: CSR, evaluasi, PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk.

ABSTRACT

Name : Isa Trisyasuma
Study Program : Social Welfare
Title : Evaluation of PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk.
Corporate Social Responsibility Program (Evaluative
Study of UPK Program in Puspanegara, Citereup, Bogor)

This research about evaluation process of implementation UPK Program was implemented by Corporate Social Responsibility PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk and explain restricting and supporting factors in program implementation. This research evaluate planning program, collecting household waste process, processing household waste to be Sorted Municipal Waste (SMW) and compost, delivering SMW and compost process, crusher machine, screen machine and vehicle maintenance process and monitoring and evaluation process. The result, there are some of differences between CSR concept and implementation of UPK and also there are four restricting factors and two supporting factors in program implementation.

Key word: CSR, evaluative, PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xvii
1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Pendekatan Penelitian	9
1.5.2 Jenis Penelitian	10
1.5.3 Keterbatasan Penelitian	11
1.5.4 Lokasi Pengumpulan Data	12
1.5.5 Teknik Pemilihan Informan	12
1.5.6 Teknik dan Waktu Pengumpulan Data	16
1.5.7 Teknik Analisa Data	18
1.5.8 Teknik Meningkatkan Kualitas Data	18
1.6 Sistematika Penulisan	19
2 Ilmu Kesejahteraan Sosial, <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan Pengembangan Masyarakat	
2.1 Ilmu Kesejahteraan Sosial, <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan Masalah Lingkungan	21
2.2 <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	25
2.2.1 Pengertian CSR	26
2.2.2 <i>Tripple Bottom Line</i>	27
2.2.3 <i>Benefit</i> dan <i>Driver</i> Pelaksanaan CSR	28
2.2.4 Ruang Lingkup CSR	30
2.2.5 Model CSR	32
2.2.6 Tahapan Penerapan CSR	33
2.2.7 Evaluasi CSR	34
2.3 Pengembangan Masyarakat	35

2.3.1	Pengertian Pengembangan Masyarakat	36
2.3.2	Ciri Khas Pengembangan Masyarakat	37
2.3.3	Pendekatan dalam Pengembangan Masyarakat	38
2.3.4	Tahap Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat	40
2.3.5	Kendala dalam Pengembangan Masyarakat	42
2.3.4.1	Kendala yang Berasal dari Kepribadian Individu	43
2.3.4.2	Kendala yang Berasal dari Sistem Sosial	45

3 Gambaran Umum

3.1	Gambaran Umum Wilayah dan Komunitas Pelaksanaan Program	47
3.1.1	Wilayah	47
3.1.2	Komunitas	48
3.2	Gambaran Umum PT . Indocement (ITP)	51
3.2.1	Sekilas Tentang ITP	51
3.2.2	Sejarah	52
3.2.3	Visi Misi Motto	54
3.2.4	Lokasi	54
3.2.5	Struktur Organisasi	55
3.2.6	Sarana dan Prasarana Perusahaan	57
3.2.7	Proses Pembuatan Semen	58
3.2.8	Produk	60
3.3	CSR ITP	61
3.3.1	Sejarah CSR ITP	61
3.3.2	Visi dan Misi CSR ITP	62
3.3.3	Struktur Organisasi CSR ITP	63
3.3.4	Desa Binaan	63
3.3.5	Program-program CSR ITP	64
3.3.6	Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)	66
3.3.7	<i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Pengelolaan <i>Sorted Municipal Waste (SMW)</i> dan Kompos di Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)	68
3.3.7.1	Pengambilan Sampah Rumah Tangga	68
3.3.7.2	Prosedur Produksi SMW dan Kompos	69
3.3.7.3	Prosedur Pengiriman SMW dan Kompos ke ITP	71
3.3.7.4	Prosedur Pemeliharaan Mesin <i>Crusher</i> , Mesin Pengayakan (<i>Screen</i>) dan Kendaraan Operasional	73
3.3.7.5	Evaluasi dan Pelaporan	74

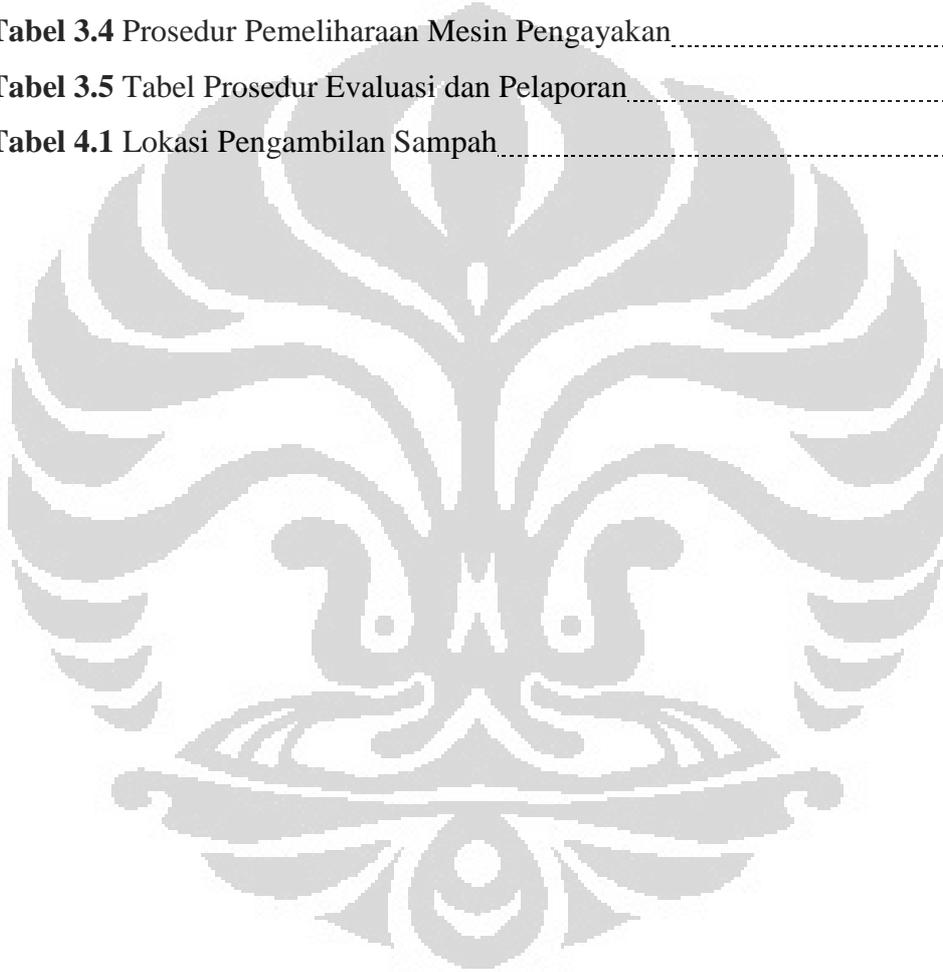
4 Temuan Lapangan dan Analisa

4.1	Gambaran Umum Pelaksanaan Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)	76
4.1.1	Perencanaan UPK	76
4.1.1.1	Identitas UPK	76
4.1.1.2	Sejarah UPK	78
4.1.2	Pelaksanaan UPK	82
4.1.2.1	Pengambilan Sampah Rumah Tangga	83
4.1.2.2	Produksi SMW dan Kompos	92

4.1.2.3	Pengiriman SMW dan Kompos	99
4.1.2.4	Pemeliharaan Mesin dan Kendaraan Operasional	102
4.1.2.5	Pelaporan dan Evaluasi	104
4.1.2.6	Manfaat yang Diperoleh Masyarakat dari Pelaksanaan UPK	104
4.1.2.7	Kegiatan Lain yang Dilaksanakan di UPK	106
4.2	Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)	108
4.2.1	Faktor Penghambat Pelaksanaan UPK	108
4.2.2	Faktor Pendukung Pelaksanaan UPK	113
4.3	Analisa	114
4.3.1	Gambaran Umum Pelaksanaan Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)	114
4.3.1.1	Perencanaan UPK	114
4.3.1.2	Pelaksanaan UPK	117
4.3.2	Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)	123
4.3.2.1	Faktor Penghambat Pelaksanaan UPK	123
4.3.2.2	Faktor Pendukung Pelaksanaan UPK	125
BAB 5 Kesimpulan dan Saran		
5.1	Kesimpulan	127
5.1.1	Gambaran Umum Pelaksanana UPK	127
5.1.2	Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan UPK	129
5.1.2.1	Faktor Penghambat Pelaksanaan UPK	129
5.1.2.2	Faktor Pendukung Pelaksanaan UPK	130
5.2	Saran	130
DAFTAR PUSTAKA		133
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kegiatan yang Dilakukan UPK dari Tahun 2007-2009.....	7
Tabel 1.2 <i>Theoretical Sampling</i>	15
Tabel 1.3 Waktu Penelitian.....	17
Tabel 3.1 Prosedur Produksi SMW dan Kompos.....	68
Tabel 3.2 Prosedur Pengiriman SMW dan Kompos ke ITP.....	71
Tabel 3.3 Prosedur Pemeliharaan Mesin <i>Crusher</i>	73
Tabel 3.4 Prosedur Pemeliharaan Mesin Pengayakan.....	74
Tabel 3.5 Tabel Prosedur Evaluasi dan Pelaporan.....	75
Tabel 4.1 Lokasi Pengambilan Sampah.....	86



DAFTAR GAMBAR

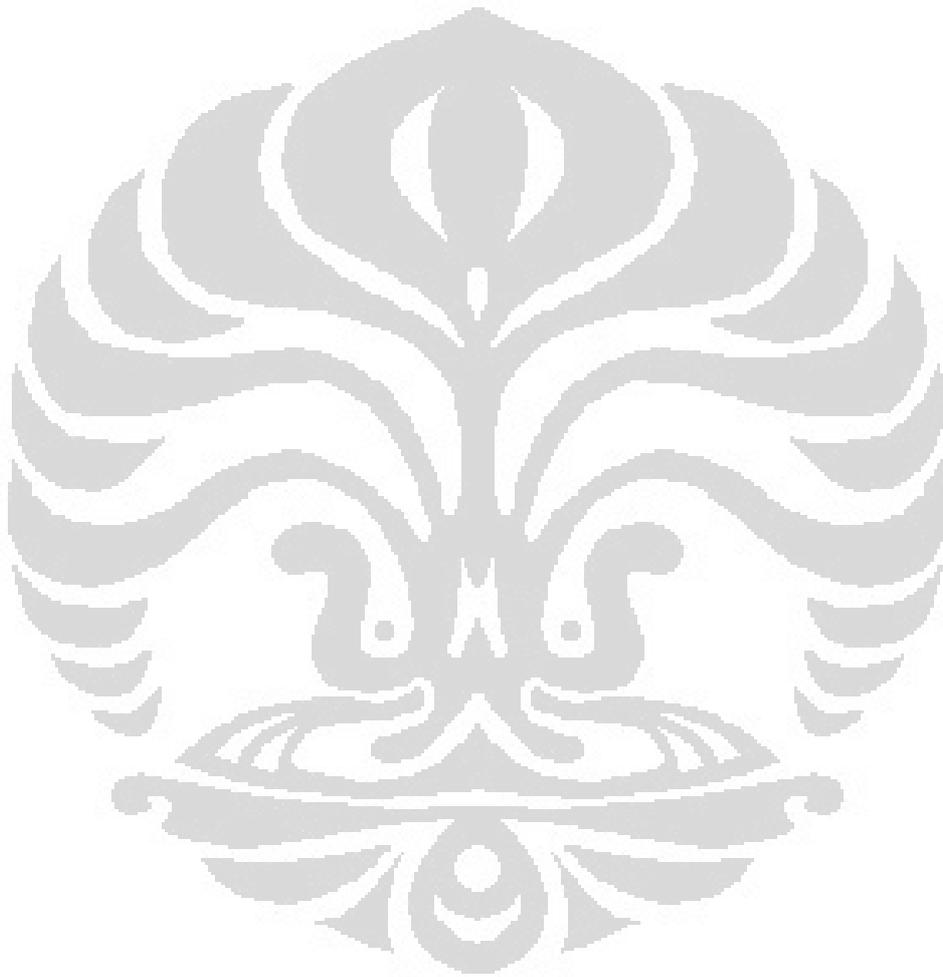
Gambar 1.1 Program CSR ITP dan Kaitannya dengan MDG's dan Isu Global.....	5
Gambar 1.2 Proses Analisa Data	18
Gambar 2.1 Ilustrasi <i>Triple Bottom Line</i>	27
Gambar 2.2 Ruang Lingkup CSR	31
Gambar 3.1 Peta Kelurahan Puspanegara	47
Gambar 3.2 Struktur Organisasi ITP	56
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Divisi Teknis	56
Gambar 3.4 Struktur organisasi CSR ITP	63
Gambar 3.5 Peta 12 Desa Binaan CSR ITP	64
Gambar 3.6 Flow Pengolahan Sampah Menjadi Energi	67
Gambar 4.1 Motor Roda Tiga UPK.....	84
Gambar 4.2 Truck UPK dan Gerobak	84
Gambar 4.3 Sampah yang menumpuk di lokasi UPK	88
Gambar 4.4 Dumping Area yang telah selesai di bangun	90
Gambar 4.5 Mesin <i>Crusher</i> dan Mesin <i>Screen</i> yang Sudah Rusak dan Tertutupi Sampah.....	93
Gambar 4.6 Pemilahan dan Pengemasan Sampah tanpa Proses Pengolahan.....	93
Gambar 4.8 Tempat pemisahan sampah di Dumping Area	95
Gambar 4.9 Kegiatan Jahit Karung	96

DAFTAR LAMPIRAN

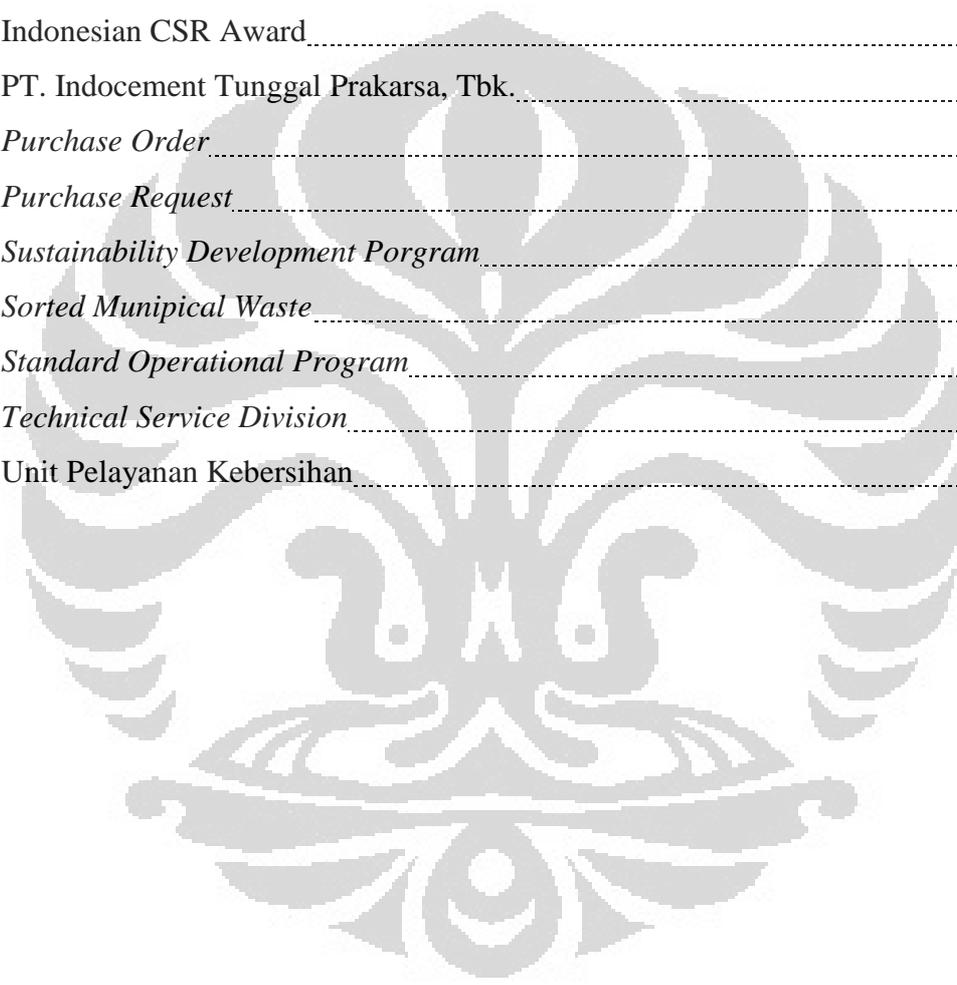
Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Traskrip Wawancara

Lampiran 3 Lembar Pengesahan di PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk.



DAFTAR ISTILAH



Alat Pelindung Diri.....	APD
<i>Alternative Fuel and Raw Material</i>	AFR
<i>Corporate Social Responsibility</i>	CSR
Dinas Kebersihan dan Pertamanan.....	DKP
<i>General Engineering Civil Division</i>	GECD
Indonesian CSR Award.....	ICA
PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk.....	ITP
<i>Purchase Order</i>	PO
<i>Purchase Request</i>	PR
<i>Sustainability Development Program</i>	SDP
<i>Sorted Municipal Waste</i>	SMW
<i>Standard Operational Program</i>	SOP
<i>Technical Service Division</i>	TSD
Unit Pelayanan Kebersihan.....	UPK

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Midgley, (1997: 23) kesejahteraan sosial merupakan “*a state or condition of human well-being that exist when social problems are managed, when human needs are met and social opportunities are maximized*” (Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan). Undang-undang No.11 tahun 2009 juga mendefinisikan “kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Kondisi kesejahteraan seperti yang didefinisikan oleh Midgley dan UU No. 11 tahun 2009 merupakan kondisi yang diinginkan oleh semua orang. Setiap individu di dalam masyarakat menginginkan kebutuhannya terpenuhi, baik kebutuhan material, spiritual dan sosial. Tidak hanya sampai disitu, setiap individu juga menginginkan berbagai permasalahan sosial di sekitarnya dapat dikelola dengan baik dan kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.

Namun kenyataannya sangat sulit untuk mencapai kondisi tersebut. Saat ini masih banyak individu-individu yang kebutuhan sosial, spritual bahkan materialnya belum terpenuhi dengan baik. Terbukti dengan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang, 12,36 persen dari total jumlah keseluruhan rakyat Indonesia.

Untuk itu, demi tercapainya kesejahteraan sosial perlu adanya dukungan dari berbagai komponen bangsa. Indonesia memang menganut prinsip keadilan sosial (sila kelima Pancasila) dan secara eksplisit konstitusinya (pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan

kesejahteraan sosial, namun letak tanggung jawab pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Prinsip keadilan sosial di Indonesia terletak pada usaha secara bersama seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Pembangunan sosial adalah tanggung jawab pemerintah, juga masyarakat, dunia usaha (perusahaan) dan komponen lainnya. Konsekuensinya harus terjadi saling sinergi dalam penanganan masalah sosial antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha (perusahaan).

Turut sertanya dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ini dapat diwujudkan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ini dikukuhkan dengan keluarnya ISO 26000. ISO 26000 digunakan sebagai standar pelaksanaan tanggung jawab sosial yang diluncurkan pada tahun 2010. Secara lengkap definisi tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 adalah:

“Responsibility of an organization for the impact of its decision and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.” (Tanggung jawab perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab suatu organisasi yang atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang; Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; Memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*; Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, alam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa) (Jalal, 2010:1)

Di Indonesia sendiri, sejak tahun 2003 Kementerian Sosial mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada perusahaan nasional. Pada tahun 2007 pelaksanaan CSR untuk dunia usaha sudah diwajibkan

melalui UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pasal 74 yang berisi: “(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pelaksanaan CSR di setiap perusahaan juga selaras dengan konsep *Triple Bottom Line* yang dipopulerkan oleh John Elkington (Wibisono, 2007: 32). Selain mengejar *profit*, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Menurut Wibisono (2007: 33) *Profit* memang menjadi unsur yang utama dari setiap kegiatan usaha. Tak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar *profit* atau mendongkrak harga saham setinggi-tingginya. Namun perlu pula disadari bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan dan kehidupan sosial perlu diperhatikan.

Jika perusahaan ingin eksis dan dapat diterima maka harus disertakan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Lingkungan akan menjadi teman ataupun musuh, tergantung bagaimana perlakuan yang mereka terima. Begitupun dengan masyarakat disekitar perusahaan. Mereka pada dasarnya juga memberikan pengaruh besar terhadap keberadaan, keberlangsungan, dan perkembangan perusahaan. Untuk itu perusahaan perlu berkomitmen untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan lingkungan.

Salah satu perusahaan yang telah menerapkan CSR dan pelaksanaannya berdasarkan pada konsep *Triple Bottom Line* adalah PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. (ITP). ITP berusaha melaksanakan CSR dengan dasar filosofi pembangunan berkelanjutan. Secara ekonomi perusahaan berusaha menciptakan

pertumbuhan dan keuntungan, secara sosial perusahaan bertanggungjawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi karyawan dan masyarakat serta secara lingkungan perusahaan berusaha menjalankan operasional usahanya dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Filosofi pembangunan berkelanjutan ini kemudian di terapkan ITP ke dalam kebijakan umum perusahaan. Kebijakan yang terkait dengan filosofi pembangunan berkelanjutan dijelaskan dalam poin keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan, lingkungan dan komunitas. ITP berkomitmen untuk senantiasa mematuhi undang-undang, mengendalikan resiko dalam operasionalnya, berupaya menghemat sumber daya alam dan mengutamakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan mengurangi dampak lingkungan serta senantiasa berusaha meningkatkan program untuk menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis dengan lingkungan sekitar.

Selain itu komitmen perusahaan terhadap pelaksanaan CSR juga dibuktikan dengan pengaturan pendanaan program CSR di ITP. Dalam hal pendanaan, ITP telah memasukkan perencanaan CSR sebagai salah satu perencanaan bisnis. Artinya biaya pelaksanaan CSR telah dimasukkan sebagai salah satu pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh ITP setiap tahun layaknya biaya operasional perusahaan.

Program CSR yang dijalankan ITP secara garis besar terbagi kedalam 2 bagian. Kedua bagian tersebut adalah 5 Pilar dan SDP (*Sustainable Development Program*). Kedua bagian ini mengacu kepada tujuan pembangunan milenium (*Milenium Development Goals/MDGs*) berikut adalah gambar yang akan menjelaskan keterkaitan 2 bagian CSR dengan MDGs dan isu global.



Gambar 1.1 Program CSR ITP dan Kaitannya dengan MDG's dan Isu Global

Sumber: CSR ITP

5 Pilar terdiri dari program-program yang bergerak di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, SOSBUDAG (Sosial Budaya Agama) dan Keamanan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap pilarnya merupakan program yang bersifat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti beasiswa dan bantuan sarana pendidikan. Sedangkan SDP lebih mengarah kepada program yang bersifat jangka panjang. Program-programnya terdiri dari Program Budidaya Jarak, UPK (Program Pengelolaan Sampah), Program *Alternative Fuel* (Pemanfaatan Kotoran Sapi menjadi Biogas), Pusat Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pusat Pelatihan Bengkel Terpadu.

Atas komitmennya terhadap lingkungan dan masyarakat ITP berhasil meraih beberapa penghargaan. Pada 31 Juli 2008, ITP Pabrik Citereup, Bogor memperoleh Peringkat hijau dari Program PROPER yang merupakan program pemeringkatan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup. Di tahun selanjutnya, pada 15 Oktober 2009, ITP pabrik Citereup meraih peringkat yang lebih tinggi yaitu peringkat emas. Pabrik yang lain (Palimanan dan Cirebon) juga berhasil menyusul ITP pabrik Citereup dengan meraih Peringkat Hijau.

Universitas Indonesia

Penghargaan kepada ITP yang berkaitan langsung dengan CSR-nya adalah penghargaan yang diberikan oleh *Indonesian CSR Award (ICA)*. Tanggal 23 Februari 2009, ITP meraih Penghargaan Emas dan Terbaik 1 pada ajang ICA. Penghargaan ini diberikan kepada salah satu program CSR ITP. Program tersebut adalah Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK) dalam bentuk pengolahan sampah rumah tangga menjadi energi (Kompos dan *Sorted Municipal Waste*). UPK menang dalam kategori sosial dan lingkungan. CSR bidang sosial menurut ICA adalah kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, keagamaan dan kesejahteraan sosial. CSR bidang lingkungan adalah kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan kenyamanan dan kelestarian lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Selaras dengan kategori yang di menangkan oleh UPK pada ICA 2008 (kategori Sosial Lingkungan), maka latar belakang berdirinya program ini menurut salah seorang staff *Sustainability Development Program (SDP)* CSR ITP adalah sebagai berikut: pertama, banyaknya sampah yang belum terkelola di beberapa wilayah yang berdekatan atau berada dalam radius unit kerja ITP; kedua, keinginan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga; dan ketiga membantu pemerintah setempat dalam pengelolaan kebersihan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka UPK dilaksanakan dengan tujuan mengoptimumkan pengelolaan sampah menjadi produk yang bermanfaat, memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat yang terlibat langsung dan masyarakat luas pada umumnya dalam pengelolaan sampah tersebut dan membantu menjalankan program pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih.

Bentuk kegiatannya adalah pengolahan sampah menjadi energi. Sampah rumah tangga diolah menjadi *Sorted Municipal Waste (SMW)* dan Kompos melalui beberapa proses. Prosesnya tersebut adalah pengambilan sampah dari rumah warga, kemudian diolah dengan menggunakan mesin *crusher* dan *screen*. Proses ini akan menghasilkan SMW dan Kompos. Keduanya kemudian difermentasikan. SMW difermentasikan untuk mengurangi kadar airnya dan

kemudian di kemas untuk dikirim ke pengguna. ITP sendiri memanfaatkan SMW sebagai bahan bakar alternatif pada proses produksi semen di pabriknya.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, pengolahan sampah di UPK tentu membutuhkan tenaga kerja. Program ini mendesain bahwa tenaga kerjanya berasal dari masyarakat yang berada di sekitar wilayah pelaksanaan UPK. Pengelola UPK juga akan berasal dari masyarakat sekitar. Melalui program ini diharapkan warga memiliki pengetahuan dan ikut serta dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga. Harapan CSR ITP adalah dengan berdirinya UPK, sampah rumah tangga dapat terkelola dengan baik dan UPK nantinya dapat menjadi suatu badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat.

Membantu terwujudnya tujuan UPK, CSR ITP membuat tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh UPK. Tahapan tersebut seperti yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Tahap UPK

No	Item	Fase 1	Fase 2	Fase 3
1	Social Mapping			
2	Focus Discussion Group (Bilikom)			
3	Penyuluhan tentang Kesehatan Masyarakat			
4	Sarana & Prasarana UPK sesuai dengan metode yang diaplikasikan			
5	Pelatihan SDM pengelola UPK			
6	Sosialisasi pengelolaan sampah bersama			
7	Percobaan operasionalisasi sarana & peralatan UPK			
8	Operasionalisasi UPK & Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat			
9	Diversifikasi terbatas produk UPK			
10	Penjualan produk UPK			
11	Penarikan iuran warga			
12	Diversifikasi produk UPK			
13	Penjualan berbagai produk UPK			
14	Sinergi dengan bidang pemberdayaan lainnya			
15	Kader Pemberdayaan masyarakat bidang UPK			

Sumber: CSR ITP

Tabel diatas menjelaskan item-item yang harus dilalui oleh UPK untuk bisa mencapai tujuannya. Item-item tersebut dikelompokkan menjadi 3 fase. Fase 1 merupakan fase perencanaan. Didalam fase ini terdapat 7 item yang harus dilalui sampai akhirnya UPK bisa mencapai fase 2. Fase 2 berisi item-item yang harus dilakukan dalam pelaksanaan UPK. Ketika pelaksanaan UPK berjalan lancar maka fase ini dapat dilalui dan beralih ke fase berikutnya. Fase 3 terdiri atas item-item yang dapat dilakukan UPK setelah berhasil melaksanakan kegiatan dasar pengolahan sampah di fase 2. Ketika UPK telah berhasil sampai ke Fase 3, diharapkan UPK telah mampu mencapai tujuannya untuk mengoptimumkan pengelolaan sampah menjadi produk yang bermanfaat, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penjualan berbagai produk yang dihasilkan UPK dan membantu pemerintah mewujudkan lingkungan bersih dan sehat.

Setiap tahun dilakukan pengukuran pencapaian item-item yang telah dilakukan oleh UPK. Pada tahun 2007 UPK telah mencapai item ke 13 yaitu penjualan berbagai produk UPK. Pada tahun 2008, UPK berhasil meningkatkan pencapaiannya, yaitu sampai item ke 15. Pencapaian ini berhasil dipertahankan pada tahun 2009. Pada tahun 2010, ternyata terjadi penurunan dalam pelaksanaan UPK. UPK tidak lagi berhasil melaksanakan item 12 sampai 15. Hal ini berlanjut sampai pada tahun 2011.

Melalui wawancara awal dengan salah seorang *staff* SDP CSR ITP, didapatkan pernyataan bahwa UPK memang sedang mengalami beberapa masalah dalam pelaksanaan pengolahan sampahnya. Sampah di UPK *overload*, mesin pengolahan sampah rusak sehingga menyebabkan kegiatan pengolahan sampah tidak berjalan efektif. Akibatnya lingkungan UPK berantakan dan hasil produksi SMW dan kompos tidak maksimal. Padahal disisi lain masyarakat membutuhkan UPK untuk mengelola sampah rumah tangga dan ITP membutuhkan SMW sebagai bahan bakar alternatif pada proses pembuatan semen.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UPK. Untuk itu diajukan dua pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program UPK?
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program UPK?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, secara umum tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program UPK. Secara khusus, tujuan umum penelitian ini akan dijabarkan melalui beberapa tujuan khusus berikut:

1. Menggambarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program UPK
2. Menjelaskan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program UPK

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis. Berikut adalah penjelasannya:

1. Akademis
 - Menambah perbendaharaan mengenai penelitian evaluatif terhadap suatu program CSR.
 - Menambah wawasan mengenai konsep dan strategi pelaksanaan *Corporate Socia Responsibility*.
2. Praktis
 - Sebagai masukan bagi perancang dan pelaksana program UPK dalam melakukan perbaikan atau penyempurnaan program CSR di masa yang akan datang.
 - Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program, sehingga dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas program.
 - Memberikan gambaran kemajuan program berdasarkan apa yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan program.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang akan di gunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Hawe (1995: 8) "*qulitative method attempt to*

determine the meaning and experience of the programme for the people involved and interpret effects that may be observed. The approach is unstructured and the evaluator is led by what people say about the programme” (metode kualitatif mencoba menetapkan arti program dan pengalaman dari orang-orang yang terlibat dalam program serta menerjemahkan efeknya. Pendekatan ini tidak terstruktur dan evaluator diarahkan oleh apa yang orang-orang katakan mengenai program). Herman (1987: 21) menyatakan dengan pendekatan kualitatif “ *the evaluators tries to understand the meaning of the program and its outcomes from the participants perspective*” (evaluator mencoba memahami arti program dan hasilnya dari perspektif partisipan).

Kirst-Ashman dkk juga menjelaskan hal serupa. Yegidis & Weinbach (2002: 17) dalam Kirst-Ashman (2006: 322) menjelaskan bahwa “*qualitative method are designed to seek to understand human experiences from the perspective of those who experience them*” (metode kualitatif didesain untuk mencoba mengerti pengalaman manusia dari perspektif orang-orang yang mengalami pengalaman tersebut). Ditambahkan oleh Kirst-Ashman (2006: 322) bahwa “*and their goal is to describe or explore the experiences of clients or other involved in the process*” (tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menggali pengalaman klien atau orang lainnya yang terlibat dalam proses).

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian evaluasi. Evaluasi menurut Watson (1993) adalah “*is an ongoing activity, which assesses the effectiveness of current procedures and provides data that can help set direction for future activities. The overall goal, of course, is to improve service.*” (merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan, yang dilakukan dengan menilai keefektifan dari prosedur-prosedur yang ada dan kemudian menyediakan data-data yang dapat membantu untuk membuat arahan untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya. Tujuan utamanya, jelas untuk meningkatkan pelayanan) (Wallace & Fleet, 2001: 80).

Definisi lain diberikan oleh Umar. Menurut Umar (2002: 1) penelitian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana

suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu apabila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Deniston (1980) dalam Hawe (1995: 7) mendefinisikan evaluasi sebagai berikut “*involves two processes (1) observation and measurement and then (2) comparison of what you observe with some criterion or standard of what you (or the group you represent) would consider an indication of good performance*” (evaluasi meliputi dua proses yaitu observasi dan pengukuran dan kemudian membandingkan apa yang diobservasi dengan kriteria standar dari performa yang terbaik).

Jadi evaluasi merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan, dilakukan dengan mengobservasi dan mengumpulkan informasi mengenai sejauh apa suatu program telah dicapai dan kemudian membandingkannya dengan standar tertentu untuk melihat selisih antara keduanya dengan tujuan meningkatkan pelayanan dari program itu sendiri.

Evaluasi terhadap program UPK di fokuskan kepada pelaksanaan programnya. Sehingga jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi proses. Piertzak dkk (1990: 111) menyatakan evaluasi proses sebagai berikut “*a process evaluation focuses on program activities that involve direct interactions between client and line staff and are central to the accomplishment of the program objectives*” (evaluasi proses fokus pada aktivitas-aktivitas program yang melibatkan interaksi langsung antara klien dan staff dan merupakan pusat dari pencapaian sasaran program). Sejalan dengan pengertian yang diberikan Piertzak, Hawe (1995) mendefinisikan evaluasi proses digunakan untuk mengetahui apakah program yang direncanakan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu perlu dicari tahu mengenai apakah semua aktivitas program telah dilaksanakan dan apakah semua material dan komponen program berada dalam kualitas yang baik.

1.5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak diperolehnya informasi yang lengkap mengenai perencanaan program. Akibatnya proses perencanaan

program tidak dapat dijelaskan secara mendetail. Hal ini disebabkan karena terbatasnya informan yang mengetahui secara rinci mengenai perencanaan UPK sejak awal program ini dimulai yaitu pada tahun 2007. Informasi mengenai perencanaan UPK hanya didapatkan dari dua orang informan, yaitu dari masyarakat yang terlibat langsung dengan UPK serta masyarakat yang menerima manfaat dari UPK.

1.5.4 Lokasi Pengumpulan Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan di tempat pelaksanaan program UPK di Desa Puspanegara, Kecamatan Citareup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Alasan penelitian dilaksanakan di UPK adalah didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Program UPK menjadi pemenang terbaik 1 dan mendapatkan *GOLD Award* dalam ajang Indonesia CSR Award pada tahun 2008. Namun saat ini kondisinya mengalami penurunan.
2. Program UPK dirancang untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Karena itu dibutuhkan evaluasi untuk merencanakan perbaikan pelaksanaan program ke arah yang lebih baik.
3. Program CSRITP berupa UPK yang dilaksanakan di Puspanegara merupakan *Pilot Project* dari program pengolahan sampah menjadi energi yang dilaksanakan oleh CSR ITP.

1.5.5 Teknik Pemilihan Informan

Penelitian ini akan menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Newman (2006: 222), metode *purposive sampling* merupakan suatu metode sampling yang digunakan pada situasi yang bersifat unik, dimana dalam teknik ini ditentukan siapa yang akan menjadi sampel sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Peneliti juga tidak akan pernah mengetahui sampel yang terpilih akan mewakili populasi yang ada. Dengan demikian setiap populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi informan. Berdasarkan pengertian

tersebut maka yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Pihak ITP

- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program UPK
- Mengetahui informasi mengenai pelaksanaan program UPK

2. Masyarakat yang terlibat langsung dengan Program

- Terlibat langsung dalam pelaksanaan program UPK.
- Terlibat langsung dalam jangka waktu minimal 3 tahun
- Mengetahui informasi mengenai pelaksanaan program UPK

3. Masyarakat yang menerima manfaat dari program

- Mengetahui informasi mengenai UPK
- Telah menerima manfaat program sejak awal
- Berada di lokasi yang berdekatan dengan UPK

Dalam pelaksanaan penelitian, berikut adalah informan yang memenuhi kriteria seperti dijelaskan diatas:

1. Pihak ITP

UPK dilaksanakan oleh ITP dibawah tanggung jawab seksi *Sustainability Development Program (SDP)*. Seksi SDP terdiri dari 1 orang *SDP Section Head (Ay)*, 2 orang *SDP Officer (Dd, Fj)*, 1 orang *Jr. Data Analyst* dan 2 orang pengawas langsung program-program SDP. *SDP Section Head* dan *SDP Officer* merupakan orang yang bertanggung jawab dan mengetahui informasi mengenai pelaksanaan UPK. *SDP Section Head* bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan seluruh program yang dilaksanakan seksi SDP, termasuk didalamnya adalah program UPK. *Fj* merupakan *SDP Officer* yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan keseharian pelaksanaan UPK. Sedangkan *Dd* merupakan *SDP Officer* yang bertanggung jawab di bagian teknis pelaksanaan UPK.

2. Masyarakat yang terlibat langsung dengan program

Dalam pelaksanaannya, program UPK dijalankan oleh masyarakat setempat. Pelaksananya terdiri dari 1 orang Ketua Pengelola, 1 orang Pengawas Lapangan, dan Pekerja (1 orang penjahit karung, 3 orang pengemas sampah, 1 orang *driver*). Ketua Pengelola dan Pengawas Lapangan merupakan orang yang telah terlibat sejak awal pelaksanaan program. Keduanya telah terlibat dalam pelaksanaan program selama kurang lebih 5 tahun dan mengetahui informasi mengenai pelaksanaan UPK. Dari 5 orang pekerja di UPK, 3 orang diantaranya telah bekerja lebih dari 3 tahun di UPK. Ketiga orang pekerja itu terdiri dari penjahit karung, pengemas sampah dan *driver*. Penjahit karung dan pengemas sampah mengetahui informasi mengenai pelaksanaan UPK, sedangkan *Driver* menyatakan dia tidak selalu berada di UPK sehingga tidak mengetahui informasi detail mengenai pelaksanaan UPK.

Selain Ketua Pengelola, Pengawas Lapangan dan Pekerja UPK (penjahit karung, pengemas sampah), Pengambil sampah juga memenuhi kriteria informan yang telah ditetapkan. Pengambil sampah merupakan orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, terutama pada tahapan pengambilan sampah dari rumah warga untuk dijadikan bahan baku pengolahan sampah. dari 13 orang pengambil sampah, 2 diantaranya (Ant dan Ak) telah bekerja selama lebih dari 3 tahun sebagai pengambil sampah warga untuk di bawa ke UPK. Keduanya mengetahui informasi mengenai pelaksanaan UPK.

3. Masyarakat yang menerima manfaat dari program

Selain dari pihak ITP dan masyarakat yang terlibat langsung dengan program, juga dibutuhkan informasi dari masyarakat yang menerima manfaat dari pelaksanaan UPK. Berdasarkan rujukan dari pengelola UPK, diperoleh 2 masyarakat penerima manfaat program yang sesuai dengan kriteria informan. Kedua informan tersebut adalah Nn dan Aa.

Jadi total seluruh informan dalam penelitian ini ada 11 orang. Tiga orang dari pelaksana program, yaitu Ay, Fj dan Dd. Enam orang masyarakat yang terlibat langsung dengan program UPK (Hr, Ddy, Dde, Zn, Ak, Ant) dan

dua orang masyarakat penerima yang menerima manfaat dari program (Nn dan Aa)

Berikut adalah tabel kerangka informan yang menjelaskan mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan informannya:

Tabel 1.2*Theoretical Sampling*

Informasi Yang Dicari		Informan	Jumlah	Total	
Gambaran Umum Pelaksanaan Program UPK	Perencanaan UPK	Identitas UPK	5 orang	3 orang pihak ITP, 1 orang masyarakat yang terlibat langsung di program, 1 orang masyarakat yang menerima manfaat program	
		Sejarah UPK			<ul style="list-style-type: none"> • Pihak ITP (Fj,Ay, Dd) • Masyarakat yang terlibat langsung dalam program (Hr) • Masyarakat yang menerima manfaat program (Aa)
	Pelaksanaan UPK	Pengambilan sampah rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak ITP (Fj, Dd, Ay) • Masyarakat yang terlibat langsung dalam program (Ak, Ant, Dde, Ddy) 	7 orang	Ditambah 3 orang masyarakat yang terlibat langsung dalam program
		Produksi SMW dan Kompos	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak ITP (Fj, Dd) • Masyarakat yang terlibat langsung dalam program (Ddy, Dde, Zn) 	5 orang	Ditambah 1 orang masyarakat yang terlibat langsung dalam program
		Pengiriman SMW dan Kompos	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak ITP (Fj) • Masyarakat yang terlibat langsung dalam program (Zn) 	2 orang	-
		Pemeliharaan Mesin dan Kendaraan Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak ITP (Fj) • Masyarakat yang terlibat langsung dalam program (Zn) 	2 orang	-
		Pelaporan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak ITP (Ay, Fj, Dd) 	3 orang	-

Universitas Indonesia

		Manfaat yang diperoleh Warga dari UPK	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang menerima manfaat program (Aa, Nn) 	2 orang	Ditambah 1 orang masyarakat yang menerima manfaat program
Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program			<ul style="list-style-type: none"> • Pihak ITP (Fj,Ay, Dd) • Masyarakat yang terlibat langsung dalam program (Dde, Ant) • Masyarakat yang menerima manfaat program (Nn) 	6 orang	Ditambah 1 orang masyarakat yang terlibat langsung dalam program
Total Informan					11 orang

Sumber: diolah oleh peneliti

1.5.6 Teknik dan Waktu Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dan wawancara mendalam. Berikut adalah uraiannya:

1. Data Sekunder

Data sekunder menurut Suryabrata (2006: 39) adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografi suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan disuatu daerah, dan sebagainya. Data sekunder tersebut didapat melalui kajian literatur dan studi kepustakaan dari data statistik, buku, arsip internet dan naskah penting lainnya. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan gambaran program UPK serta data komunitas yang terlibat dalam pelaksanaan UPK.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam menurut Taylor dan Bogdan (1984, 77) dalam Minichiello (1995, 68) adalah pertemuan tatap muka yang diulang-ulang secara

Universitas Indonesia

langsung untuk memahami perspektif informan terhadap berbagai kehidupan, pengalaman, dan situasi mereka mereka sebagai suatu pengungkapan dalam kata-kata mereka sendiri.

Pada pelaksanaan wawancara tersebut telah disusun terlebih dahulu pedoman wawancara, yang berguna dalam memberikan arahan mengenai pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Selain itu, dalam wawancara digunakan alat bantu berupa alat perekam dan hasil rekaman tersebut berguna untuk memudahkan dalam melakukan transkrip ke dalam bentuk verbatim.

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam merupakan teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan, kelemahan dan kelebihan UPK. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan UPK khususnya yang memenuhi kriteria informan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 9 bulan. Dalam kurun waktu tersebut mencakup seluruh kegiatan penelitian. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah:

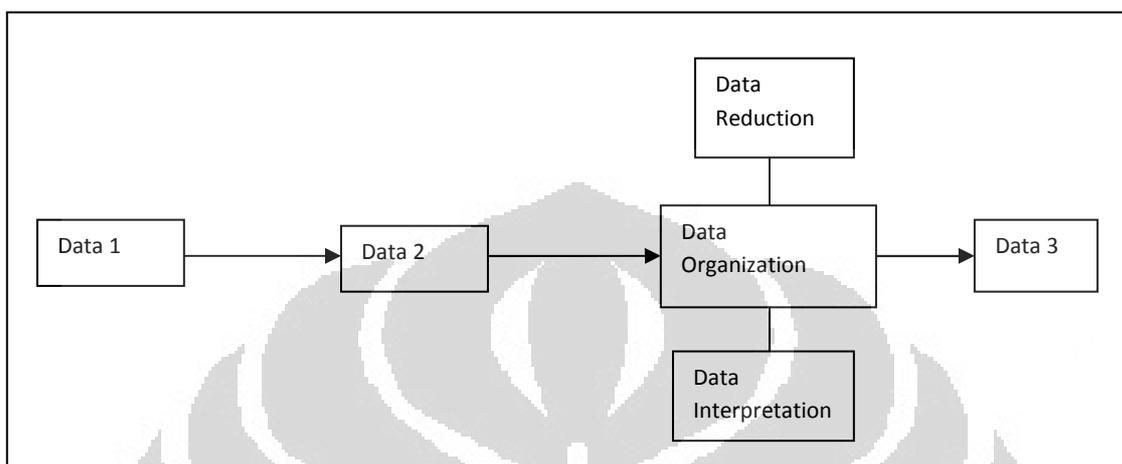
Tabel 1.3 Waktu Penelitian

No.	Tahapan Kegiatan Penelitian	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Pengajuan Judul									
2	Penyusunan Proposal									
3	Revisi Proposal									
4	Seminar Proposal									
5	Pengurusan izin administrasi penelitian									
6	Membuat pedoman wawancara									
7	Studi Kepustakaan									
8	Observasi dan wawancara									
9	Pengolahan Data									
10	Penyusunan laporan penelitian									

Sumber: diolah oleh peneliti

1.5.7 Teknik Analisa Data

Secara ringkas dari proses analisa data yang akan dilakukan, terangkum dalam bagan dibawah ini.



Gambar 1.2 Proses Analisa Data

Sumber: Alston and Bowles, 1998: 195

Berdasarkan model diatas, penelitian ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Data 1 merupakan data yang berasal dari data sekunder yang didapatkan mengenai program UPK, penelitian dengan tema sejenis, dan SOP UPKserta teori-teori pendukung lainnya. Data 2 merupakan data hasil wawancara kepada informan yang memenuhi kriteria informan dan data sekunder mengenai pelaksanaan program. Data yang diambil merupakan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang terpilih kemudian diorganisasikan dan dievaluasi serta dianalisa berdasarkan teori yang digunakan. Data 3 merupakan hasil analisa dari penelitian guna menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian.

1.5.8 Teknik Meningkatkan Kualitas Data

Berdasarkan model yang diungkapkan oleh Guba (1981) dalam Kreffting (1990: 217), untuk meningkatkan kredibilitas, dependabilitas penelitian, dapat menggunakan strategi triangulasi. Adapun teknik yang dipakai adalah:

- Triangulasi sumber data, yaitu mendapatkan data melalui banyak informan sehingga didapatkan variasi data yang tinggi dan jelas.
- Triangulasi metode, yaitu mengumpulkan data melalui metode yang berbeda, dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pelaksanaan program.

Sedangkan menurut Moleong (2007: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Dalam penelitian ini, teknik meningkatkan kualitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi sumber data dilaksanakan melalui pengumpulan informasi dari berbagai informan yang memenuhi kriteria informan. Data mengenai pelaksanaan program UPK didapatkan dari hasil wawancara dengan 11 orang informan yang berbeda. Penelitian ini juga menggunakan triangulasi metode. Data tidak hanya didapatkan dari hasil wawancara melainkan juga dari data sekunder.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bagian, yang terdiri dari:

- Bab 1. Pendahuluan. Menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (jenis penelitian, kriteria penelitian, ruang lingkup penelitian, keterbatasan penelitian. Lokasi pengumpulan data, teknik pemilihan informan, teknik dan waktu pengumpulan data, teknik analisa data dan teknik meningkatkan kualitas data), sistematika penulisan.
- Bab 2. Ilmu Kesejahteraan Sosial, CSR dan Pengembangan Masyarakat. Pada Bab Ini dijelaskan tinjauan literatur mengenai kaitan antara Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan CSR dan Masalah Lingkungan ditambah konsep-konsep terkait CSR dan Pengembangan Masyarakat.

- Bab 3. Lokasi pelaksanaan program (Kelurahan Puspanegara), PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk, (ITP) dan Pelaksanaan *Coorporate Social Responsibility* di ITP, menjelaskan mengenai gambaran umum ITP, CSR ITP, UPK dan *Standard Operational Procedure* (SOP)
- Bab 4. Gambaran Umum, Faktor Penghambat, Faktor Pendukung Pelaksanaan Unit Pelayanan Kebersihan (UPK) dan Analisa. Menjelaskan mengenai temuan lapangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian serta analisisnya. Temuan lapangan tersebut terdiri dari sejarah berdirinya UPK, Identitas UPK, Pelaksanaan UPK (Pengambilan Sampah Rumah Tangga, Pengolahan SMW dan Kompos, Pengiriman SMW dan Kompos ke ITP, Pemeliharaan Mesin *Crusher* dan *Screen* serta Evaluasi dan Pelaporan UPK) dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program. Selain itu analisa akan dikelompokkan berdasarkan pengelompokan di temuan lapangan.
- Bab 5. Kesimpulan dan Saran, akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil temuan lapangan dan analisa. Kesimpulan ini terdiri dari gambaran pelaksanaan program dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program. Selain itu juga dijelaskan mengenai saran-saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program.

BAB 2

ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

2.1 Ilmu Kesejahteraan Sosial, CSR dan Masalah Lingkungan

Subbab ini menggambarkan keterkaitan ilmu kesejahteraan sosial, CSR dan masalah lingkungan. Keterkaitan Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan CSR akan dilihat dari bagaimana pekerja profesional yang berlatar belakang ilmu kesejahteraan sosial dapat berkontribusi mewujudkan usaha kesejahteraan sosial di perusahaan melalui CSR. Pelaksanaan CSR ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang lingkungan. Bidang lingkungan sendiri merupakan salah satu ilmu yang disinergikan oleh Ilmu Kesejahteraan Sosial dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik. Untuk keterangan lebih lanjut berikut adalah penjelasannya.

Ilmu Kesejahteraan Sosial menurut Adi (2005: 16) adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; dan pemaksimalan kesempatan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang. Sebagai sebuah ilmu, ilmu kesejahteraan sosial akan memberikan kontribusi pada perwujudan kondisi sejahtera yang diinginkan oleh semua pihak. Dengan mempelajari Ilmu Kesejahteraan Sosial seseorang dapat mengetahui kerangka pemikiran yang menghasilkan cara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Usaha yang dilakukan dalam rangka meningkatkan standar kehidupan masyarakat mendorong terbentuknya berbagai usaha kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan itu sendiri, pada dasarnya merupakan suatu program ataupun kegiatan yang di desain secara konkrit untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat. Usaha ini ditujukan kepada individu, keluarga ataupun kelompok masyarakat.

Usaha kesejahteraan digerakkan oleh profesi praktisi di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial atau pekerja sosial profesional

digunakan untuk menggambarkan lulusan perguruan tinggi di bidang pekerjaan sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial (Adi, 2005: 91). Pekerja sosial menurut Zastrow (1999) dalam Suharto (2009: 1) adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Terkait dengan luasnya ilmu kesejahteraan sosial, perlu ada pengelompokan ke dalam bidang pekerjaan sosial. Salah satu bidang pekerjaan sosial dilihat berdasarkan pembangunan sektoral adalah bidang pekerjaan sosial yang terkait dengan pembangunan sektor industri. Masuknya bidang kesejahteraan sosial ke dalam sektor industri memunculkan konsep Pekerjaan Sosial Industrial (*Industrial Social Work*) dan Pekerjaan Sosial Okupasional (*Occupational Social Work*). Pada tahun 1978 sebuah konferensi yang dihadiri lebih dari seratus praktisi Pekerjaan Sosial dari sektor bisnis dan industri merumuskan definisi pekerjaan sosial sebagai “*industrial social work therefore refers to the utilization of social work expertise in meeting the needs of workers or union members and the serving of broader organizational goals of setting*” (pekerjaan sosial industri menunjuk kepada penggunaan keterampilan pekerjaan sosial dalam memenuhi kebutuhan para pekerja atau perusahaan dan pencapaian tujuan organisasi tersebut).

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa model pekerjaan sosial industri. Model ini dikembangkan oleh Jhonshon (1980: 54). Berikut adalah penjelasannya:

1. Model pelayanan karyawan (*The Employee Service Model*)

Model ini menekankan pada pelaksanaan program dan layanan yang menguntungkan pihak manajemen dengan meningkatkan produktivitas dan komitmen karyawan terhadap perusahaan atau organisasi dengan meningkatkan atau menjaga kesetiaan karyawan terhadap perusahaan serta terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu karyawan.

2. Model layanan organisasi (*Employeer/work organization service*)

Model ini ditujukan terutama untuk membantu karyawan atau organisasi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kebijakan dan layanan yang

berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam model ini organisasi adalah yang merupakan klien utama dan bukan kelompok individu atau karyawan.

3. Model tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility model*)

Model ini menekankan pada upaya mengidentifikasi dan membantu perusahaan melaksanakan komitmennya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dimana mereka beroperasi. Peran dan pekerja sosial dalam hal ini beragam. Diantaranya adalah analisis lokasi dana sosial, manajer CSR, konsultan pengembangan masyarakat atau koordinator layanan masyarakat.

4. Model layanan yang terkait dengan kebijakan publik (*Work Related Public Policy Model*)

Model ini mencakup kegiatan perumusan, identifikasi, analisa dan advokasi terhadap kebijakan, program dan layanan pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi dunia kerja. Keterampilan yang dibutuhkan dalam model ini mencakup perencanaan kebijakan, analisa kebijakan, pengembangan program, advokasi dan pengembangan jaringan yang sama

Dari 4 model ini dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial industri mencakup layanan internal dan eksternal. Layanan internal mencakup program-program bantuan terhadap karyawan. Layanan eksternal berwujud program CSR.

Pelaksanaan CSR, sebagai sebuah bentuk layanan eksternal dari pekerjaan sosial industri, semakin hari semakin berkembang. Pelaksanaan CSR yang awalnya bersifat *charity* mulai beralih kepada pelaksanaan CSR yang melaksanakan pemberdayaan. Ditambah lagi pelaksanaan CSR telah ditetapkan dalam UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UU ini dinyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bagaimana hubungan pelaksanaan CSR dengan konsep Ilmu Kesejahteraan Sosial. Pelaksanaan CSR dapat dilakukan oleh praktisi kesejahteraan sosial. Praktisi kesejahteraan sosial

dalam hal ini disebut Pekerja Sosial Industri. Pelaksanaan CSR yang dilaksanakan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial dapat dikatakan sebagai suatu usaha kesejahteraan sosial.

CSR dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan didalam berbagai bidang tertentu. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah krusial yang harus diselesaikan di masyarakat. Salah satu bidang yang selama ini sering digarap dalam pelaksanaan CSR adalah bidang lingkungan. Di dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial sendiri telah menjadi perhatian sejak sekitar tahun 1980-an. Era 1980-an menurut Beder (1993, xi-xii) dalam Adi (2005: 62) adalah era kedua dalam gelombang gerakan lingkungan. Dalam gelombang kedua ini terdapat perkembangan ke arah pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*). Pembangunan yang berkelanjutan seperti yang disampaikan *The World Commission on Environment and Development* (Komisi Dunia untuk Pembangunan dan Lingkungan) adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa menghancurkan kemungkinan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut Adi (2005: 63) berkembangnya masalah lingkungan yang ada dewasa ini, bukan hanya monopoli pada negara yang sudah berkembang saja, tetapi juga mencakup negara-negara yang sedang berkembang. Salah satu masalah yang sering muncul terkait dengan pembangunan dan tingginya tingkat migrasi di negara berkembang adalah masalah sampah. Tumpukan sampah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Masalah sampah pada dasarnya sudah diatur pengelolaannya dalam UU No. 18 Tahun 2008 (Tentang Pengelolaan Sampah). Berdasarkan pertimbangannya, didalam UU ini dinyatakan bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara kompeherensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Oleh karenanya, dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan

Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Didalam UU ini juga dijelaskan mengenai hak setiap orang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Didalam pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan /atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu. Selain itu ditambahkan pada ayat yang sama bahwa setiap orang berhak memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Terkait dengan hak, ilmu kesejahteraan sosial juga memiliki nilai dasar terkait dalam relasi profesional antara praktisi kesejahteraan sosial dengan komunitas yang menjadi sasarannya. Nilai dasar ini pada awalnya banyak dipengaruhi oleh *Helping Profession* lainnya. Nilai tersebut (Adi, 2005: 77) menyatakan bahwa praktisi kesejahteraan sosial harus mempertimbangkan bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan dalam memenuhi hak-hak dan kebebasan asasinya yang sejalan dengan kepentingan bersama (tidak bertentangan dengan norma masyarakat secara umum).

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

Tinjauan literatur mengenai CSR ini akan menjelaskan beberapa konsep mengenai CSR serta *triple bottom line*, dimulai dari pengertian CSR, *benefit* dan *driver* pelaksanaan CSR, ruang lingkup CSR, model CSR, tahapan penerapan dan pentingnya pelaksanaan evaluasi CSR. Diharapkan melalui penjelasan ini didapatkan pemahaman mengenai apa itu CSR, konsep apa yang mendorong pelaksanaan CSR, kenapa CSR perlu dilaksanakan, pada aspek mana saja CSR perlu dilaksanakan, bagaimana bentuk pelaksanaan CSR, langkah-langkah yang harus dilalui untuk melaksanakan CSR dan perlunya evaluasi CSR dilakukan. Untuk keterangan lebih lanjut, berikut adalah penjelasannya:

2.2.1 Pengertian CSR

Defenisi CSR dari sisi etimologis diterjemahkan sebagai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Dalam konteks lain, CSR kadang juga disebut sebagai “Tanggung Jawab Sosial Korporasi” atau “Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha”. Banyak Ahli, Komite, Organisasi yang mengeluarkan pengertian ataupun definisi CSR. Berikut beberapa diantaranya:

Nuryana (Suharto, 2009:10) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Definisi CSR juga dijelaskan oleh Oliver van Heel dan *European Comission* dalam Rahmatullah (2011: 4). Menurut Oliver van Heel (2004) CSR adalah suatu pendekatan bisnis yang menciptakan nilai pemangku kepentingan dengan merangkum semua peluang dan mengelola semua resiko yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial. Sedangkan menurut *European Comission* CSR adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan.

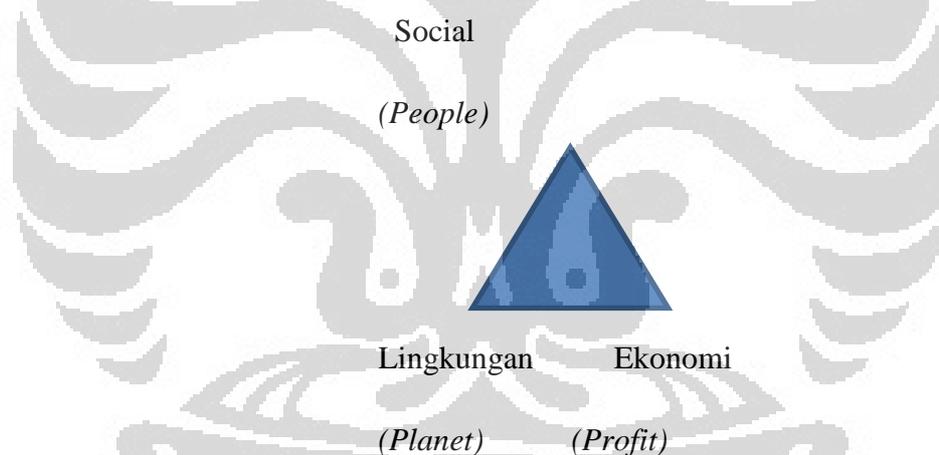
Didalam Draft 3 ISO 26000 (Rahmatullah, 2011:5) dinyatakan bahwa CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi atas dampak dari keputusan dan kegiatan suatu organisasi bagi masyarakat dan lingkungannya, melalui perilaku transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Komite Ahli Indonesia CSR Award 2008 (Bisnis dan CSR, 2008: 286) menyatakan CSR adalah komitmen perusahaan yang beroperasi secara legal, etis, dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan Berkelanjutan menurut *The Brudtland Comission* dalam Rahmatullah (2011: 3) adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan berbagai pengertian CSR diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh pemangku kepentingan.

2.2.2 *Tripple Bottom Line*

Pelaksanaan CSR tidak terlepas dari konsep *Tripple Bottom Line*. Konsep ini dipopulerkan oleh John Elkington. Elkington (dalam Wibisono, 2007: 32) memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, haruslah memperhatikan “3P”. Selain mengejar *profit*, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan(*planet*).

Gambar2.1 Ilustrasi *Triple Bottom Line*



Sumber: Wibisono, 2007: 32

Dalam gagasan ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab untuk mencari keuntungan secara ekonomi saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Berikut adalah penjelasannya menurut Wibisono, (2007: 33) :

1. *Profit*

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dalam setiap kegiatan usaha. Tak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam

perusahaan adalah mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. *People*

Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain itu perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Karenanya perusahaan perlu melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

3. *Planet*

Unsur ketiga yang mesti diperhatikan adalah *planet* atau lingkungan. Jika perusahaan ingin eksis dan ekseptabel maka harus disertakan pula tanggung jawab kepada lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan manusia termasuk perusahaan. Hubungan dengan lingkungan merupakan hubungan sebab akibat. Jika usaha melestarikan lingkungan dilakukan, maka lingkungan akan memberikan manfaat yang besar kepada kehidupan manusia. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, tentunya lingkungan juga akan memberikan dampak yang buruk terhadap kelangsungan hidup manusia.

2.2.3 *Benefit* dan *Driver* Pelaksanaan CSR

Setiap perusahaan menginginkan keberlanjutan dan kestabilan dalam operasionalnya. Keberlanjutan dan kestabilan usaha akan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada perusahaan. Berikut akan dijelaskan *benefit* dan *driver* (Wibisono, 2007: 78) pentingnya kalangan usaha merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi *brand image* perusahaan

Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan image positif perusahaan.

2. Layak mendapatkan *social licence to operate*

Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan *benefit* dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan kepada perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program CSR diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (*social insurance*) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.

3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan

Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder* resiko yang diharapkan.

4. Melebarkan akses sumber daya

Track record yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.

5. Membentangkan akses menuju *market*

Investasi yang ditanamkan untuk program CSR, dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk didalamnya akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.

6. Mereduksi biaya

Banyak contoh yang dapat menggambarkan penghematan biaya sebagai buah dari hasil implementasi CSR. Misalnya pelaksanaan *recycle/* daur ulang limbah ke dalam siklus produksi. Disamping mereduksi biaya, proses ini tentu juga akan mengurangi buangan ke luar sehingga lebih aman.

7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*

Implementasi program CSR tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholder*. Nuansa ini dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya *trust* kepada perusahaan.

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator

Perusahaan yang menerapkan program CSR pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang bertanggung jawab mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan.

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan

Kesejahteraan yang diberikan para pelaku CSR umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan perusahaan. Oleh karenanya wajar bila bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.

10. Peluang mendapatkan penghargaan

Banyak *reward* ditawarkan bagi penggiat CSR. Sehingga jika CSR dilaksanakan dengan baik, banyak kesempatan yang dapat diperoleh untuk mendapatkan penghargaan.

2.2.4 Ruang Lingkup CSR

Rahmatullah (2011: 7) menyatakan pada hakikatnya CSR adalah nilai atau jiwa yang melandasi aktivitas perusahaan secara umum, dikarenakan CSR menjadi pijakan kompeherensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan. Tidak etis jika nilai CSR hanya diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat setempat namun perusahaan berkontribusi pada pencemaran terhadap alam, melakukan pemborosan energi, bermasalah dengan limbah atau tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Bagaimanapun semua aspek ini tidak bisa lepas dari koridor CSR. Berikut adalah penjelasan berupa gambar:

Gambar 2.2 Ruang Lingkup CSR



Sumber: Rahmatullah, 2011: 8

Tanari (2009) dalam Rahmatullah (2011: 7) menyatakan 4 landasan pokok yang saling berkaitan dalam pelaksanaan CSR. Berikut adalah penjelasannya:

1. Landasan pokok CSR dalam aktifitas ekonomi, meliputi:
 - Kinerja keuangan yang baik
 - Investasi modal berjalan sehat
 - Kepatuhan dalam membayar pajak
 - Tidak terdapat praktik suap/korupsi
 - Tidak ada konflik kepentingan
 - Menghargai hak dan kemampuan intelektual/paten
2. Landasan pokok CSR dalam aktifitas isu lingkungan hidup, meliputi:
 - Tidak melakukan pencemaran
 - Tidak berkontribusi pada perubahan iklim
 - Tidak berkontribusi terhadap limbah
 - Tidak melakukan pemborosan air
 - Tidak melakukan praktik pemborosan energi
 - Tidak melakukan penyerobotan lahan
 - Tidak berkontribusi terhadap kebisingan

Universitas Indonesia

- Menjaga keanekaragaman hayati
3. Landasan pokok CSR dalam aktifitas isu sosial, meliputi:
- Menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak
 - Tidak memperkerjakan anak
 - Memberikan dampak positif terhadap masyarakat
 - Melakukan proteksi konsumen
 - Menjunjung keanekaragaman
 - Menjaga privasi
 - Melakukan praktik derma sesuai kebutuhan
 - Bertanggung jawab dalam proses *outsourcing* dan *off-shoring*
4. Landasan pokok CSR dalam aktifitas isu kesejahteraan, meliputi:
- Memberikan kompensasi terhadap karyawan
 - Memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah
 - Menjaga kesehatan karyawan
 - Menjaga keamanan kondisi tempat kerja
 - Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja
 - Menjaga keseimbangan kerja/hidup

Jadi landasan diatas memberikan gambaran bahwa CSR bukan lah hal yang parsial, melainkan suatu urusan yang kompeherensif. Tidak tepat jika perusahaan hanya fokus pada aspek lingkungan hidup, namun abai dalam aspek lainnya.

2.2.5 Model CSR

Menurut Saidi dan Abidin (Suharto, 2009:110) sedikitnya ada empat model Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau CSR yang umumnya diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Keterlibatan langsung

Perusahaan menjalankan program TSP secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate*

secretary atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari pejabat *public relation*.

2. Melalui yayasan dan organisasi sosial perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau *groupnya*. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan teratur bagi kegiatan yayasan.

3. Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan menyelenggarakan TSP melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (ornop), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

4. Mendukung dan bergabung dalam suatu konsorium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat "hibah pembangunan". Pihak konsorium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara proaktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

2.2.6 Tahapan Penerapan CSR

CSR yang baik memadukan kepentingan *shareholder* dengan *stakeholder* (Suharto, 2009:114). Karenanya, CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Lima langkah dibawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR:

1. *Engagement*

Merupakan langkah awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang lebih baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan *trust* masyarakat yang akan

dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun “kontrak sosial” antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak terlibat.

2. *Assesment*

Assesment adalah identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan *needs-based approach* (aspirasi masyarakat), melainkan pula berpijak pada *right-based approach* (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat).

3. *Plant of Action*

Merumuskan rencana aksi. Program yang diterapkan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat (*stakeholder*) disatu pihak dan misi perusahaan termasuk *shareholder* dilain pihak.

4. *Action and Facilitation*

Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi program.

5. *Evaluation and Termination or Reformation*

Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (*termination*) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan *exit strategy* antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya melaksanakan *capacity building* terhadap masyarakat (*stakeholder*) yang akan melanjutkan program CSR secara mandiri. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan (*Reformation*), maka perlu dirumuskan *lesson learned* bagi pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru bisa dirumuskan sepanjang diperlukan.

2.2.7 Evaluasi CSR

Pelaksanaan program CSR telah diwajibkan pelaksanaannya melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan program ini juga akan berdampak kepada terjalinnya relasi antara korporasi dengan para pemangku

kepentingan. Relasi antara korporasi dengan para pemangku kepentingan perlu dijalin dengan baik. Relasi yang baik antara keduanya akan saling mendatangkan keuntungan. Relasi ini dapat dilakukan dalam pelaksanaan program CSR. Untuk melihat bagaimana relasi antara korporasi dengan para pemangku kepentingannya dapat dilihat melalui kinerja program CSR yang dilakukan korporasi (Prayogo, 2011: 43).

Carol, 1999 dalam Prayogo, 2011: 43 menjelaskan tinggi rendahnya kinerja program CSR tidak mutlak menjamin baik-buruknya relasi korporasi dengan pemangku kepentingan, namun dari kinerja ini terlihat bagaimana komitmen, kebijakan dan tindakan korporasi terhadap pemangku kepentingan mereka atau khususnya terhadap komunitas terdekat. Jadi semakin baik kinerja suatu program CSR maka semakin tinggi pula komitmen, kebijakan dan tindakan korporasi terhadap pemangku kepentingan mereka. Untuk menilai bagaimana kinerja suatu program CSR ini maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan program yang telah dilakukan. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihannya, diharapkan dapat dilakukan perbaikan program di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan komitmen, kebijakan dan tindakan korporasi terhadap pemangku kepentingan.

Disisi lain, pelaksanaan evaluasi juga penting untuk memperbaiki citra perusahaan. Khususnya perusahaan tambang dan migas, karena sifatnya yang ekstraktif terhadap sumber daya alam, memiliki citra yang relatif “lebih buruk” dari industri lainnya (Prayogo, 2011: 44). Oleh karenanya untuk membangun “citra baik” dengan pemangku kepentingan, maka penilaian kinerja CSR sangat penting dilakukan.

2.3 Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan CSR. Karenanya, pada subbab ini akan dijelaskan mengenai beberapa hal dasar mengenai pengembangan masyarakat. Subbab ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok penjelasan, diantaranya adalah pengertian pengembangan masyarakat, ciri khas pengembangan masyarakat, tahap pelaksanaannya dan kendala-kendala

pengembangan masyarakat. Tinjauan literatur pada bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai apa itu pengembangan masyarakat, bagaimanakan ciri-ciri suatu kegiatan pengembangan masyarakat, cara seperti apa saja yang harus dilakukan untuk melaksanakan pengembangan masyarakat dan kendala-kendala apa yang dapat kita temukan dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjabaran mengenai pengembangan masyarakat:

2.3.1 Pengertian Pengembangan Masyarakat

Menurut Brokensha dan Hodge, 1969 dalam Adi (2008: 205), pengembangan masyarakat adalah “*community development is a movement designed to promote better living for the whole community with the active participation and on the initiative of the community*” (pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat).

Partisipasi dalam hal ini dimaknai sebagai suatu proses yang memungkinkan masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang mereka inginkan (Mikkelsen, 2005: 54 dalam Adi, 2008: 108)

Menurut Glen (dalam Adi, 2008: 202) pengembangan masyarakat merupakan salah satu model intervensi yang terkait dengan praktek komunitas. Pandangan ini dipengaruhi oleh pandangan dalam Diskursus Komunitas, dimana hakikat dari kesejahteraan (*nature of welfare*) pada diskursus ini dilihat dari adanya atau tumbuhnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci terciptanya kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat baik secara fisik, pemikiran, materiil, maupun finansial, diharapkan akan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki proses dan hasil pembangunan di komunitas tersebut.

Selain itu, Penerima Usaha Kesejahteraan Sosial (*receptient of welfare*) pada diskursus ini dilihat sebagai warga masyarakat yang mempunyai hak sekaligus kewajiban. Penerima usaha kesejahteraan sosial dianggap mempunyai

tingkatan yang relatif sederajat dengan pemberi layanan sehingga prinsip egalitarian coba dikembangkan dalam relasi antara warga dan pekerja sosial sebagai pelaku perubahan.

Terkait dengan diskursus komunitas dimana relasi praktisi dan warga masyarakat yang egalitarian, maka peran praktisi dalam hal ini lebih mengarah pada peran sebagai *community worker* atau pemercepat perubahan (*enabler*). Peran ini lebih mengarah kepada peran pekerja sebagai fasilitator.

Sejalan dengan pemahaman diatas, Suharto (2009: 118) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial terencana yang secara profesional didesain untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan pada tingkat komunitas. Suharto juga menjelaskan bahwa di dunia industri istilah pengembangan masyarakat seringkali digunakan sebagai salah satu pendekatan atau strategi dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

2.3.2 Ciri Khas Pendekatan Pengembangan Masyarakat

Tiga unsur dasar yang menjadi ciri khas pendekatan pengembangan masyarakat menurut Glen dalam Adi (2008: 224) adalah:

1. Tujuannya memampukan masyarakat untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam pendekatan ini *community worker* sebaiknya mendasarkan pada “kebutuhan yang dirasakan” (*felt needs*) oleh masyarakat untuk mengawali proses pengembangan masyarakat. Pandangan ini agak kurang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang tidak didasari masyarakat tetapi didasari oleh pelaku perubahan (*normative needs*) ataupun kebutuhan yang tidak diinginkan masyarakat.

2. Proses pelaksanaannya melibatkan kreativitas dan kerjasama masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut.

Harus ada kerjasama dan kreativitas sebagai dasar proses pengembangan masyarakat yang baik. Pandangan yang melihat komunitas sebagai kelompok masyarakat yang secara potensial kreatif dan kooperatif merefleksikan idealisme sosial yang positif terhadap upaya-upaya kolaboratif dan pembentukan identitas komunitas.

3. Praktisi yang menggunakan model intervensi ini (lebih banyak) menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat yang bersifat Non-Direktif

Menurut Adi (2008: 227) pendekatan Non-Direktif dilakukan berlandaskan asumsi bahwa masyarakat sudah mempunyai pengetahuan tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka.

2.3.3 Pendekatan dalam Pengembangan Masyarakat

Batten (dalam Adi, 2008: 227) menyatakan terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan tersebut adalah pendekatan direktif (instruktif) dan nondirektif (partisipatif).

1. Pendekatan Direktif (Instruktif)

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa *community worker* tau apa yang dibutuhkan dan terbaik untuk masyarakat. Dalam pendekatan ini, peran *community worker* lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari *community worker*. *Community worker*-lah yang menetapkan apa yang baik dan buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut. Dengan pendekatan ini, prakarsa dan pengambilan keputusan berada di tangan *community worker*. Dalam praktiknya *community worker* memang menayakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau cara apa yang perlu dilakukan untuk menangani suatu masalah, tetapi jawaban yang muncul dari masyarakat selalu diukur dari segi “baik” dan “buruk” menurut *community worker* (Batten, 1967: 4-10 dalam Adi (2008: 228).

Dengan pendekatan ini, memang banyak hasil yang dapat diperoleh, tetapi hasil yang didapat lebih terkait dengan hasil jangka pendek dan seringkali lebih bersifat pencapaian secara fisik. Pendekatan ini menjadi kurang efektif untuk mencapai hal-hal yang bersifat jangka panjang ataupun perubahan yang lebih mendasar yang berkaitan dengan perilaku seseorang. Hal ini antara lain disebabkan akan perlunya perubahan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*), dan niat (*intention*) individu sebelum terjadinya

perubahan perilaku (*overt behaviour*), bila pelaku perubahan menginginkan perubahan yang terjadi bukanlah perubahan yang berdifat temporer belaka.

2. Pendekatan Non Direktif (Partisipatif)

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan non direktif. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Dalam pendekatan ini *community worker* tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan “baik” dan “buruk” bagi suatu masyarakat. Pemeran utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. *Community worker* lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan untuk membuat analisa dan mengambil keputusan yang berguna bagi diri mereka sendiri, serta diberi kesempatan secara penuh dalam penentuan cara-cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Peran *community worker* disini berubah menjadi katalisator pemercepat perubahan (*enabler*) yang membantu mempercepat perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini *community worker* berusaha untuk merangsang tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk menentukan langkahnya sendiri (*self-determination*) dan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri (*self-help*) (Batten, 1967: 11 dalam Adi (2008: 230). Tujuan dari pendekatan non-direktif dalam upaya pengembangan masyarakat adalah agar masyarakat memperoleh pengalaman belajar untuk mengembangkan dirinya melalui pemikiran dan tindakan yang dirumuskan oleh mereka. Karenanya pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan yang bersifat partisipatif.

Menurut Batten, 1967: 13-14 dalam Adi, 2008: 235 upaya yang dapat dilakukan untuk terciptanya kondisi masyarakat yang mendukung pendekatan non-direktif :

- Menumbuhkan keinginan untuk bertindak dan merangsang munculnya diskusi tentang apa yang menjadi masalah dalam masyarakat sehingga mereka dapat menentukan dengan pasti apa yang sebenarnya mereka inginkan.

- Mememberikan informasi jika dibutuhkan, mengenai pengalaman kelompok lain dalam mengorganisasi diri untuk menghadapi hal serupa
- Membantu masyarakat untuk membuat analisa situasi secara sistematis tentang hakikat dan penyebab dari masalah, serta menelusuri keuntungan dan kerugian dari setiap usulan yang terkait dengan upaya pemecahan masalah yang mereka hadapi
- Menghubungkan masyarakat dengan sumber yang dapat dimanfaatkan untuk membantu (baik bantuan teknis maupun materiil) mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, sebagai tambahan sumber daya yang memang sudah dimiliki.

2.3.4 Tahap Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat

Tahapan pengembangan masyarakat secara umum menurut Adi (2006:244) terdiri atas 7 tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Didalam tahap persiapan terdapat tahap persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat dengan pendekatan non-direktif. Persiapan petugas ini terutama diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan persiapan lapangan merupakan rangkaian dari kegiatan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, dan mengurus perizinan kepada tokoh-tokoh formal dan informal.

2. Tahap *Assesment*

Dalam tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah (kebutuhan yang dirasakan atau *felt needs*) ataupun kebutuhan yang diekspresikan (*expresses needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Pada tahap *assesment* ini dapat digunakan teknik SWOTH yang melihat kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weaknesses*), kesempatan (*Opportunities*), dan ancaman (*Threat*).

Dalam proses *assesment* ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan

Universitas Indonesia

benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Disamping itu, pada tahap ini pelaku perubahan juga memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya, yaitu tahap perencanaan.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang akan mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan. Program dan kegiatan yang akan dikembangkan tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pemberian bantuan sehingga tidak muncul program-program yang bersifat insidental (*one short programme*) ataupun amal (*charity*) yang kurang dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang.

4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini pelaku perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka gunakan guna mengatasi permasalahan yang ada.

5. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerja sama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat.

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Karena dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal.

Feurstein (1990) dalam Adi (2008: 254) indikator yang paling sering digunakan dalam mengevaluasi suatu kegiatan adalah indikator ketersediaan

(apakah unsur yang seharusnya ada dalam suatu proses benar-benar ada), indikator relevansi (seberapa tepat layanan yang ditawarkan), indikator keterjangkauan (apakah layanan yang diberikan masih berada dalam “jangkauan” pihak-pihak yang membutuhkan), indikator pemanfaatan (seberapa banyak suatu layanan yang sudah disediakan oleh pihak pemberi layanan dan dipergunakan oleh kelompok sasaran), indikator cakupan (menunjukkan proporsi orang-orang yang membutuhkan sesuatu dan menerima layanan tersebut), indikator kualitas (menunjukkan standar kualitas dari layanan yang disampaikan ke kelompok sasaran), indikator upaya (menggambarkan berapa banyak upaya yang sudah “ditanamkan” dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan), indikator efisiensi (menunjukkan apakah sumber daya dan aktivitas yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dimanfaatkan secara tepat guna) dan indikator dampak (melihat apakah sesuatu yang kita lakukan benar-benar memberikan suatu perubahan di masyarakat).

7. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap “perpisahan” hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap “mandiri”, tetapi tidak jarang karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyanggah dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut.

Jadi terdapat 7 tahapan dalam pelaksanaan suatu program pengembangan masyarakat. Dimulai dari proses *engagement* dengan masyarakat sampai pada tahap terminasi.

2.3.5 Kendala dalam Pengembangan Masyarakat

Watson dalam Adi (2008: 259) , dalam buku *Planning of Change* edisi kedua, menggambarkan ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan). Hal ini tentunya akan terkait dengan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas. Kendala-kendala tersebut adalah:

2.3.4.1 Kendala yang Berasal dari Kepribadian Individu

1. Kestabilan (*Homeostasis*)

Cannon dalam Adi (2008: 259) menyatakan homeostasis merupakan dorongan internal individu yang berfungsi menstabilkan dorongan-dorongan dari luar. Jadi tubuh manusia mempunyai mekanisme untuk mengatur perubahan fisiologis.

Raup (1925) dalam Adi (2008: 260) menggambarkan disamping kemampuan mengadaptasi perubahan fisiologis, manusia juga mempunyai kemampuan untuk mengadaptasi perubahan psikologis dalam batas tertentu. Terkait dengan hal ini, suatu proses pelatihan yang diberikan dalam waktu yang relatif singkat belum tentu dapat membuat perubahan yang permanen pada diri individu bila tidak diikuti dengan penguatan yang relatif terus menerus dari sistem yang melingkupi (tidak diikuti program lanjutan untuk menstabilkan hasil latihan).

2. Kebiasaan (*Habit*)

Faktor lain yang dapat menghambat suatu perubahan adalah faktor kebiasaan. Sebagian besar pakar dari teori belajar berasumsi bahwa bila tidak ada perubahan situasi yang tak terduga, setiap individu pada umumnya akan bereaksi sesuai dengan kebiasaannya. Jadi setiap individu pada umumnya akan bereaksi sesuai dengan kebiasaan yang mereka anggap paling menguntungkan. Contohnya adalah ketika seorang *community worker* ingin mengembangkan pola hidup sehat dengan membiasakan mencuci tangan sebelum makan dan jika nilai individual yang ada pada umumnya makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu adalah hal yang menguntungkan serta mereka biasa melakukannya. Bila hal ini terjadi, kebiasaan yang ada pada individu dapat menjadi faktor penghambat terjadinya suatu perubahan.

3. Hal yang Utama (*Primacy*)

Hal utama yang dimaksudkan disini adalah hal-hal yang berhasil mendatangkan hasil yang memuaskan. Bila tindakan pertama yang dilakukan seseorang mendatangkan hasil yang memuaskan ketika menghadapi situasi tertentu, ia cenderung untuk mengulanginya pada saat yang lain. Hal ini akan

menjadi penghambat terjadinya perubahan, apalagi bila tindakan tersebut sudah begitu terpola pada individu tersebut.

4. Seleksi Ingatan dan Persepsi (*Selective Perception and Retention*)

Bila sikap seseorang terhadap “objek sikap” sudah terbentuk, tindakan yang dilakukannya dia saat-saat yang berikutnya akan disesuaikan dengan “objek sikap” yang ia jumpai.

5. Ketergantungan (*Dependence*)

Ketergantungan terhadap seseorang dapat menjadi faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Bila dalam suatu kelompok masyarakat terlalu banyak orang yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain maka proses ‘pemandirian’ masyarakat tersebut dapat menjadi lebih lama dari waktu yang diperkirakan.

6. Superego

Superego yang terlalu kuat cenderung membuat seseorang tidak mampu menerima pembaharuan dan kadangkala menganggap pembaharuan sebagai sesuatu hal yang tabu.

7. Rasa Tidak Percaya Diri (*Self-Distrust*)

Rasa tidak percaya diri merupakan konsekuensi dari ketergantungan pada masa kanak-kanak yang berlebihan, serta dorongan dari superego yang terlalu kuat. Rasa tidak percaya diri yang tinggi juga membuat seseorang tidak yakin akan kemampuannya sehingga berbagai potensi yang dimilikinya sulit untuk muncul ke permukaan.

8. Rasa Tidak “Aman” dan Regresi (*Insecurity and Regression*)

Faktor internal lain yang dapat menghambat partisipasi yang efektif adalah kecenderungan untuk mencari “rasa aman” yang ia peroleh dimasa lalu. Mereka merasa bahwa perubahan yang akan terjadi justru akan dapat meningkatkan “kecemasan dan ketakutan” mereka. Berdasarkan hal ini mereka menjadi pihak yang cenderung menolak pembaruan.

9. Faktor Predisposisi (*Predisposing Factor*)

Faktor predisposisi merupakan sesuatu yang muncul sebelum perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional ataupun rasional terhadap

perilaku yang dilakukan seseorang. Faktor predisposisi ini dapat berupa pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, dan persepsi dari komunitas sasaran.

2.3.4.2 Kendala yang Berasal dari Sistem Sosial

1. Kesepakatan terhadap Norma Tertentu (*Conformity to Norms*)

Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis mengikat sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu. Pada titik tertentu, norma dapat menjadi faktor yang menghambat atau halangan terhadap perubahan (pembaruan) yang ingin diwujudkan. Misalnya di komunitas yang membolehkan minum minuman keras, maka akan sulit bagi pelaku perubahan untuk merombak norma tersebut.

2. Kesatuan dan Kepaduan Sistem dan Budaya (*Systemic and Cultural Coherence*)

Perubahan pada suatu sistem sosial ataupun budaya yang sudah begitu menyatu pada masyarakat tentunya akan sulit dilakukan. Karena komunitas sasaran sudah terbiasa dengan sistem sosial dan budaya yang ada.

3. Kelompok Kepentingan (*Vested Interest*)

Adanya berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat tidak jarang menjadi faktor penghambat dalam upaya pengembangan masyarakat karena mereka cenderung ingin menyelamatkan, mengamankan, dan memperluas aset yang mereka miliki tanpa memperhatikan kelompok lainnya.

4. Hal yang Bersifat Sakral (*The Sacrosant*)

Salah satu yang mempunyai nilai kesulitan untuk berubah yang tinggi adalah ketika suatu teknologi ataupun program inovatif yang akan dilontarkan ternyata membentur nilai-nilai keagamaan ataupun nilai-nilai yang dianggap sakral dalam suatu komunitas.

5. Penolakan terhadap “Orang Luar” (*Rejection of “Outsider”*)

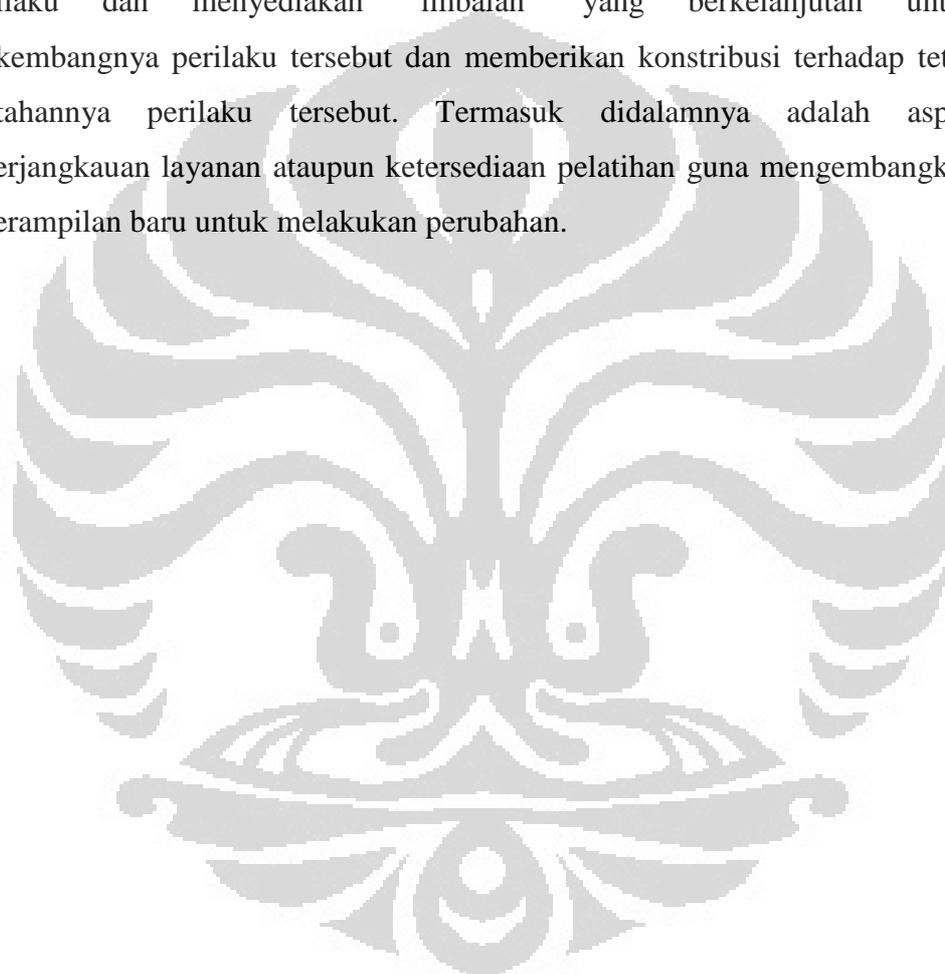
Dari sudut pandang psikologi dinyatakan bahwa manusia mempunyai sifat yang universal. Salah satunya ialah mempunyai rasa curiga dan rasa terganggu (*hostility*) terhadap orang asing. Oleh karena itu, seorang *social worker* harus mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik agar ia tidak menjadi “orang luar” dalam masyarakat tersebut.

6. Faktor Penguat Perubahan (*Reinforcing Factor*)

Faktor penguat perubahan adalah sesuatu yang muncul sebelum perilaku terjadi dan memfasilitasi motivasi tersebut agar dapat terwujud. Faktor penguat perubahan terkait dengan *covert* dan *overt behaviour* dari pihak yang terkait dengan komunitas sasaran.

7. Faktor Pemungkin Perubahan (*Enabling Factors*)

Faktor pemungkin perubahan adalah faktor yang mengikuti suatu perilaku dan menyediakan “imbalan” yang berkelanjutan untuk berkembangnya perilaku tersebut dan memberikan kontribusi terhadap tetap bertahannya perilaku tersebut. Termasuk didalamnya adalah aspek keterjangkauan layanan ataupun ketersediaan pelatihan guna mengembangkan keterampilan baru untuk melakukan perubahan.



BAB 3

GAMBARAN UMUM

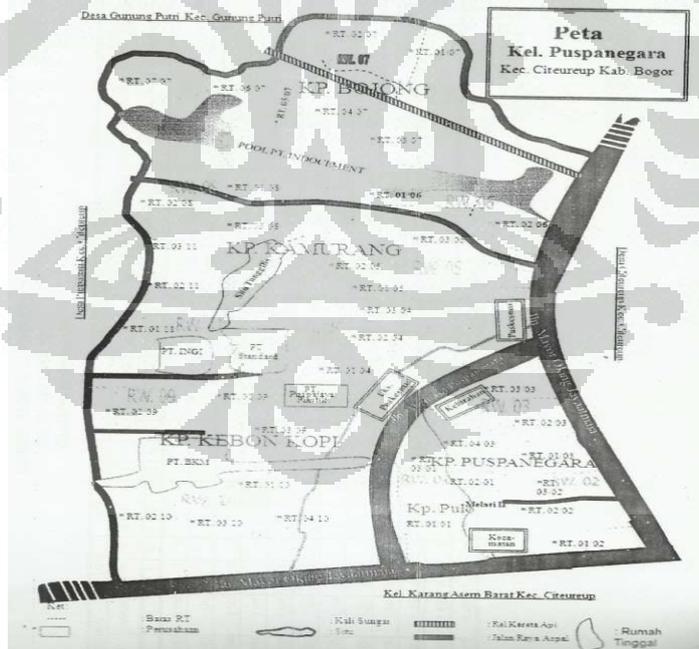
3.1 Gambaran Umum Wilayah dan Komunitas Pelaksanaan Program

3.1.1 Wilayah

Program UPK dilaksanakan di wilayah Kelurahan Puspanegara. Wilayah Kelurahan Puspanegara dari Laporan tahunan kelurahan tahun 2011 terdiri dari 4 lingkungan, yaitu :

1. Puspanegara terdiri dari 3 RW yaitu RW 01, RW 02 dan RW 03
2. Kamurang terdiri dari 5 RW yaitu RW 04, RW 05, RW 06, RW 08 dan RW 11
3. Bojong terdiri dari 1 RW yaitu RW 07
4. Kebon Kopi terdiri dari 2 RW yaitu RW 09 dan RW 10.

Berikut adalah peta Kel. Puspanegara



Gambar 3.1 Peta Kelurahan Puspanegara

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Puspanegara 2011

Setiap lingkungan mempunyai kepengurusan masing-masing yang dikepalai oleh ketua RW/RT sebagai mitra kerja Pemerintahan Kelurahan.

Batas wilayah Kelurahan Puspanegara di sebelah Utara adalah Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri, sebelah Timur adalah Desa Citereup Kecamatan Citereup, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citereup, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puspasari Kecamatan Citereup.

3.1.2 Komunitas

Jumlah penduduk Kelurahan Puspanegara berdasarkan data terakhir adalah 18.497 jiwa. Yang terdiri dari 1.755 warga di RW 01, 941 orang di RW 2, 2.168 orang di RW 3, 2.107 orang di RW 4, 1.509 orang di RW 5, 993 orang di RW 6, 2.174 orang di RW 7, 2.257 orang di RW 8, 1.244 orang di RW 9, 1.705 orang di RW 10 dan 1.610 orang di RW 11. Dari seluruh total penduduk, Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 4.977 KK dimana jumlah penduduk di Kelurahan Puspanegara didominasi oleh generasi muda yang berusia 20-24 tahun.

Mayoritas penduduk kelurahan ini beragama Islam. Jumlahnya sekitar 83% dari total keseluruhan penduduk. Sisanya penduduk beragama Katholik 5,80%, Protestan 6,10 %, Hindu 0,5%, Budha 2 % dan Konghucu 3% dari total keseluruhan penduduk.

Berdasarkan mata pencariannya, penduduk Kelurahan Puspanegara sebagian besar bekerja sebagai buruh industri, yaitu 6.335 orang. Selanjutnya 180 orang bekerja sebagai pedagang. Sebanyak 114 orang bekerja sebagai pengemudi, 54 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil, 45 orang pensiunan (TNI/POLRI/PNS), 30 orang buruh bangunan, 4 orang TNI/POLRI dan 2 orang sebagai pengrajin.

Keadaan sarana dan prasarana kelurahan Puspanegara dibagi dalam 3 kelompok, yaitu sarana dan prasarana pemerintahan kelurahan, sarana dan keagamaan, dan prasarana wilayah. Sarana dan prasarana pemerintahan kelurahan terdiri dari 1 buah kantor kelurahan, 38 buah pos siskamling dan 1 buah aula. Sedangkan sarana dan keagamaan terdiri dari 7 mesjid, 13 musholla, 10 majlis taklim dan 4 pondok pesantren.

Selanjutnya adalah prasarana wilayah. Prasarana wilayah dikelompokkan menjadi prasarana pengairan, prasarana perhubungan, prasarana perekonomian, prasarana keuangan/ perkreditan, prasarana kesehatan. Prasarana pengairan terdiri dari 1 buah sungai dan danau/situ. Prasarana perhubungan terdiri dari 1 Km jalan kabupaten, 2,1 Km Jalan Kelurahan, 6 buah Jembatan Beton, 1 buah Jembatan Layang. Sedangkan Jalan Negara dan Jalan Propinsi belum terdapat di Kelurahan Puspanegara. Prasarana perekonomian terdiri dari 203 Toko/Kios/Warung, 21 Ruko, 2 Supermarket/Departemen Store dan 6 Mini Market. Selanjutnya adalah prasarana Keuangan/Perkreditan terdiri dari 3 buah Bank Pemerintah, 6 buah Bank Swasta, 1 BPR Pemerintah, 2 BPR Swasta dan 6 Koperasi Non KUD. Prasarana kesehatan yang terdiri dari 2 poliklinik yang terdiri dari 2 dokter dan 1 buah puskesmas yang terdiri dari 6 orang dokter dan 15 orang paramedis, juga terdapat 2 praktek dokter yang terdiri dari 2 dokter dan 4 orang paramedis. Juga terdapat 2 bidan praktek yang terdiri dari 2 bidan dan 6 paramedis. Terdapat 1 apotik dan 15 posyandu. Terakhir adalah prasarana pendidikan yang terdiri dari 1 SMA swasta, 2 SMP Swasta, 9 SD Negeri, 1 SD Swasta, 7 buah TK, 5 PAUD dan 3 Pondok Pesantren.

Penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Puspanegara yang dilaksanakan pada tahun 2011 adalah pembangunan Jalan Lingkungan (Betonisasi) Akses Jalan Makam sepanjang 500 x 2 M. Sedangkan pembangunan lingkungan dibiayai oleh pihak ketiga, yaitu ITP yang terdiri dari pembangunan jalan lingkungan di Kampung Kebon Kopi RW 10 sepanjang 250m x 2m, pemagaran kantor Kelurahan Puspanegara sepanjang 62 M, rehab Mushola Al-Barqah Kp. Kamurang RT. 01/05 seluas 50 M² dan pembangunan tempat wudhu Masjid Nurul Iman di Kel. Puspanegara RT 02 RW 03 dengan ukuran 10M x 7M.

Berdasarkan Perda No. 25 tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja, Kelurahan Puspanegara dibagi menjadi 4 seksi dan 1 Sekretariat. Dengan demikian organisasi dan tata kerja di Kelurahan Puspanegara terdiri dari Lurah, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Keamanan dan Ketertiban. Setiap bagian menjalankan tugas dan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan bersama.

Fungsi lurah adalah penyelenggaraan ketatausahaan kelurahan, tugas-tugas pemerintahan umum, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan masyarakat, sosial kemasyarakatan, pembinaan organisasi kemasyarakatan serta penyelenggaraan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Fungsi sekretariat adalah pengelolaan program, administrasi umum dan kearsipan, pengelolaan administrasi kepegawaian kelurahan dan pendataan administrasi asset daerah.

Fungsi pemerintahan adalah menyelenggarakan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai bidang tugasnya.

Selanjutnya adalah fungsi seksi perekonomian dan pembangunan. Tugas yang pertama adalah memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan. Diikuti dengan fungsi sebagai fasilitator pembangunan perekonomian kelurahan, kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan dan koperasi serta memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan swadaya masyarakat ditambah memfasilitasi pajak bumi dan bangunan.

Seksi berikutnya adalah seksi Kesejahteraan Sosial. Seksi ini berfungsi untuk membina dan melaporkan program wajib belajar dan pendidikan luar sekolah, membina organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan, memfasilitasi bantuan sosial, membina dan memfasilitasi pemberdayaan perempuan, memfasilitasi pembinaan kesehatan masyarakat serta memfasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama.

Terakhir adalah seksi Keamanan dan Ketertiban. Seksi ini berfungsi menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dan pelayanan dokumen izin ketertiban.

Setiap tahunnya, setiap seksi melakukan perumusan masalah-masalah yang terjadi di Kelurahan Puspanegara. Terkait dengan penelitian ini masalah yang akan disajikan adalah masalah yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan sosial. Dari hasil permasalahan yang di rumuskan oleh bidang ini disimpulkan

bahwa masalah masalah yang terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan.

3.2 Gambaran Umum PT . Indocement Tungal Prakarsa, Tbk.

3.2.1 Sekilas Tentang ITP

PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk. (ITP) telah menjadi produsen semen berkualitas yang terkemuka di Indonesia sejak tahun 1975. Tahun 2011 menandai ulang tahun Perseroan yang ke-36. Pada tahun 2001, HeidelbergCement Group yang berbasis di Jerman menjadi pemegang saham mayoritas ITP.

ITP memiliki tiga kompleks pabrik, yang secara keseluruhan meliputi 12 pabrik. Kompleks Pabrik Citeureup di Bogor, Jawa Barat, yang mengoperasikan 9 pabrik, adalah salah satu kompleks pabrik semen terbesar di dunia. Dua kompleks pabrik lainnya berlokasi di Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, dengan dua pabrik; dan di Tarjun, Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan sebuah pabrik. Pada tahun 2010, ITP menambah kapasitas produksi sebesar 1,5 juta ton semen per tahun di Pabrik Palimanan. Hal ini menambah total kapasitas produksi terpasang ITP menjadi 18,6 juta ton semen per tahun.

ITP menawarkan beberapa jenis produk semen yang dipasarkan dengan merek “Tiga Roda”. Termasuk di dalamnya adalah *Portland Composite Cement* (PCC), *Semen Ordinary Portland* (Tipe I, Tipe II, dan Tipe V), Semen Sumur Minyak (*Oil Well Cement*), Semen Putih dan Mortar Putih TR30. ITP adalah satu-satunya produsen Semen Putih di Indonesia. Penjualan terbesar dari ITP berasal dari PCC, yang diperkenalkan pada tahun 2005. Semen ini menggunakan bahan baku alternatif untuk mengurangi rasio klinker, yang juga meningkatkan daya tahan serta resistensi terhadap erosi cuaca dan kimia. Penggunaan bahan baku alternatif dapat mengurangi pemakaian energi dan emisi CO₂, serta merupakan bagian utama dari komitmen ITP untuk menjaga kelestarian lingkungan di seluruh kegiatan operasinya.

ITP telah menjadi penyedia semen curah dan beton siap-pakai (RMC) terkemuka. Bidang usaha ini dilaksanakan oleh anak perusahaan ITP, PT Pionirbeton Industri (Pionir), yang menggunakan merek “Tiga Roda”. Untuk mendukung usaha ini, ITP mengakuisisi perusahaan agregat kedua pada tahun

2009, yang memiliki cadangan sekitar 95 juta ton. Pengoperasian beberapa *batching plant* baru pada 2010 memampukan ITP secara cepat memperluas pangsa pasar semen curah dan beton siap-pakai, khususnya di pasar utama Jakarta dan Jawa Barat. ITP saat ini merupakan salah satu dari tiga pemasok utama semen curah dan beton siap-pakai secara nasional.

ITP tetap mempertahankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), yang menitikberatkan pada pengurangan kemiskinan, pendidikan dan lingkungan. Selama satu dasawarsa terakhir, ITP telah menerima berbagai penghargaan atas upayanya dalam pembangunan berkelanjutan untuk ikut memajukan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi usahanya. Di antara berbagai penghargaan yang diterima pada tahun 2010, ITP meraih peringkat pertama penghargaan *SGS Annual Quality Award for Corporate Responsibility to Society and Environment* untuk kategori Manufaktur. SGS merupakan lembaga internasional yang melakukan verifikasi, pengujian dan sertifikasi berbagai perusahaan terkemuka.

Saham ITP tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 30 Desember 2010, ITP memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp58.716 miliar. ITP dan anak perusahaannya mempekerjakan 5.982 karyawan pada akhir tahun 2010.

3.2.2 Sejarah

ITP memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.2876.HT.01.01.TH.85 pada tanggal 17 Mei 1985. Pabrik-pabrik yang saat ini dimiliki ITP berawal dari PT. Distinct Indonesia Cement Enterprise (DICE), pada tahun 1973 mulai dibangun tanur putar pertama dengan kapasitas terpasang sebesar 500.000 ton semen abu-abu per tahun. Pembangunan tanur pertama ini selesai pada tahun 1975 dan diresmikan pada tanggal 4 Agustus 1975 oleh Presiden RI saat itu, Bapak Soeharto. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi ITP. Tanur pertama ini kemudian menjadi pabrik semen pertama yang dimiliki ITP. Produksi komersialnya dimulai pada tahun yang sama.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan semen di Indonesia, ITP mendirikan perusahaan baru. Pada mulanya semua pabrik yang dimiliki ITP

tersebut dikelola dan dioperasikan oleh enam perusahaan, yang kemudian pada tahun 1985 perusahaan-perusahaan tersebut bergabung menjadi ITP. Kedelapan pabrik tersebut terdapat di daerah Citereup, Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya, pabrik ke-9 terletak di Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Pabrik ini berasal dari PT Tridaya Manunggal Perkasa Cement (TMCP) yang diambil alih ITP pada tahun 1991. Sedangkan pada tahun 1996, ITP menyelesaikan pembangunan pabrik ke-10 dengan lokasi dan kapasitas yang sama dengan pabrik ke-9. Pabrik ke-11 terletak di Citereup, Bogor, Jawa Barat yang diresmikan pada tanggal 1 Maret 1999 dengan kapasitas terpasang sebesar 2.400.000 ton klinker per tahun.

Sebagai hasil *merger* antara ITP dengan PT Indocement Investama dan PT Indo Kodeco Cement (IKC) pada tahun 29 Desember 2000, maka ITP menjadi pabrik di Tarjun, Kota Baru, Kalimantan Selatan (Sebelumnya oleh IKC). Pabrik tersebut menjadi pabrik ITP ke-12.

Hingga saat ini ITP telah memiliki 12 pabrik. Pabrik ke 1-8 dan pabrik ke-11 berada di Citereup, Bogor. Pabrik ke-9 dan ke-10 berada di Cirebon. Sedangkan pabrik ke-12 berada di Tarjun, Kota baru, Kalimantan Selatan. Status ITP sejak tanggal 5 Desember 1989 adalah perusahaan public (*Go Publik*). Dengan status sebagai perusahaan *public*, maka nama ITP ditambah dengan “Tbk” yang artinya terbuka. Selanjutnya pada tanggal 16 September 1994 ITP mencatat seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*)

Tanggal 18 April 2001, Kimmeridge Enterprise Pte. Ltd (anak perusahaan HeidelbergCement Group/”Kimmeridge”) telah membeli seluruh saham ITP milik Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan PT Holdiko Perkasa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kimmeridge menjadi pemegang 45,48% saham ITP.

HeidelbergCement Group adalah produsen semen yang berpusat di Jerman menjadi pemegang saham pengendali ITP. Dengan masuknya ITP ke HeidelbergCement Group (melalui Kimmeridge), ITP memperoleh manfaat keahlian teknis dan keuangan bertaraf internasional, serta dukungan jaringan global di bidang pemasaran. Saham ITP tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kapasitas kapitalisasi sebesar Rp 30.186 miliar pada akhir tahun 2007 dengan jumlah karyawan mencapai 6.433 orang.

Tahun selanjutnya, ITP menerima Emisi Reduksi yang Disertifikasi (*Certified Emission Reduction/CER*) untuk pertama kalinya dalam kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih untuk proyek penggunaan bahan bakar alternatif. ITP menerima Peringkat Hijau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) untuk periode 2007-2008, untuk Pabrik Citeureup dan Peringkat Biru untuk Pabrik Palimanan. Dalam rangka restrukturisasi internal, HeidelbergCement AG – pemegang saham utama ITP – mengalihkan seluruh sahamnya di ITP kepada Birchwood Omnia Limited (Inggris), yang dimiliki 100% oleh HeidelbergCement Group.

ITP meraih peringkat tertinggi, yaitu Peringkat Emas, pada program PROPER 2008- 2009. Peringkat tersebut diraih oleh Pabrik Citeureup, Bogor. ITP merupakan perusahaan kedua di Indonesia yang meraih Peringkat Emas sejak program PROPER dimulai tahun 2002. Pabrik Palimanan, Cirebon, memperoleh Peringkat Hijau pada program PROPER 2008-2009.

3.2.3 Visi Misi Motto

1. Visi Perseroan

Pemimpin pasar semen yang berkualitas dan pemain penting di bidang beton siap-pakai di dalam negeri.

2. Misi Perseroan

Kami berkecimpung dalam bisnis penyediaan papan dan bahan bangunan terkait semen yang bermutu, dengan harga kompetitif dan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan.

3. Moto Perseroan

Turut membangun kehidupan bermutu.

3.2.4 Lokasi

Lokasi pabrik semen yang dimiliki ITP tersebar di tiga tempat:

1. Citeureup, Bogor, berjumlah 9 Plant dengan luas area 200 Ha
2. Palimanan Cirebon, berjumlah 2 Plant dengan luas area 37 Ha
3. Tarjun, Kalimantan Selatan, berjumlah 1 Plant dengan luas area 18 Ha.

Plant yang dimiliki oleh ITP, seluruhnya berjumlah 12 Plant. Sembilan diantaranya yaitu Plant 1-8 dan Plant 11 terdapat di Citereup. Pabrik Palimanan terdiri dari Plant 9 dan Plant 10. Sedangkan pabrik Tarjun terdiri dari 1 Plant yaitu Plant 12.

Pemilihan lokasi di daerah Citereup, Palimanan dan Tarjun berdasarkan berbagai pertimbangan dan faktor menguntungkan, antara lain:

1. Ketersediaan bahan baku

Daerah Citereup dan Cirebon adalah daerah yang kaya akan kandungan kapur dan tanah liat. Bukit-bukit yang mengelilinginya kaya akan kapur dan tanah liat. Hal ini menguntungkan karena bahan baku untuk pembuatan semen dapat diperoleh mudah dengan cara penambangan.

2. Daerah pemasaran

Pembangunan di Indonesia belum merata, dimana sebagian besar pembangunan berpusat di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan terfokusnya daerah pemasaran produk ITP. Pemilihan lokasi ini mengakibatkan transportasi produk tidak terlalu jauh.

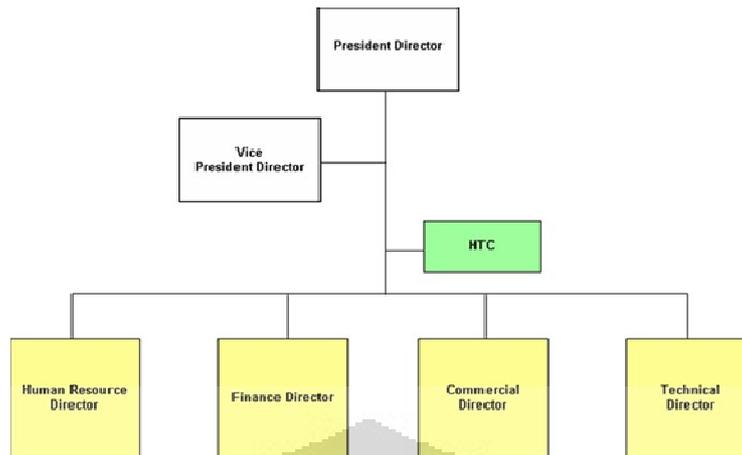
3. Tenaga kerja

Untuk Pulau Jawa, pada umumnya penyediaan tenaga kerja dapat dijamin keberadaannya, baik kebutuhan tenaga kerja tingkat bawah, menengah maupun atas.

3.2.5 Struktur Organisasi

ITP dipimpin oleh seorang direktur utama. Saat ini Direktur Utama ITP adalah Daniel Lavallo. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama dibantu oleh Wakil Direktur Utama. Berbeda dengan Direktur Utama yang berkebangsaan Belgia, Wakil Direktur Utama adalah warga negara Indonesia.

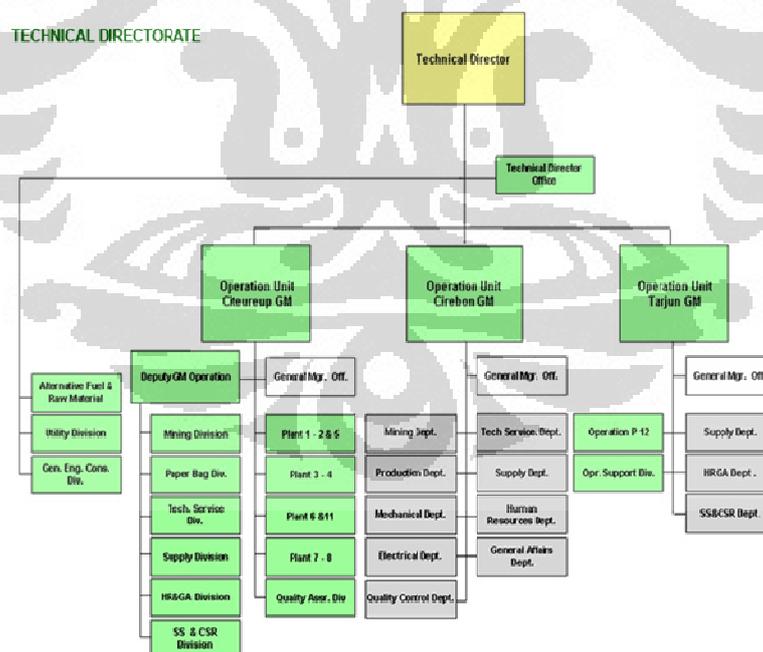
Direktur Utama membawahi empat divisi, yaitu Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Keuangan, Divisi Teknis dan Divisi Komersial. Berikut adalah struktur organisasinya.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi ITP

Sumber : <http://intranet/v4/index3.aspx>

CSR ITP berada didalam divisi Teknis atau Operasional. Berikut adalah bagannya:



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Divisi Teknis

Sumber: <http://intranet/v4/index3.aspx>

3.2.6 Sarana dan Prasarana Perusahaan

Dalam mengembangkan usahanya, ITP memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan produksi dan kesejahteraan karyawan seperti lokasi strategis, serta memiliki peralatan dengan teknologi yang modern di setiap unit kerja dan fasilitas karyawan yang memadai seperti:

Keselamatan kerja berupa fasilitas ini diberikan demi menjaga kelancaran serta keamanan selama menjalankan pekerjaan. Fasilitas yang diberikan adalah sejumlah alat pelindung diri (APD) seperti: helm, masker, sepatu kerja (*safety shoes*), kacamata las, dan alat pelindung telinga serta APD lainnya yang sesuai dengan unit kerja masing-masing karyawan. Di areal pabrik juga terpasang rambu-rambu lalu lintas yang berfungsi memberikan petunjuk kepada berbagai kendaraan operasional perusahaan.

Selain itu juga ada fasilitas kesehatan berupa poliklinik yang berada di lingkungan pabrik, dengan jadwal pelayanan pada pagi hari untuk karyawan dan sore hari untuk keluarga karyawan. Fasilitas yang terdapat pada poliklinik antara lain: balai Pengobatan Umum/ Dokter Umum dan Spesialis, balai pengobatan gigi, klinik P3K dan UGD 24 jam, klinik KIA dan KB, apotek, dan *rontgent*.

Tidak lupa juga ada fasilitas transportasi berupa bus karyawan “*shuttle bus*” yang akan mengantarkan dan menjemput karyawan dari pintu masuk (*pos*) ke tempat kerja (*plant*) masing-masing sesuai dengan waktu kerja yang berlaku, dan tempat tinggal perumahan yang ada di lingkungan pabrik di peruntukkan bagi karyawan sesuai tingkat eselon *Housing I*, *Housing II*, *Housing III*, sedangkan untuk para tamu atau staf berupa *Guest House*.

Tidak kalah pentingnya ITP memiliki dua macam laboratorium yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses pembuatan semen dari segi komposisinya dan uji mutu semen yang dihasilkan, yaitu:

1. Laboratorium kimia

Laboratorium ini digunakan untuk pengendalian mutu semen yang dihasilkan selama 24 jam sesuai dengan jalannya proses produksi. Umumnya komposisi kimia dianalisis setiap 1 jam dan menjadi analisis harian atau bulanan. Analisis yang mendukung proses pengendalian mutu produk adalah

bagian tidak larut (*insoluble residu*), hilang pijar (*loss on ignition*), uji CaO bebas (*freelime*) dan pengujian komposisi kimia menggunakan metode spektrometer sinar X.

2. Laboratorium fisika

Laboratorium ini digunakan untuk pengujian semen secara fisika yang meliputi pengujian kehalusan dengan metode *blaine*, analisis *residue*, pengujian kuat tekan, dan pengujian waktu pengikatan (*setting time*)

Selanjutnya adalah fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola, lapangan voley, lapangan basket, lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, serta tenis meja yang berada di lingkungan perseroan yang disebut *sport hall* ditambah tempat ibadah, perpustakaan, koperasi karyawan dan kantin.

3.2.7 Proses Pembuatan Semen

Bahan baku pembuatan semen terdiri dari batu kapur (80%), tanah liat (10%), pasir-silika (9%) dan pasir besi (1%). Produksi semen membutuhkan bahan baku yang bersifat kering, proporsional, dan homogen sebelum ditransfer ke dalam tanur pembakaran. Hasil pencampuran ini dikenal dengan nama klinker, yang kemudian dihaluskan dengan campuran gipsum di dalam penggilingan semen untuk menghasilkan OPC atau dicampur dengan bahan aditif lainnya untuk menghasilkan tipe semen yang lain. Rata-rata, sekitar 960 kg klinker menghasilkan satu ton OPC. Berikut ini akan digambarkan dengan ringkas 7 tahap pembuatan semen:

1. Penambangan

Bahan baku utama yang digunakan dalam memproduksi semen adalah batu kapur, pasir silika, tanah liat, pasir besi dan gipsum. Batu kapur, tanah liat dan pasir silika di tambang dengan cara pengeboran dan peledakan dan kemudian dibawa ke mesin penggiling yang berlokasi tidak jauh dari tambang. Bahan yang telah digiling kemudian dikirim melalui ban berjalan atau dengan menggunakan truk.

Dalam sistem proses basah, bahan baku dimasukkan ke dalam tanur dengan wujud aslinya yang masih basah, sehingga membutuhkan konsumsi panas yang relatif tinggi. Dalam sistem proses kering, bahan baku telah

dikeringkan dan dimasukkan ke tanur dalam bentuk bubuk. Ini memberikan keuntungan sehingga digunakan oleh produsen semen saat ini. ITP menggunakan proses tanur kering, yang mengkonsumsi panas lebih sedikit dan lebih efisien dibandingkan proses tanur basah.

2. Pengeringan dan Penggilingan

Semua bahan yang sudah dihancurkan dikeringkan di dalam pengering yang berputar untuk mencegah pemborosan panas. Kadar air dari material tersebut menjadi turun sesuai dengan kontrol kualitas yang telah ditentukan sesuai standar yang telah ditetapkan. Setelah disimpan di *Raw Mill Feed Bins*, campuran material yang telah mengikuti standar dimasukkan ke dalam penggilingan. Dalam proses penggilingan ini, pengambilan contoh dilakukan setiap satu jam untuk diperiksa agar komposisi masing-masing material tetap konstan dan sesuai dengan standar. Setelah itu tepung yang telah bercampur itu dikirimkan ke tempat penyimpanan.

3. Pembakaran dan Pendinginan

Dari tempat penyimpanan hasil campuran yang telah digiling, material yang telah halus itu dikirim ke tempat pembakaran yang berputar dan bertemperatur sangat tinggi sampai menjadi klinker. Setelah klinker ini didinginkan, dikirim ke tempat penyimpanan. Selama proses ini berlangsung, peralatan yang canggih digunakan untuk memantau proses pembakaran yang diawasi secara terus menerus dari Pusat Pengendalian. Bahan bakar yang dipergunakan adalah batu bara, kecuali untuk semen putih dan *oil well cement* digunakan gas alam.

4. Penggilingan Akhir

Klinker yang sudah didinginkan kemudian dicampur dengan gips yang masih diimpor, kemudian digiling untuk menjadi semen. Penggilingan ini dilaksanakan dengan sistem *close circuit* untuk menjaga efisiensi serta mutu yang tinggi. Semen yang telah siap untuk dipasarkan ini kemudian dipompa ke dalam tangki penyimpanan.

5. Pengantongan

Dari silo tempat penampungan, semen dipindahkan ke tempat pengantongan untuk kantong maupun curah. Pengepakan menjadi efisien

dengan menggunakan mesin pembungkus dengan kecepatan tinggi. Kantong-kantong yang telah terisi dengan otomatis ditimbang dan dijahit untuk kemudian dimuat ke truk melalui ban berjalan. Sedangkan semen curah dimuat ke lori khusus untuk diangkut ke tempat penampungan di pabrik, atau langsung diangkut ke Tanjung Priok untuk disimpan atau langsung dikapalkan.

Berkaitan dengan program UPK, hasil pengolahan sampah berupa *Sorted Municipal Waste* (SMW) digunakan pada proses pembakaran. Dalam proses ini, bahan bakar berupa batu bara dikurangi penggunaannya melalui pemanfaatan SMW sebagai bahan bakar alternatif.

3.2.8 Produk

ITP memproduksi lima jenis semen yang dipasarkan dengan merek dagang Tiga Roda. Adapun penjelasan dari produk-produk semen tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Portland Composite Cement* (PCC)

PCC dibuat untuk penggunaan umum seperti rumah, bangunan tinggi, jembatan, jalan beton, beton *pre-cast* dan beton *pre-stress*. PCC mempunyai kekuatan yang sama dengan Portland Cement Tipe I.

2. *Ordinary Portland Cement* (OPC)

OPC juga dikenal sebagai semen abu-abu, terdiri dari lima tipe semen standar. Indocement memproduksi OPC Tipe I, II dan V. OPC Tipe I merupakan semen kualitas tinggi yang sesuai untuk berbagai penggunaan, seperti konstruksi rumah, gedung tinggi, jembatan, dan jalan. OPC Tipe II dan V memberikan perlindungan tambahan terhadap kandungan sulfat di air dan tanah.

3. *Oil Well Cement* (OWC)

OWC adalah tipe semen khusus untuk pengeboran minyak dan gas baik di darat maupun lepas pantai. OWC dicampur menjadi suatu adukan semen dan dimasukkan antara pipa bor dan cetakan sumur bor dimana semen tersebut dapat mengeras dan kemudian mengikat pipa pada cetakannya.

4. *White Cement*

Semen putih digunakan untuk dekorasi eksterior dan interior gedung. Sebagai satu-satunya produsen semen putih di Indonesia, saat ini ITP dapat mencukupi kebutuhan semen putih pasar domestik.

5. *White Mortar TR30*

White Mortar TR30 sangat sesuai untuk pekerjaan acian dan nat. Komposisi *White Mortar TR30* antara lain Semen Putih "Tiga Roda", kapur (Kalsium Karbonat) dan bahan aditif khusus lainnya. Keuntungan menggunakan *White Mortar TR30* antara lain, permukaan acian lebih halus, mengurangi retak dan terkelupasnya permukaan, karena mempunyai sifat plastis dengan daya rekat tinggi, cepat dan mudah dalam pengerjaan, hemat karena acian lebih tipis, serta dapat digunakan pada permukaan beton dengan menambahkan lem putih.

3.3 **CSR ITP**

Pabrik ITP tersebar di tiga tempat. Secara operasional, setiap pabrik memiliki unit CSR sendiri. Setiap unit CSR memiliki daerah binaan masing-masing. Secara konsisten dan berkesinambungan ITP mengembangkan programnya di 35 desa binaan. Di Citereup terdapat 12 desa binaan, 6 desa binaan di Cirebon, 10 di Tarjun dan 7 desa binaan Non-Plant. Penelitian ini akan menjelaskan khusus CSR Unit Citereup.

3.3.1 Sejarah CSR ITP

Pada awalnya, ITP melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya melalui *Human Research-General Affair Departement (HR_GAD)*. Departemen ini melaksanakan berbagai program yang berbentuk donasi dan *charity*. Jadi program yang dilaksanakan belum dalam bentuk pembinaan lingkungan ataupun program yang bersifat jangka panjang.

Tahun 1990 ITP membentuk Bina Lingkungan (BILIK) dibawah sub *Security Departement*. Disinilah baru dimulai dilaksanakan pembinaan kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan mulai beralih kepada pengembangan komunitas sekitar operasi perusahaan. Tugas dari BILIK ini adalah membina

masyarakat bersama keamanan (karena inilah digabung dalam *Security Departement*, agar lingkungan aman).

Tahun 2002, BILIK berubah menjadi *Community Development Office* (CDO), dalam hal ini CDO terpisah dari *Security Departement* dan menjadi divisi sendiri. Tahun 2006 hingga 2008, CDO menjadi sub dari SSCD (*Security, Safety and Communiti Development Division*). Sejak dibentuknya CDO mulai ada program pengembangan masyarakat.

Tahun 2009 CDO menjadi *Coorporate Social ResponsibilityDepartement* (CSR). Kegiatan CSR ITP berkembang menjadi pemberdayaan masyarakat dan program berkelanjutan.

3.3.2 Visi dan Misi CSR ITP

CSR ITP mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi:

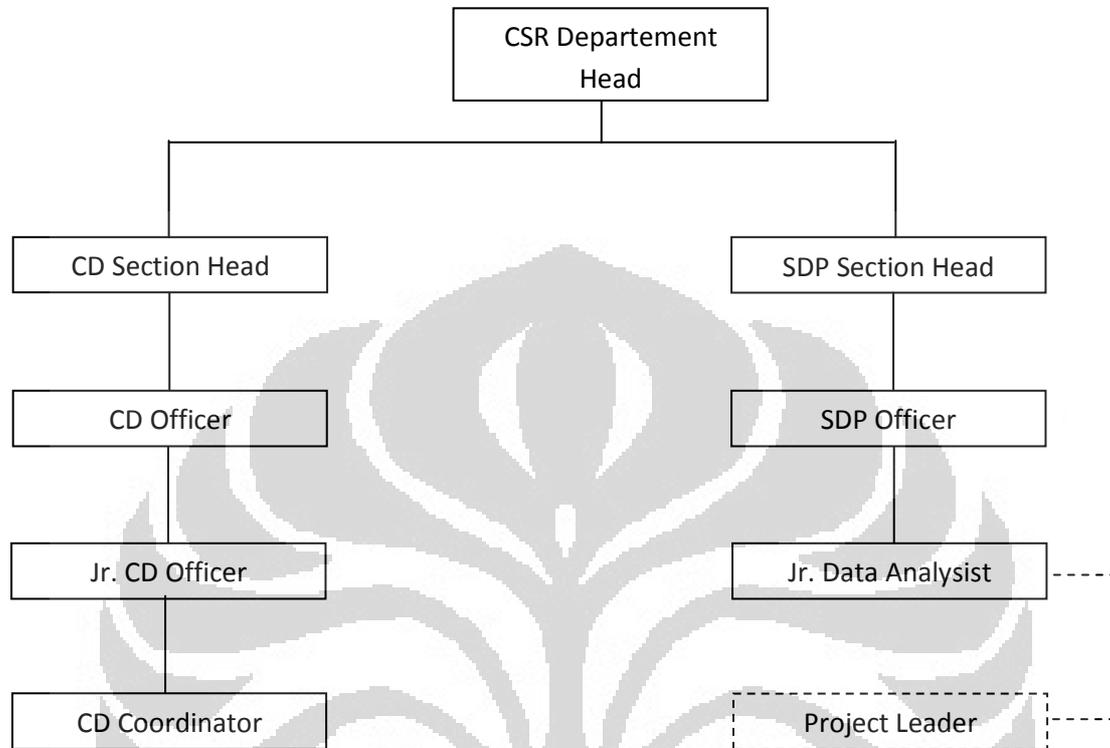
Membangun kepentingan perusahaan untuk kepentingan bersama perusahaan dan komunitas, khususnya komunitas lokal dimana perusahaan beroperasi sehingga tercipta hubungan yang harmonis.

2. Misi:

Menjalankan seluruh kegiatan usaha dengan tetap memperhatikan kesejahteraan komunitas (*wholesome community*) dan dengan konsep ramah lingkungan (*enviromtent friendly*) dengan memperhatikan pembangunan perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

3.3.3 Struktur Organisasi CSR ITP

Struktur organisasi CSR pada tahun 2010 adalah seperti yang dapat dilihat di bagan di bawah ini:



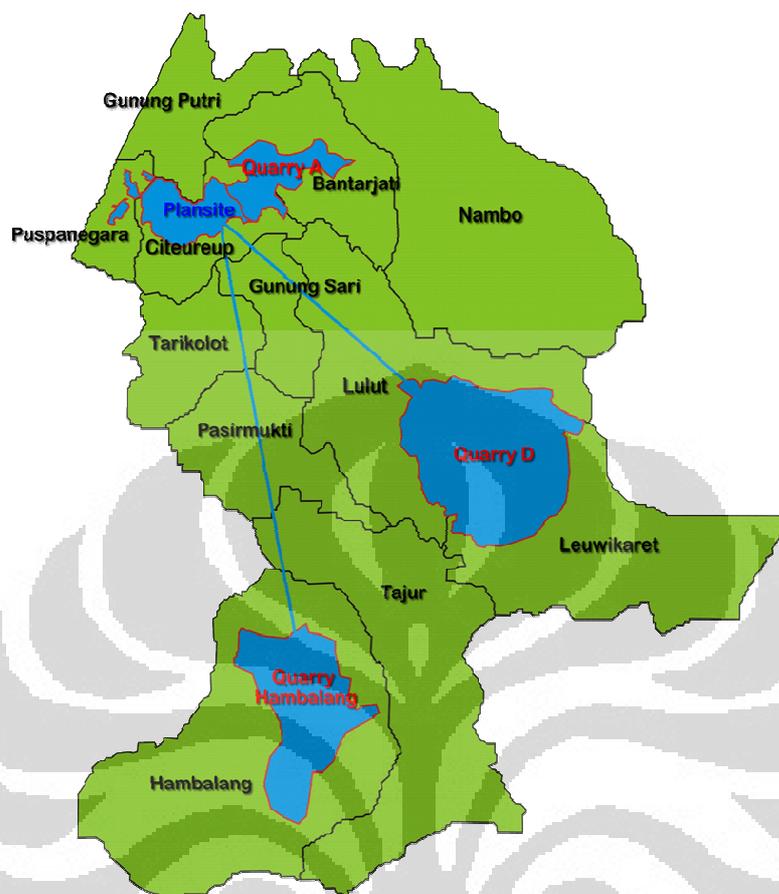
Gambar 3.4 Struktur organisasi CSR ITP

Sumber: <http://intranet/v4/index3.aspx>

3.3.4 Desa Binaan

CSR unit Citereup melaksanakan programnya pada 12 Desa Binaan. Desa tersebut terdiri dari desa-desa yang berada di sekitar lokasi pabrik. Ke-12 desa tersebut adalah Desa Gunung Putri, Desa Puspanegara, Desa Citereup, Desa Bantarjati, Desa Nambo, Desa Gunung Sari, Desa Tarikolot, Desa Pasir Mukti, Desa Lulut, Desa Tajur, Desa Leuwikaret, dan Desa Hambalang.

Berikut adalah peta 12 Desa binaan CSR Unit Citereup:



Gambar 3.5 Peta 12 Desa Binaan CSR ITP

Sumber: <http://intranet/v4/index3.aspx>

Plantsite merupakan lokasi pabrik ITP. Sedangkan *Quarry A* dan *D* merupakan lokasi penambangan batu kapur. Sedangkan *Quarry Hambalang* merupakan tempat lokasi pemambangan tanah liat.

3.3.5 Program-program CSR ITP

ITP melaksanakan gagasan-gagasan Tanggung jawab Sosial Perusahaan untuk memberikan mata pencaharian, perhatian dan perlindungan yang layak bagi masyarakat dan lingkungannya untuk memastikan keberlangsungan pertumbuhan serta kesejahteraan bagi generasi berikutnya.

Program CSR ITP didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada tiga pencapaian yang bermanfaat secara ekonomi, sosial dan

Universitas Indonesia

lingkungan. Yaitu keseimbangan dalam menjaga kelestarian lingkungan, memberikan nilai kepada masyarakat dan perusahaan mendapatkan nilai untuk menjaga kelangsungan operasionalnya.

ITP juga mendasarkan program ini pada kerangka Lima Pilar pembangunan berkelanjutan. Lima Pilar tersebut meliputi bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial-budaya-agama-olahraga dan keamanan.

Terobosan dalam program CSR yang berhasil dicapai ITP pada tahun 2007 adalah pada saat menyelaraskan kepentingan konservasi lingkungan dengan sumber bahan bakar alternatif dan pembangunan komunitas, dimana momentumnya lebih terasa di tahun 2008. Aktivitas CSR terpusat pada empat proyek berbeda yang memberikan peluang kerja pada wilayah dengan kesempatan kerja yang langka, menawarkan pendapatan bagi orang yang tidak memiliki penghasilan, mengubah pola pikir masyarakat tentang kebersihan dan sanitasi di dalam dan sekitar desa mereka, dan yang lebih penting lagi, membuka peluang untuk menggalang keterlibatan dan pengembangan masyarakat pada kegiatan yang memiliki nilai ekonomis dan memberi manfaat sosial yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Secara garis besar, program CSR ITP dijalankan di dalam 2 bagian, *Community Development* 5 Pilar (5 Pilar) dan *Sustainability Development Program* (SDP). Program 5 Pilar terdiri dari Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Ekonomi, Program Sosial Budaya Agama dan Olahraga (Sosbudagor) dan Program Keamanan. Program-program ini kemudian direalisasikan dalam berbagai bentuk kegiatan. Program Pendidikan menjalankan kegiatan membangun sekolah, program anak asuh dan beasiswa, bantuan sarana pendidikan, pendidikan keterampilan praktis untuk usaha kecil, perpustakaan mandiri, *training Seven Habit* untuk Guru, siswa dan orang tua siswa. Program kesehatan terdiri dari Puskesmas Keliling, Makanan Tambahan, Penyuluhan Kesehatan, Operasi Katarak, Khitanan Masal, Sarana Air Bersih, Lomba Balita Sehat, Sarana MCK, Lomba Kebersihan & Penghijauan Lingkungan dan Kapanye HIV/AIDS & Narkoba. Untuk Program ekonomi, kegiatannya adalah modal kerja bergulir dan pelatihan UMKM, pemberdayaan tenaga kerja / kontraktor lokal, pemberdayaan UMKM desa binaan melalui program *local purchase* dan program

PKBL. Program Sosbudagor terdiri dari Pengembangan Objek Wisata Banyu Panas, Ruman Budaya. Sedangkan untuk program keamanan, kegiatan yang dijalankan adalah Program Pembinaan SDM Keamanan Lingkungan, Program Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan dan Program Bantuan Seragam dan Kelengkapan SDM Keamanan Lingkungan.

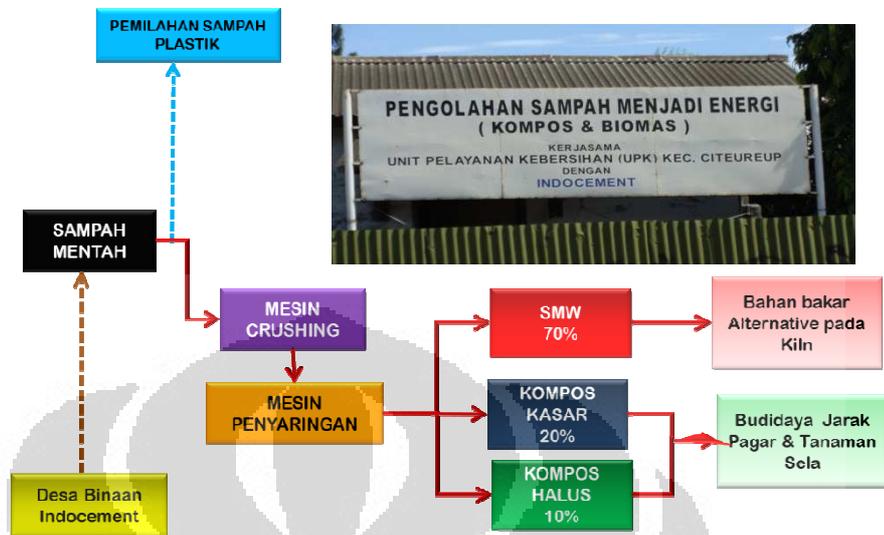
Sedangkan SDP terdiri dari beberapa proyek program, yaitu Program Budidaya Jarak Pagar, Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK) dalam bentuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Program Pusat Pelatihan & Pemberdayaan Masyarakat (P3M), Program Pusat Pelatihan Domba, Program Pemanfaatan Kotoran Sapi Menjadi Biogas, Program Bengkel Terpadu dan Program Pelatihan Operator Alat Berat serta Program Penangkaran Rusa dan Bekantan.

3.3.6 Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)

Program UPK merupakan salah satu program yang terus dikembangkan oleh ITP. Melalui program ini, ITP berhasil mengolah sampah menjadi SMW dan Kompos. SMW digunakan ITP sebagai energi alternatif dalam proses produksi semen di pabrik, khususnya pada proses pembakaran. Melalui Program ini, CSR ITP berhasil mendapatkan Pemenang 1 dan *Gold Award* dalam Indonesian CSR Award 2008.

Program ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah menjadi produk yang bermanfaat, memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat yang terlibat langsung dan masyarakat luas pada umumnya dan membantu menjalankan program pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Jadi program ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran dengan merekrut tenaga kerja dan memberikan pendapatan kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam program. UPK juga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih bebas dari sampah.

Pelaksanaan program ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



Gambar 3. 6 Flow Pengolahan Sampah Menjadi Energi

Sumber: <http://intranet/v4/index3.aspx>

Berdasarkan gambar diatas, kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam pengelolaan sampah rumah tangga adalah sampah diambil dari daerah Desa Binaan ITP. Sampah mentah yang diambil dari rumah warga kemudian dipilah. Sampah yang bisa didaur ulang tidak diolah. Sampah ini dipisahkan untuk kemudian dijual dan dijadikan pemasukan tambahan bagi karyawan UPK. Sampah yang akan diolah dimasukkan ke mesin *crusher*. Mesin ini juga disebut mesin pencacah karena mampu membuat ukuran sampah menjadi media yang lebih kecil. Sampah yang telah di cacah kemudian diayak menggunakan mesin *Screen*. Hasil pengayakannya akan menghasilkan SMW dan Kompos. SMW dan Kompos kemudian di fermentasikan. Setelah di kemas, keduanya kemudian dijual ke ITP dan pengguna lainnya. Di ITP SMW digunakan sebagai bahan bakar alternatif pada proses pembuatan semen. Sedangkan kompos digunakan pada program budidaya tanaman jarak dan tanaman sela.

3.3.7 *Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Sorted Municipal Waste (SMW) dan Kompos di Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)*

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengelolaan sampah menjadi energi yang dilaksanakan dalam program UPK ini memiliki *Standard Operational Procedure* yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan program. Karena penelitian ini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program maka SOP ini akan digunakan sebagai pedoman evaluasi. Prosedur ini terdiri dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengolahan sampah menjadi energi. Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari: Prosedur Produksi *Sorted Municipal Waste (SMW)* dan Kompos, Prosedur Pengiriman SMW dan Kompos ke ITP, Prosedur Pemeliharaan Mesin *Crusher*, Mesin Pengayakan (*Screen*) dan Kendaraan Operasional serta Evaluasi dan Pelaporan. Berikut adalah penjelasannya:

3.3.7.1 Pengambilan Sampah Rumah Tangga

1. Sampah Rumah Tangga,

Sampah Rumah tangga diambil dari lokasi di desa binaan, terutama di daerah sekitar UPK, tidak menutup kemungkinan dari luar UPK

2. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga,

Sampah rumah tangga diambil dari lokasi yang terdapat di sekitar UPK atau dari luar dengan menggunakan truck atau motor khusus yang memiliki bak terbuka atau gerobak sampah yang diangkut oleh para pengangkut sampah dari warga sekitar Desa binaan.

		dapat didaur ulang dimasukkan ke mesin pencacah (<i>crusher</i>).	
6	Operator mesin <i>crusher</i> & <i>Screen</i>	Hasil pencacahan kemudian mengalami proses pengayakan memakai mesin <i>screening</i> (mesin pengayakan) dan apabila mesin pengayakan mengalami masalah, maka hasil pencacahan disortir secara manual dan langsung dikemas untuk dikirim ke ITP	
7	Pengepakan SMW & Kompos	Hasil pengayakan yang merupakan <i>Sorted Municipal Waste</i> (SMW) serta kompos mengalami proses fermentasi untuk mengurangi kadar air sesuai permintaan dari Plant di ITP sebagai user yang membakar SMW.	
8	Pengepakan SMW dan Kompos	SMW atau Kompos yang telah difermentasikan kemudian dikemas ke dalam karung sesuai permintaan dari Plant yang membakar SMW.	<i>Stock card</i> harian SMW dan Kompos
9	Sopir truck dan Kenek UPK	SMW atau Kompos yang telah dikemas di dalam karung dikirim melalui truk UPK ke pengguna (user) baik ITP untuk digunakan dalam program CSR atau dijual keluar.	Laporan Harian Kegiatan UPK; <i>Stock card</i> harian SMW dan Kompos

Sumber: *Standar Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Sorted Municipal Waste (SMW) dan Kompos Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)*

3.3.7.3 Prosedur Pengiriman SMW dan Kompos ke ITP

Prosedur pengiriman *Sorted Municipal Waste* (SMW) dan kompos ke ITP adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Prosedur Pengiriman SMW dan Kompos ke ITP

No	Petugas Penanggung Jawab	Uraian Langkah Kerja	Dokumen Terkait
1	Pemilah Sampah, Operator Mesin <i>Crusher</i> & <i>Screen</i> , pengepakan	<i>Sorted Municipal Waste</i> atau kompos yang telah dikemas baik dalam karung dimuat ke dalam truck sesuai kapasitas muatannya maksimal satu lapis di atas bak.	Laporan Harian kegiatan UPK
2	Supir truck Operasional dan Kenek	Truck yang memuat <i>Sorted Municipal Waste</i> (SMW) atau kompos membawa surat jalan dengan mencantumkan nomor PO, kemudian menimbang truck di timbangan yang dioperasikan oleh petugas AFRD di ITP (timbang isi), apabila hari libur atau malam hari, maka SMW atau kompos ditimbang di timbangan yang beroperasi sesuai koordinasi dengan AFRD.	Surat jalan, <i>Weighing Card</i>
3	Supir Truck Operasional dan kenek, didampingi Karawan CSR Dept	Untuk SMW, diturunkan di gudang penyimpanan sementara SMW atau langsung diturunkan di tempat yang sesuai koordinasi dengan AFRD	

4	Supir Truck Operasional dan kenek, didampingi Kar yawan CSR Dept	Untuk kompos, diturunkan langsung ke <i>Quarry D</i> atau di lokasi yang telah ditentukan setelah sebelumnya koordinasi dengan <i>warehouse Supply Div.</i> Untuk penerimaan barang.	
5	Supir Truck Operasional dan kenek, didampingi Kar yawan CSR Dept	Setelah <i>truck</i> kosong, tidak berisi muatan, maka <i>truck</i> ditimbang kosong di timbangan tempat penimbangan isi. Kemudian surat jalan serta <i>weighing card</i> sebagian diberikan ke <i>Supply Div.</i> untuk kelengkapan penagihan di <i>Plant</i> dan yang berwarna putih dibawa ke <i>UPK</i> untuk dikumpulkan dan dicatat administrasinya sebagai kelengkapan syarat pembayaran dari <i>ITP</i> .	Surat jalan, Weighing Card

Sumber: *Standar Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Sorted Municipal Waste (SMW) dan Kompos Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)*

3.3.7.4 Prosedur Pemeliharaan Mesin *Crusher*, Mesin Pengayakan (*Screen*) dan Kendaraan Operasional

1. Prosedur Pemeliharaan Mesin *Crusher*

Prosedur pemeliharaan mesin *crusher* dapat diterangkan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Prosedur Pemeliharaan Mesin *Crusher*

No	Petugas Penanggung Jawab	Uraian Langkah Kerja	Dokumen Terkait
1	Operator mesin <i>Crusher</i> & <i>Screen</i>	Mesin <i>crusher</i> dicuci dan dibersihkan setiap seminggu sekali pada waktu sore hari.	<i>Crusher machine maintenance card</i>
2	Operator mesin <i>Crusher</i> & <i>Screen</i>	Mesin <i>crusher</i> dilumasi setiap sebulan sekali dengan memakai <i>grease</i> , maupun memakai oli secukupnya, kemudian dicatat dalam kartu pemeliharaan mesin.	<i>Crusher machine maintenance card</i>
3	Operator mesin <i>Crusher</i> & <i>Screen</i> ; CSR Dept; TSD Fabrikasi	Mesin <i>crusher</i> setiap empat bulan sekali selama maksimal 2 minggu dibawa ke pabrik (TSD) dengan pembuatan SR dari CSR Dept ke TSD untuk pemeliharaan (<i>maintenance</i>) mesin, kemudian dicatat dalam kartu pemeliharaan mesin.	SR, <i>Crusher machine maintenance card</i>

Sumber: *Standar Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Sorted Municipal Waste (SMW) dan Kompos Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)*

2. Prosedur Pemeliharaan Mesin Pengayakan

Prosedur pemeliharaan mesin Pengayakan (*screen*) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Prosedur Pemeliharaan Mesin Pengayakan

No	Petugas Penanggung Jawab	Uraian Langkah Kerja	Dokumen Terkait
1	Operator mesin <i>Crusher</i> & <i>Screen</i>	Mesin pengayakan dicuci dan dibersihkan setiap minggu sekali pada waktu sore hari.	<i>Crusher machine maintenance card</i>
2	Operator mesin <i>Crusher</i> & <i>Screen</i>	Mesin pengayakan dilumasi dengan oli maupun <i>grease</i> secukupnya setiap sebulan sekali, kemudian dicatat dalam kartu pemeliharaan mesin.	<i>Crusher machine maintenance card</i>
3	Operator mesin <i>Crusher</i> & <i>Screen</i> ; CSR Dept.; TSD	Mesin pengayakan setiap empat bulan sekali selama satu minggu dilakukan pemeliharaan (<i>maintenance</i>) dengan menghubungi TSD, dibuat SR ke TSD dari CSR Dept.	SR, <i>Crusher machine maintenance card</i>

Sumber: *Standar Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Sorted Municipal Waste (SMW) dan Kompos Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)*

3. Prosedur Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Prosedur pemeliharaan kendaraan operasional menjadi tanggung jawab pengelola UPK

3.3.7.5 Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan evaluasi dan pelaporan diatur sesuai dengan tabel dibawah ini:

Universitas Indonesia

Tabel 3.5 Tabel Prosedur Evaluasi dan Pelaporan

No	Petugas Penanggung Jawab	Uraian Langkah Kerja	Dokumen Terkait
1	Karyawan UPK, CSR Dept.	Evaluasi hasil produksi SMW maupun kompos dilakukan setiap sebulan sekali melalui rapat koordinasi yang dilakukan setiap sebulan sekali yang dihadiri oleh seluruh karyawan UPK, Perwakil dari CSR dept, terutama <i>SDP Section</i> , maupun SSCD manager. Pelaporan kegiatan UPK dilakukan setiap sebulan sekali melalui laporan tertulis yang disampaikan kepada CSR Dept.	Notulen rapat; Laporan Keuangan dan kegiatan Harian

Sumber: *Standar Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Sorted Municipal Waste (SMW) dan Kompos Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)*

BAB 4

GAMBARAN UMUM, FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG PELAKSANAAN UNIT PELAYANAN KEBERSIHAN (UPK) DAN ANALISA

4.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)

Gambaran umum pelaksanaan program akan menjelaskan mengenai perencanaan UPK dan Pelaksanaan UPK. Perencanaan UPK terdiri dari Identitas dan Sejarah UPK. Sedangkan Pelaksanaan UPK terdiri dari Pengambilan Sampah Rumah Tangga, Produksi SMW dan Kompos, Pengiriman SMW dan Kompos ke ITP, Pemeliharaan Mesin dan Kendaraan Operasional, Pelaporan dan Evaluasi serta Manfaat yang Diperoleh Masyarakat dari Pelaksanaan UPK. Berikut adalah penjelasannya:

4.1.1 Perencanaan UPK

4.1.1.1 Identitas UPK

Subbab ini menjelaskan mengenai identitas UPK secara umum. Dimulai dengan nama program, lokasi program, latar belakang berdirinya program, tujuan serta output yang ingin di capai oleh program. Temuan lapangan mengenai identitas UPK ini didapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan *staff* SDP dan juga data sekunder yang terkait dengan UPK.

UPK merupakan salah satu program CSR ITP yang berada dibawah seksi *Sustainability Development Program* (SDP). Program ini bernama UPK Puspanegara. Hal ini seperti yang disampaikan salah *staff* SDP:

“Nama Program: UPK, Unit Pelayanan Kebersihan, Pengolahan Sampah Menjadi Energi, UPK Puspanegara, Cuma dulunya di sebut UPK Citeterup. Lokasinya berada di Kecamatan Citereup” (FJ, 28 Maret 2012).

UPK dilaksanakan di Kelurahan Puspanegara yang menjadi salah satu desa binaan ITP. Secara spesifik terletak di Jalan Puspanegara, Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citereup, Bogor.

Program ini diadakan karena beberapa alasan. Salah satu diantaranya adalah karena banyaknya sampah yang belum terkelola di wilayah Puspanegara. Berdasarkan pemaparan staff SDP, di Puspanegara tempat UPK ini berdiri tidak terdapat TPS sehingga warga membuang sampah di sembarang tempat. Berikut adalah penuturannya:

“Jadi untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di desa Puspanegara....., kan disana sampah dibuang sembarangan karena tidak ada TPS. Di wilayah itu nga ada TPS, jadi sampah dibuang sembarangan. Ada yang dibuang ke kali, kan di deket Karang Asem itu ada kali, ada yang dibuang disitu, trus ya ada juga sih yang dibuang ke wilayah ITP. Disitu tuh, di pos 3” (Fj, 28 Maret 2012).

Selain karena banyaknya jumlah sampah yang belum terkelola, alasan lain didirikannya UPK adalah keinginan ITP untuk memberdayakan masyarakat serta membantu pemerintah setempat dalam pengelolaan kebersihan. Salah satu usahanya adalah dengan membantu mencari solusi mengenai masalah krusial yang ada di masyarakat yang dalam hal ini berupa sampah yang belum terkelola dengan baik di Puspanegara. Hal ini sesuai dengan penuturan staff SDP berikut:

“Kita bisa *flashback* lagi ke belakang. Karena memang sebagai bentuk tanggung jawab kita ke masyarakat. Setidaknya masyarakat bisa mendapatkan manfaat lah dengan keberadaan ITP di wilayah mereka. Di tambah lagi sampah kan memang menjadi masalah krusial di masyarakat” (Dd, 19 Maret 2012).

Dengan latar belakang diatas maka tujuan dari pelaksanaan program ini adalah mengoptimumkan pengelolaan sampah menjadi produk yang bermanfaat, membuka lapangan pekerjaan baru serta membantu pemerintah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini disampaikan staff SDP seperti berikut ini:

“Kita punya tujuan mengoptimumkan pengelolaan sampah menjadi produk yang bermanfaat, memberikan penghasilan tambahan kepada masyarakat yang terlibat langsung dan masyarakat luas pada umumnya dalam pengelelolaan sampah tersebut serta membantu pemerintah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat” (FJ, 28 Maret 2012).

Selain ketiga tujuan diatas, UPK juga diharapkan untuk mandiri. Kemandirian dijadikan salah satu output akhir yang diharapkan dari pelaksanaan UPK. UPK diharapkan mampu untuk berdiri sendiri dan menjadi bagian dari masyarakat tanpa bergantung kepada ITP. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh kepala seksi SDP berikut:

“Lingkungan bersih dan juga kemandirian. Jadi si pengeloa bisa mengeloa UPK secara mandiri. Tanpa lagi ketergantungan kepada kita. Bagaimana mengelola dengan baik dan mendatangkan *profit*. Disamping kita membantu masyarakat, dengan menggunakan teknologi kita bisa mengolah itu menjadi suatu hal yang menghasilkan” (Ay, 24 April 2012).

Jadi UPK merupakan sebuah program pengolahan sampah yang terletak di jalan Puspanegara, Kel Puspanegara, Kecamatan Citereup, Bogor. Diadakannya program ini didasarkan pada banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan baik di Puspanegara, keinginan memberdayakan masyarakat yang terdapat di desa binaan ITP serta membantu pemerintah setempat dalam pengelolaan kebersihan. Dengan latar belakang tersebut, tujuan didirikannya UPK adalah mengoptimumkan pengelolaan sampah menjadi produk yang bermanfaat, membuka lapangan pekerjaan baru serta membantu pemerintah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu Output yang ingin dicapai adalah kemandirian dari masyarakat dalam pengelolaan UPK tanpa bergantung kepada ITP. Untuk sejarah singkat UPK akan dijelaskan pada subbab di bawah ini.

4.1.1.2 Sejarah UPK

Kel. Puspanegara merupakan kelurahan dengan tingkat kepadatan jiwa paling tinggi di Kecamatan Citereup. Berdasarkan data laporan terakhir yang terdapat dalam buku “Kecamatan Citereup dalam Angka” tahun 2009, kepadatan jiwa kelurahan Puspanegara per Km² pada tahun 2008 adalah 16.326 jiwa. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi ini, salah satu masalah krusial yang ada adalah masalah sampah. Belum ada pengelolaan sampah yang baik di daerah ini. Terbukti dengan kebiasaan warga membuang sampah di sembarang di sembarang tempat. Berikut adalah penjelesannya: “(penduduknya) Uhh rapet banget udah” (Ddy, 3 April 2012).

“Sampah dibuang sembarangan. Ada yang dibuang ke kali, kan di dekat Karang Asem itu ada kali, ada yang dibuang disitu, trus ya ada juga sih yang dibuang ke wilayah ITP. Disitu tuh, di pos 3” (Fj, 28 April 2012).

Sampah yang belum terkelola tidak hanya menarik perhatian ITP, tetapi juga sudah menjadi masalah yang belum ditemukan solusinya oleh tokoh masyarakat setempat. Keduanya sama-sama berkeinginan untuk menciptakan lingkungan yang bersih di lingkungan mereka. Tokoh masyarakat setempat telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih sebelum akhirnya mendirikan UPK. Salah satu upaya tersebut adalah dengan membuat TPS di beberapa lokasi tertentu. Direncanakan, ketika TPS tersebut diadakan, sampahnya akan diangkut oleh Dinas Kerbersihan dan Pertamanan (DKP) Kab. Bogor ke TPA. Hal ini sesuai dengan penuturan berikut:

“Sebenarnya dari awal memang sudah menjadi pemandangan yang tidak enak. Walaupun bagaimana sampah yang berantakan nga enak. Waktu itu saya dan Pak Camat berembuk. Pak Camat juga menanyakan kepada saya, gimana supaya sampah tidak berantakan, supaya lebih bersih. Saya kemudian bilang, pas waktu itu ada kunjungan bupati, tahun 2006, yaudahlah Pak Camat, kita buat TPS-TPS di lokasi-lokasi tertentu. Nah dibuatlah disaat itu yang namanya TPS, itu dibuatnya kaya depan ruko-ruko dan beberapa lokasi tertentu. Kita kerjasama pada waktu itu dengan DKP. Artinya masyarakat membuang disitu, lalu diangkut oleh DKP” (Hr, 21 Maret 2012).

Namun, usaha ini ternyata belum berhasil membuat lingkungan menjadi bersih. Sampah malah berserakan dilokasi tempat berdirinya TPS. Hal ini dikarenakan kapasitas TPS tidak sebanding dengan banyaknya sampah yang ada. Sampah berasal tidak hanya dari masyarakat setempat, melainkan juga dari daerah lain yang berada di luar Kecamatan Citareup.

“Ditengah perjalanan itu tidak menjadi solusi. Di satu sisi masyarakat buang sembarangan. Dari motor, dari mobil atau banyak orang yang buang sampah bahkan tidak hanya dari masyarakat setempat, artinya lokasi itu dimanfaatkan seperti usaha-usaha catering dari Gunung Putri. TPS akhirnya jadi masalah (Hr, 21 Maret 2012).

Langkah kedua dilakukan untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Langkah tersebut adalah dengan membersihkan sampah yang ada lalu dimasukkan ke dalam kontainer yang disediakan DKP.

“Setelah itu kita ngambil langkah ke dua, kita tutup semua itu, kita ganti caranya yang sporadis saja. Kita sapu, lalu buang ke kontainer yang disiapkan oleh DKP. Jadi sifatnya tidak permanen. Ternyata itupun sama (belum berhasil)” (Hr, 21 Maret 2012).

Masih belum berhasil mengatasi sampah yang ada, tokoh masyarakat berupaya mencari solusi lain mengatasi masalah ini. Muncullah ide untuk melakukan pengolahan sampah. Namun ide ini masih terkendala oleh biaya.

“Pada akhirnya saya punya pemikiran, gimana pak kalo misalkan kita buat semacam pengolahan sampah. Namun pak camat waktu itu bilang, itu biayanya nga kecil pak RW” (Hr, 21 Maret 2012).

Tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai ketua RW 01 Karang Asem Barat berusaha memikirkan cara untuk mewujudkan tempat pengolahan sampah sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sampah di wilayah setempat. Pada akhirnya dicobalah menyampaikan pendapatnya kepada pihak manajemen ITP. “Kita mulai tu, datang ke pihak manajemen. Ternyata manajemen merespon” (Hr, 21 Maret 2012).

Manajemen ITP langsung menyambut baik hal tersebut karena memang memiliki tujuan yang sama. Berikut adalah penjelasan salah seorang staff SDP:

“Kita punya, istilahnya apa ya, tujuan yang sama dengan pak RW Hery. Jadi pertama kita ingin mengatasi sampah karena tidak adanya TPS, jadinya kita buat UPK. dulunya juga dari manajemen juga sih yang mengarahkan untuk membuat pengolahan sampah disitu” (Fj, 28 Maret 2012).

Selain karena memiliki tujuan yang sama dengan tokoh masyarakat setempat, ITP dalam mengembangkan program CSR-nya memang juga berdasarkan kebutuhan masyarakat. Program CSR diharapkan benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat. Sehingga ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya, ITP akan merespon kebutuhan tersebut.

“Dalam perencanaannya kita liat masyarakat butuh nga nih, ketika kita liat masyarakat butuh, kita bikin programnya. Ada juga yang idenya dari

masyarakat, masyarakat merasa butuh, lalu kita fasilitasi. Dimasyarakat banyak sampah, jadi dibutuhkan pengolahan sampah” (Ay, 22 Maret 2012).

Setelah adanya kesepakatan antara ITP dan tokoh masyarakat, pertama sekali, upaya yang dilakukan adalah menentukan lokasi tempat pengolahan sampah. ITP dan tokoh masyarakat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menentukan lokasi yang bisa digunakan. Berdasarkan Keputusan Bupati Bogor No. 591/425/Kpts/Huk/2007 ditetapkan bahwa:

“Menunjuk Lokasi Tanah Seluas \pm 2.500 M2 Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Jalan Alternatif Puspanegara, Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citereup,

ITP juga mendatangkan ahli dalam pengolahan sampah. ITP mendatangkan Prof. Dr. Azwar Yanas untuk membantu mendampingi didirikannya tempat pengolahan sampah ini.

“Pada saat itu ITP merespon dan kemudian mengambil ahli yang waktu itu Prof. Dr. Azwar Yanas. Guru besar di IPB. Nah pada saat sebelum kita mulai, saya banyak dibimbing dan diajarkan sama beliau” (Hr, 21 Maret 2012).

Pada awal berdirinya, program ini juga mengalami masalah. Beberapa warga tidak setuju apabila di daerah mereka didirikan UPK. Warga takut jika didirikan tempat pengolahan sampah, daerah mereka akan bau serta menimbulkan polusi udara dan air.

“Pada saat kita mau buka disana, tantangannya adalah masyarakat menolak keras keberadaan pengolahan sampah disana. Karna masyarakat itu yah karena trauma tadi dengan alasan bermacam-macam kaya bau, polusi udara dan air” (Hr, 21 Maret 2012).

Untuk menyelesaikan masalah ini, masyarakat yang kontra dibawa ke Rumah Perubahan Rhenald Khasali untuk melihat tempat pengolahan sampah yang ada disana. Disana masyarakat diperlihatkan bagaimana sebenarnya pengolahan sampah tersebut. Hal ini sesuai dengan pemaparan majalah Bisnis&CSR ketika melakukan wawancara kepada Kuky Permana selaku Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) ITP.

“ITP telah melakukan pendekatan kepada masyarakat, dengan mengajak mereka untuk melihat langsung pengolahan sampah yang dilakukan Rhenal

Khasali di Pondok Gede, sebelum program berjalan” (Bisnis&CSR, 2008:47).

Kunjungan ke Rumah Perubahan Rhenald Khasali ini menghasilkan respon positif dari masyarakat. Masyarakat yang awalnya kontra mulai menyambut antusias didirikannya tempat pengolahan sampah di daerah mereka. Berikut penjelasan dari tokoh masyarakat mengenai respon positif dari warga.

“Akhirnya masyarakat yang berkunjung disana yang awalnya menolak, baru disana ngomong, ohh nga disini nga bau ya Pak. Akhirnya dikomentarin tuh sama Pak Hidayat, inget banget saya yang dibilang pak Hidayat. Ya disini bau juga, tapi bau duit” (Hr, 21 Maret 2012).

Berdasarkan keterangan salah seorang warga, juga diadakan verifikasi melalui pengumpulan tanda tangan warga, sebagai bentuk persetujuan warga atas didirikannya UPK. berikut adalah pernyataannya:

“Dulu itu sempat ada validasi dan verifikasi. Jadi warga diminta memberikan tanda tangan persetujuan pendirian UPK. Dari kelurahan melakukan verifikasi, dipanggil ketua RWnya, apakah benar warganya nandatangani, pake KTP juga” (Aa, 3 Juli 2012)

Setelah melewati berbagai proses yang panjang akhirnya UPK didirikan. Dimulai dari keinginan ITP dan tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sampai dengan persetujuan dari masyarakat yang kontra terhadap pendirian UPK melalui studi banding ke tempat pengolahan sampah di Rumah Perubahan.

4.1.2 Pelaksanaan UPK

Pelaksanaan UPK menjelaskan mengenai bagaimana gambaran pelaksanaan UPK. Pemaparan pada subbab ini secara umum akan menjelaskan keadaan UPK setelah mengalami penurunan pada pelaksanaannya, yaitu sejak 2010. Namun sebagai pembandingan juga akan dipaparkan keadaan UPK sebelum mengalami penurunan.

Untuk penjelasannya, peneliti akan mengelompokkan Pelaksanaan UPK ini ke dalam 5 bagian. Pengelompokan ini berdasarkan pada prosedur pengolahan sampah yang sesuai dengan SOP. Kelima bagian tersebut adalah Pengambilan

Sampah Rumah Tangga, Produksi *Sorted Municipal Waste* (SMW) dan Kompos, Pengiriman *Sorted Municipal Waste* (SMW) dan Kompos ke ITP, Pemeliharaan Mesin *Crusher*, mesin Pengayakan (*Screen*) dan Kendaraan Operasional, dan Evaluasi dan Pelaporan.

Setiap kelompok pembagian ini akan menjelaskan setiap proses yang terjadi di UPK. Pengambilan Sampah Rumah Tangga akan menjelaskan mengenai bagaimana sampah diambil dari warga hingga akhirnya sampai ke UPK. *Produksi Sorted Municipal Waste* (SMW) dan Kompos akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pengolahan sampah serta orang-orang yang terlibat didalamnya. Pengiriman *Sorted Municipal Waste* (SMW) akan menjelaskan mengenai proses pengiriman produk UPK ke ITP. Pemeliharaan Mesin *Crusher*, mesin Pengayakan (*Screen*) dan Kendaraan Operasional akan menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan pemeliharaan mesin serta kendaraan operasional di UPK. Terakhir, Evaluasi dan Pelaporan akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan UPK. Berikut adalah penjelasannya:

4.1.2.1 Pengambilan Sampah Rumah Tangga

Pengambilan Sampah merupakan salah satu kegiatan pengumpulan sampah dari rumah warga untuk digunakan sebagai bahan dasar pengolahan sampah menjadi energi. Disini akan dijelaskan mengenai cara pengambilan sampah dari warga, lokasi pengambilan sampah, masalah yang timbul serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1. Cara Pengambilan Sampah

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengambilan sampah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya sampah diambil selain menggunakan gerobak juga menggunakan mobil serta motor roda tiga. Berikut adalah keterangan salah seorang staff SDP “Dulu, awal-awal itu kita juga ada motor yang rodanya tiga. Ada dua biji, Trus ada juga yang ngambil pake truck, ada gerobak juga” (Fj, 28 Maret 2012).



Gambar 4.1 Motor Roda Tiga UPK

Sumber: Dokumentasi CSR ITP

Sejak 2010, karena kurang perawatan, truck dan motor roda tiga rusak dan tidak dapat dioperasikan lagi. Pada tahun 2011, ITP kembali memberikan truck kepada UPK. Namun, truck ini tidak lagi digunakan untuk mengambil sampah. Truck hanya digunakan untuk keperluan operasional UPK lainnya seperti pengambilan karung dan pengiriman SMW ke ITP. Pekerja di UPK menyatakan hal berikut: “(saat ini truck digunakan untuk) Nganterin SMW ke pabrik sama ambil karung nih kalo abis” (Dde, 4 April 2012).



Gambar 4.2 Truck UPK dan Gerobak

Sumber: Dokumentasi CSR ITP

Universitas Indonesia

Jadi saat ini, sampah dari warga diambil menggunakan gerobak. Gerobak yang dimaksud seperti yang terdapat dalam foto diatas. “Itu sekarang semuanya gerobak. Gerobak aja kalo sekarang” (Fj, 28 Maret 2012).

2. Sistem Pengambilan Sampah

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengambil sampah, sistem pengambilan sampah menggunakan gerobak adalah pengangkut sampah mengambil sampah dari warga di beberapa wilayah yang berada di sekitar UPK. Sampah ini diangkut menggunakan gerobak yang disediakan di RT atau sumbangan dari ITP. Setelah itu sampah diangkut ke UPK untuk kemudian diolah. Untuk setiap sampah yang diambil, warga harus mengeluarkan iuran (*collecting fee*) bulanan. *Collecting Fee* digunakan untuk membayar gaji pengambil sampah dan biaya operasional UPK. berikut adalah keterangan dari penwas UPK “Iya dikasih, buat operasional sini, kalo nga dikasih mau ngasih gaji pegawai sini dari mana. Iya, buat bayar-bayar kebutuhan disini” (Ddy, 4 April 2012).

Sistem pungutan iuran dari warga bermacam-macam. Di beberapa wilayah, iuran dipungut oleh pengangkut sampah. hasil wawancara dari salah seorang pengasmbil sampah menyatakan “Saya juga, jadi saya ngambil sampah dari warga, awal bulan saya dibayar dulu, nanti akhir bulan saya narikin dari warga” (Ak, 4 April 2012).

Jumlahnya bermacam-macam sesuai dengan kesepakatan warga dengan koordinator wilayahnya. Beberapa wilayah juga ada yang menggabungkan uang pungutan ini bersama uang keamanan. Disalah satu daerah jumlahnya adalah sebagai berikut “Kalo di saya, kontrakan 5.000, kalo rumah sendiri 10.000” (Ant, 4 April 2012).

Sedangkan di wilayah lainnya berjumlah sebagai berikut “Kalo kontrakan 6.000, kalo rumah sendiri 15.000, itu yang 6.000, 3.000nya untuk sampah, 3.000nya lagi untuk keamanan. Kalo yang 15.000, 5.000nya yang untuk keamanan” (Ak, 4 April 2012)

3. Wilayah Pengambilan Sampah

Wilayah pengambilan sampahnya terbagi kedalam beberapa lokasi. Berikut adalah tabel wilayah pengambilan sampah beserta beberapa keterangan.

Tabel 4.1 Lokasi Pengambilan Sampah

NO	Lokasi pengambilan
1	RT 3 RW 1 Karang Asem Barat
2	RT 4, 5 RW 1 Karang Asem Barat
3	RT 1,5,2 sebagian RW 02 Karang Asem Barat
4	RT 3,4,2 sebagian RW 02 Karang Asem Barat
5	Yayasan Indocement
6	Jalan Jagorawi, Pemda, 7 Rumah
7	RT 4 RW 10 Puspanegara, jalan raya jagorawi, jalan baru
8	Jalan Raya Jagorawi
9	RT 01, 02, RW 8 Puspasari
10	RT 01, 02, RW 8 Puspasari
11	RT 1 RW 4 Puspanegara
12	SD Puspanegara
13	Jalur Kantor Kecamatan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampah diambil dari beberapa RW di tiga kelurahan, yaitu Karang Asem, Puspasari dan Puspanegara. Sampah dari ketiga wilayah ini diolah di UPK karena letak wilayah mereka yang berkedekatan dengan UPK. Jadi daerah pengambilan sampah didasarkan pada lokasi yang paling dekat lokasinya dengan UPK. hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh pengawas dan staff SDP berikut: “Dari daerah sekitar sini. Pokonya yang berdekatan sama UPK aja”, (Ddy, 3 april 2012) dan “Berdasarkan wilayah terdekat dari UPK”, (Fj, 28 Maret 2012)

Selain itu penentuan lokasi pengambilan sampahnya juga berdasarkan kesediaan warga untuk memberikan iuran kepada UPK.

“Tergantung warganya juga mba, ada yang mau, ada yang engga. Kalo nga mau ngapain dipaksa. Tergantung bayarnya juga. Kalo bayarnya lancar diambil” (Dde, 4 April 2012)

4. Perluasan wilayah pengambilan sampah

Lokasi pengambilan sampah mengalami perluasan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 sampah diambil dari 6 RW di Puspanegara dan 2 RW di Karang Asem Barat ditambah dengan beberapa Ruko di Citereup. Wilayah ini sudah mengalami perluasan dibandingkan dengan awal berdirinya UPK

“Tapi 2009 itu ada datanya, sampah diambil dari RW 1 dan 2 Karang Asem, RW 4,5,6,8,10,11 Puspanegara, Pabrik Roti, Toko Material, Toko Meubel, sama Ruko Citereup. Sudah ada perluasan dari yang awal. Sebelumnya nga segini” (Fj, 28 Maret 2012).

Perluasan wilayah ini disebabkan karena meningkatnya animo masyarakat terhadap keberadaan UPK.

“Itu yang di Puspanegara, animo masyarakat terhadap pengolahan sampah semakin meluas, artinya semakin hari, setiap bulan, semakin luas masyarakat yang dilayani oleh UPK. Jadi apa yang bisa kita kelola, yang bisa kita olah. Jadi awalnya kita hanya membantu DKP. Dalam hal ini dinas kebersihan dan pertamanan. Untuk mengelola sampah dari masyarakat yang sebelumnya belum terkelola oleh dinas. Namun kenyataannya masyarakat makin banyak yang bergantung dengan kita. Sehingga kapasitas yang harusnya 1 ton jadi 4 ton per hari. Nah jadilah *overload*.” (Ay, 22 Maret 2012).

Selain itu, perluasan wilayah pengambilan sampah dilakukan dengan harapan dapat menambah pemasukan UPK melalui iuran yang diberikan warga ke UPK. Hal ini disampaikan oleh salah seorang staff SDP seperti berikut “Kan untuk pekerjaanya kan semakin banyak, untuk operasional, sampahnya ditambah, ehh malah mesinnya yang nga kuat” (Fj, 28 Maret 2012).

Penetapan lokasi pengambilan sampah memang belum dilakukan oleh pengelola UPK. berikut adalah alasan yang dikemukakan oleh pengelola “Ya nga bisa dong, karna sampah dari penduduk itu tetap harus kita ambil. Penduduknya padat” (Ddy, 3 April 2012).

Semakin luasnya lokasi pengambilan sampah mengakibatkan sampah yang menumpuk di UPK. Sampah yang masuk tidak sesuai dengan kapasitas mesin pengolahan sampah. Jumlah sampahnya jauh melebihi kemampuan mesin dan sumber daya manusia untuk mengolah sampah. Sampah yang tidak terolah terus bertambah setiap harinya.

“Jadi dari 2010 trus kesini, namun penambahan volume sampah tersebut belum didiringi dengan kapasitas produksi yang memadai, baik itu mesin ataupun orang. Nah sehingga, di tahun 2011 terjadi overload.” (Ay, 22 Maret 2012).



Gambar 4.3 Sampah yang menumpuk di lokasi UPK

Sumber: Dokumentasi CSR ITP 2011

Menumpuknya jumlah sampah memberikan dampak yang negatif ke berbagai hal. Yang pertama lokasi pengolahan sampah jadi tertutupi oleh sampah. Akibatnya proses pengolahan menjadi sulit dilakukan. “Itu pas tahun ini, ehh pertengahan 2011. Udah *overload*, jadi mesinnya rusak. Udah nga bisa diolah, mesinnya udah ketutupan sama sampah” (Fj, 28 Maret 2012).

Mengatasi keadaan ini, ITP melakukan evaluasi untuk mencari solusi mengenai permasalahan overload sampah ini. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

“Sampai akhirnya, setelah kita evaluasi bahwa tidak bisa terus menerus seperti itu. UPK ini juga tidak bisa terus menerus sebegitu banyak sampah, itu juga salah. Akhirnya dibenahi. Tapi kan ini masalahnya masyarakat sudah bergantung kepada UPK. Karena sudah dilayani penarikan sampahnya....., Makanya saya berkoordinasi dengan pihak Pemda dalam hal ini pihak kecamatan. Terus juga dengan Dinas Kebersihan. Kita musyawarah di (kantor) kecamatan, kita sepakati bahwa sampah yang akan kita olah adalah sampah yang sesuai dengan kapasitas mesin. ITP akan *upgrade* kapasitasnya, tapi juga tetap masih dibawah input sampah yang dibawa dari masyarakat. Jadi selain itu kita juga akan berkoordinasi dengan dinas. Ada sampah yang diambil dinas, ada sampah yang kita kelola. Jadi kita akan mengolah sampah sesuai dengan kapasitas dan tempat yang ada. Nah kesepakatannya seperti itu” (Ay, 22 Maret 2012).

Setelah rapat koordinasi ini dilaksanakan, dihasilkan beberapa kesepakatan yang akan sama-sama dijalankan. Diantaranya adalah terhitung awal Maret sampah masuk dari masyarakat akan di tampung dalam bak penampungan khusus di UPK dan akan di pilah oleh pekerja UPK untuk diproses lebih lanjut, sampah yang tidak bisa diolah akan di angkut oleh DKP 2 kali per minggu, desain bak penampungan sampah di upayakan memudahkan pemilahan dan pengangkutan sampah sisa oleh DKP, biaya pengangkutan sampah yang tidak terolah akan menjadi tanggungan masyarakat yang di pungut oleh pengelola UPK bekerja sama dengan DKP dengan biaya dikenakan sebagai pelanggan sesuai Perda yang berlaku, CSR ITP akan membantu pengelola untuk pembuatan bak dan perbaikan sarana UPK termasuk pembersihan sisa penumpukan sampah bekerja sama dengan DKP supaya bisa berfungsi sesuai konsep awal, opsi lain usulan DKP yaitu pembagian wilayah kerja pengangkutan sampah dari masyarakat pengelola UPK hanya mengangkut sesuai kapasitas UPK sementara sampah lainnya di angkut DKP dengan wilayah kerja di atur lebih lanjut dan pihak kecamatan selanjutnya akan mengadakan

pertemuan Lurah Puspanegara, dan Karang Asem Barat,serta RW yang warganya membuang sampah di UPK terkait pola kerjasama dengan DKP agar warga siap dengan nilai distribusi yang di minta DKP.

Setelah diadakannya rapat ini, beberapa kegiatan mulai dilakukan. Sampah yang tidak terolah mulai diangkut oleh DPK ke TPA Kramatungga. Hal ini seperti yang dijelaskan pengelola UPK yang menyatakan bahwa sejak Maret 2012 sudah membayar uang ke DKP. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan pengawas UPK berikut: “Ya (sekarang) kita juga yang bayar, 2,5 juta perbulan. Ya pemerintah kan seperti itu” (Ddy, 3 April 2012)

Pada saat penelitian dilaksanakan, pembangunan *Dumping Area* sebagai tempat pemilahan sampah telah mulai dilaksanakan.

“Berdsasarkan keputusan ini hasil rapat koordinasi kita mulai bekerja kan, saya mulai lagi membuat perencanaan biayanya. Anggaran ini sudah disetujui Pak Iwan (*Manajer Safety, Security and CSR Division (SSCD)*), beberapa sudah dikucurkan (*dumping area*). Saya kemudian cek ke pengelola apakah dananya benar-benar dimanfaatkan terealisasi. Jadi ini bentuk *maintanance* kita supaya UPK itu tetap sustain” (Dd, 19 Maret 2012).



Gambar 4.4 *Dumping Area* yang telah selesai di bangun

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Jadi, pengambilan sampah di UPK mengalami perubahan dari yang awalnya diambil menggunakan truck, motor roda tiga dan gerobak, saat ini pengambilan sampah dari lingkungan sekitar hanya menggunakan gerobak. Motor roda tiga tidak dapat digunakan lagi karena fasilitas tersebut rusak. Sedangkan truck yang baru hanya digunakan untuk mengirimkan SMW ke ITP.

Warga mengeluarkan iuran untuk sampah yang diambil. Sistem pemungutannya bermacam-macam, sesuai kesepakatan warga dengan koordinator wilayah masing-masing. Masalah yang terjadi pada proses ini adalah jumlah iuran dari warga masih dibawah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengolah sampah menjadi SMW. Mengangani hal ini, CSR ITP melakukan koordinasi dengan kecamatan setempat dan juga pengelola untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat.

Wilayah pengambilan sampah pun mengalami perluasan. Hal ini diakibatkan oleh animo masyarakat meningkat terhadap keberadaan UPK dan iuran dari warga dibutuhkan untuk keperluan operasional UPK.

Perluasan wilayah pengambilan sampah ini ternyata memberikan akibat negatif kepada UPK. Volume sampah yang dikumpulkan dari lingkungan sekitar tidak sesuai dengan kapasitas mesin pengolahan sampah. Volume sampahnya jauh melebihi kapasitas mesin. Akibatnya terjadi penumpukan sampah di UPK. UPK yang semula berfungsi sebagai tempat pengolahan sampah, beralih fungsi menjadi TPS.

Mengatasi masalah ini, CSR melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak. Hasil rapatnya adalah ITP akan membantu pengelola membersihkan sisa penumpukan sampah dengan bekerjasama dengan DKP. Kedepannya, ITP juga akan membantu memperbaiki sarana serta pembuatan dumping area untuk memudahkan pemisahan sampah yang bisa diolah dengan yang tidak dapat diolah. Sampah yang tidak dapat diolah akan diangkut oleh DKP.

Setelah rapat ini selesai dilaksanakan, ITP segera mengucurkan dana untuk pembangunan Dumping Area. Terhitung sejak akhir Maret 2012, dumping area telah selesai dibangun.

4.1.2.2 Produksi SMW dan Kompos

Setelah sampah dikumpulkan dari lingkungan sekitar, kegiatan selanjutnya yang dilakukan di UPK adalah pengolahan sampah. Dalam pengolahan sampah terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan. Kegiatan tersebut didukung oleh mesin pengolahan sampah dan tenaga kerja yang terlibat didalamnya.

1. Mesin UPK beserta masalah dan upaya perbaikan yang dilakukan

Pada awalnya, mesin pengolahan sampah di UPK menggunakan mesin pengolahan sampah dari MAP.

“Kalo dulu sih awal-awal mesinnya kita kerja sama sama MAP. Dia bergerak di bidang pembuatan mesin pengolahan sampah. Jadi pertamanya kita pake mesin yang dari MAP ini, dia diluar ITP. Cuma dia dari presentasinya berhasil buat mesin pengolahan sampah” (Fj, 28 Maret 2012).

Mesin pengolahan sampah dari MAP ini terdiri dari mesin *crusher* dan mesin *screen* kecil. Mesin *crusher* digunakan untuk memotong sampah menjadi media yang lebih kecil. Sedangkan mesin *screen* digunakan untuk menyaring sampah yang sudah di *crusher*.

Setelah beberapa lama beroperasi, mesin ini ternyata memiliki beberapa kekurangan. CSR ITP berusaha memodifikasinya dengan berkoordinasi dengan *Technical Service Division* (TSD). Untuk mesin *screen* dimodifikasi dari yang sebelumnya manual menjadi digerakkan oleh listrik. Sedangkan untuk mesin *crusher* dari yang sebelumnya menggunakan solar dimodifikasi dengan menggunakan tenaga listrik.

“Sama TSD di sini, di ITP....., Jadi awalnya itu mesinnya kan pake solar, belum pake listrik. Trus jebol, dimodifikasi sama ITP, jadi sekarang ya pake listrik sampe sekarang” (Fj, 28 Maret 2012).

Setelah mengalami beberapa kali modifikasi, mesin akhirnya rusak total pada pertengahan 2011. Rusaknya mesin mengakibatkan proses pengolahan sampah tidak dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan staff SDP berikut: “Itu pas tahun ini, ehh pertengahan 2011. Udah

overload, jadi mesinnya rusak. Udah nga bisa diolah, mesinnya udah ketutupan sama sampah” (Fj, 28 Maret 2012).



Gambar 4.5 Mesin *Crusher* dan *Screen* yang Rusak dan Tertutupi Sampah

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Karena mesin pengolahan sampahnya rusak, kegiatan yang saat ini dilakukan di UPK hanyalah pemilahan dan pengemasan sampah ke dalam karung.



Gambar 4.6 Pemilahan dan Pengemasan Sampah tanpa Proses Pengolahan

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Universitas Indonesia

Mengatasi masalah ini, CSR ITP melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi masalah yang ada di UPK. Dari hasil evaluasi ini, CSR ITP berencana melakukan *upgrading* mesin pengolahan sampah. CSR ITP telah merencanakan untuk membuat mesin pengolahan sampah yang lebih kompleks. Diharapkan *upgrading* mesin ini akan mampu menghasilkan tidak hanya SMW dan kompos padat, namun juga kompos cair. Berikut salah satu penjelasan staff SDP:

“Ditambah lagi ITP akan mengupgrade dan menambah fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Seperti mesin-mesin. Ini kan generasi pertama, jadi kita ingin *mengupgrade* seperti generasi kedua kita yang lebih kompleks mesinnya sehingga bisa menghasilkan kompos padat dan cair. Jadi bisa lebih beraneka ragam. ITP membantu memfasilitasi mesin dan sarana prasarana yang ada disana” (22 Maret 2012).

Mesin generasi kedua ini dirancang dalam bentuk yang lebih kompleks. Mesinnya tidak hanya terdiri dari mesin *crusher* dan mesin *screen* tetapi ditambah dengan *conveyor* dan mesin kompos. Alurnya adalah sampah dipilah di *waste separator*, kemudian sampah masuk ke *conveyor*. Dari *conveyor* sampah dicacah di mesin *crusher* dan kemudian disaring di mesin *screen*. Dari sini akan dihasilkan SMW dan kompos. Komposnya akan di fermentasikan ke fermentasi box dan SMW dikemas dalam karung untuk kemudian dikirim ke ITP.

“Kita rencanakan ada perbaikan, kita investasikan dana yang cukup besar juga untuk perbaikan....., Jadi artinya kita perbarui, pertama ada bak penampung, jadi belajar dari pengalaman dulu tidak semua sampah bisa diolah, kaya kursi, karpet, tiker dan sebagainya, ini nanti diambil oleh DKP (Dinas Kebersihan Pemda). Jadi kita rencanakan nanti juga ada *waste separator*, kalo yang botol-botol dipisah, plastik-plastik dipilahin, besi-besi dipilahin. Nah setelah itu nanti akan masuk ke *conveyor*, di *crusher* masuk ke *screen* dan kemudian masuk ke bak-bak fermentasi (fermentasi box). Jadi bahan komposnya nanti di fermentasi dulu. Setelah di fermentasi kita akan beli mesin kompos seperti yang disana juga.....,

yang jadi kompos halus itu. Biomassnya nanti dikarungin dan di bawa ke ITP” (Dd, 19 Maret 2012).



Gambar 4.7 Tempat pemisahan sampah di Dumping Area

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Untuk upgrading mesin ini, CSR ITP berkoordinasi dengan TSD dan GECD (*General Engineering Civil Division*). CSR ITP bekerjasama dengan GECD dalam perencanaan *lay out* mesin pengolahan sampah. Sedangkan perbaikan mesin bekerjasama dengan TSD (*Technical Service Division*).

“Iya, CSR, bagian perbaikan mesin GECD, iya sama TSD. Jadi khusus perbaikan mesin di ITP. Karna mesin itu hasil modifikasi kita. Jadi perbaikan ke mereka. Kalo penrencanaan mesin ke GECD. Itu terakhir tanggal 5 Maret nih kita rapat. GECD, TSD, CSR” (Fj, 28 Maret 2012).

2. Tenaga Kerja

Selanjutnya, selain mesin, komponen penting lainnya dalam pengolahan UPK adalah tenaga kerja. Di UPK tenaga kerjanya terdiri dari ketua pengelola, koordinator lapangan, tenaga administrasi, sopir, keamanan dan pekerja (pemilah sampah, operator mesin *crusher*, operator mesin *screen*, pengepak sampah dan juga tukang jahit karung)

“Trus pegawainya ada yang jahit, ada yang di mesin *crusher*, *screen*, ada yang pengepakan sama security sama driver. Pak RW penanggung jawab

semunya, saya koordinator lapangan, trus ya pekerja yang disini.” (Ddy, 3 April 2012).

Setelah mesin rusak total, tidak semua kegiatan dilakukan seperti sebelumnya. Saat ini salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengepakan sampah yang sudah diambil dari warga. Hal ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi UPK Puspanegara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2012. Rapat ini dihadiri oleh Ketua Pengelola, Koordinator Lapangan, Tim CSR ITP dan perwakilan dari masyarakat. Hasil rapat ini menyatakan bahwa pekerja UPK yang ada di konsentrasikan untuk melakukan pengemasan sampah kedalam karung.

Selain pengemasan sampah, kegiatan lain yang dilakukan adalah menjahit karung. Karung yang digunakan untuk pengepakan sampah adalah karung semen yang tidak dipakai di pabrik.



Gambar 4.8 Kegiatan Jahit Karung

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Dari segi jumlah, dari tahun 2007 sampai 2012 jumlah tenaga kerjanya mengalami perubahan. Berikut adalah penuturan staff SDP mengenai jumlah pekerja di UPK, “Awal sih itu 2007 9 orang, 2008 16 orang, 2009 12 orang, 2010 12 orang, 2011, 13 orang, 2012 10 orang” (Fj, 28 Maret 2012).

Universitas Indonesia

Sejak 2008, jumlah pekerjanya terus berkurang. Tenaga admisnitrasi sudah tidak ada sejak tahun 2009. Menurut salah saeorang staff CSR ITP, kondisi di UPK memang sedikit khas.

“Dulu sempat ada, sampai 2009. Itu masih ada. Setelah itu udah nga ada lagi. Karna disana juga kan kita sampai ganti berkali-kali. Karna memang kan orangnya disana juga khas ya. Karakternya khas. Iya khas, jadi yang disana haru benar-benar kuat. Itu juga udah ganti berapa kali tuh” (Fj, 28 Maret 2012).

Jumlah pekerja program yang terus menurun memberikan dampak negatif. Karena kurangnya jumlah pekerja, beberapa pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang sama. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang pengangkut sampah dibawah ini: “ya itu (selain mengangkut sampah) kita juga harus ngarungin sampah disini”, (Ant, 27 April 2012)

Lingkungan UPK memang kurang kondusif. Pengelola dan pengawas lapangan tidak fokus dalam menangani UPK. Keduanya memiliki banyak kesibukan lainnya diluar memimpin dan mengawasi UPK. Khususnya pengelola jarang mengontrol kegiatan di UPK. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang staff SDP berikut, “Pengelolanya kan terlalu banyak kesibukan, jadi jarang mengontrol kesana. Engga fokus” (Fj, 24 April 2012).

Berdasarkan Identifikasi Masalah UPK Puspanegara yang dilakukan oleh tim CSR ITP, selain kurang fokus dan jarang ke lokasi UPK, pengelola juga tidak disiplin mengelola dan tidak mengikuti birokrasi CSR. Hal ini sesuai dengan pemaparan salah seorang staff SDP berikut:

“Ini pengelola itu dia mainnya langsung, tidak mengikuti prosedur yang ada. Mainnya langsung. Kemaren-kemaren itu dia langsung ke manager. Seharunya kan lewatin saya sama pak ayi dulu. Udah pernah di kasih tau prosedurnya. Tapi kita terus coba arahkan, sudah mulai ada perubahan. Lewat saya dulu sama pak ayi. Karena dulunya itu mereka seperti dianakemaskan, bisa langsung ke atas. Kita nga tau apa-apa tiba-tiba dari atas langsung dapat kabar. Sekarang sudah mulai tidak” (Fj, 24 April 2012).

Kelalaian dari pengelola dan pengawas ini memberikan dampak buruk kepada UPK. Akibatnya produktifitas UPK jauh dibawah target, pekerja tidak disiplin dan lokasi UPK penuh dan berantakan, berikut adalah penuturan salah seorang staff SDP, “.....pengelolanya itu nga bisa stay terus. Karena dia ada kesibukan yang lain jadi pekerjaanya tidak terawasi. Pekerja jadinya bekerja semaunya” (Fj, 28 Maret 2012)

Mengatasi masalah ini, tim CSR melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya. Beberapa opsi pernah dijalankan dengan tujuan pengelolaan yang terbaik untuk UPK. Opsi pertama adalah mengganti pengelola. Hal ini ternyata tidak menyelesaikan masalah karena pola di UPK memang agak rumit. Calon pengganti pengelola yang baru mendapat ancaman dari pengelola yang lama. Melihat hal ini tim CSR ITP akhirnya memilih opsi lain, yaitu dengan menggeser peran pengelola ke peran yang lebih besar. Untuk pengelolaan UPK sendiri di berikan kepada seseorang diluar UPK dan dibayar khusus oleh Tim CSR ITP. Usaha ini ternyata juga masih belum berhasil. Pengelola yang baru keluar karena tidak betah. Akhirnya, untuk saat ini, tim CSR menaikkan posisi pengawas menjadi pengelola dan menjadikan driver UPK yang selama ini sudah memperlihatkan loyalitasnya kepada UPK untuk menjadi pengawas. Berikut adalah penjelasan mengenai upaya yang pernah dilakukan oleh CSR ITP untuk mengatasi masalah pengelolaan UPK

“Cuma ya nga tau pengelolanya ini. Kita juga sudah pernah analisa gimana kalo pengelolanya diganti saja, tapi pihak manajemen bilang, pengelola yang sekarang dikasih kesempatan saja dulu”, (Fj, 4 April 2012)

Hal yang sama juga disampaikan Staff SDP lainnya:

“Dulu itu karna ada pernah laporan dari masyarakat pak RW ini tidak serius menangani pengolahan sampah ini, sehingga sampah tidak terkelola baik. Mereka menawarkan seorang karang taruna untuk mengganti pak RW. Dan itu dalam forum rapat besar kita terima. Tapi sebelum terlaksana, pak RW ini kan dibawahnya ada pak RT dan yang lain-lain kan, kelompok-kelompok yang pola kesehariannya agak preman lah. Sehingga yang orang karang taruna ini diancam, sampai ada pemukulan. Melihat ini kita putuskan untuk tidak mengganti. Kita putuskan juga untuk menggeser

peran. Kita usahakan untuk menggeser perannya menjadi lebih besar, ke peran yang lebih strategis. Jadi misalnya pengelolaan UPK menjadi tanggung jawab pak RT misalnya. Tapi dulu itu kita tidak ganti pak RT karena memang mereka satu paket kan. Dulu kita ganti dengan orang diluar mereka, Yanto namanya. Kita menempatkan seorang tenaga yang ditempatkan disana dan kita bayar. Tapi yantonya keluar, karna nga betah. Memang agak rumit nih, polanya. Akhirnya rencana yang kita buat sekarang itu pak RWnya kita naikkan lagi. Karna memang pak RW itu dibalik berbagai kelemahannya dia mampu melobi, meyakinkan orang lain, dan juga kemampuan dalam tanda kutip kalo tidak di manage oleh ITP akan merepotkan ITP. Jadi sekarang itu pak RT jadi pengelola, dan Taufik Ismail, yang dulu driver jadi pengawasnya. Kita coba dulu berjalan seperti ini sembari perbaikan mesin yang sekarang sedang saya lakukan.....” (Dd, 27 April 2012).

Tim CSR ITP juga melakukan upaya agar pengelola dan pengawas mengikuti prosedur yang telah di tetapkan. Agar pengelola dan pengawas mengikuti prosesur atau birokrasi yang telah di tetapkan CSR, tim CSR berupaya untuk menjelaskan kembali SOP serta prosedur-prosedur yang seharusnya dilakukan oleh pengelola dan pengawas.

“Untuk yang tidak sesuai prosedur sudah coba kita atasi. Kita arahkan supaya dia sesuai prosedur. Kita kasih tau juga SOPnya, udah kita jelasin. Kalo ada apa-apa di UPK, nah udah kita jelasin semuanya. Kalo pengelola ya lewat rapat kita jelasin juga” (Fj, 24 April 2012)

4.1.2.3 Pengiriman SMW dan Kompos

Hasil pengolahan sampah berupa SMW digunakan ITP sebagai salah satu bahan bakar alternatif dalam proses pembuatan semen. Pengiriman SMW ke ITP ini memiliki prosedur yang tidak hanya melibatkan departemen CSR tetapi juga departemen dan divisi lainnya. Divisi dan Departemen yang terlibat tersebut terdiri dari *Divisi Supplay*, *Divisi Accounting*, *Plant* dan *Divisi Alternatif Fuel and Raw Material (AFR)*.

Pertama sekali, CSR ITP akan berhubungan dengan Divisi *Supply*. Divisi *Supply* merupakan divisi yang menyuplai kebutuhan semua divisi dan departemen di ITP.

“Jadi dia divisi, yang mensuplai kebutuhan semua divisi. Kalo ada divisi yang membutuhkan sesuatu di minta ke divisi *supply*. Bagian pengadaan barang kan *supply* divisi itu” (Fj, 4 April 2012).

Prosedurnya adalah CSR ITP meminta *Purchase Request* (PR) kepada Divisi *Supply*. “PR ini ada formnya, jadi lewat PR ini kita bilang kita butuh apa ke *Supply* divisi” (Fj, 12 April 2012)

Setelah CSR ITP menyampaikan PR ke Divisi *Supply*, maka Divisi *Supply* akan mengeluarkan *Purchase Order* (PO) ke *Supplier*. Dalam hal ini *supplier* adalah UPK. “Iyaa, trus orang *supply* nyampein PO ke UPK. Setelah UPK terima POnya, dia harus menuhin” (Fj, 4 April 2012).

PO yang dikeluarkan oleh Divisi *Supply* disesuaikan dengan PR yang diminta oleh CSR ITP. CSR ITP menargetkan setiap bulannya UPK harus mengirimkan 50 ton SMW ke ITP. Berikut adalah keterangannya “Nah setelah itu *supply* ntar nerbitin PO. Nah biasanya untuk SMW itu 50 ton satu bulan, Itu dikeluarin oleh *supply* divisi atas permintaan kita. Kita sebulan minta 50. Jadi satu bulan itu UPK harus menyediakan sekitar 47,35” (Fj, 4 April 2012).

Setelah UPK menerima PO dari divisi *Supply*, UPK akan mengirimkan SMW ke ITP. Berdasarkan wawancara dengan dengan salah seorang pekerja UPK, prosedur pengiriman SMW dari UPK ke ITP adalah sebagai berikut:

“Ohh kalo itu ya di anter pake truck, ntr kita bawa surat, suratnya dikasih pak Dedy (pengawas lapangan UPK) di stempel di pos 3, trus di timbang di plant 6, bukan yang di deket pom bensin, nah disana juga di stempel, lalu kita taruh di gudang, pas balik kita lewat timbangan lagi, ntar suratnya di bawa ke UPK deh, untuk nagih uangnya ntar” (Zn, 4 April 2012)

Setelah UPK memenuhi PO dari Departemen *Supply*, maka UPK harus memenuhi semua kebutuhan administrasi yang dibutuhkan. Setelah semua kebutuhan administrasi dipenuhi maka UPK akan menerima uang hasil penjualan SMW dari Divisi *Accounting* 3 bulan setelah proses administrasi selesai. Berikut

adalah penjelasannya, “Barangnya masuk nih, administrasinya dipenuhi. Setelah itu ke *accounting*. Kalo nga ada masalah 3 bulan keluarnya” (Fj, 4 Maret 2012).

Secara umum prosedurnya adalah departemen atau divisi di ITP mengirimkan PR ke Departemen *Supplay*. PR berisi tentang kebutuhan yang diperlukan oleh setiap departemen ataupun divisi. Setelah *Supply* Divisi menerima PR ini, maka kemudian Departemen *Supply* akan mengumumkan PO kepada para *supplier*. *Supply* barang nantinya akan diberikan kepada kepada *supplier* yang mampu dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh departemen *supply*.

“Permintaan dari orang dalam ke *supply* divisi itu PR, ntr *supply* ngeluarin PO ke *supplier*. Kalo misalnya sanggup menuhin ayo masukin penawaran. Nanti *supply* divisi yang nentuin PO ini jatuh ke siapa. Jadi kan dia ada kriteria yang harus dipenuhi” (Fj 4 Maret 2012).

Setelah *suplier* menyuplay barang yang dibutuhkan, maka *supplier* harus terlebih dahulu menyelesaikan prosedur administrasi. Setelah semua prosedur administrasi selesai maka *suplier* akan menerima uang dari divisi *Accounting* 3 bulan setelahnya.

“Iya, jadi kalo ada kebutuhan, kita PR dulu ke *supply*, ntar *supply* PO ke luar buat *suplier*. Jadi ntr di yang nunjuk tender siapa yang menang. Setelah itu, barangnya di *supplay*, trus diselesaikan administasinya. Misalnya tanggal ini dimasukin, trus tanggal selanjutnya. Nah kalau udah ntr baru urusannya ke *accounting*. *Accounting* baru bayar 3 bulan selanjutnya” (Fj, 4 Maret 2012).

Untuk SMW, PR yang diminta oleh CSR ITP akan digunakan di plant. Plant menggunakan SMW sebagai bahan bakar alternatif. Sebelum CSR ITP meminta divisi *supplay* melakukan order SMW ke UPK, sudah ada koordinasi sebelumnya antara Plant, CSR dengan AFR. CSR dan AFR memiliki tanggung jawab masing-masing dalam pengiriman SMW ke plant. Tanggung jawab tersebut sesuai dengan penjelasan berikut ini.

“Ya engga, kan yang make plant. Kalo kita (CSR) sebagai untuk mengawasi aja sesuai nga spesifikasinya dengan yang diinginkan plan,Jadi kan usernya itu plant. Udah ada koordinasi dulu sebelumnya. Kalo yang di plant itu yang tanggung jawab AFR. Dia yang bertanggung jawab untuk pembakarannya. Kalo ada masalah baru kasih tau ke kita. Misalnya “nih

SMWnya basah nih”. Jadi basahnya itu maksimal 30%. Kalo lebih dari itu nga bisa, malah menghambat proses pembakaran. Nah kita nanti koordinasi lagi ke UPK, gimana supaya nga lebih dari 30%. Yang konsumsi tetap plant. Kalo ke supplaynya tetap kita. Kita yang buatin Ponya.” (Fj, 4 April 2012).

Jadi ketika SMW yang telah disupplay UPK bermasalah, maka alurnya Plant akan mnyampaikan kepada AFR. AFR nantinya akan menyampaikan kepada CSR.

“Mereka ngadunya ke AFR, AFR juga akhirnya nyampein ke kita. Misalnya ini sampahnya masih basah, ininya begini. Kalo dulu kita langsung ngatasin plant 2011 kalo nga salah, disitu ada tanda tangan manajer ya, bapak Iwan Sabar. Jadi kita tanggung jawab hanya sebatas pengiriman SMW saja. AFR yang berkoordinasi di Plant. Kita disitu harus menjaga kualitas SMW yang dikirim. Supaya sesuai dengan yang diminta plan” (Fj, 28 Maret 2012).

Jadi alur pengiriman SMW melibatkan UPK sebagai produsen SMW dan Plant sebagai pengguna SMW. Keduanya dihubungkan lewat *Supplay* Divisi yang berfungsi menyuplai semua kebutuhan Divisi di ITP. Penggunaan SMW di Plant sebagai bahan bakar alternatif melibatkan divisi AFR yang bertanggung jawab untuk penggunaan *Alternatif Fuel* di Plant. Selain itu Divisi *Accounting* juga terlibat untuk pembayaran tagihan SMW yang sudah di *supplay* ke Plant. Semua kegiatan ini dikoordinasikan oleh CSR ITP. Dari UPK sendiri, SMW dibawa oleh driver ke ITP menggunakan truk. Driver membawa surat jalan yang telah dibuat sebelumnya oleh pengawas UPK. Setelah melewati pemeriksaan pertama di Pos 3, truk kemudian ditimbang di Plant 6. Setelah ditimbang, SMW akan diturunkan di gudang penyimpanan khusus SMW. Setelah SMW diturunkan, truk kosong kembali ditimbang. Selisih antara keduanya dianggap berat SMW yang nanti akan di bayar oleh ITP ke UPK.

4.1.2.4 Pemeliharaan Mesin dan Kendaraan Operasional

Pemeliharaan mesin *Crusher* dan *Screen* dilakukan oleh pekerja UPK sesuai dengan kebutuhan. Salah seorang pekerja menyatakan bahwa mesin di bersihkan agar mesin dapat beroperasi dengan lancar. Berikut adalah

pernyataannya: “Ohh ya kita bersihin kalo jalannya pelan. Kan kalo sampahnya dimasukin banyak, sering nyangkut, jadi harus dibersihhn” (Zn, 27 April 2012).

Mesin dibersihkan setiap hari dan diberi grease sebanyak 2-3 kali seminggu.

“Kalo mesinnya jalan sih hampir tiap hari kita bersihin, trus juga dikasih gemuk mesinnya, 2 sampai 3 kali seminggu lah, biar puterannya enak. Tapi ya kadang gitu, karna kebanyakan (sampah) jadinya nga jalan” (Zn, 27 April 2012).

Tidak berbeda dengan mesin crusher, mesin screen juga dibersihkan setiap hari. Hal ini sesuai dengan penjelasan pekerja UPK berikut: “Kalo mesin screen udah lama rusak, dulu sih dibersihin aja sampah yang nyangkut, kan nga bisa turun komposnya kalo sampahnya nyangkut” (Zn, 27 April 2012).

Untuk kendaraan operasional, salah seorang staff SDP menyatakan bahwa pemeliharaan kendaraan operasional merupakan tanggung jawab pengelola. Namun terkadang, dalam beberapa hal, CSR ITP tetap harus membantu mengelola kendaraan operasional karena kurangnya kepedulian pengelola dalam memelihara kendaraan operasional.

“Dulu, awal-awal itu kita juga ada motor yang rodanya tiga. Ada dua biji, tapi rusak juga. Trus ada juga yang ngambil pake truck. Waktu lagi banyak-banyaknya tuh. Sampe ya rusaknya itu sendiri. Satu sisi karna pemeliharaannya kurang. Sisi yang lain sampah semakin banyak. Nambah tahunnya sampahnya makin banyak. Penduduknya kan semakin banyak juga. Sebenarnya kita ada disini pemeliharaan, Cuma karna ini tanggung jawab mereka ya kita lepas. Namun disaat-saat mendesak ya kita turun tangan juga. Kita udah perbaikan bak nya (truck). Akhirnya kan tidak dirawat lagi jadi rusak. Kurang memang mereka untuk perawatan. Motor pun ya akhirnya rusak. 2010 lah ya kerusakannya. 2011 kita ganti yang baru” (Fj, 28 Mei 2012).

4.1.2.5 Pelaporan dan Evaluasi

UPK melakukan evaluasi yang diadakan dalam bentuk laporan dari pengelola UPK dan rapat koordinasi. Laporan dan rapat koordinasi dijadwalkan untuk dilaksanakan setiap bulan.

Dalam pelaksanaannya, rapat koordinasi dan pelaporan belum dilaksanakan rutin setiap bulan. Rapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

“Itu kita adain waktu rapat koordinasi. Kita jadwalkan sebulan sekali lah. Ya itu kalo melihat waktu. Menyesuaikan. Ketua pengeloa, trus dari tim sini, saya, pak Ayi. Terakhir seperti itu, kalo laporan, sejak nga ada lagi tenaga administrasi udah nga kekontrol” (Fj, 28 Mei 2012)

Selain rapat koordinasi, juga diadakan *Annual Meeting* yang dilaksanakan setiap tahunnya. *Annual Meeting* diadakan untuk mengevaluasi seluruh program yang telah dijalankan oleh CSR ITP dengan seluruh unit operasi.

“Setiap tahun kita kan ada *meeting*. Dengan seluruh unit operasi. *Annual Meeting* untuk mengevaluasi semua program yang dijalankan. Di kita juga ada kegiatan yang dijalankan. Intinya selalu mengevaluasi perbulan. Ada laporan ke departemen. Terus ke manager, perkembangannya gimana, apa yang perlu dievaluasi” (Ay, 24 April 2012).

Jadi evaluasi dilaksanakan dalam bentuk laporan dan rapat koordinasi serta *annual meeting* yang dilaksanakan setiap tahunnya. Pelaksanaan rapat koordinasi dijadwalkan untuk dilaksanakan setiap bulan. Namun dalam pelaksanaannya rapat koordinasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Ketika melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, Tim SDP menggunakan metode SWOT.

4.1.2.6 Manfaat yang Diperoleh Masyarakat dari Pelaksanaan UPK

Pelaksanaan program UPK memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar khususnya masyarakat yang sampahnya diolah di UPK. Salah seorang warga menuturkan bahwa dengan adanya UPK, lingkungan perumahan warga menjadi lebih bersih dan sehat, berikut adalah penuturannya:

“Dengan adanya pengolahan sampah ini ya manfaat untuk masyarakat memang sangat besar. Yang tadinya masyarakat buang sampah sembarangan karena bingung mau buang sampah dimana. Dengan adanya pengolahan

sampah yang merupakan bantuan dari ITP ini, yang dikelola oleh pak RW Hery ya, jadi masyarakat sekarang merasa terbantu, jadi tidak membuang sampah sembarangan. Yang tadinya dibuang sembarangan dibelakang rumah, kumuh, jadi menimbulkan bau karna numpuk-numpuk, bingung mau buang sampah dimana, menjadi terbantu, dirasakanlah manfaatnya sama warga disini. Khususnya sama warga RT 01 nih. Yang kedua juga karna kita udah buang sampahnya kesana (UPK) jadi ngurangin bibit penyakit. Yang tadinya sampahnya bisa menimbulkan penyakit jadi berkurang, bau busuknya nga ada lagi” (Nn, 3 Juli 2012).

Hal serupa juga disampaikan oleh warga lainnya. Menurutnya keberadaan UPK sangat membantu warga mengatasi masalah sampah rumah tangga, berikut adalah penuturannya: “Kalo menurut saya sangat membantu mba, selama ini kan dibuang ke pasar atau ke kali. Kalo ada ini (UPK) jadi kan ada yang ngelola” (Aa, 3 Juli 2012)

Masyarakat tidak merasakan adanya masalah dengan biaya pembayaran yang selama ini dibebankan oleh UPK ke warga. Berikut adalah penjelasannya:

“Kami dimintanya dari pihak UPK cuma 300.000 ribu perbulan. Kalo menurut kami sih itu sangat murah. Berarti satu hari itu cuma 10.000 dibagi seluruh warga. Satu harinya tidak sampai 500 rupiah per orang” (Aa, 3 Juli 2012)

Berdasarkan hasil wawancara, harapan dari warga terhadap UPK adalah mesin yang tidak lagi rusak dan peningkatan kapasitas mesin UPK. Hal ini sesuai dengan penjelasan berikut:

“Jadi kita lihat sih kendalanya itu mesinnya kan sering rusak. Kita sendiri juga bingung nih. Disini kan ada tim yang narikin sampahnya, ada satu orang, yaitu bapak amun, pas udah ngambil (sampah) dari sini, dibawa kesana (UPK) ternyata mesinnya rusak. Akhirnya kan dari sininya di stop dulu, sehari dua hari. Tapi walaupun sehari juga kan sampah masyarakatnya dikumpulin juga banyak. Jadi harapan kita sih, untuk indocementnya mesinnya tolong diperhatikan lah. Misalnya pake aja mesinnya yang otomatis. Yang kapasitasnya biasanya berapa kubik, ditambah lagi lah. Kan biasanya disana saya lihat sampah ini masih numpuk. Bagusnya kan sehari

masuk dari warga langsung habis (diolah) kan enak nga menimbulkan bau juga, gitu mba” (Nn, 3 Juli 2012).

4.1.2.7 Kegiatan Lain yang Dilaksanakan di UPK

Selain kegiatan inti pengolahan sampah menjadi energi, kegiatan lain yang dilakukan di UPK adalah pendampingan, penyuluhan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Pada awal berdirinya program kegiatan pertama yang dilakukan adalah studi banding di Rumah Perubahan Rhenald Khasali. Studi banding ini dilakukan untuk merubah pola pikir masyarakat mengenai pengolahan sampah. “Pernah dapat pelatihan di Rumah Perubahan Renald Khasali, untuk merubah pola pikir mereka” (Fj, 24 April 2012).

Selain itu juga diberikan pelatihan SOP kepada seluruh pekerja di UPK pada awal pelaksanaan program. Kegiatan ini ditujukan agar seluruh pekerja mengetahui dan paham mengenai tanggung jawab masing-masing selama bekerja di UPK. “Ada juga pelatihan tentang SOP. Jadi mereka udah tau SOPnya apa” (Fj, 24 April 2012).

Pelatihan ini juga bertujuan untuk melatih pekerja mengoperasikan berbagai mesin yang digunakan di UPK. “Misalnya hal-hal teknis, kita ajarin. Mulai dari pembuatanya kita beli mesin, dan training agar mereka bisa mengerti cara mengoperasikan mesin” (Ay, 24 April 2012).

Masalah kesehatan dan keselamatan untuk pekerja juga diperhatikan. Program ini diwujudkan melalui program *Join Safety Infection*. Program ini merupakan program yang dibentuk CSR bersama tiga departemen lainnya. Departemen tersebut adalah *Safety, Healthy dan Security*. Sasaran pelaksanaan program ini adalah seluruh program CSR yang mengandung unsur kegiatan kerja. Sesuai dengan namanya, pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan melakukan infeksi. Kegiatannya terdiri dari kunjungan tim ke lokasi program, dan kemudian menilai kesehatan dan keselamatan kerja yang telah dipraktekkan di lapangan. Dari hasil infeksi ini kemudian diberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu ditingkatkan.

“UPK ini kan termasuk salah satu program CSR nih. Kita ITP, itu memang ada program bernama *Join Safety Infection*...., Itu adalah kita bergabung dari tim *safety, healthy, security*, sama CSR yang bertanggung jawab dalam program tersebut. Apa yang dilihat, itu tadi, faktor safetynya, kesehatannya dan faktor keamanannya. Ini ditujukan dengan semua program CSR, salah satunya UPK, yang berhubungan dengan adanya kegiatan kerja. Kalo misalnya beasiswa itu tidak. Pokoknya yang ada proses kegiatan manusia didalamnya. Nah itu perlu infeksi dan penyuluhan. Infeksi dulu, setelah di infeksi, misalnya, oh ini kurang kesadaran, bentuknya tim datang ke lokasi, melihat apa yang kurang disitu. Dari segi keamanannya, kesehatannya. Dari hasil infeksi itu ada rekomendasi, misalnya adanya kurang kesadaran pekerja mengenai kesehatannya. Dari situ diadakanlah penyuluhan bahwa misalnya setelah bekerja harus cuci tangan, mandi tidak boleh makan karena itu kan kotor. Kalo dari safety misalnya pengoperasian mesin, pekerja harus menggunakan APD, alat pelindung diri, ada *safety shoes*, ada earpla, ada masker” (Ay, 24 April 2012).

Program ini dicanangkan untuk dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Namun pada pelaksanaannya kegiatan diadakan menyesuaikan dengan keadaan. “Kita pengennya rutin, namun kita menyesuaikan juga waktunya” (Fj, 24 April 2012).

Selain kegiatan ini, kegiatan yang pernah dilakukan di UPK adalah pemberian Alat Pelindung Diri (APD) dan pemberian susu gratis kepada pekerja UPK. Alat pelindung diri yang diberikan kepada pekerja UPK berupa sepatu, helm, pakaian, sarung tangan, dan masker. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pekerja berikut: “Dikasih Sepatu, masker, baju, earpla” (Dde, 17 April 2012)

Pemberian APD serta susu gratis dilaksanakan belum secara rutin. Terbukti dari penjelasan pekerja UPK sebagai berikut:

“Kadang-kadang dikasih susu, tapi kadang-kadang juga tidak, APD) Kadang dikasih, kadang engga, Kan udah abis dipake, ancur, lama, kalo sepatu udah lama, bawahnya udah jebol lagi” (Zn, 27 April 2012),

Jadi dalam pengolahan sampah ini dijelaskan mengenai dinamika kegiatan mesin pengolahan sampah serta jumlah tenaga kerja yang terus menurun di UPK

sejak 2008. Untuk mesin pengolahan sampah, pada awalnya bekerja sama dengan pihak lain diluar ITP. Namun dalam perkembangannya, mesin ini kemudian dimodifikasi oleh divisi TSD dan GECD ITP. Masalah timbul ketika pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik. Mesin akhirnya rusak total dan kegiatan pengolahan sampah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan yang dilakukan sekarang hanyalah pengemasan langsung sampah yang sudah diambil dari warga ke dalam karung. Mengatasi hal ini CSR ITP melakukan evaluasi dan berusaha melakukan upgrating mesin pengolahan sampah menjadi mesin yang lebih kompleks. Tenaga kerja UPK juga mengalami penurunan secara kuantitas. Pembagian tugas setiap pekerja yang dulunya disesuaikan dengan proses pengolahan sampah, untuk saat ini lebih di fokuskan kepada pengemasan sampah ke dalam karung. Pengelola UPK juga tidak bisa terus menerus mengamati kegiatan pekerja UPK karena memiliki kesibukan lainnya. Di UPK juga dilaksanakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan selain kegiatan inti pengolahan sampah. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah studi banding ke Rumah Perubahan Rhenald Khasali, Pelatihan SOP, dan Program *Join Safety Infection*.

4.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)

4.2.1 Faktor Penghambat Pelaksanaan UPK

1. Faktor Manusia

Faktor manusia terdiri dari pengelola, pengawas lapangan dan pelaksana program. Pengelola diharapkan mampu memimpin dan mengelola proses produksi UPK agar sesuai dengan target ITP. Sedangkan pengawas lapangan diwajibkan mengawasi pekerjaan karyawan UPK setiap hari kerja. Namun pada kenyataannya, pengelola dan pengawas lapangan tidak fokus dalam menangani UPK. Keduanya memiliki banyak kesibukan lainnya diluar memimpin dan mengawasi UPK. Khususnya pengelola jarang mengontrol kegiatan di UPK. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang staff SDP berikut: “Pengelolanya kan terlalu banyak kesibukan, jadi jarang mengontrol kesana. Engga fokus” (Fj, 24 April 2012).

Berdasarkan Identifikasi Masalah UPK Puspanegara yang dilakukan oleh tim CSR ITP, selain kurang fokus dan jarang ke lokasi UPK, pengelola juga tidak disiplin mengelola dan tidak mengikuti birokrasi CSR. Hal ini sesuai dengan pemaparan salah seorang staff SDP berikut:

“Ini pengelola itu dia mainnya langsung, tidak mengikuti prosedur yang ada. Mainnya langsung. Kemaren-kemaren itu dia langsung ke manager. Seharunya kan lewat saya sama pak ayi dulu. Udah pernah di kasih tau prosedurnya. Tapi kita terus coba arahkan, sudah mulai ada perubahan. Lewat saya dulu sama pak ayi. Karna dulunya itu mereka seperti dianakemaskan, bisa langsung ke atas. Kita nga tau apa-apa tiba-tiba dari atas langsung dapat kabar. Sekarang sudah mulai tidak” (Fj, 24 April 2012).

Kelalaian dari pengelola dan pengawas ini memberikan dampak buruk kepada UPK. Akibatnya produktifitas UPK jauh dibawah target, pekerja tidak disiplin dan lokasi UPK penuh dan berantakan.

Akibat lain dari kurangnya kontrol pengawas dan pengelola terhadap proses produksi UPK adalah kurang disiplinnya pekerja UPK. Selain itu pekerja juga menjadi kurang motivasi untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Jumlah pekerja UPK juga terus mengalami penurunan. Berikut adalah penjelasannya : “Pelaksana yang kurang jumlah, disiplin dan motivasi kerja” (Dd, 27 April 2012) dan “Pengelolaan ada, itu disana tenaga kerja keluar masuk. Kita juga tidak bisa paksakan orang untuk stay terus disitu. Tapi itu memang menjadi kendala” (Ay, 24 April 2012).

Jumlah pekerja program yang terus menurun memberikan dampak negatif. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang pekerja yang menyatakan bahwa beberapa pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang sama seperti penjelasan penangkut sampah berikut : “Ya itu, kita disini juga harus ngarungin sampah juga” (Ant, 27 April 2012)

2. Faktor Dana

UPK membutuhkan dana dalam pelaksanaan proses produksinya. Dana dibutuhkan untuk memenuhi berbagai pengeluaran. Saat ini pemasukan UPK

didapatkan dari tiga sumber, yaitu *Collecting Fee* dari masyarakat, hasil penjualan produk dan subsidi dari CSR ITP. Subsidi masih diberikan oleh CSR ITP karena dana yang didapat dari *collecting fee* dari masyarakat serta hasil penjualan produk masih belum mampu memenuhi kebutuhan pengeluaran UPK. Dengan tujuan mencapai kemandirian, masih rendahnya *collecting fee* serta hasil penjualan menjadi masalah yang harus dipecahkan. Berikut adalah penuturan dari staff SDP yang menyatakan masih kurangnya jumlah *Collecting Fee* dari masyarakat

“Kalo penghambat ya dari masyarakatnya ini nih, kesadaran masyarakatnya. Itu yang susah, jadi kesadaran masyarakat untuk membayar *collecting fee*. Kalau misalnya masyarakat sudah sadar untuk membayar *collecting fee* untuk pengolahan sampah itu, itu butuh biaya yang tidak sedikit kan, untuk mesinnya, pengelolaannya, tenaga kerjanya. Kalau kita kan mikirnya kita buang, ya habis perkara. Rata-rata sih gitu. Kalau misalnya dia nga buang pun, pola pikirnya kan selagi kita punya tanah, ya kita buang saja di tanah kita, atau buang di kali, habis perkara kan. Jadi masih merasa rugi kalau harus membayar besar. Padahal kan kalau ditempat lain tuh udah mulai mau bayar besar” (Fj, 28 Mei 2012).

“Masyarakat merasa terbantu, namun kontribusi iuran masih sangat rendah. Jadi artinya pengelola UPK kan memperkerjakan orang. Harus dibayar. Salah satu pendapatannya kan dari masyarakat nih. Cuma kesadarannya masih rendah untuk membayar iuran” (Ay, 24 April 2012).

Rendahnya *collecting fee* dari masyarakat ini, didasarkan pada sebuah perhitungan yang pernah dilakukan oleh CSR ITP:

“Biaya operasional UPK itu 16 juta sebulan. sampah yang diolah 4 ton sehari kan, 4 ton kali 25 hari kan seratus ton. Jika dibagi per kg dibutuhkan sekitar 160 rupiah untuk mengolah setiap kg sampah. Dari keluarga jika setiap harinya menghasilkan 5 kg sampah per orang. Dan dalam keluarga ada 4 orang, berarti 20 kg, berarti setiap bulannya menghasilkan sampah 600kg per bulan. Nah yang sampai ke kita itu cuma kurang lebih 1500 rupiah kan”.

Untuk mengatasi ini, usaha yang pernah dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan camat setempat. Berikut adalah penjelasan mengenai upaya-upaya yang pernah dilakukan:

“Sudah dilakukan beberapa kali usaha. Melalui pak RW, dan kelurahan Puspanegara itu diadakan rapat untuk masyarakat diberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa untuk perlu mengolah sampah itu butuh biaya. Yang idealnya ditanggung juga oleh masyarakat. Cuma memang sampai saat ini dalam forum tersebut mereka iya-ya aja. Nga boleh kalau ITP langsung terjun (sosialisasi langsung) ke masyarakat. Kita tetap harus melewati penanggung jawab masyarakat. karena memang mereka memiliki struktur organisasi sendiri, Camat, Kelurahan, RW, RT” (Dd, 27 April 2012).

Usaha melalui pengelola juga pernah diupayakan. Pengelola diajak untuk berkoordinasi dengan masyarakat mengenai peningkatan iuran ini. Berikut adalah penjelasannya:

“Dari pengelola ya, soalnya kan kita punya pengelola yang sudah kita percayakan. Kita posisinya kan cuma membantu. Ada pengelola yang bertanggung jawab untuk operasional, kalo ada kesulitan ya kita bantu. Ini kita dorong pengelola untuk bisa berkordinasi lagi dengan masyarakat” (Ay, 24 April 2012).

3. Faktor Mesin

Faktor kedua adalah mesin. Mesin merupakan salah satu faktor penting dalam pengolahan sampah. Tanpa mesin, kegiatan pengolahan sampah menjadi energi tidak bisa dilakukan dengan optimal. Di UPK terdapat beberapa mesin yang digunakan, diantaranya adalah mesin Crusher dan mesin Screen

Selama kurun waktu 5 tahun berjalannya UPK, mesin telah mengalami beberapa kali modifikasi. Modifikasi dilakukan karena ketahanan dan spesifikasi mesin yang tidak sesuai dengan janji awal yang diberikan oleh MAP. Berikut adalah penjelasan yang diberikan oleh staff SDP yang bertanggung jawab untuk bagian teknis UPK

“Pertama mesin, mesin yang ada itu kan sangat sederhana ya, crusher, screen, dulu sempat ada press, sama secondary screen. Kalau masalah

mesin, kemaren juga udah saya cek, itu durabiliti atau ketahanannya masih kurang. Kemudian juga ada masalah spesifikasi. Masalah yang ada adalah mesin yang ada ternyata spesifikasinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dulu. Durabilitynya disampaikan bahwa mesin akan tahan 5 tahun, tapi kenyataannya sampai sekarang (dari 2007 sampai pertengahan 2012) saja sudah tiga kali ganti. Screen juga sama. Intinya kalo untuk mesin kita melihat dari durability sama spesifikasinya. Spek itu kan memperlihatkan kemampuan dia seperti apa. Untuk spek ini sendiri dilihat dari material, kemudian pembuatannya sama desainnya. Kalo misalnya desain sama pembuatannya bagus tapi materialnya jelek yan tetep nga akan bertahan lama kan. Nah mesin ini specnya tidak sesuai, desainnya juga, makanya kita modifikasi. Yang di UPK kan dari mesin crusher manual ke mesin screennya. Dari situ kita modifikasi yang udah langsung terhubung dari *crusher* ke *screennya* kan, pake *belt konveyor*.” (Dd, 27 April 2012).

Hal serupa juga disampaikan oleh warga, salah satu yang menghambat pelaksanaan program ini adalah mesin yang rusak. Hal ini berakibat pada ketidاكلancaran proses pengambilan sampah

“Jadi kita lihat sih kendalanya itu mesinnya kan sering rusak. Kita sendiri juga bingung nih. Disini kan ada tim yang narikin sampahnya, ada satu orang, yaitu bapak amun, pas udah ngambil (sampah) dari sini, dibawa kesana (UPK) ternyata mesinnya rusak. Akhirnya kan dari sininya di stop dulu, sehari dua hari. Tapi walaupun sehari juga kan sampah masyarakatnya dikumpulin juga banyak. Jadi harapan kita sih, untuk indocementnya mesinnya tolong diperhatikan lah. Misalnya pake aja mesinnya yang otomatis. Yang kapasitasnya biasanya berapa kubik, ditambah lagi lah. Kan biasanya disana saya lihat sampah ini masih numpuk. Bagusnya kan sehari masuk dari warga langsung habis (diolah) kan enak nga menimbulkan bau juga, gitu maba” (Nn, 3 Juli 2012).

4. Faktor Manajemen

Kelemahan selanjutnya adalah kurangnya kemampuan pengelola untuk memajemen sampah yang masuk ke UPK. Luas daerah pengambilan sampah terus bertambah padahal kapasitas mesin dan jumlah pekerja memiliki keterbatasan. Akibatnya tidak semuanya sampah yang masuk ke UPK dapat diolah. Jumlah sampah yang masuk lebih besar dari sampah yang bisa dikelola di UPK. Hal ini seperti yang disampaikan kepala seksi SDP:

“Keduanya, masyarakat semakin tergantung dengan keberadaan UPK, jadi sementara kita masih ada keterbatasan. Pkerjanya, mesinnya. Sampahnya makin banyak yang dibuang kesitu. Nah ini menjadi kendala. Sampah jadi overload. Sampah yang masuk lebih besar dari sampah yang bisa dikelola” (Ay, 24 April 2012).

4.2.2 Faktor Pendukung Pelaksanaan UPK

1. Komitmen ITP

Komitmen ITP merupakan salah satu faktor yang menjadi kelebihan pelaksanaan program UPK. Tingginya komitmen ITP untuk tetap melaksanakan UPK membuat UPK masih bertahan ditengah berbagai masalah yang ada. Berikut adalah penjelasannya:

“Ini juga sebenarnya ada kaitannya sama direksi, kalo direksi bilang saya nga mau lagi deh mengelola sampah, ya brenti nih UPK. Komitmen dari direksi penting banget. Komitmen bahwa ini harus berjalan, pasti ini akan berjalan” ((Dd, 27 April 2012).

Tingginya komitmen ITP khususnya jajaran direksi untuk tetap melaksanakan program CSR, dalam hal ini UPK, memiliki beberapa latar belakang. Salah satunya adalah keinginan untuk ikut serta mengurangi pemanasan global.

“Pertama masalah lingkungan, ITP akan selalu di tuntutan untuk mengurangi nilai gas karbo yang dihasilkan. Jadi kalau ITP sudah membakar sekian banyak produk semen, yang menghasilkan gas karbon, ITP diharapkan mengganti proses (pembakaran) yang diluar dengan mengalihkan ke ITP” (Dd, 27 April 2012).

Selain itu keinginan untuk menjaga kelancaran dan keamanan produksi adalah alasan lain yang melatarbelakangi tingginya komitmen ITP untuk tetap melaksanakan program CSR khususnya UPK. Keamanan dan kelancaran produksi tidak akan terjamin jika tidak terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan perusahaan.

“Jadi sebenarnya perusahaan kan membutuhkan keamanan dalam proses produksinya. Nah keamanan dan kelancaran produksi itu baru bisa terealisasi kalau didukung dengan hubungan baik dengan masyarakat...., . Jadi disitulah tugas saya dan tim (CSR) untuk membuat kelancaran produksi ini. Kalo kita ingin menjamin keamanan dan kelancara produksi, kita harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat. jadi kita berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat...., Jadi kita, setiap perusahaan lah, bukan pembagi-bagi hadiah melainkan iginn menjamin keamanan dan kelancaran produksi. Jadi kita di SDP sama CD program-programnya harus jalan nih. Kalau sudah jalan kita berbuat lebih nih, misalnya pada level kita mengeluarkan uang 3 miliar saja masyarakat sudah aman, kita lebih dari itu” (Dd, 27 April 2012)

2. UPK didukung oleh teknologi pengolahan sampah menjadi energi

Tersedianya teknologi yang sudah mendukung pengolahan sampah menjadi energi merupakan salah satu kelebihan dari UPK. Dengan sudah tersedianya mesin yang mampu mengolah sampah menjadi energi membuat proses kegiatan di UPK menjadi mungkin dilakukan. “Kemudian teknologinya. Kalo misalnya nga ada teknologi yang bisa ngolah air jadi bensin, ya nga bisa diolah. Untuk sampah kan sudah ada teknologinya” (Dd, 27 April 2012)

4.3 Analisa

4.3.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)

4.3.1.1 Perencanaan UPK

Berdasarkan temuan lapangan pada subbab identitas UPK dapat dilihat bahwa tujuan didirikannya UPK adalah mengoptimumkan pengelolaan sampah menjadi produk yang bermanfaat, membuka lapangan pekerjaan baru serta

membantu pemerintah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dari tujuan ini dapat dirumuskan bahwa ruang lingkup pelaksanaan UPK memperhatikan faktor ekonomi, sosial dan lingkungan.

Secara lingkungan program ini bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan sampah rumah tangga menjadi produk yang bermanfaat seperti kompos dan SMW. Setiap hari, setiap individu menghasilkan sampah. Jumlahnya akan terus menumpuk seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah ini akan menjadi masalah yang serius karena bisa memberikan banyak dampak negatif. Salah satunya adalah lingkungan yang kotor dan tidak enak dipandang mata. Penarikan sampah rumah tangga untuk dikelola di UPK akan berakibat kepada terciptanya lingkungan yang bebas sampah. Sampah yang pada awalnya berantakan dan tidak sedap dipandang mata dapat dikelola dan lingkungan menjadi bersih. Di sisi ekonomi, masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah di UPK akan mendapatkan keuntungan secara *financial*. Pekerja di UPK akan mendapatkan insentif dari apa yang mereka kerjakan dalam berbagai kegiatan di UPK. Ditambah program ini juga dilakukan dalam rangka membuka lapangan pekerjaan baru dan membantu pemerintah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Hal ini sejalan dengan ruang lingkup pelaksanaan CSR yang disampaikan oleh Rahmatullah. Rahmatullah (Bab 2: 30) menyatakan pada hakikatnya CSR adalah nilai atau jiwa yang melandasi aktivitas perusahaan secara umum, dikarenakan CSR menjadi pijakan kompeherensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan. Tidak etis jika nilai CSR hanya diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat setempat namun perusahaan berkontribusi pada pencemaran terhadap alam, melakukan pemborosan energi, bermasalah dengan limbah atau tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Bagaimanapun semua aspek ini tidak bisa lepas dari koridor CSR.

Selanjutnya menurut Soeharto (Bab 2: 33) terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam merumuskan suatu program CSR. Langkah tersebut adalah *engagement, assesment, dan plant of action*. Setelah ketiga

kegiatan ini dilakukan, barulah dilakukan *action and facilitation* dan *evaluation and termination or reformation*.

Enggagement merupakan langkah awal yang dilakukan kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang lebih baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan *trust* masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR.

Setelah *enggagement* dilakukan mulai dilaksanakan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang dijadikan dasar dalam merumuskan program atau *assesment*. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan *needs-based approach* (aspirasi masyarakat), melainkan pula berpijak pada *right-based approach* (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat).

Langkah selanjutnya adalah *plant of action* atau perumusan rencana aksi. Pada tahapan ini program yang akan diterapkan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat (*stakeholder*) disatu pihak dan misi perusahaan termasuk *shareholder* dilain pihak.

Dikaitkan dengan temuan lapangan perencanaan UPK khususnya sejarah UPK, dapat dilihat bahwa kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah identifikasi masalah dengan melihat aspirasi dari masyarakat. Dijelaskan di temuan lapangan bahwa ITP merespon dengan baik aspirasi yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat mengenai masalah sampah yang belum terkelola dengan baik di kelurahan Puspanegara. Hal ini serupa dengan assesment yang dijabarkan oleh Suharto.

Selanjutnya, perumusan rencana kegiatan berupa pengolahan sampah menjadi energi kemudian dilakukan. Perancangan program ini selain memperhatikan aspirasi masyarakat juga memperhatikan kepentingan ITP. ITP membutuhkan SMW sebagai bahan bakar alternatif dalam proses produksi semen.

Setelah ditetapkan bahwa kegiatan yang akan dilakukan adalah pengolahan sampah menjadi energi, masyarakat umum mulai dilibatkan. Dapat dilihat di temuan lapangan bahwa masyarakat pada awalnya menolak

dilaksanakannya program ini. Namun ITP berusaha melakukan komunikasi, pemahaman dan penerimaan dari masyarakat dengan membawa masyarakat ke Rumah Perubahan Rhenald Khasali yang juga melaksanakan kegiatan pengolahan sampah menjadi energi. Setelah dilaksanakannya kegiatan ini, masyarakat akhirnya menerima dan UPK mulai didirikan.

Jadi pada perencanaan UPK, tahapan yang dilakukan berbeda dengan tahapan penerapan CSR yang dikemukakan oleh Suharto. Perencanaan UPK dilaksanakan dengan langkah *Assesment* kebutuhan masyarakat berdasarkan aspirasi dari salah seorang tokoh masyarakat. *Plant of action* dilaksanakan dengan memperhatikan tidak hanya aspirasi tokoh masyarakat melainkan juga kebutuhan ITP. *Enggagement* dilaksanakan dengan membawa masyarakat berupa kunjungan ke Rumah Perubahan Rhenal Khasali dalam rangka membangun pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap UPK yang dilaksanakan dalam bentuk pengolahan sampah menjadi energi.

4.3.1.2 Pelaksanaan UPK

Selanjutnya adalah pelaksanaan UPK. Berdasarkan tahapan penerapan CSR yang dikemukakan oleh Suharto, tahap *Action and Facilitation (Pelaksanaan)* merupakan salah satu tahap yang paling krusial. Di UPK, tahap pelaksanaan dilaksanakan dalam beberapa kegiatan. Yaitu pengambilan sampah rumah tangga, produksi SMW dan Kompos, Pengiriman SMW dan Kompos ke ITP, Pemeliharaan Mesin dan Kendaraan Operasional serta Pelaporan dan evaluasi.

Kegiatan awal yang dilakukan dalam pengolahan sampah menjadi energi adalah pengambilan sampah dari rumah tangga. Berdasarkan SOP, kegiatan ini dilaksanakan dengan mengambil sampah dari lokasi di desa binaan, terutama di daerah sekitar UPK. Namun tidak menutup kemungkinan jika sampah diambil dari luar UPK. Dalam pelaksanaannya, sampah diambil dari beberapa RW di tiga kelurahan yang berada di sekitar lokasi UPK. Tiga kelurahan tersebut adalah kelurahan Puspanegara, Puspasari dan Karang Asem. Diantara ketiganya hanya Kelurahan Puspanegara yang menjadi Kelurahan Desa Binaan ITP. Jadi saat penelitian dilakukan, selain mengambil sampah dari Desa Binaan ITP, UPK juga

mengambil sampah dari wilayah yang berada di luar desa binaan ITP. Perluasan daerah pengambilan sampah ini berakibat kepada meningkatnya jumlah sampah yang masuk ke UPK. Jumlah sampah yang diambil melampaui kapasitas mesin dan sumber daya manusia di UPK. Hal ini menyebabkan sampah masuk ke UPK secara tidak terkontrol, kondisi UPK berantakan dan mesin rusak.

Mengatasi masalah ini, CSR ITP menjalin kerjasama dengan Kecamatan Citereup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor. DKP akan mengambil sampah yang tidak bisa diolah oleh UPK untuk dibawa ke TPA. Hal ini berarti CSR ITP tidak melaksanakan sendiri kegiatan UPK melainkan bermitra dengan pihak lain, dalam hal ini Kecamatan Citereup dan DKP.

Selanjutnya, di SOP juga dijelaskan bahwa sampah rumah tangga diambil dengan menggunakan truck atau motor khusus yang memiliki bak terbuka atau gerobak sampah yang diangkut oleh para pengangkut sampah dari warga di sekitar desa binaan CSR ITP. Berdasarkan temuan lapangan, sampah diambil dari rumah warga dengan menggunakan gerobak. Motor roda tiga dan truck tidak digunakan lagi untuk mengambil sampah karena keduanya rusak. Pada tahun 2011 CSR ITP mengganti truck dengan yang baru. Truck ini tidak lagi digunakan untuk mengangkut sampah dari rumah warga, melainkan hanya digunakan untuk mengirim SMW ke ITP. Walaupun tidak lagi menggunakan truck dan motor roda tiga, sampah tetap dapat diambil dari rumah warga.

Selanjutnya adalah Produksi SMW dan Kompos. Berdasarkan SOP terdapat beberapa langkah dalam pengolahan sampah menjadi SMW dan Kompos, langkah-langkah tersebut dimulai dari pemilahan sampah, pencacahan, pengayakan, di fermentasikan dan kemudian dikemas. Berbeda dengan langkah-langkah ini keadaan yang peneliti temukan ketika melakukan penelitian adalah sampah dipilah, di keringkan dan kemudian dikemas. Tidak dihasilkan kompos dalam proses ini. SMW tanpa proses pencacahan dan pengayakan kemudian dikirim ke ITP.

Hal ini terjadi karena mesin pengolahan rusak sehingga tidak dapat digunakan. Rusaknya mesin pengolahan sampah dikarenakan sampah yang harus diolah melampaui kapasitas mesin. Karenanya tidak terdapat lagi pembagian kerja

seperti operator mesin pengolah dan operator mesin *screen*. Pekerja lebih fokus pada kegiatan pemilahan sampah, jahit karung dan pengepakan sampah.

Selain karena rusaknya mesin, proses produksi SMW dan Kompos juga dihambat oleh kurangnya jumlah pekerja yang terlibat dalam proses ini. Berdasarkan temuan lapangan, jumlah pekerja tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus dilakukan di UPK. Akibatnya beberapa pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang sama. Ditambah lagi, pengelola dan pengawas UPK tidak fokus menjalankan kewajibannya. Akibatnya pekerja tidak terawasi dan produktifitas UPK dibawah target.

Tahap selanjutnya adalah pengiriman SMW dan Kompos ke ITP. Setelah sampah di produksi dan SMW beserta kompos di kemas, SMW dan Kompos siap untuk dikirim ke pengguna. Pelaksanaan Pengiriman Sampah ke ITP telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Saat penelitian dilakukan, prosedur pengiriman SMW ke ITP melibatkan banyak divisi. Diantaranya adalah CSR sebagai Departemen penggerak UPK, *Alternatif Fuel (AFR) Departement*, *Supplay Division* dan *Accounting Division*. Peran masing-masing divisi akan dijelaskan dalam alur pengiriman SMW dibawah ini.

Pertama sekali CSR yang telah bekerja sama dengan AFR dan Plant akan mengajukan permohonan pengadaan barang (*Purchase Request/PR*) berupa SMW ke *Supplay* Divisi. *Supplay* divisi kemudian akan mengeluarkan *Purchahse Order (PO)* ke Supplier. Supplier yang terpilih merupakan supplier yang mampu memenuhi permintaan dan syarat yang diajukan oleh *Supplay* Divisi.

Permintaan Plant terhadap SMW untuk saat ini dipenuhi oleh UPK. UPK mengirimkan SMW ke ITP setelah ketua pengelola memenuhi syarat administrasi dari *Supplay* Divisi. Dari UPK, SMW akan dimuat di truck, dan kemudian *driver* dengan membawa surat PO, menimbang jumlah SMW di plant. Setelah penimbangan jumlah SMW, SMW di turunkan di gudang yang disediakan khusus untuk SMW sebelum di gunakan dalam pembakaran produksi semen. Truck yang kosong kembali melewati timbangan dan kembali ke ITP. UPK akan mendapatkan pembayaran hasil penjualan SMW tiga bulan setelahnya.

Terkadang SMW yang dikirimkan UPK tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Plant. Untuk masalah-masalah seperti ini, plant akan melapor ke AFR. Hal ini karena AFR merupakan divisi yang bertanggung jawab terhadap pembakaran alternatif fuel di Plant.

Jadi dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa CSR telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengiriman SMW dan Kompos ke ITP.

Selanjutnya mengenai prosedur pemeliharaan mesin dan kendaraan operasional. Prosedur pemeliharaan Mesin *Crusher*, Mesin *Screen* dan Kendaraan operasional adalah (mesin *crusher*) mesin dicuci dan dibersihkan setiap seminggu sekali pada waktu sore hari. Mesin juga dilumasi setiap sebulan sekali dengan memakai grease, maupun memakai oli secukupnya, kemudian dicatat dalam kartu pemeliharaan mesin. Setiap empat bulan sekali selama maksimal 2 minggu mesin dibawa ke pabrik (TSD) untuk pemeliharaan mesin. Tidak berbeda jauh dengan mesin *crusher*, pemeliharaan mesin *screen* dilakukan dengan dicuci dan dibersihkan setiap seminggu sekali pada waktu sore hari, dilumasi dengan oli maupun grease secukupnya setiap sebulan sekali, kemudian dicatat dalam kartu pemeliharaan mesin. Setiap empat bulan sekali selama satu minggu dilakukan pemeliharaan (*maintenance*) mesin *screen* dengan menghubungi TSD, dibuat SR ke TSD dari CSR Dept. Sedangkan untuk kendaraan operasional prosedur pemeliharannya menjadi tanggung jawab pengelola UPK.

Ketika penelitian dilakukan karena kedua mesin rusak sehingga proses pemeliharaan mesin tidak dilakukan. Untuk kendaraan operasional, walaupun menjadi tanggung jawab pengelola, disaat-saat tertentu ITP tetap turun tangan untuk membantu pemeliharaan truck.

Selanjutnya adalah pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan. Evaluasi hasil produksi SMW maupun kompos direncanakan dilakukan setiap bulan melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh karyawan UPK, Perwakilan dari CSR dept, terutama SDP Section, maupun SSCD manager. Pelaporan kegiatan UPK dilakukan setiap sebulan sekali melalui laporan tertulis yang disampaikan kepada CSR Dept.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi dan pelaporan belum dilaksanakan rutin setiap bulannya. Dalam rapat koordinasi masalah yang dibahas umumnya

mengenai masalah yang sedang dihadapi di UPK. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari UPK, seperti pengelola atau pengawas dan staff SDP CSR. Tidak semua pekerja di UPK terlibat dalam pelaksanaan evaluasi.

Beberapa pelaksanaan evaluasi berupa rapat koordinasi dengan tujuan membahas masalah yang sedang terjadi di UPK memiliki perbedaan dengan evaluasi sebagai salah satu tahap dalam pelaksanaan CSR yang disampaikan oleh Suharto. Suharto (Bab 2: 32) menyatakan bahwa tahapan ini dilakukan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Hasilnya bisa berupa terminasi program ataupun program akan dilanjutkan. Jadi terdapat perbedaan tujuan pelaksanaan evaluasi di UPK dengan evaluasi sebagai salah satu tahap pelaksanaan CSR yang disampaikan oleh Suharto.

Secara umum, tahap pelaksanaan UPK diprakarsai oleh SDP CSR. SDP CSR sebagai pemberi layanan lebih dominan dalam memprakarsai kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasional UPK. SDP CSR menetapkan cara-cara yang diperlukan untuk memperbaiki berbagai masalah yang terjadi di UPK dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendekatan direktif yang disampaikan oleh Batten (Bab 2: 38). Batten menyatakan bahwa pendekatan direktif dilakukan berdasarkan asumsi bahwa *community worker* tau apa yang dibutuhkan dan terbaik untuk masyarakat. Dalam pendekatan ini, peran *community worker* lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari *community worker*. *Community worker*-lah yang menetapkan apa yang baik dan buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut. Dengan pendekatan ini, prakarsa dan pengambilan keputusan berada di tangan *community worker*. Dalam praktiknya *community worker* memang menanyakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau cara apa yang perlu dilakukan untuk menangani suatu masalah, tetapi jawaban yang muncul dari masyarakat selalu diukur dari segi “baik” dan “buruk” menurut *community worker*.

Pada dasarnya jika pendekatan ini masih dipertahankan akan menjadi kurang efektif untuk mencapai hal-hal yang bersifat jangka panjang. Pendekatan

ini akan menimbulkan ketergantungan dari masyarakat terhadap kehadiran CSR ITP. Akibatnya kemandirian sebagai output pelaksanaan UPK akan sulit dicapai. Saat ini ketergantungan UPK terhadap CSR ITP dapat dilihat dari subsidi yang terus dikeluarkan oleh CSR ITP ke UPK. Tanpa subsidi tersebut, UPK masih belum bisa memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Untuk mencapai kemandirian dalam sebuah program, pendekatan non-direktif dapat digunakan sebagai solusinya. Batten menyatakan pendekatan ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Dalam pendekatan ini *community worker* tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan “baik” dan “buruk” bagi suatu masyarakat. Pemeran utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. *Community worker* lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan untuk membuat analisa dan mengambil keputusan yang berguna bagi diri mereka sendiri, serta diberi kesempatan secara penuh dalam penentuan cara-cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Cara ini akan menjadi lebih efektif dalam mencapai kemandirian dari masyarakat.

Dengan keadaan UPK saat ini, dimana masyarakat yang terlibat di UPK sudah biasa “diurus” oleh CSR ITP, mungkin akan sulit beralih kepada pendekatan non-direktif. Kesulitannya karena mereka dipaksa untuk terlibat secara aktif dan ikut bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang mereka tetapkan. Namun masih dapat dilakukan berbagai upaya yang mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang mendukung pendekatan non-direktif. Hal ini sesuai dengan penjelasan Batten mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk terciptanya masyarakat yang mendukung pendekatan seperti yang dapat dilihat di BAB 2: 39.

4.3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program Unit Pelayanan Kebersihan (UPK)

4.3.2.1 Faktor Penghambat Pelaksanaan UPK

Faktor penghambat pelaksanaan UPK dianalisa menggunakan kendala dalam pengembangan masyarakat yang dinyatakan oleh Watson (Bab 2: 42), berikut adalah uraiannya:

1. Faktor Manusia

Faktor manusia terdiri dari pengelola, pengawas lapangan dan pelaksana program. Pengelola diharapkan mampu memimpin dan mengelola proses produksi UPK agar sesuai dengan target ITP. Sedangkan pengawas lapangan diwajibkan mengawasi pekerjaan karyawan UPK setiap hari kerja. Namun pada kenyataannya, pengelola dan pengawas lapangan tidak fokus dalam menangani UPK. Keduanya memiliki banyak kesibukan lainnya diluar memimpin dan mengawasi UPK. Khususnya pengelola jarang mengontrol kegiatan di UPK. Pengelola juga masih belum disiplin mengelola kendaraan operasional sehingga dalam beberapa keadaan CSR masih harus turun tangan mengatasi masalah pada kendaraan operasional.

Akibat lain dari kurangnya kontrol pengawas dan pengelola terhadap proses produksi UPK adalah kurang disiplinnya pekerja UPK, tingkat produksi yang rendah dan kondisi UPK yang berantakan.

Jumlah pekerja UPK juga terus mengalami penurunan. Jumlah pekerja program yang terus menurun memberikan dampak negatif. Beberapa pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang sama.

Dikaitkan dengan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengembangan masyarakat, kurang fokus dan disiplinnya pengelola dan pengawas menangani UPK dan kendaraan operasional dapat dilihat dari sisi ketergantungan. Pengelola dan pengawas selama ini terbiasa “diurus” semua masalah yang mereka hadapi di UPK oleh CSR ITP. Dapat dilihat bahwa CSR ITP selalu berperan dominan dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang ada di UPK. CSR ITP juga ikut turun tangan menangani kendaraan operasional yang menjadi tanggung jawab pengelola. Kebiasaan “diurus” oleh CSR ITP inimenyebabkan ketergantungan dari pengelola dan pengawas UPK.

Watson menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap seseorang menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya perubahan di masyarakat. Ketergantungan bisa memperlambat proses “pemandirian” dari masyarakat.

2. Faktor Dana

UPK membutuhkan dana dalam pelaksanaan proses produksinya. Dana dibutuhkan untuk memenuhi berbagai pengeluaran. Saat ini pemasukan UPK didapatkan dari tiga sumber, yaitu *Collecting Fee* dari masyarakat, hasil penjualan produk dan subsidi dari CSR ITP. Subsidi masih diberikan oleh CSR ITP karena jumlah *collecting fee* dari masyarakat dan hasil penjualan SMW masih belum mampu memenuhi biaya operasional UPK. Berdasarkan temuan lapangan, jumlah *collecting fee* dari masyarakat masih rendah.

Disisi lain pada temuan lapangan (Bab 4: 104) dapat dilihat bahwa masyarakat merasakan manfaat atas keberadaan UPK dan tidak merasa keberatan dengan biaya yang selama ini dibebankan oleh UPK.

Dapat dilihat disini bahwa masalah rendahnya *collecting fee* dari masyarakat karena kurangnya komunikasi antara warga dan pengelola dalam penetapan *collecting fee* yang harus dibayar warga. Warga tidak memiliki pengetahuan mengenai biaya yang harus dikeluarkan UPK untuk menangani sampah mereka. Akibatnya warga tidak membayar *collecting fee* sesuai dengan kebutuhan UPK. Hal ini sesuai dengan salah satu faktor penghambat dalam pengembangan masyarakat yang dinyatakan oleh Watson dalam Adi (BAB 2: 44) bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor predisposisi yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat.

3. Faktor Mesin

Faktor selanjutnya adalah mesin. Mesin merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan pengolahan sampah. Tanpa mesin, kegiatan pengolahan sampah menjadi energi tidak bisa dilakukan dengan optimal. Saat penelitian dilakukan mesin *screen* dan *crusher* yang terdapat di UPK berada pada kondisi rusak total. Akibatnya pengolahan sampah menjadi energi dilakukan secara

manual. Hanya dilakukan pemilahan, pengeringan dan pengemasan SMW. Tidak dihasilkan kompos dalam kegiatan ini.

Dikaitkan dengan faktor penghambat dalam pengembangan masyarakat yang di kemukakan oleh Watson, kerusakan mesin yang menjadi penghambat pelaksanaan UPK tidak berasal dari individu ataupun sistem sosial dari masyarakat melainkan bersifat teknis.

4. Faktor Manajemen

Faktor yang menghambat pelaksanaan UPK selanjutnya adalah kurangnya kemampuan pengelola untuk memanajemen sampah yang masuk ke UPK. Luas daerah pengambilan sampah terus bertambah padahal kapasitas mesin dan jumlah pekerja memiliki keterbatasan. Akibatnya tidak semuanya sampah yang masuk ke UPK dapat diolah, lokasi UPK penuh dan berantakan.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan ketergantungan pengelola dan pengawas terhadap CSR ITP. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, CSR ITP dominan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh UPK. Akibatnya pengelola dan pengawas terbiasa “diurus” oleh ITP dalam menangani berbagai permasalahan yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab pengelola dan pengawas. Hal ini melahirkan timbulnya ketergantungan dari pengelola dan pengawas terhadap CSR ITP.

4.3.2.2 Faktor Pendukung Pelaksanaan UPK

1. Komitmen ITP

Komitmen ITP merupakan salah satu faktor yang menjadi kelebihan pelaksanaan program UPK. Tingginya komitmen ITP untuk tetap melaksanakan UPK membuat UPK masih bertahan ditengah berbagai masalah yang ada. Salah satu contohnya ITP kembali mengeluarkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki mesin pengolahan sampah di UPK. Hal ini dilakukan UPK sebagai bentuk komitmennya terhadap masyarakat

Tingginya komitmen ITP khususnya jajaran direksi untuk tetap melaksanakan program CSR, dalam hal ini UPK, memiliki beberapa latar belakang. Salah satunya adalah keinginan untuk ikut serta mengurangi

pemanansan global. Keinginan untuk menjaga kelancaran dan keamanan produksi adalah alasan lain yang melatarbelakangi tingginya komitmen ITP untuk tetap melaksanakan program CSR khususnya UPK. Keamanan dan kelancaran produksi tidak akan terjamin jika tidak terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan perusahaan.

Latar belakang tingginya komitmen ITP untuk melaksanakan UPK ini sesuai dengan *benefit* dan *driver* pelaksanaan CSR yang dinyatakan oleh Wibisono. Wibisono (Bab 2: 29) menyatakan bahwa salah satu *benefit* dan *driver* pelaksanaan UPK adalah memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*. dinyatakan bahwa Implementasi program CSR tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholder*. Nuansa ini dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya *trust* kepada perusahaan.

2. Program UPK didukung oleh teknologi pengolahan sampah menjadi SMW berupa mesin *Crusher* dan *Screen*.

Tersedianya teknologi yang sudah mendukung pengolahan sampah menjadi energi merupakan salah satu kelebihan dari UPK. Dengan sudah tersedianya mesin yang mampu mengolah sampah menjadi energi membuat proses kegiatan di UPK menjadi mungkin dilakukan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berikut akan dijelaskan kesimpulan mengenai gambaran pelaksanaan program serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program UPK.

5.1.1 Gambaran Umum Pelaksanaan UPK

- Berdasarkan tujuannya, UPK dilaksanakan dalam ruang lingkup ekonomi, sosial dan lingkungan
- Perencanaan UPK dilaksanakan dengan langkah *Assesment* kebutuhan masyarakat berdasarkan aspirasi dari salah seorang tokoh masyarakat. *Plant of action* dilaksanakan dengan memperhatikan tidak hanya aspirasi tokoh masyarakat melainkan juga kebutuhan ITP. *Enggagement* dilaksanakan dengan membawa masyarakat berupa kunjungan ke Rumah Perubahan Rhenal Khasali dalam rangka membangun pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap UPK yang dilaksanakan dalam bentuk pengolahan sampah menjadi energi.
- Sampah diambil dari beberapa RW di tiga kelurahan yang berada di sekitar lokasi UPK. Tiga kelurahan tersebut adalah kelurahan Puspanegara, Puspasari dan Karang Asem. Diantara ketiganya hanya Kelurahan Puspanegara yang menjadi Kelurahan Desa Binaan ITP. Jadi selain mengambil sampah dari Desa Binaan ITP, UPK juga mengambil sampah dari wilayah yang berada di luar desa binaan ITP. Perluasan daerah pengambilan sampah ini berakibat kepada banyaknya jumlah sampah yang harus diolah di UPK. Jumlah sampah yang diambil belum sebanding dengan kapasitas mesin dan sumber daya manusia di UPK. Hal ini menyebabkan sampah masuk ke UPK secara tidak terkontrol, kondisi UPK berantakan dan mesin rusak.
- Sampah diambil dari rumah warga dengan menggunakan gerobak. Motor roda tiga dan truck tidak digunakan lagi untuk mengambil sampah karena keduanya rusak. Pada tahun 2011 CSR ITP mengganti truck dengan yang baru. Truck ini tidak lagi digunakan untuk mengangkut sampah dari rumah warga, melainkan

hanya digunakan untuk mengirim SMW ke ITP. Tidak terjadi masalah terkait dengan tidak digunakannya motor roda tiga dan truck untuk pengambilan sampah

- UPK dilaksanakan oleh CSR ITP dengan bermitra dengan pihak lain khususnya pihak kecamatan dan Dinas-Dinas terkait seperti DKP
- Pada tahap kedua yaitu produksi *Sorted Municipal Waste* (SMW) dan Kompos sampah dipilah, di fermentasikan dan kemudian dikemas. Tidak dilaksanakan proses pencacahan dan penyaringan. Pekerja lebih fokus pada kegiatan pemilahan sampah, jahit karung dan pengepakan sampah. Akibatnya tidak dihasilkan kompos pada proses ini.
- Produksi SMW dan kompos terhambat karena mesin pengolahan sampah rusak, jumlah pekerja sedikit, dan pengelola tidak fokus menjalankan kewajibannya.
- Proses Pengiriman SMW dan Kompos ke ITP pengiriman SMW ke ITP sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP.
- Pemeliharaan Mesin *Crusher*, Mesin Pengayakan (*Screen*) dan Kendaraan Operasional tidak berjalan karena mesin rusak total. Pada tahapan ini masalah terjadi pada pemeliharaan kendaraan operasional. Pengelola tidak bertanggung jawab terhadap kendaraan operasional. Untuk saat-saat tertentu SDP masih harus memberikan bantuan untuk pemeliharaan kendaraan operasional.
- Evaluasi dan Pelaporan belum dilaksanakan rutin setiap bulan. Evaluasi yang dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi umumnya dihadiri oleh perwakilan dari UPK, seperti pengelola atau pengawas dan staff SDP CSR. Tidak semua pekerja dapat menyuarakan pendapatnya mengenai masalah yang dihadapi oleh UPK.
- Terdapat perbedaan tujuan pelaksanaan evaluasi di UPK dengan evaluasi sebagai salah tahap pelaksanaan CSR yang disampaikan oleh Suharto. Suharto menyatakan bahwa evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Sedangkan UPK melaksanakan evaluasi untuk membahas masalah-masalah yang ada dihadapi UPK dilapangan.

- Secara umum UPK dilaksanakan secara direktif. SDP CSR sebagai pemberi layanan lebih dominan dalam memprakarsai kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasional UPK. SDP CSR menetapkan cara-cara yang diperlukan untuk memperbaiki berbagai masalah yang terjadi di UPK dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut.

5.1.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan UPK

5.1.2.1 Faktor Penghambat Pelaksanaan UPK

- Pengelola dan pengawas tidak fokus dan disiplin mengelola UPK. Hal ini disebabkan ketergantungan pengelola dan pengawas terhadap CSR ITP. CSR ITP dominan dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh UPK. Hal ini sesuai dengan salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Watson. Watson menyatakan bahwa ketergantungan dapat memperlama proses pemandirian suatu kegiatan pengembangan masyarakat.
- Jumlah *collecting fee* dari masyarakat rendah karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh UPK untuk mengolah sampah. Hal ini sesuai dengan faktor predisposisi yang dikemukakan oleh Watson sebagai salah satu penghambat pelaksanaan pengembangan masyarakat.
- Mesin pengolahan sampah rusak. Hambatan ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Watson. Watson menyatakan kendala pengembangan masyarakat yang berasal dari individu dan sistem sosial, sedangkan mesin kerusakan mesin pengolahan sampah bersifat teknis.
- Kurangnya kemampuan pengelola mengelola sampah yang masuk ke UPK juga sesuai dengan faktor ketergantungan yang dikemukakan oleh Watson. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, CSR ITP dominan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh UPK. Akibatnya pengelola dan pengawas terbiasa “diurus” oleh ITP dalam menangani berbagai permasalahan yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab pengelola dan pengawas. Hal ini

menyebabkan timbulnya ketergantungan dari pengelola dan pengawas terhadap CSR ITP.

5.1.2.2 Faktor Pendukung Pelaksanaan UPK

- Komitmen ITP

Komitmen ITP merupakan salah satu faktor yang menjadi kelebihan pelaksanaan program UPK. Tingginya komitmen ITP untuk tetap melaksanakan UPK membuat UPK masih bertahan ditengah berbagai masalah yang ada. Salah satu bentuk komitmen tersebut dilaksanakan ITP dengan kembali mengeluarkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki mesin pengolahan sampah di UPK.

Tingginya komitmen ITP dilatar belakangi oleh keinginan ITP untuk turut serta dalam pengurangan pemanasan global dan menjaga kelancaran produksi. Hal ini sesuai dengan salah satu *benefit* dan *driver* dilaksanakannya suatu program CSR yaitu menjalin hubungan yang baik dengan *stakeholder*.

- Program UPK didukung oleh teknologi pengolahan sampah menjadi SMW berupa mesin *Crusher* dan *Screen*.

Tersedianya teknologi yang sudah mendukung pengolahan sampah menjadi energi merupakan salah satu kelebihan dari UPK. Dengan sudah tersedianya mesin yang mampu mengolah sampah menjadi energi membuat proses kegiatan di UPK menjadi mungkin dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan analisa terhadap pelaksanaan program serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program ini, berikut adalah saran-saran yang dapat peneliti berikan terhadap CSR ITP sebagai pelaksana program UPK

- Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan UPK. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan melatih masyarakat yang terlibat dalam UPK untuk memiliki keinginan bertindak. Hal ini dapat dirangsang dengan memunculkan berbagai diskusi dan mengikutsertakan pengelola, pengawas dan pekerja UPK dalam setiap pembahasan masalah yang terjadi di UPK, memberikan informasi mengenai

Universitas Indonesia

pengalaman kelompok lain dalam menghadapi masalah serupa yang dihadapi di UPK, membantu masyarakat yang terlibat di UPK untuk membuat analisa situasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di UPK dan membuat pemecahan masalahnya serta menghubungkan masyarakat yang terlibat di UPK dengan berbagai sumber yang dapat membantu UPK dalam penyelesaian masalahnya.

- Memfasilitasi diadakannya diskusi terbuka antara semua pihak yang terlibat dengan UPK.

Dari temuan lapangan dapat dilihat bahwa salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan UPK adalah rendahnya *collecting fee* dari masyarakat. Disisi lain masyarakat sangat merasakan manfaat atas keberadaan UPK dan tidak merasa keberatan terhadap biaya yang selama ini dibebankan. Melalui diskusi ini diharapkan pengelola UPK dapat menyampaikan kebutuhan dana UPK dan bersama masyarakat melakukan penyelesaian masalah terbaik dari masalah dana yang dihadapi UPK ini.

- Meningkatkan monitoring, supervisi dan pendampingan terhadap pengelola UPK

Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi program CSR. Diharapkan dengan meningkatkan monitoring, supervisi dan pendampingan terhadap pengelola, pengawas dan pekerja, ketiganya menjadi lebih disiplin dan fokus menangani UPK

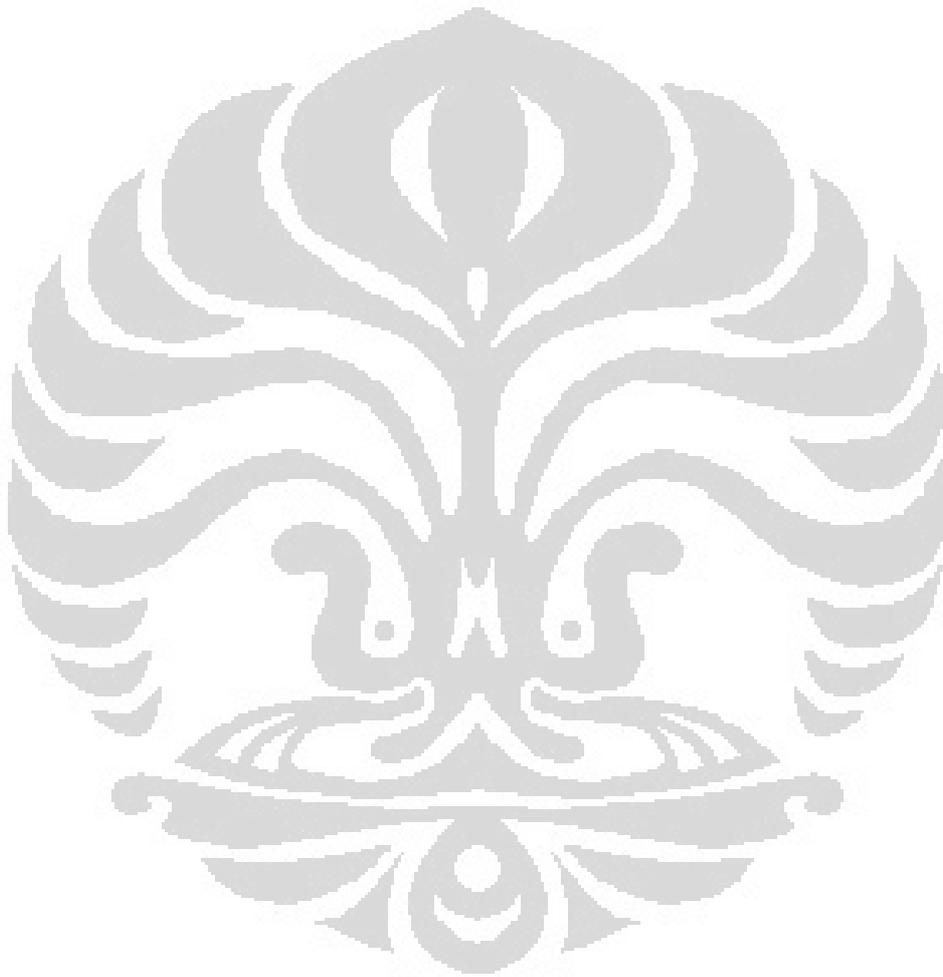
- Menambah jumlah pekerja di UPK

Karena jumlah pekerja UPK yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus dilakukan di UPK, maka untuk meningkatkan produktifitas UPK perlu dilakukan penambahan jumlah pekerja di UPK.

- Mengadakan pelatihan manajemen dan keuangan yang ditujukan kepada pengelola, pengawas dan pekerja UPK

Dapat dilihat di temuan lapangan bahwa kegiatan pelatihan terhadap pengelola, pengawas maupun pekerja hanya dilakukan pada awal pelaksanaan program. Mengatasi masalah kurangnya manajemen pengelolaa terhadap sampah yang masuk ke UPK serta pengaturan keuangan dapat dilakukan pelatihan manajemen ataupun keuangan.

- Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan
Evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan yang penting dilakukan untuk membahas masalah yang terjadi di UPK dan melihat sejauh apa perkembangan UPK. Jadi sebaiknya dilaksanakan secara reguler.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: FISIP UI Press
- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Alston, Margareth and Wendy Bowles. (1998). *Research for Social Worker: an Introduction to Methods*. Canberra: Allen and Unwin Pty Ltd
- Hawe, Penelope., Deirdre Degeling, Jane Hall and Alison Brierley. (1995). *Evaluating Health Promotion*. Australia :MacLennan & Petty Pty Limited.
- Herman, Joan L., Lynn Lyons Morris and Carol Taylor Fitz-Gibbon.(1987). *Evaluator's Handbook, 2nd ed*. California. SALE Publication, Inc.
- Kirst-Ashman, Karen and Grafton H. Hull, Jr. (2006). *Generalist Practice with Organization and Community (3rd ed)*. USA: Thomson Higher Education.
- Krefting, L. (1990). *Rigor in Qualitative Research: The Assesment of Truthworthiness*. Ontario: Occupational Therapy Journal of Research Vol 45 No. 3
- Moleong, Lexy. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Minichiello, Victor., Rosalie Aroni, Eric Timewell and Loris Alexander. (1995). *In-Depth Interviewing (2ed)*. Melbourne: Longman Australia Pty. Ltd
- Midgley, James, (1997). *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*, London: Sage Publication.
- Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social Research Method (6ed)*. Boston: Education, Inc.
- Piertzak, Jeanne., Malia Ramler, Tanya Ranner, Lucy Ford, and Neil Gilbert. (1990). *Practical Program Evaluation: Example from Child Abuse Prevention*. California: Sage Publication, Inc
- Rahmatullah, Trianita Kurniati. (2011). *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta: Samudra Biru

- Suharto, Edi. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Corporate Social Responsibility*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Solihin, Ismail. (2009). *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Umar, Husein. (2002). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama
- Wibisono, Yusuf. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing
- Wallace, D.P and Fleet, C.V (2001). *Library Evaluation: A Casebook and Can-Do Guide*. Colorado: Libraries Unlimited.
- Lewis, J.A., Lewis M.D., Packard, T., & Souflee Jr. F. (2001). *Management of Human Service Program (3rd ed.)*. USA: Thomson Learning.
- Mathison, S. (ed) (2005). *Encyclopedia of Evaluation*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Journal

- Jhonston N. (1980). *Social Work to Industry: Educational for Practice in The Work Place*. makalah yang di presentasikan pada *Council of Social Work Education Meeting*, Maret 13-16. Hal 54-62.
- Prayogo, Dody. (2011). *Evaluasi Porgram Corporate Social Responsibility dan Community Development pada Industri Tambang dan Migas*

Majalah

- Hardiansyah, M.S. (2008). *Panduan Indonesian CSR Award 08*. Majalah Bisnis dan CSR. 2008. Jakarta: PT LatofiSumaDivaEvente

Dokumen

Laporan Tahunan Kelurahan Puspanegara 2011

Standar Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Sorted Municipal Waste (SMW) dan Kompos Unit Pelayanan Kebersihan (UPK) Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.

Universitas Indonesia

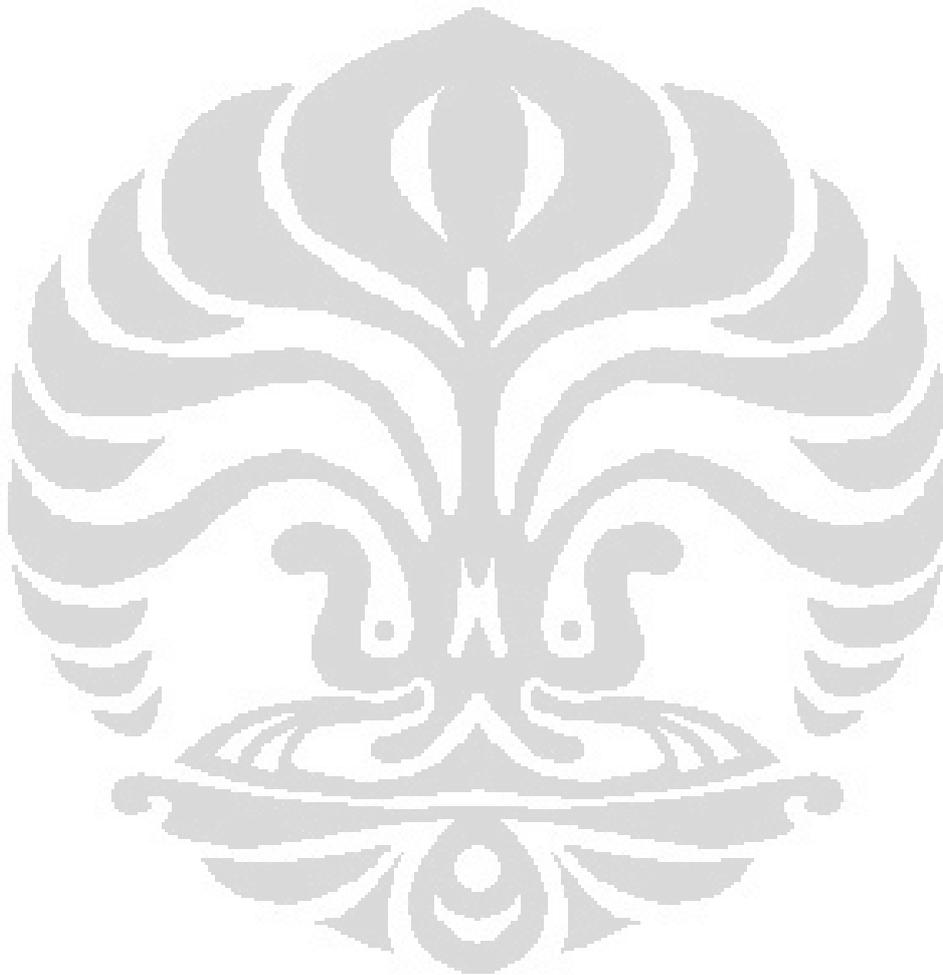
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007

Website

Jalal. 2010. *Selamat Datang Iso 26000*. Bogor:

www.csrindonesia.com/data/articles/20101217084002-a.pdf

<http://intranet/v4/index3.aspx>



Pedoman Wawancara Untuk Pelaksana Program

Umum

- Identitas
 - Nama:
 - Posisi dalam program:
 - Berapa lama bekerja di program:
 - Pekerjaan Sebelumnya:
 - Latar Belakang Pendidikan:
 - Tanggung Jawab Dalam Program:

Khusus:

- Identitas Program
 - Visi dan misi program?
 - Lokasi program?
 - Latar belakang program?
 - Tujuan pelaksanaan program?
 - Output yang diharapkan dari program?
 - Berapa dana yang dianggarkan ?
 - Atas dasar apa dana tersebut dianggarkan?
 - Siapa penggagas program?
 - Siapa target penerima program dan mengapa?
- Perencanaan Program
- Pelaksanaan Program
 - Pengambilan sampah rumah tangga?
 - Produksi SMW dan Kompos?
 - Pengiriman SMW dan Kompos ke ITP?
 - Pemeliharaan Mesin dan Kendaraan Operasional?
 - Pelaporan dan Evaluasi?
- Kegiatan lain yang dilaksanakan di UPK
- Pendukung Pelaksanaan Program
- Penghambat Pelaksanaan Program

Pedoman Wawancara untuk Masyarakat yang Terlibat Langsung dalam Pelaksanaan Program

Umum:

- Identitas
 - Nama:
 - Posisi dalam program:
 - Berapa lama bekerja di program:
 - Pekerjaan Sebelumnya:
 - Latar Belakang Pendidikan:
 - Tanggung Jawab dalam Program:
 - Bentuk Keterlibatan:
 - Jam kerja

Khusus:

- Bagaimana proses terlibat dengan program
- Apa yang diketahui mengenai program ini
- Pernahkah mengikuti berbagai kegiatan selain kegiatan inti yang diadakan oleh UPK
- Manfaat apa yang diterima setelah terlibat dalam program ini
- Fasilitas apa saja yang didapat selama bekerja? (gaji/tunjangan kesehatan/tunjangan hari raya/tunjangan keamanan/gaji lembur)
- Adakah masalah yang muncul selama berada di program, bagaimana penyelesaiannya?
- Penghambat pelaksanaan program
- Pendukung pelaksanaan program

Pedoman Wawancara untuk Masyarakat Penerima Manfaat Program

Umum:

- Identitas
 - Nama:
 - Alamat Rumah:
 - Pekerjaan:

Khusus:

- Keterlibatan dengan program
 - Kemana sampah dibuang?
 - Apakah sampah dipilah terlebih dahulu?
 - Berapa uang yang dikeluarkan untuk sampah?
 - Kepada siapa uang iuran sampah diberikan?
- Pelaksanaan Program
 - Siapa yang mengambil sampah?
 - Setiap hari apa sampah diambil?
- Pengetahuan mengenai program
 - Apakah yang diketahui mengenai UPK?
 - Untuk apa uang iuran sampah yang diberikan?
- Kegiatan lain
 - Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan UPK untuk masyarakat?
 - Apakah pernah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK
- Peghambat pelaksanaan program?
- Pendukung Pelaksanaan Program?
- Manfaat apa yang dirasakan dengan dibawanya sampah rumah tangga ke UPK?
- Keadaan lingkungan sebelum ada UPK
- Kondisi lingkungan setelah ada UPK
- Pendapat mengenai program?

Transkrip Wawancara Masyarakat yang Menerima Manfaat Program

Umum:

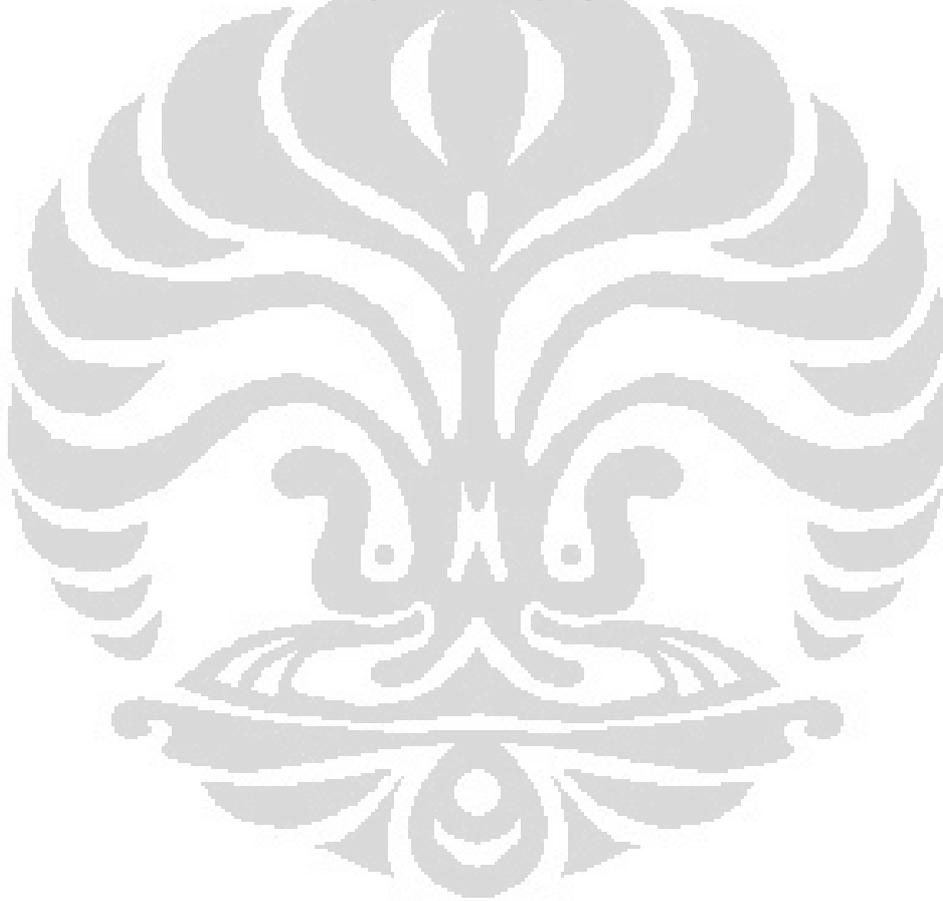
- Identitas
Nama: Aa
Alamat Rumah: RT 01 RW 03
Pekerjaan: Petugas Kelurahan, Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Puspanegara

Khusus:

- Keterlibatan dengan program
Kemana sampah dibuang?
Apakah sampah dipilah terlebih dahulu?
Berapa uang yang dikeluarkan untuk sampah?
Kepada siapa uang iuran sampah diberikan?
- Perencanaan Program
Kalau menurut saya sih, sosialisasi mereka udah sampaikan. Tapi ya nga nerti semua. Bahkan kalo ditanyain RT/Rwnya juga nga bakal ngerti tuh. Sosialisasinya dulu kaya apa tuh pak?
Penyampaian, dikumpulan warganya di kelurahan, kalo yang tingkat kecamatan saya nga tau.
Dulu itu sempat ada validasi dan verifikasi. Jadi warga diminta memberikan tanda tangan persetujuan pendirian UPK. dari kelurahan melakukan verifikasi, dipanggil ketua Rwnya, apakah benar warganya nandatangani, pake KTP juga.
Jadi setelah itu baru dibangun. Nga gampang juga pas ngebangunnya. Kedua juga orang kan takut polusinya, lalu juga secara SDMnya, mereka kan belum pernah mengelola urusan sampah. taunya mereka kan orang organisasi. Tapi setelah berjalan ya berjalan. Diyakinkan sama pihak ITP ada pendampingan kan waktu itu. Yang dari IPB
- Pelaksanaan Program
Kami dimintanya dari pihak UPK Cuma 300000 ribu perbulan. Kalo menurut kami sih itu sangat murah. Berarti satu hari itu Cuma 10000 dibagi seluruh warga. Satu harinya tidak sampai 500 rupiah per orang.
- Pengetahuan mengenai program
Apakah yang diketahui mengenai UPK?
Untuk apa uang iuran sampah yang diberikan?
- Kegiatan lain
Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan UPK untuk masyarakat?
Apakah pernah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK
- Adakah kekurangan program?

Kalo menurut saya sih kalo kita liat memang kapasitasnya kecil. Dari warga sendiri juga belum cukup mengerti tentang pengelolaan sampah. jadi kalo diajakin mengelola masih bingung. Misalnya kalo sampah ditarik dengan pembayaran misalnya 1 bual 12 ribu, kadang-kadang merasa terlalu besar. Kadang RT narik untuk uang ronda 5000 aja merasa keberatan. Misalnya dibagiin 100 kupon limas nih, yang bayar Cuma 70, sisa 30. Linmas kan tidak digaji dari kelurahan. Gajinya ya dari RT dari penarikan uang itu. Nah apalagi dengan sampah kan. Apalagi orang yang masih ngerasa punya lahan.

- Kelebihan Program?
- Manfaat apa yang dirasakan dengan dibawanya sampah rumah tangga ke UPK? Kalo menurut saya sangat membantu mba, selama ini kan dibuang ke pasar atau ke kali. Kalo ada ini (UPK) jadi kan ada yang ngelola.



Transkrip Wawancara Masyarakat Penerima Manfaat Program

Umum:

- Identitas
Nama: Nn
Alamat Rumah: RT 01 RW 04
Pekerjaan: Sekretaris RT, Pegawai TU SMP Indocement Nambo

Khusus:

- Keterlibatan dengan program
Jadi dulu pas awal pembangunan disana, harapan dari ITPnya semua sampah yang ada di puspanegara dibuang kesana. Dari pengelolanya udah ngasih tau warga. Kalo warga sendiri tergantung yang ngurus kan (RT). Ada respon tanggap, sampahnya dibawa kesana, ada yang engga. Nah kalo kita, langsung kesana, daftar.
Ohh pernah daftar dulunya pak?
Iya pernah daftar, harus daftar dulu, biar nanti dengan adanya pendaftaran itu, nga ada sampah yang sembarangan masuk kesitu. Tujuannya sih begitu, buat pendaftaran sama pak RW Hery. Kalo misalnya udah didata, ini dari mana, ohh dari RT 1 RW 04, ohh silahkan masuk, gituuu.
- Perencanaan Program
Pernah dulu ada dari kelurahan sama ITP. Jadi awalnya itu kan nga mau disitu. Awalnya di dekat kelurahan sekarang, tempat yang cucian motor. Tapi ya masyarakat nga mau, karna terlalu dekat sama rumah warga, yang depan SD 08
Ohhh disitu pak?
Iya, awalnya kan mau disitu. Warga sini, semcama menolak sih engga, Cuma menyampaikan sebaiknya jangan disitu. Jangan dekat sama rumah warga.
Dulu banget ya pak
Iya sebelum pembangunan. Kita juga sempat turun ke jalan. Jangan disini, cari tempat lain aja. Gituuu. Akhirnya kan ditempat yang sekarang itu. Disana kan nga dekat sama perumahan warga kan. Deketnya sama pabrik.
- Pelaksanaan Program
Yang ngambil sampahnya gimana tuh pak?
Ohh itu orang sini, jadi yang ngegaji warga sini. Jadi kita itu disini patungan 3000 per KK 1 bulan.
Disini ada berapa KK pak?
Disini hampir 200an
Banyak ya pak?
Iya, plus yang kontrakan-kontrakan. Itu buat ngegaji, dikatan gaji juga bukan sih. Cuma 400ribu untuk yang ngangkut. Tapi juga sampah yang biasa dijual lagi, ntr dijual sama dia. Sampah yang bisa di jual, dijual lagi. Yang nga bisa dikirim ke UPK.
Itu warga sini pak?
Iya warga sini.
Tiap hari pak?
Iya tiap hari kecuali minggu. Hari minggu libur. Dikomposnya juga libur.
Ke UPKnya dikasih uang juga nga pak?

Perbulan itu, karna dia juga buat gaji karyawannya, kita ngasih 150.000 perbulan.

Jadi ada nga pak efeknya program ini terhadap lingkungan disini?

Kaya yang saya bilang pertama, orang yang biasanya buang sampah di kali, bikin lobang, sekarnag kita engga. Tiap rumah ada tong didepannya, ntr sampahnya diambil tiap hari.

Ohh gitu oia pak. Itu yang 150 dikasih ke UPK, emang syarat dari UPK apa gimana pak?

Itu pak Herynya yang minta, jadi dulu itu kita sampahnya diangkut sama oranya pak Hery.

Jadi kita naruh dipinggir jalan. Namun nga efektif. Jadi kita dari warga buang sendiri ke depan. Yang deket kalo itu. Jadi dibikin bak. Ntr orang pak herynya ngambil. Tapi ya itu, trucknya kan Cuma 1, belum lagi ngambil ke tempat lain, belum lagi nganter ke ITP. Jadi kita putusin kita yang nganter sendiri ke sana

- Adakah kekurangan program?

Jadi kita lihat sih kendalanya itu mesinnya kan sering rusak. Kita sendiri juga bingung nih. Disini kan ada tim yang narikin sampahnya, ada satu orang, yaitu bapak amun, pas udah ngambil (sampah) dari sini, dibawa kesana (UPK) ternyata mesinnya rusak. Akhirnya kan dari sininya di stop dulu, sehari dua hari. Tapi walaupun sehari juga kan sampah masyarakatnya dikumpulin juga banyak. Jadi harapan kita sih, untuk indocementnya mesinnya tolong diperhatikan lah. Misalnya pake aja mesinnya yang otomatis. Yang kapasitasnya biasanya berapa kubik, ditambah lagi lah. Kan biasanya disana saya lihat sampah ini masih numpuk. Bagusnya kan sehari masuk dari warga langsung habis (diolah) kan enak nga menimbulkan bau juga, gitu maba.

Ohh itu dari pengangkut sampahnya mba. Truknya itu dulunya kan katanya dikasih yang jelek (dari ITP ke UPK). kata pak Hery, karna susah bawa ke ITP jadi (yang sudah diolah/SMW) numpuk juga disitu

- Manfaat apa yang dirasakan dengan dibawanya sampah rumah tangga ke UPK?

Dengan adanya pengolahan sampah ini ya manfaat untuk masyarakat memang sangat besar. Yang tadinya masyarakat buang sampah sembarangan karena bingung mau buang sampah dimana.

Dengan adanya pengolahan sampah yang merupakan bantuan dari ITP ini, yang didkelola oleh pak RW Hery ya, jadi masyarakat sekarang merasa terbantu, jadi tidak membuang sampah sembarangan. Yang tadinya dibuang sembarangan dibelakang rumah, kumuh, jadi menimbulkan bau karna numpuk-numpuk, bingung mau buang sampah dimana, menjadi terbantu, dirasakanlah manfaatnya sama warga disini. Khususnya sama warga RT 01 nih

Yang kedua juga karna kita udah buang sampahnya kesana (UPK) jadi ngurangin bibit penyakit. Yang tadinya sampahnya bisa menimbulkan penyakit jadi berkurang, bau busuknya nga ada lagi.

Transkrip Wawancara Masyarakat yang Terlibat Langsung dengan Program

Umum:

- Identitas
Nama: Ak
Posisi dalam program: Pengangkut sampah dari rumah warga menggunakan Gerobak
Berapa lama bekerja di program:
Pekerjaan Sebelumnya:
Latar Belakang Pendidikan:
Tanggung Jawab dalam Program: Mengambil sampah dari rumah warga
Bentuk Keterlibatan:

Khusus:

- Apa yang diketahui mengenai program ini
Melaksanakan Tugasnya
Bapak ngambil sampah darimana?
Saya ngambil dari kaum
Kaum itu dimana pak?
Itu tempatnya RW Hery, RW 01 Karang Asem Barat
Itu semua RTnya yang bapak ambil?
Saya ngambil RT 3
Yang lain diambil siapa pak?
Saya berdua disana, sama Badruin, ngambil di RT 4 sama RT 5
Itu bapak ngambilin sampah aja?
Engga, saya juga sekalian keamanan. Orang tidur di pos kamling, belum punya istri.
Ohh gitu, aki digajinya sama siapa?
Saya sama RW Hery
Yang ngambil uang dari warga siapa? Aki tau nga?
Saya juga, jadi saya ngambil sampah dari warga, awal bulan saya dibayar dulu, nanti akhir bulan saya narikin dari warga.
Narikinya berapa?
Kalo kontrakan 6.000, kalo rumah sendiri 15.000, itu yang 6.000, 3.000nya untuk sampah, 3.000nya lagi untuk keamanan. Kalo yang 15.000, 5.000nya yang untuk keamanan.
Ohh jadi aki yang narikin?
Iyaaaa, kadang-kadang dikasih lebih juga sama warga "nih ki, buat aki" gituuu
Ohh aki beruntung donggg, emang aki dikasih berapa sama pak RW setiap bulannya?
Dikit mah neng, dikasih 400.000,-
Ohhh, oia ki, kalo yang lain aki tau nga sampahnya diambil dari mana aja?
Kalo yang di karang asem juga ada Uwok sama Mang Ali. Uwok ngambilnya dari RW 02 Karang Asem Barat RT 01 sama 05. Kalo Mang Ali RT 03 sama 04. RT 02 mereka paruhan ngambilnya aki ngambilnya hari apa aja tuh?
Saya mah dari Senin sampai Sabtu, nga berenti
Kalo Mang Ali sama Uwok hari apa ki?
Itu dia jum'at sama minggu libur
Kalo yang lain masih ada yang aki tau nga?
Coba aja tanya bapak yang itu tuh

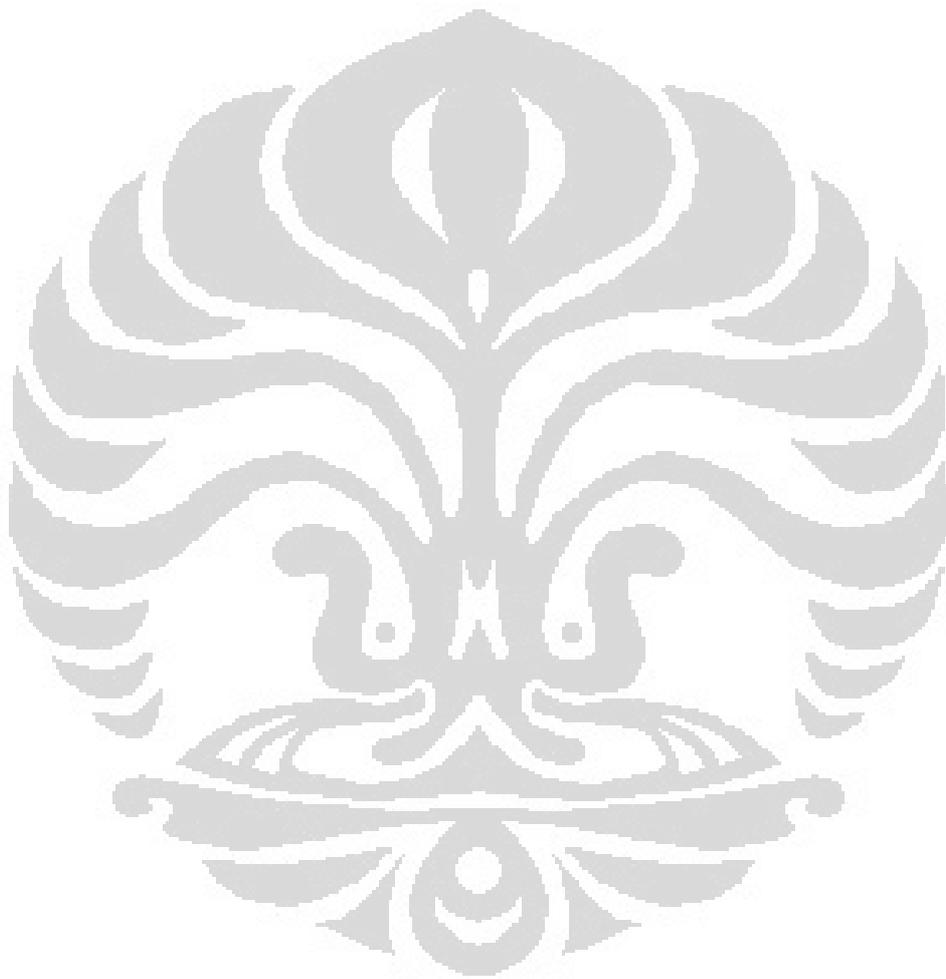
Transkrip Wawancara Masyarakat yang Terlibat Langsung dengan Program

Umum:

- **Identitas**
Nama: Ant
Posisi dalam program: Pengangkut sampah dari Warga
Berapa lama bekerja di program: 3 tahun
Pekerjaan Sebelumnya: serabutsn
Latar Belakang Pendidikan:
Tanggung Jawab dalam Program: Mengangkut sampah dari rumah warga
Bentuk Keterlibatan:

Khusus:

- **Apa yang diketahui mengenai program ini**
Tugas dalam program
Pak, bapak ambil sampah dari mana aja?
Saya neng, kalo saya dari RW 08 Puspasari
Ohh bukan puspanegara pak?
Bukan
Itu bapak ngambil di semua RT?
Saya ngambilnya di RT 1 sama RT 2, berdua sama temen saya
Ohh ada dua orang pak di RW 08?
Iya, sama bang Nanci
Itu ngambilnya satu orang satu RT?
Engga, kita berdua aja, Cuma saya memang pake gerobaknya RT 2, pak Nanci pake gerobaknya RT 1
Ohh gitu, bapak ngambilnya hari apa aja?
Kalo RT 01 jadwalnya Senin, Rabu sama Sabtu, kalo RT 02 diambilnya Selasa Jum'at.
Itu bayarnya gimana?
Sama, saya juga yang narikin dari warga, ntar saya kasih ke pak RT, kalo yang di RT 01 Yayan, kalo RT 02 Wahid
Bapak di bayar berapa?
Saya 250.000
Itu warganya bayar berapa pak?
Kalo di saya, kontrakan 5.000, kalo rumah sendiri 10.000
- **Manfaat apa yang diterima setelah terlibat dalam program ini**
Setelah kerja disini manfaat yang bapak terima apa?
Yaaahhh, saya kadi bisa rongsokan mba, botol-botol aqua saya kumpulin buat tambahan
- **Fasilitas apa saja yang didapat selama bekerja? (gaji/tunjangan kesehatan/tunjangan hari raya)**
Kalo sakit gimana?
Ya bayar sendiri
- **Penghambat Pelaksanaan Program**
Udah 3 tahun nih bapak buang sampah kesini, itu kendalanya apa aja
Ya itu, kita disini juga harus ngarungin sampah juga, misalnya mesinnya nga jalan
Kalo pas mesinnya jalan bapak nga ngarungin?
Engga, langsung digiling
Kelo kelebihannya apa?
Warga sering komplain kalo sampahnya nga diambil tiap hari.



Transkrip Wawancara Masyarakat yang Terlibat Langsung dengan Program

Umum:

- Identitas
Nama: Dd
Posisi dalam program: pengemudi roda tiga / jahit karung
Berapa lama bekerja di program: 2009
Pekerjaan Sebelumnya: pekerja di sebuah kontraktor listrik
Latar Belakang Pendidikan: PGRI Cibinong

Khusus:

- Bagaimana proses terlibat dengan program
Saking nganggurnya, nga enak kalo nganggur tuh, pindah dari Purwakarta kesini, jauh di sono, nga ada tempat main.
Keluarganya tinggal dimana?
Disini, waktu di Purwakarta nga betah aja, balik lagi kesini, nganggur, kata temen noh ada kerjaan noh, kompos dijalan baru, apaan, sampah, berapa sebulannya, segitu, yaudah, daripada nganggur, untuk sementara, eh taunya udah lama.
- Apa yang diketahui mengenai program ini
Kegiatan di dalam program
Mas udah pegawai sini dong?
Iya udah digaji pak RW (Hery). Dulu itu ada mobil, ada roda tiga.
Warganya juga bayar ke mas?
Engga, bayarnya ke RT masing-masing ntr baru ngasih ke RW Hery.
Dulu pake motor sama mobil aja mas?
Engga, dulu juga pake roda. Kalo roda baru dari warga. Kalo mobil sama motor itu baru dari UPK.
Ohh gitu, kalo motor ngambilnya yang jauh-jauh. Dari pos 3.
Sekarang kenapa nga pake motor pak?
Motornya rusak.
Mas terakhir bawa motor kapan?
2010.
Ohh setelah itu baru mas jahit ini ya?
Iya
Dulu banyak ya mas yang kerja disini?
Nga kenal.
Dari pos 3 trus diapain?
Di bawa kesini. Trus di sortir baru di crusher.
Siapa yang nyortir?
Itu yang kerja disini, yang beling, batu, kayu dipisahin, trus yang kain bekas juga dipisahin. Trus yang bisa diolah baru di giling. Trus setelah itu masuk saringan. Trus masukin lagi saringan yang kedua. Ada empat, yang ketiga dan keempat itu manual. Supaya kesaring yang buat kompos. Setelah itu tunggu kering dulu sampahnya. Baru di press akhirnya.
Dulu di press ya mas, nga dikarungin doang?
Iya, kan ada mesin pressnya
Mas mulai jahit sejak kapan?
2010
Ada berapa orang?
Ada yang motongin karung juga. Karung yang dikasih kesini dari Indocement kan kadang kepanjangan, jadi pokoknya dia potong biar bisa dijahit. Ada yang nempel, ada yang ada bekas jahitannya.
Kalo sekarang kerjanya ngapain aja mas?
Ya kebanyakan ngarungin sampah.
Itu kerjanya gmana mas? Misalnya sakit gitu?
Ya izin ke mandor (pak RT)
Itu yang kerja siapa aja mas sekarang?

Ada wahyu, zaenal, mang Lili, Mang Udin, Uman, Gokil sama mang Udin lagi. Mang Udinnya ada dua. Ohh gitu, itu kerjanya ngapain aja?
 Saya yang jahit, wahyu yang potong. Mang Udin itu keamanan. Gokil driver. Yang lainnya ngarungin sampah.
 Mas digajinya berapa per bulan?
 Saya 500.000 ribu
 Ohh gitu kalo driver kerjanya ngapai aja?
 Nganterin SMW ke pabrik sama ambil karung nih kalo abis.
 Kalo ngambil karung itu prosesnya gimana?
 Saya bilang ke mandor "pak karung abis". madornya bilang ke pak Ali, yang kemaren kesini. Pak Alinya bikin surat jalan. Nah kalosuratnya udah ada ntr bang Gokil ngambil ke pabrik.
 Sampahnya kenapa ampe diambil ampe jauh-jauh banget sih mas? Kenapa nga dari sini-sini aja?
 Tergantung warganya juga mba, ada yang mau, ada yang engga
 Kalo yang engga mau gimana?
 Kalo nga mau ngapain dipaksa. Tergantung bayarnya juga. Kalo bayarnya lancar diambil
 Pernah ada masalah nga mas ?
 Engga sih, Cuma kadang karyawannya aja kadang males masuk.
 Mas tau nga yang ngambil sampah siapa lagi?
 Iya pokonya tambahannya itu ada dua roda dari pinggir kali, dari depan kelurahan satu orang, SD satu orang, SMA SMP 2 roda, kebon kopi pinggir 3 roda, kantor kecamatan 1 roda.

- **Pernahkah mengikuti berbagai kegiatan selain kegiatan inti yang diadakan oleh UPK**
 Pernah ngikutin kegiatan lain nga mas selain kegiatan inti disini?
 Ada, paling bersih-bersih.
 Selain itu? Kaya pelatihan-pelatihan gitu?
 Ohhh dulu pernah, di yasmen (sekolah Yayasan Indocement) sini diadainnya. Cuma yang ikut waktu itu Herman, sekarang sih udah meninggal.
 Itu ngapain aja disana?
 Diajarin cara bikin pupuk organik, diajarin kaya gitu,
 Abang kenapa nga ikut?
 Belum masuk saya waktu itu
 Pas abang masuk pernah diadakan nga kegiatan-kegiatan kaya gitu?
 Engga kayanya
 Kalo diajarin cara menggunakan mesin gini pernah nga?
 Kadang sih saya suka ngeliat aja sih
 Pelatihan yang pernah diadain indocement pernah ngikutin?
 Nga ada
 Jadi kegiatannya Cuma pgnolahan sampah aja?
 Iya
 Bener nih nga ada kegiatan lainnya?
 Ohh ada dari safety, ngajarin apa itu, kesehatan aja,
 Dimana diadain?
 Disini pada ngumpul aja anak-anak, trus dikasih obat-obatan juga nih kaya gini. Ada juga masker, sarung tangan,
 Kenapa nga dipake sekarang?
 Nga tau, paling pada ilangan,
 Kalo kegiatan tentang pelatihan pengolahan sampah yang baik, berwirausaha dan sebagainya pernah nga?
 Belum pernah
- **Manfaat apa yang diterima setelah terlibat dalam program ini**
 Selama bekerja disini, abang ngerasain apa manfaatnya?
 Saya jadi bisa, belajar otodidak, seperti jait, gimana cara bikin pupuk, gimana cara bersihin mesin, tadinya rusak jadi bener lagi.
 Trus apalagi?
 Ini rongksokan bisa dijual sendiri.
- **Fasilitas apa saja yang didapat selama bekerja? (gaji/tunjangan kesehatan/tunjangan hari raya)**

Sepatu, masker, baju, earpla
Kalo lebaran dikasih THR nga?
Kalo dari Indocemen dikasih, sebesar gaji
Abang pernah sakit nga selama kerja disini?
Pernah
Itu sakitnya sakit apa?
Sakit kuning,

- Adakah masalah yang muncul selama berada di program, bagaimana penyelesaiannya?
Selama abang kerja disini pernah ada masalah nga?
Mesin rusak, listrik juga kadang mati

- **Penghambat Pelaksanaan Program**

Mesin rusak, listrik juga kadang mati
Program ini menurut abang kelemahannya apa?
Karyawannya kurang, jadi lemahnya dari sini, kalo belum ditambah penghasilannya jadi dikit kan sehari itu, jadi misalnya saya ngejahit sehari 700 karung, ntr yang udah saya jahit itu jadi nga ada, malah dibawa keluar sama tukang roda, jadi nga keliatan, maka dari situ karyawannya kurang, kalo karyawannya banyak jadi keliatan kan karung itu kemana, jadi nga usah dibawa keluar sama tukang roda
Emang tukang roda diapain karungnya?
Nga tau, mau dikarungin keluar tapi nga semuanya bali kesini. Makanya saya ngejait sedikit sekarang. Nga ada yang ngawasin.

- **Pendukung pelaksanaan program**

Kelebihannya sih menguntungkan aja, karan yang dari rongsokan itu

Transkrip Wawancara Masyarakat yang Terlibat Langsung dengan Program

Umum:

- Identitas
Nama: Dd
Posisi dalam program: Pengawas Lapangan

Khusus:

- Apa yang diketahui mengenai program ini
Perencanaan Program
Dulu kenapa sih pakm UPK ini berdiri?
Karna kan kita liat kan dari sampah segala macam. Kita punya keinginan untuk membersihkan sampah dulunya.
Itu dulu siapa aja pak yang ikut perencanaannya?
Kita semua, Pak RW, semuanya. Termasuk warga juga. Tokoh masyarakat.

Pelaksanaan Program

Pak jadi yang roda ini bukan di bayar UPK ya pak?
Bukan, itu yang bayar koordinator wilayah masing-masing.
Ohh jadi emang gitu ya, kalo uang yang diambil dari masyarakat itu selain buat bayar bapak-bapak yang roda, nga dikasih kesini juga pak?
Iya dikasih, buat operasinal sini, kalo nga dikasih mau ngasih gaji pegawai sini dari mana
Itu uangnya dari setiap koordinator di kasih ke siapa pak?
Ke saya yang dari Puspasari sama SMA & SMP, kalo selebihnya dikasih ke pak RW.
Ohh pak RW yang kelola ya pak?
Iya, buat bayar-bayar kebutuhan disini.
Ohh gitu, kalo hasil dari penjualan SMW ke Indocement itu gimana pak?
Kita sih 50 ton perbulannya, sati kilo 125 rupiah
Jadi berapa tuh pak? Nga bisa itung, hehehe
Hahahaha, ya sekitar 6juta. Kalo mesin jalan baik itu bisa lebih dari segitu.
Pak itu kenapa nga ditetapkan aja daerah pengambilan sampahnya biar nga overload?
Masyarakat inginnya dibawa kesini, ini aja udah saya tolak satu RW, karna disini lagi overload kan.
Trus kalo misalnya nga kesini, dibuang kemana pak?
Ke pasar paling, kalo tempat saya ke DKP, bayar 400.000 per reed.
Oia pak, kalo subsidi dari Indocement itu gimana proses pengambilannya?
Kalo itu sih urusan pak RW. Ada laporannya, pak RW yang bikin.

Program Dulunya

Gimana sih pak ini dulunya, misalnya penentuan tempatnya gitu?
Nyari tanah itu, sebeanrnya kan punya pemda ini. Jadi dulu itu tukar tempat. Pemda sebenarnya punya yang disana (tempat puskesmas sekarang). Namun karena disana deket banget sama warga, jadinya tanah kosong warga yang disini diganti dengan yang itu.
Itu awal-awal kaya apa sih pak pengolahannya?
Kalo dulu itu yah, dari roda atau mobil dating itu langsung di giling, di crusher. Sama terus di ayak.
Itu dulu yang ekkerja berapa orang pak?
18 orang. Tahun 2007. 1 Agusutus
18 orang itu ngapain aja pak?
Macem-macem, ada yang di mesin crusher, ada yang di screen, trus juga ada yang ngepak sampah
Ohh gitu. Kalo bapak sendiri apa aja tugasnya?
Saya ya monitoring disini, ngeliat-ngeliat gitu
Ohh, ini sampahnya diambil dari mana aja pak?
Dari daerah sekitar sini. Pokonya yang berdekatan sama UPK aja
Rinciannya gimana pak?

Iyaaa, dari RW 10, itu dari RT 1-4, RW 4 RT 1 dan 2. RW 1 RTnya 1 sampai 3, RW2 RTnya 1 sampai 2 terus RW 1 dan RW 2 karang sem barat. RTnya 1 sampai 5. Pokonya jalur jalan sini ampe pasar ampe tol juga disana.

Wah lumayan gede banget juga ya pak. 2008 katanya pernah menang CSR Award itu gimana pak?

Iya pernah datang orangnya kesini. Termasuk yang dari lingkungan hidup waktu itu juga dating.

Proposal dan sebagainya itu urusan siapa pak?

Itu orang Indocement yang ngurus.

Waktu itu prosesnya lagi gimana pak?

Itu berjalan waktu itu, sampahnya belum numpuk. Ya jadi masih jalan semua, belum ada yang rusak.

Aku liat itu mesin screennya da 3 ya pak? Itu dulu gimana sih pak?

Kalau yang kecil itu manual tuh, buat bikin pupuk aja. Jadi dari yang besar itu, kita fermentasi, setelah itu kita ayak lagi pake yang manual.

Yang ngambil sampah apa memang sudah bapak-bapak yang disini?

Ya ganti-ganti orangnya. Yang dulu itu Badung.

Jadi dari dulu emang ngambilnya pake roda ya pak?

Pake mobil juga dulunya. Itu ngambil dari pos 3. Karena overload kita alihkan ke DKP sana.

Jadi sekarang mobilnya nga dipake nih pak?

Dipake, buat nganter SMWnya ke Indocement. Bawa biomassnya.

Dulu selain itu pake apalagi pak diangkutnya?

Dulu ada motor 2. Motor yang ada baknya.

Itu fasilitasnya dari Indocement semua pak?

Semua dari Indocement

Termasuk yang dari gerobak pak?

Ohh kalo itu dari RTnya.

Itu gajinya gimana sih pak?

Yah itu kan mereka dapet dari RTnya

Emang mereka nga bagi kesini gitu pak?

Ya ada, jadi kan ditetapkan perbulan sekian gitu.

Kan dikumpulin ke warga, warga ngumpul ke RTnya apa gimana pak?

Kalo itu mekanismenya saya nga ngerti, yang penting mereka bayar kesini, gitu aja.

Siapa?

Dari pihak coordinator RT sama RWnya.

Ohh ada koordinatornya, jadi yang gaji bapak-bapak itu RTnya?

Yang roda iya

Yang masuk kesini nga ada pak uangnya?

Sebagian juga ada yang dibayar kesini.

Jadi sebenarnya bapak-bapak yang bawa sampah itu bukan pegawai sini ya pak?

Bukan

Kalo yang pegawai sini siapa aja pak?

Ada 7 orang,

Siapa aja

Danu, zaenal, usaman, encek, alin.

Itu kerjaannya apa aja?

Ngarungin aja

Yang jahit gimana pak?

Nah iya itu juga.

Kalo lagi nga jalan gini dapet uangnya darimana dong pak?

Ya itu tadi, dari mana aja sih, saya dan pak RW Hery yang ngatur.

Emang Indocement nga ngasih subsidi pak?

Yaaa, kan kita jual kesana SMWnya, trus juga dari masyarakat kan ada.

Indocement beben0benenr nga ngasih pak?

Iya kan kadang-kadang turun naik subsidiya

Listriknya gede pak?

Iya sekitar-sekitar 700 per bulan

Itu listriknya dipake buat apa aja pak?

Mesin crusher, screen sama mesin press

Meson press apa sih?

Dulu kan permintaan Indocement kan sampahnya harus di press.

Ohh kalo sekarang nga kaya gitu ya pak?

Engga, sekarang kan dikarungin aja.
Ini nga berfungsinya sejak kapan?
Sejak 8 bulan yang lalu, 2011

Pak ini kan termasuk program yang lama ya pak, dinamikanya pernah naik, pernah turun, itu menurut bapak kenapa sih program ini bisa tetap bertahan?

Ya karna kepedulian kita terhadap lingkungan, kalo kita nga peduli ya udahan. Kalo saya sama pak RW udahan, ya udahan semua.

Bapak ketua RT dimana pak?

RT 2 RW 6

Itu sampahnya dibawa kesini pak?

Awalnya sih sampah dari pos tiga aja yang dibawa kesini. Kalo yang di pos tiga emang udah tertata rapi ya

Pos tiga yangmana sih pak?

Yang depan indocement, itu sebelumnya disana udah tertata rapi dan dibawa DKP. Nah sebelum ini berdiri sampahnya kita tarik kesini. Uang retribusinya dialihkan kesini.

Pegawai-pegawai yang disini asalnya dari mana pak?

Dari daerah sini

Kalau ada masalah disini koordinasinya ke Indocement itu gimana pak?

Kita sih langsung ke CDO aja.

Ada bikin laporan-laporan gitu sih nga pak biasanya?

Itu urusan pak fajar mah biasanya. Dulu memang ada orang administrasinya, sekarang nga ada.

Ohh dulu ada pak, itu kenapa sekarang nga ada lagi pak?

Ya karna pemasukan kita kurang, mau bayarnya bingung.

Jadi ini arahannya ke kemandirian ya pak?

Kalo udah stabil sih iya, lepas tangan. Tapi urusannya masih di maintainance. Infrastruktur. Tapi kalo masalah-masalah yang kecil yah biasanya kita tanganin sendiri

Emang disini bener-bener nga ada TPS ya pak?

Kalo dibikin TPS itu, anggaplah bikin bak gitu. Pagi bersih sorenya udah numpuk lagi. Makanya disana tuh TPS saya bongkarin. Malah bikin runyam.

Memang penduduknya disini rame banget ya pak?

Uhh rapet banget udah.

Ini umumnya penduduk apa pak?

Pendatang umumnya, 60-40 pendatang sama yang aslinya. Jadi banayakan penduduk pendatang memang.

Tapi pernah ada yang komplain-komplain gitu nga pak?

Ya ada, tapi kita bawa ketawa aja, jadi ya beres sendiri. Pak RW aja pernah nyuruh orang demo, trus nanti dibayar "nih gw bayar, satu orang 10ribu, dikasih makan" pada nga jadi

Buat demo apa?

Buat demo ini, nga ada yang jadi tuh, jadi ada yang kontra

Itu dulu awal-awal pak?

Engga udah pertengahan, malah udah ditawarkan dibayar buat yang mau demo, tapi nga ada yang mau,

Untuk ngurusin ini bapak digaji Indocement?

Engga tuh, hhahaha, saya ngurusin dari hati aja, lagian siapa yang mau ngegaji. Jadi pokoknya plus minusnya kerja disini adalah, gituuu, kalouang mah kan bisa dapat darimana saja.

Jadi manajemennya gimana pak?

Pak RW penanggung jawab semuanya, saya koordinator lapangan, trus ya pekerja yang disini. Tukang jahit, yang crusher 3 orang, yang screen 2 orang,

kalo crusher itu ngapain kerjanya pak?

Ya masuk-masukin sampah buat crusher.

Kalo yang penyaringan?

Ya misahin, kalo yang plastik masukin karung, kalo kompos di frementasikan. Kalo dulu kan dua sift. Pkerjanya jadi dua sift. Jadi kalo sift dua itu khusus ngemasin aja. Jadi kalo pagi itu udah bersih.

Itu dari jam berapa pak?

Ampe jam 10.

Jadi pembagian jamnya gimana pak?

Dari pagi ampe jam 3 sift 1, trus sift 2nya dari jam 3 sampai 10 malem. Sift dua untuk pengemasan sama fermentasi. Kalo yang pertama crusher, penyaringan.

Kalo yang dari pabrik roti pak?

Ohh itu paling 5 karung per minggunya.

Sampah diambil, masuk ke sini, sampahnya di keluarkan, sama oegawai UPK dimasukin ke mesin crusher ke mesin screen, dari screen kepisah SMW sama kompos. SMW langsung dikemas, kompos di frementasikan dulu.

Itu di fermentasikannya berapa lama pak?

Bisa ampe sebulan itu.

Trus pegawainya ada yang jahit, ada yang di mesin crusher, screen, ada yang pengepakan sama security sama driver.

Pak RW penanggung jawab keseluruhan, koordinator lapangan bapak, trus setelah itu langsung pegawai.

Administrasi pak fajar yang sekarang pegang.

Itu masyarakatnya bayar berapa sih pak?

Kalo masyarakat perkampungan paling bayar berapa sih, kata yang ngambil sampah "minta 5000 aja susah". Tergantung rumahnya seperti apa aja, sampahnya lah terutama.

Kalo yang lain sampahnya gimana tuh pak?

Ke DKP, kalo masyarakatnya bayar ke DKP itu 400 satu kali angkut. RT saya itu aja bayar ke DKP. Itu bayar 5 ribu. Kita disana kan banyak pabrik, jadi kit aminta subsidi dari mereka.

Kalo sampah mah jangan kan tingat RT RW, provinsi aja susah.

Satu red itu maksudnya gimana pak?

Satu truck, mereka ngambil dari pinggir jalan. Kalo saya sistemnya hari senin. Warga naruh sampah di satu titik, ntr diambil DKP dari situ. Jadi seminggu dua kali. Peraturan pemerintah itu ribet.

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan dan cara mengatasinya

Itu sampahnya kebanyakan sejak kapan pak?

Sejak 2011,

Itu kenapa pak sampahnya kebanyakan?

Karna penduduknya bertambah,

Jadi nga ada penetapan wilayah pak?

Ya nga bisa dong, krna sampah dari penduduk itu tetap harus kita ambil. Penduduknya padat.

Kendala lainnya dari program apa pak?

Ya kadang listrik mati juga (dari PLN), kadang mesinnya rusak.

Mesinnya sering rusak ya pak?

Iya, kadang nyari laharnya aja buat mesin sussah banget. Kadang ampe ke Jakarta nyarinya.

Sebelumnya nga pernah ada penumpukan sampah?

Engga, pas 2011 aja. Itu kan gara-gara troble 1, semuanya pengaruh, aggaplah mesin jahit aja ayng rusak kan pengaruh ke yang lainnya, sampahnya jadi nga tau mau dikarungin kemana.

Ntr kalo sampah yang dari sini nga bisa diolah kan dibawa DKP ya pak, itu siapa ayng bayar?

Ya kita juga yang bayar, 2,5 juta perbulan. Ya pemerintah kan seperti itu

Itu sejak kapan pak abyar segitu?

Sejak bulan ini, kalo dulu bayar 350.000 tiap kali jalan.

Yang manage keuangannya siapa?

Pak RW

Kalo ada masalah gitu gmana dong pak?

Saya nanti lapor ke pak RW

Kalo tenaga kerjanya bermasalah nga pak?

Iya, susah nyari tenaga kerjanya. Kalo kaya dulu mungkin gampang ya, kalo sekarang susahnya karna disini kan udah banyak pabrik.

Ohh itu mulai bayar 2,5 juta sejak ngumpul sama orang DKP itu ya pak?

Iya, hasil dari situ, keputusannya jadi kita bayar ke DKP utnuk sampah yang nga bisa kita olah.

DKP itu kecamatan apa ditingakt kabupaten pak?

Kabupaten

Itu ntr dibawanya ke mana pak?

Ke TPA di Galunggung

Transkrip Wawancara Masyarakat yang Terlibat Langsung dengan Program

Umum:

- Identitas

Nama: Hr

Posisi dalam program: Ketua Pengelola Program

Berapa lama bekerja di program: Sejak Awal Berdirinya Program pada 2007

Pekerjaan Sebelumnya:

Latar Belakang Pendidikan:

Tanggung Jawab dalam Program:

Bentuk Keterlibatan:

Khusus:

- Apa yang diketahui mengenai program ini

Sejarah Berdirinya program

Itu perencanaannya dulu gimana paa?

Dari awalnya itu, UPK Kecamatan Citereup, Unit Pelayanan Kebersihan kec Citereup yang dalam hal ini adalah sebagai pengolahan sampah. Berdirinya berawal dari banyaknya atau berantakannya sampah dari wilayah kota kecamatan Citereup pada saat itu. Sebenarnya dari awal memang sudah menjadi pemandangan yang tidak enak. Walaupun bagaimana sampah yang berantakan nga enak. Waktu itu saya dan pak camat berembung. Pak camat juga menanyakan kepada saya, gimana supaya sampah tidak berantakan, supaya lebih bersih. Saya kemudian bilang, pas waktu itu ada kunjungan bupati, tahun 2006, yaudahlah pak camat, kit buat TPS-TPS di lokasi-lokasi tertentu. Nah dibuatlan disaat itu yang namanya TPS, itu dibuatnya kaya depan ruko-ruko dan beberapa lokasi tertentu. Kita kerjasama pada waktu itu dengan DKP. Artinya masyarakat membuang disitu, lalu diangkut oleh DKP. Namun pada saat ditengah perjalanan itu tidak menjadi solusi. Di satu sisi masyarakat buang sembarangan. Dari motor, dari mobil atau banya orang yang buang sampah bahkan tidak hanya dari masyarakat setempat, artinya lokasi itu dimanfaatkan seperti usaha-usaha catering dari Gunung Putri. TPS akhirnya jadi masalah.

Setelah itu kita ngambil langkah ke dua, kita tutup semua itu, kita ganti caranya yang sporadis saja. Kita sapu, lalu buang ke kontainer yang disiapkan oleh DKP. Jadi sifatnya tidak permanen. Ternyata itupu sama.

Pada akhirnya saya punya pemikiran, gimana pak kalo misalkan kita buat semacam pengolahan sampah. Namun pak camat waktu itu bilang, itu biayanya nga kecil pak RW. Lokasi tanahnya juga kita harus cari yang daerah pinggiran. Saya bilang kalo mau mengolah sampah kota, berarti tempatnya ya harus ditengah kota. Tapi masyarakatnya kan susah, trauma lah, umumnya tempat pengolahan sampah kan bau, polusi udara dan air. Saya bilang lagi mungkin nanti polanya begini pak, kita kerjasama supaya bagaimana biaya yang besar bisa kita kerja sama ke Indocement. Kita mulai tu, datang ke pihak manajemen. Ternyata manajemen merespon. Saya disuruh buat porposal semacam konsep kecil-kecilan lah. Disitu saya merasa terpenggil, saya beli buku-buku tentang pegolahan sampah, pengelolaan lingkungan. Pada saat itu indocement merespon dan kemudian mengambil ahli yang waktu itu Prof. Dr. Azwar Yanas. Guru besar di IPB. Nah pada saat sebelum kita mulai, saya banyak dibimbing dan diajarin sama beliau. Akhirnya kita cari lokasi. Pada saat itu lokasi yang sekarang itu masih rawa. Akhirnya diputuskan disitu. Kit abuatlah surat pengajuan ke Pemda. Pemda mengizinkan, silakan saja tanh itu dipakai selagi tidak digunakan oleh pemda. Walaupun ternyata pada saat itu ternyata yang punya pihak swasta. Pemda akhirnya ngeganti tanah itu.

Pada saat kita mau buka disana, tantangannya adalah masyarkat menolak keras keberadaan pengolahan sampah disana. Karna masyarakat itu yah karena trauma tadi dengan alasan bermacam-macam.

Akhirnya setelah kita melakukan survey dengan pemerintah kabupaten, kecamatan dan indocement, saya akhirnya bilang, udah ini di tinggal saja, saya akan berusaha mendekati masyarakat, memberikan sosialisasi, akan kita coba sharing, seenggaknya kita bisa menangkap apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi dasar masyarakat itu menolak. Akhirnya dengan gaya gaul saya saya sampaikan kepada mereka. Kenapa seperti jagoan semuanya, seolah-olah seperti saya akan melakukan suatu kegiatan yang mengganggu banget. Akhirnya mereka menjawab, bukan apa-apa pak rw, katanya pengolahan samapah itu akan memeberikan dampak negatif kepada mereka. Karena menang masyarakat itu belum mengerti. Pada akhirnya saya sampaikan kepada masyarakat puspanegara. Saya nga akan ngomong-ngomong aja, silahkan siapkan waktu, anda akans aya bawa jalan-jalan ke tempat pengolahan sampah yang mapan. Ini terjadi 2007.

Karna sosialisasinya memakan waktu hampir satu tahun. Akhirnya mereka melalui Rwnya RT ataupun karang taruna, siap mau melihat pengolahan sampah yang memang sudah bagus. Setelah itu saya bilang lagi ke Indocement, saya menjanjikan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang menolak pendirian tempat pengolahan sampah ini, kita ajak jalan-jalan ke lokasi pengolahan sampah. Waktu itu saya minta indocement, menyiapkan bis, snack, makan. Pokonya seperti acara wisata, tamsya. Akhirnya kita coba ke Bekasi, jati asih. Kita kenal dengan pak Renal Khasali, rumah perubahan. Disana ada pengolahan sampah. Pada saat itu yang dipimpin oleh pak Hidayat dan beberapa alumni UI berupaya melakukan sesuatu agar sampah menjadi sesuatu hal yang positif. Dan pada saat itu pengolahan sampahnya tidak bau. Akhirnya masyarakat yang berkunjung disana yang disini menolak, baru disana ngomong, ohh nga disini nga bau yan pak RW. Akhirnya dikomentarin tuh sama Pak Hidayat, inget banget saya yang dibilang pak Hidayat. Ya disini bau juga, tapi bau duit. Akhirnya masyarakat merasa puas, baru setelah itu, setelah dari sana, iya kita coba sama-sama ngejalanin. Selain itu pada waktu itu kita juga jalan ke daerah-daerah hijau yang ada di Jakarta.

Dari hasil survey ini, hasil tamsya ini ada nilai positifnya, kita coba bergabung dengan beberapa RW, pada tanggal 7 Agustus 2007 diresmikan dibuka oleh bupati Agus Kuntara, bahwa UPK kec. Citereup sebagai pengolahan sampah kec Citereup.

Jadi itu kerjasamanya?

Masyarakat, indocement, serta pihak pemerintah. Waktu itu sih belum dengan dkk ya. Saya juga pernah rapat di pemda. Dihadiri semua instansi. Yang dalam hal ini skpd. Dinas-dinas yang terkait, dinas lingkungan hidup, dinas kebersihan, itu semua pada saat itu saya juga kecewa. Pada saat itu mereka juga tidak mengizinkan begitu saja. Saya yang pada saat menyampaikan presentasi, seolah-olah akan membuat sebuah proyek mercusuar. Pertanyaan yang mereka ajukan misalnya, apakah mau tanah seluas 2000 m² itu akan di jadikan tempat pengolahan sampah, pak RW udah memikirkan belum dampak lingkungannya seperti polusi udara, polusi air, itu semua ditanyakan kepada saya. Terus terang pada saat itu agak emosi dan kok saya pikir pemdanya kok malah begini. Akhirnya saya ngomong pada saat itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, dalam hal ini pemda kabupaten bogor. Bapak perlu ketahu, rapat hari ini di ruang sekda jaman itu pak sundawa, yang tidak dibayar adalah saya sebagai RW. Bapak-bapak ikut rapat hadir disini itu masuk hitungannya kerja. Namun di satu sisi saya ingin melakukan pekerjaan yang mulia, karena sampah itu selalu bermasalah di sisi masyarakat namun disisi lain kok seperti saya ingin melakukan proyek mercusuar. Di persalahkannya seperti ini. Wauaduh luar biasa. Saya bukannya tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Namun mereka tidak menyadari pertanyaan tersebut mereka juga yang jawab. Karna bicara undang-undang sampah, yang punya kewajiban pengolahan sampah, yang punya kewajiban penanganan sampah adalah mereka, pemerintah secara luas dan pemerintah secara khusus kabupaten bogor. Saya waktu itu dibela Prof. Dr. Azwar Yanas. Beliau bilang, terus terang saya selaku kaum intelektual, yang dalam posisi ini di minta untuk mendampingi pak RW, terus terang saya baru ketemu dengan pak RW yang punya pemikiran seperti pak RW. Harusnya pemda bangga punya pak RW Hery yang mau memikirkan bagaimana masalah sampah ini. Jadi waktu itu pemdanya malu.

Artinya saya mendirikan UPK ini tantangannya tidak hanya dimasyarakat tapi juga di Pemdanya. Dengan laka likunya akhirnya berdiri juga. Setelah berdiri pun tidak mudah. Memang yang menjadi permasalahan kita di Indonesia, tidak hanya kecamatan, tidak mempunyai kesadaran membuang sampah di tempat yang benar. Tanpa kita sadari, saya juga, plung buang puntung rokok, bekas makanan. Pak ali, ohh bukan, pak fajar tuh ngeliat sendiri ketika saya marahin orang yang pake mobil mewah, Camry buang sampah sembarangan dari mobilnya bekas makan roti. Artinya tidak kalangan atas tidak kalangan bawah pemikiran ataupun perilaku membuang sampah pada tempat yang benar itu belum dilakukan. Termasuk di lingkungan tempat tinggal kami, rw 01 Karang asem ini. Tidak mudah masyarakat saya untuk membuang sampah pada tempatnya. Tetap saja terkadang buang sampah seenaknya sendiri.

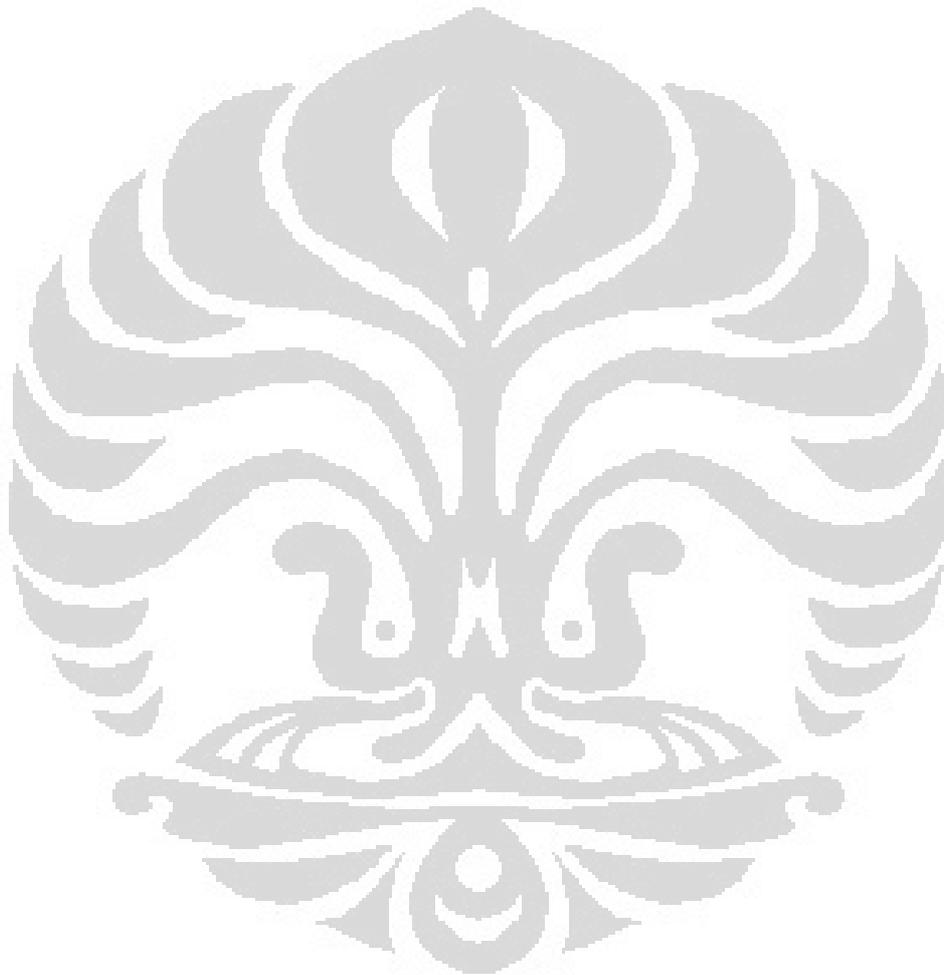
Nah itu mungkin dasar atau awal berdirinya UPK. pada saat berjalan juga sama, volume sampah yang masuk dengan kapasitas produksi kita itu tidak sebanding, volumenya terlalu besar. Jadi masalah lagi. Namun ini kita sadari oleh saya selaku pengelola dan indocement bahwa sampah itu memang bukan masalah yang sederhana. Dan yang mengkritisi saya juga banyak. Tapi saya jalan terus saja. Termasuk juga kemaren keputusan indocement kita tutup saja, saya termasuk orang yang keras menolak karena walaupun bagaimana saya bisa membayangkan kalo tempat pengolahan sampah itu ditutup, betapa banyak sampah-sampah yang akan berserakan di lingkungan-lingkungan yang selama ini buang sampah ke situ termasuk kota citereup. Artinya sampai akhirnya kita berupaya dengan pihak indocement kita buat, akan kita renovasi, akan kita buat pengolahan sampah ini menjadi sebuah pilot project. Terakhir kemaren saya rapat sama DKP.

Biomass itu sih sebenarnya sampah racikan yang kering. Yang akhirnya dipadu dengan batubara yang akhirnya dimanfaatkan oleh indocement. Sekarang kita akan mencoba membuat kompos. Baik kompos pupuk ataupun cair. Nanti akan coba kita buat, karna kemaren kita juga sudah survey dengan tingkat pemda. Sampai mereka juga mengatakan bahwa ini tidak hanya dijadikan tempat pengolahan sampah namun juga

jadi taman wisata. Artinya dibuat suasananya lebih hijau, lebih tertata dan lebih rapih. Saya disana sebagai penanggung jawab dibantu pak RT. Data-data lebih rinci ada di pak fajar.

- **Penghambat pelaksanaan program**

Kalo kita bilang sih mereka juga pekerja sosial, karena kita bayarnya masih belum UMR. Belum sanggup kitanya. Unsurnya kebanyakan unsur sosial, unsl insyaAllah, alhamdulillah. Namaun yan kadang ngedumel-ngedumel dikit ya biasa lah. Namanya juga manusia.



Transkrip Wawancara Masyarakat yang Terlibat Langsung dengan Program

Umum:

- Identitas
Nama: Zn
Posisi dalam program: Kerjanya ya ngarungan, ngirim, naikin sampah,
Berapa lama bekerja di program: 3 tahun
Pekerjaan Sebelumnya: kuli bangunan
Latar Belakang Pendidikan:
Tanggung Jawab dalam Program:
Bentuk Keterlibatan:
Jam kerja: 8-16

Khusus:

- Bagaimana proses terlibat dengan program
Awalnya kenapa bisa kerja disini?
Saya nganggur, pokoknya saya maunya gaji naik ahhh
Dulu diajakin kerja disini sama siapa?
Sama teri, orangnya udah nga ada sih, dulu pekerja disini juga?
- Apa yang diketahui mengenai program ini
- Pernahkah mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh UPK
Selama tiga tahun kerja disini pernah ngikutin kegiatan-kegiatan yang dilakukan ITP nga?
Saya dikasih tau sama pak Dedi yang dikantor doang cara make mesin
Kalo tentang keselamatan kerja atau kesehatannya pernah nga?
Pernah, kadang-kadang dikasih susu, tapi kadang-kadang juga tidak
- Manfaat apa yang diterima setelah terlibat dalam program ini
Setelah bapak kerja disini manfaat apa yang diperoleh?
Rongsokan, buat smapingan beli rokok lah
Saya pokokny minta naik gaji sama pak fajar
- Fasilitas apa saja yang didapat selama bekerja? (gaji/tunjangan kesehatan/tunjangan hari raya/tunjangan keamanan/gaji lembur)
Kalo kaya sarung tangan, helm, sepatu, itu dikasih nga?
Kadang dikasih, kadang engga
Kenapa nga dipake sekarang?
Kan udah abis dipake, ancur
Dikasihnya kapan?
Udah lama, kalo sepatu udah lama, bawahnya udah jebol lagi,

Bapak pernah sakit nga selama kerja disini?
Seiring kalo sakit sih, meriang, batuk
Dikasih biaya sama sini nga?
Kadang dikasih kadang engga
Siapa yang ngasih?
RT Dedi 20.000
Kalo lebaran dikasih nga?
Iya sedikitlah
Bapak pernah kerja lembur nga?
Digaji

Transkrip Wawancara

Pihak ITP

Umum

- Identitas

Nama: Ay

Posisi dalam program: Kepala Seksi SDP

Berapa lama bekerja di program: Sejak 2009 (3tahun)

Pekerjaan Sebelumnya: Plantsite 7-8 ITP

Latar Belakang Pendidikan: S1 Elektro Universitas Pancasila

Tanggung Jawab dalam Program:

Tanggung jawab bapak terhadap program secara rincinya apa?

Saya bertanggung jawab bagaimana supaya program ini berjalan baik. Semua kendalanya apa, itu yang saya pecahkan agar program tetap berjalan dan berkelanjutan dan juga tujuannya tercapai. Masalah yang ada juga dikoordinasikan tergantung dengan masalahnya apa. Misalnya kali yang bermasalah mesinnya, kita koordinasi dengan bagian mesin. Kalo masalahnya dari masyarakat, kita koordinasinya dengan pihak kepala desa, tokoh masyarakat. Intinya itu, tanggung jawab saya adalah program itu berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya kan banyak kendala. Kendala itulah yang harus saya atasi. Dengan cara apa, misalnya dengan berkoordinasi, atau turun langsung gitu.

Khusus:

- Identitas Porgram

Tujuan pelaksanaan program

Tujuan program UPK itu apa pak?

Jadi gini, pada tahun 2007 ya, ada keluhan dari warga citereup puspanegara mengenai masalah sampah. Banyak sampah yang belum terkelola oleh DPK. Kita pada saat itu berinisiatif untuk bantu mengelola sampah tersebut?

Jadi tujuannya membantu ya pak?

Dengan konsep 3R. Terus kita melakukan studi banding ke tempatnya bapak Rhenal Khasali. Disana sudah melaksanakan pengolahan sampah dengan sistem 3R. Jadi studi banding kesana beserta para tokoh masyarakat yang ada di Puspanegara. Dari situ kita putuskan untuk membangun suatu tempat pengolahan kebersihan.

Masyarakat ikut terlibat pak?

Engga, tapi maksudnya disini masyarakat menyetujui, kita tetap mengadakan suatu program diluar itu harus minimal publikasi dan mendapatkan persetujuan dari pihak terkait. Pihak pemerintahan desa dan tokoh masyarakat. karena itu kan pembangunan kan adanya di masyarakat. Nah terus, oke, setelah persetujuan segala macam lah ya, kita bangun dengan konsep 3R.

Ada tujuan lainnya nga pak?

Tujuan utamanya itu, intinya mengelola kebersihan di masyarakat. secara nga langsung membantu pemerintah mewujudkan lingkungan bersih. Sebenarnya kan itu tanggung jawab pemerintah, fungsinya kita hanya membantu aja. Yang harusnya menangani kan pemerintah dalam hal ini DKP. Kita pada dasarnya membantu mereka dalam pengelolaan sampah itu.

Juga terpikirkan untuk meberdayakan masyarakat nga pak?

Pasti, dengan adanya UPK disana, tentu ada orang yang harus mengerjakannya, terjadi penyerapan tenaga kerja. itu efek keduanya. Yang pertama adalah kebersihan tadi. Ketika kita menjalankannya tentu akan menyerap tenaga kerja pada saat pembangunannya, pada saat pengelolaannya, artinya operasionalnya memerlukan beberapa orang. Dulu itu sampai 12 orang tenaga kerja. nah itu merupakan efek sosial dengan mengurangi pengangguran.

Konsep pemberdayaan lebih ke arah ekonomi ya pak?

Sebenarnya gini, ... dapat, ekonomi dapat. Ekonominya penerapan tenaga kerja, dan dipacu untuk menghasilkan. Artinya si pengelola yang bekerja disitu kan harus punya profit. Makanya mereka dipacu untuk mendapatkan profit dengan menjual produknya. Yang tadinya sampah dibuang dan tidak dipakai sekarang dikelola, diolah supaya bisa menghasilkan uang. Kompos kan bisa dijual, biomass kan juga bisa dijual. Terus plastik-plastik pilahan juga bisa dijual. Jadi nilai ekonomisnya ada disana. Jadi kita mempekerjakan mereka dan memacu mereka untuk bisa mandiri melakukan pengolahan ini. Artinya kita siapkan umpannya, mereka yang mengelola dan tentunya dengan kita dampingi.

Tidak, jadi indocement berusaha untuk memberdayakan masyarakat. Kan tujuan kita adalah membantu masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk mengelola dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dan indocement disini membantu fasilitasnya. Pengelolaannya dilaksanakan oleh pengelola, disana ada pengelolanya. Pak RW Heri sama pak RT Dedi disana yang mengelola. Namun kita tetap membantu memantau karena kita ingin itu bisa berjalan dengan baik dan membantu masyarakat sesuai dengan tujuan yang kita inginkan.

Output yang diharapkan dari program

Output yang ingin dicapai apa sih pak?

Lingkungan bersih dan juga kemandirian. Jadi si pengelola bisa mengelola UPK secara mandiri. Tanpa lagi ketergantungan kepada kita. Bagaimana mengelola dengan baik dan mendapatkan profit. Disamping kita membantu masyarakat, dengan menggunakan teknologi kita bisa mengolah itu menjadi suatu hal yang menghasilkan.

Itu tadi, saya ingin membawa itu kembali ke fungsi yang sebenarnya, yaitu sebagai pengolahan sampah. Bukan dalam arti mengambil alih, namun membantu. Sehingga sesuai dengan kapasitas dan bisa mandiri. Kita juga bersama pemda dan pak camat, ingin itu juga bisa menjadi pusat studi pengolahan sampah, bisa diolah menjadi pupuk, alternatif fuel. Jadi si pengolahan itu bukan menjadi space seperti yang dibantar gebang, bukan, tapi itu scopenya adalah percontohan, dimana para pelajar bisa belajar pengolahan sampah yang baik itu seperti apa. Tujuannya juga kesana. Disamping juga membantu masyarakat sekitar sesuai dengan kapasitas.

- **Perencanaan Program**

Sama aja kaya yang digunug sari, sosialisasi, di bilikom, di ceritakan bagaimana cara pengolahan sampah sampai masyarakat disana dibawa itu ke rumah perubahan rhenald kasali.

Nahhh iyaa, memang seperti itu. Dalam perencanaannya kita liat masyarakat butuh nga nih, ketika kita liat masyarakat butuh, kita bikin programnya. Ada juga yang idenya dari masyarakat, masyarakat merasa butuh, lalu kita fasilitasi.

- **Pelaksanaan Program**

Dalam pelaksanaan program ini, timnya siapa aja pak?

Di saya ada yang namanya SDP Officer, pak fajar yang saya tugasin di puspanegara. Dibawahnya pak ali. Kalo di CD kan ada kordes, kalau di saya pak ali, pak ali sama fungsinya kaya kordes. Cuma kalau kordes ke desa-desa, pak ali ke proyek. Yang intens memonitor, pak ali, kemudian pak Fajar.

- **Evaluasi Program**

Pelaksanaan evaluasinya gimana pak?

Setiap tahun kita kan ada meeting. Dengan seluruh unit operasi. Annual meeting untuk mengevaluasi semua program yang dijalankan. Di kita juga ada kegiatan yang dijalankan. Intinya selalu mengevaluasi perbulan. Ada laporan ke departemen. Terus ke manager, perkembangannya gimana, apa yang perlu dievaluasi.

Kalo untuk pelaksanaan evaluasi perbulannya itu bentuknya gimana?

Kan ada pelaporan dari mereka setiap bulan, terus kita evaluasi apa yang kurang. Ada rapat koordinasi juga setiap bulannya.

- **Masalah yang pernah terjadi dan cara mengatasinya**

Itu yang di Puspanegara, animo masyarakat terhadap pengolahan sampah semakin meluas, artinya semakin hari, setiap bulan, semakin luas masyarakat yang dilayani oleh UPK. jadi dari 2009 trus kesini, namun pertambahan volum sampah tersebut belum didiringi dengan kapasitas produksi yang memadai, baik itu mesin ataupun orang. Nah sehingga, di tahun 2011 terjadi overload. Jadi apa yang bisa kita kelola, yang bisa kita olah. Jadi awalnya kita hanya membantu DKP. Dalam hal ini dinas kebersihan dan pertamanan. Untuk mengelola sampah dari masyarakat yang sebelumnya belum terkelola oleh dinas. Namun kenyataannya masyarakat makin banyak yang bergantung dengan kita. Sehingga kapasitas yang harusnya 1 ton jadi 4 ton per hari. Nah jadilah overload.

Upk itu sebeanrnya kan sudah ada pengelola sebenarnya. Kita hanya membantu lahan, fasilitas, mesin-mesin dan hasilnya yang tidak bisa diolah dijadikan alternatif fuel untuk pengolahan semen. Pada saat overload itu seirngkali kita juga membantu. Sebenarnya kita juga ingin mereka mandiri ya, artinya layaknya badan usaha kita membeli produk mereka dengan dikirim ke sini. Namun karena banyaknya sampah kita bantu lagi mengangkutnya kesini agar tidak terjadi overload disana.

Dengan sistemnya mereka, yang menaikkan ke truck kecil, terbatas lah. Artinya kita bantu agar kapasitas pengiriman kesini bertambah. Setelah diolah perlu dikarung dan segala macam, kita bantu ngangkutnya kesini. Nah itu dari 2009 ke 2011.

Sampai akhirnya, setelah kita evaluasi bahwa tidak bisa terus menerus seperti itu. UPK ini juga tidak bisa terus menerus sebegitu banyak sampah, itu juga salah. Akhirnya dibenahi . tapi kan ini masalahnya masyarakat sudah bergantung kepada UPK. karena sudah dilayani penarikan sampahnya. Kita berusaha lagi kembalikan kepada fungsi awal, bahwa Indocement disini fungsinya adalah membantu pemerintah, bukan untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah dalam bidang sampah ini. Makanya saya berkoordinasi dengan pihak pemda dalam hal ini pihak kecamatan. Terus juga dengan dinas kebersihan. Kita musyawarah di dinas kecamatan, kita sepakati bahwa sampah yang akan kita olah adalah sampah yang sesuai dengan kapasitas mesin. Indocement akan mengupgrade kapasitasnya, tapi juga tetap masih dibawah input sampah yang dibawa dari masyarakat. Jadi selain itu kita juga akan berkoordinasi dengan dinas. Ada sampah yang diambil dinas, ada sampah yang kita kelola. Jadi kita akan mengolah sampah sesuai dengan kapasitas dan tempat yang ada. Nah kesepakatannya seperti itu. Ditambah lagi indocement akan mengupgrade dan menambah fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Seperti mesin-mesin. Ini kan generasi pertama, jadi kita ingin mengupgrade seperti generasi kedua kita yang lebih kompleks mesinnya sehingga bisa menghasilkan kompos padat dan cair. Jadi bisa lebih beraneka ragam. Indocement membantu memfasilitasi mesin dan sarana prasarana yan ada disana.

- Kegiatan lain

Kegiatan lain yang dilakukan selain kegiatan inti pengolahan sampah?

Pendampingannya seperti apa?

Misalnya hal-hal teknis, kita ajarin. Mulai dari pembuatannya kita beli mesin, dan training agar mereka bisa mengerti cara mengoperasikan mesin. Kita juga berikan mereka pelatihan kesehatan. Itu kan berhubungan dengan kesehatan pekerja. Bagaimana bekerja dengan aman, tidak mengganggu kesehatan. Itu kita berikan semuanya, supaya mereka bisa bekerja dengan baik.

Ini memang menjadi kegiatan rutin program pak?

Iya, ini memang masuk dalam program. UPK ini kan termasuk salah satu program CSR nih. Kita Indocement, itu memang ada program bernama Join Safety Infection. Yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Itu adalah kita bergabung dari tim safety, health, security, sama CSR yang bertanggung jawab dalam program tersebut. Apa yang dilihat, itu tadi, faktor safetynya, kesehatannya dan faktor keamanannya. Ini ditujukan dengan semua program CSR, salah satunya UPK, yang berhubungan dengan adanya kegiatan kerja. kalo misalnya beasiswa itu tidak. Pokoknya yang ada proses kegiatan manusia didalamnya. Nah itu perlu infeksi dan penyuluhan

Ohh bentuknya penyuluhan pak?

Infeksi dulu, setelah di infeksi, misalya, oh ini kurang kesadaran, bentuknya tim datang ke lokasi, melihat apa yang kurang disitu. Dari segi keamanannya, kesehatannya. Dari hasil infeksi itu ada rekomendasi, misalnya adanya kurang kesadaran pekerja mengenai kesehatannya. Dari situ diadakanlah penyuluhan bahwa misalnya setelah bekerja harus cuci tangan, mandi tidak boleh makan karena itu kan kotor. Kalo dari safety misalnya pengoperasian mesin, pekerja harus menggunakan APD, alat pelindung diri, ada safety shoes, ada earpla, ada masker.

Itu terlaksana pak?

Terlaksana, makanya ada program yang tadi aku bicarakan.

Selain itu ada program lain nga pak yang terkait Upk tapi diluar kegiatan inti?

Kemaren itu ada kerja bakti, dikampung Muhara. Itu sampahnya berserakan, tidak tertata. Disana diadakan kerja bakti masyarakat sekitar, sampahnya dikarungin, dikemas kemudian kerjasama dengan UPK Puspanegara. Mereka kan waktu itu kesulitan juga, nga tau sampahnya mau dibuang kemana. Untuk masyarkat yang sampahnya diambil oleh Upk, pernah diberikan sosialisasi nga pak? Pernah, dari awal kan sosialisasi itu penting ya, tetnang kebersihan, kesehatan, lingkungan. Disana kita adakan pertemuan, dengan warga dan pemerintah setempat. Seperti penyuluhan lah, tentang hidup bersih, bahanya lingkungan yang tidak bersih, seperti itu. Kita kerja sama dengan tokoh masyarkat juga.

Output yang dihasilkan adalah kemandirian

Usaha yang dilakukan untuk mendorong UPK ini mandiri apa aja pak?

Pendidikan manajemen secara tidak langsung. Bagaimana mengelola tenaga kerja, bagaimana dia meningkatkan nilai jualnya. Kita berikan pengarahan langsung. Kepada pengelola ya, kita ajak mereka studi banding, benchmarking, ke UPK-UPK yang lain.

- **Penghambat Pelaksanaan Program**

Sejauh ini, dari sisi pelaksanaan UPK kelemahannya apa pak?

Masyarakat merasa terbantu, namun kontribusi iuran masih sangat rendah. Jadi artinya pengelola UPK kan memperkerjakan orang. Harus dibayar. Salah satu pendapatannya kan dari masyarakat nih. Cuma kesadarannya masih rendah untuk membayar iuran. Keduanya, masyarkat semakin tergantung dengan keberadaan UPK, jadi sementara kita masih ada keterbatasan. Pkerjanya, mesinnya. Sampahnya makin banyak yang dibuang kesitu. Nah ini menjadi kendala. Sampah jadi overload. Sampah yang masuk lebih besar dari sampah yang bisa dikelola.

Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi ini pak?

Daripengelola ya, soalnya kan kita punya pengelola yang sudah kita percayakan. Kita posisinya kan Cuma membantu. Ada pengelola yang bertanggung jawab untuk operasional, kalo ada kesulitan ya kita bantu. Ini kita dorong pengelola untuk bisa berkordinasi lagi dengan masyarakat. mengenai sampah yang overload kita langkah awalnya adalah bekerja sama dengan pihak dinas khususnya DKP. Jadi ada sampah yang ditarik oleh mereka. Jadi kita menyediakan seperti TPS di tempat kita, tapi itu yang tidak bisa kita kelola diambil oleh DKP. Selain itu kita juga upayakan menaikkan kapasitas mesin.

Kalo dari sisi pengelolaan sendiri pernah ada masalah nga pak?

Pengelolaan ada, itu disana tenaga kerja keluar masuk. Kita juga tidak bisa paksakan orang untuk stay terus disitu. Tapi itu memang menjadi kendala.

- **Pendukung Pelaksanaan Program**

Masyarakat terbantu, pemerintah terbantu, lingkungan terbantu.

Kalo kekuatan dari dalam programnya pak? Apa yang membuat dia selama ini bertahan?

Kita sih ngeliatnya karena masyarakat butuh. Yang kedua kita juga mendidik mereka untuk bisa survive, agar usaha ini tetap berjalan. Sebenarnya kan ini merupakan suatu unit usaha kalalu bisa dibilang. Ada bahan bakunya, pengolahan bahan baku, ada produk yang bisa dijual, mereka bisa lakukan itu. Artinya proses itu bisa dijalankan.

Transkrip Wawancara

Pihak ITP

Umum

- Identitas

Nama: Dd

Tanggung Jawab Dalam Program:

Ada saya, fajar sama pak ay. Saya pegang bagian perencanaan, teknis, pembuatan ini (lay out upgrating), itu memang di saya tuh. Tapi kalo misalnya laporan, administrasi keuangan, administrasi lainnya itu di pak fajar. Kalo pak ay sebagai kepala section itu di pak ay.

Khusus:

- Pelaksanaan Program

Peningkatan kapasitas dan peningkatan sistem, kalo sekarang kesana itu masih seperti model awal. Sampah masuk ke dumping area kemudian tanpa dipilah langsung masuk ke saringan, kemudian dikemas, sebagian mejadi kompos dan sebagian lagi dikirim ke Indocement. Jadi itu yang terjadi sekarang disana. Disana sekarang hanya ada mesin crusher, mobil masuk, di crusher kemudian di tumpuk, setelah kering dimasukkan ke karung.

Kita rencanakan ada perbaikan, kita investasikan dana yang cukup besar juga untuk perbaikan. Nanti saya kopikan progres perbaikan ke arah ini (mesin yang baru). Itu yang sekarang kita lakukan. Untuk merevisi lay outnya. Jadi artinya kita perbarui, pertama ada bak penampung, jadi belajar dari pengalaman dulu tidak semua sampah bisa diolah, kaya kursi, karpet, tiker dan sebagainya, ini nanti diambil oleh DKP (Dinas Kebersihan Pemda). Nanti dibawa lagi ke ... sana. Jadi kita rencanakan nanti juga ada waste separator, kalo yang botol-botol dipisah, plastik-plastik dipilahin, besi-besi dipilahin. Nah setelah itu nanti akan masuk ke conveyor, di crusher masuk ke screen dan kemudian masuk ke bak-bak fermentasi (fermentasi box). Jadi bahan komposnya nanti di fermentasi dulu. Ini di desainnya hampir sama seperti yang di gunung sari. Setelah di fermentasi kita akan beli mesin kompos seperti yang disana juga, yang jadi kompos halus itu. Biomassnya nanti dikarungin dan di bawa ke Indocement.

Kemaren itu terjadi penumpukan, dari evaluasi kita setelah 6 tahun berjalan ini, jadi ada orang buang kursi, ada orang buang karpet, dari masyarakat yang penting dibuang. Akhirnya di sini (UPK) nga bisa di proses. Akibatnya sampahnya numpuk. Dari pengalaman itu akhirnya kita kerjasama sama DKP.

Nah ini juga walnya rencananya kita juga mau nyuci sampah, namun kayanya nga bakal dijalanin karna costnya ternyata besar dan juga mencemari air. Kalo disana kan langsung ke kali, kalo disini ngelewatin dulu areal masyarakat

Mesinnya yang ngerancang kita, budget juga, upgretingnya juga. Tentu saja selain merencanakan upgreting, kita juga mengadakan perbaikan terhadap sistem. Faktanya disana sekarang memang dalam rangka pembangunan upgratingnya.

Upgratingnya itu kenapa pak?

Kita liatnya dari hasil evaluasi, jadi setahun sekali lah, diadakan evaluasi. Ini nih hasil evaluasi terakhir. Identifikasi masalahnya. Ini dilakukan akhir 2011. Yang di exe, kita juga sudah liat bobot yang paling besar masalahnya. Setiap masalah kita coba pecahkan dan cari solusinya.

Dalam menyelesaikan masalah ini, kita juga sudah melakukan berbagai kordinasi. Kita undang camat, DKP, dll (liat surat kordinasi). Kita berusaha menyampaikan masalah yang sekarang terjadi, kita sampaikan goals kita ingin mengembalikan fungsi UPK sebagai tempat pengolahan sampah dan konsep ini. Dari hasil rapat akhirnya kita bagi tugas. (masukkan hasil rapat).

Berdasarkan keputusan ini kita mulai bekerja kan, saya mulai lagi membuat perencanaan biayanya. Nih disini kita bisa liat. Anggaran ini sudah disetujui pak iwan, beberapa sudah dikururkan. Saya kemudian cek ke pengelola apakah dananya benar-benar dimanfaatkan terealisasi. Jadi ini bentuk maintanance kita supaya UPK itu tetap sustain.

Dan memang costnya itu cukup besar.

- Kegiatan lain

Kegiatan lain yang dilakukan selain kegiatan inti pengolahan sampah?

Keinginan untuk memberdayakan masyarakat masyarakatnya?

Itu juga yang kita lakukan sekarang, target awalnya kan charity ya, jadi kalau ada reaksi dari masyarakat, ITP buru-buru ngasih bantuan, itu level pertamanya. Jadi diberikan bantuan ketika ada keadaan yang mengancam pelaksanaan produksi. Itu level pertamanya. Selanjutnya itu level kedua, mau masyarakatnya mengancam atau tidak kita tetap berkontribusi. Yang sekarang ini, sejak 2005 kesini, ITP sudah melangkah jauh, dengan berusaha meningkatkan kapasitas manusianya. Seperti pelatihan pertanian, bengkel.

Kalo di Upk pak?

Sama saja, dilatih juga, atau diperkenalkan ya seengaknya, terlepas berhasil atau tidak, ITP berusaha mengenalkan mereka yang berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat melalui perogram itu. Oran kan dulu nga tau kalo sampah itu bisa diubah menjadi energi, nga tau kalo plastik itu bisa bernilai ekonomi, itu diperkenalkan oleh kita. Jika dalam pelaksanaannya belum 100% sempurna, it's okay. Tapi konsepnya sudah seperti itu. Levelnya sudah disitu, ingin menginkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat terlepas dari nantinya masyarakat mengancam atau tidak. di kita mining tuh yang paling ingin CSR diadakan di daerah mereka, karna dari kegiatan yang mereka lakukan paling sering ada komplain dari masyarakat.

ITP kan menambang ya, ada waktu habisnya, ini akan bertahan sampai 80 tahun mendatang. Grafiknya setelah sampai pada tahap inklinasi akan menurun, itu di 2017. Jadi kalo sekarang kan masih di genjot terus kan. Nah dari keadaan ini, kita mulai persiapkan pondasinya. Begitu ITP menurun, masyarakat tidak langsung kehilangan potensi ekonominya. Contoh yang paling ekstrim itu di tambang timah, bangka belitung. PN timah itu kan contoh paling buruk terhadap persiapan suatu perusahaan, apalagi BUMN terhadap persiapan masyarakatnya. Jadi begitu tambang abis, masyarakat kebingunagn setengah mati, itu yang kita hindari. Jadi dibalik menjaga keamanan dan kelancaran produksi, kita juga mempersiapkan masyarakat untuk siap dengan keadaan pasca itu (Seleainya kegiatan produksi ITP) dengan meningkatkan kapasitas sumber daya.

Khusus untuk Upk pak, kegiatan seperti apa saja yang sudah pernah dilakukan pak?

Hmmm, ini kan levelnya top manajemen ya, ini levelnya middle, kalo saya sama pak ayi lah saya keputusannya pada kelancara produksi, target produksi, pengembangan program, dan ekonominya menuju kemandirian. Ini yang menjadi target kita.

Jadi ada target kemandirian pak?

Iya, kalo udah mandiri kita kembangkan di wilayah lain. Tahapan kemandirian ini, seharusnya sudah ada pada 2012 ini. Ehh 2012 apa 2013 ya, nah ini, 2013 kemandirian pemberdayaan dalam sistem pemberdayaan integratif. Kalau program lain seperti peternakan domba, itu sudah bisa dibilang mandiri, karena pendapatan dan penjualan domba dalam setahun itu sekitar 200 juga. Ditambah dengan hasil pupuk kandangnya itu hsekitar 243juta. Sementara total biaya yang digelontorkan ITP untuk program itu sekitar 260 juga. Sudah mulai pas, dan wajar ada sedikit selisih, karena ITP bisa melatih 4 angkatan kali lima orang. Jadi biasa dianggap itu biaya pelatihan. Jadi ini sudah mulai menapaki pasca menjelang 2013. Bengkel motor juga, cost tertingginya sekarang di pelatihan motornya, tapi modal waktu mendirikan bengekkel dengan hasil yang didapatkan sekarang sudah berkembang. Dulu aset diluar bangunan kita keluarkan sekitar 23juta, sekarang asetnya sudah 100jutaan. Jadi berkembang di aset. Yang collapse itu jarak. Dari sekian miliar yang diinvestasikan tapi nga sebanding.

Untuk UPK ini, masalah ketokohan, politik itu membebani pelaksanaan program untuk mencapai mandiri. Tapi untuk masyarakatnya tercapai. Bagi saya dan pak ayi mungkin memang belum dan ingin pengelolanya diganti, tapi level pak iwan keamanan yang tercipta lebih penting dari masalah ini. Di saya inginnya kan uangnya balik, bisa saja uangnya balik tapi pak RW memprovokasi warga untuk menghalangi masuknya truck ITP. Ini mudah saja dilakukan oleh pak RW. Ini yang berusaha dijaga oleh manajer. Saya kadang juga kesel nih, namun juga harus bisa memahami kenapa manajer ini tetap mempertahankan, apakah karena ada kedekatan pribadi atau gimana ternyata tidak juga karena keamanan dan kelancara produksi jauh lebih penting.

- **Penghambat Pelaksanaan Program**

Pak apa aja sih kekurangan dalam pelaksanaan UPK?

Kalo dilihat secara sistematis ya setiap program itu kan ada alurnya. Bagaimana proses dari pengolahan sampah itu. Terkait proses ada sumber dayanya, ada mesinnya, ada uangnya, sama manajemennya, kalau dalam pelaksanaannya dikenal dengan SOP lah. Pada waktu kita menentukan proses ini yang berkaitan dengan manusia, uang, manajemen dan mensin ini, jika diurai semua ini pasti ada sisi kelemahan dan kelebihannya. Saya sudah pernah buat analisa mengenai project ini. Bahwa program UPK ini, mungkin jadi yang paling lama ya, mulai pembuatan 2007, sudah kurang lebih 4 tahun lebih, selama itu tentu kita sudah bisa mengevaluasinya.

Pertama dari manusianya sendiri kan ada pengelola, pengelola operasional ditambah pelaksana. Pelaksana ini juga terdiri dari operator mesin crusher, mesin screen, mesin pressed, pemilah, driver, keamanan. Nah untuk menilai kelemahan dan kelebihannya, kita di ITP menggunakan metode SWOT. Jadi dengan menggunakan metode ini kita bisa tau strengtnya dimana, weaknessnya dimana. Pertama mesin, mesin yang

ada itu kan sangat sederhana ya, crusher, screen, dulu sempat ada press, sama secondary screen. kalau masalah money itu kan ada collecting fee dari masyarakat, ada juga subsidi ITP ada juga hasil penjualan. Ini sisi pendapatannya. Sisi pengeluarannya operating cost. Mulai dari upah, BBM, listrik. Nah setelah kita evaluasi masalah yang ada di UPK itu adalah pengawas yang kurang mengontrol, pelaksana juga kurang memadai jumlahnya, disiplin dan motivasinya kurang. Kalau masalah mesin, kemarin juga udah saya cek, itu durability atau ketahanannya masih kurang. Kemudian juga ada masalah spesifikasi. Masalah yang ada adalah mesin yang ada ternyata spesifikasinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dulu. Durabilitynya disampaikan bahwa mesin akan tahan 5 tahun, tapi kenyataannya sampai sekarang saja sudah tiga kali ganti. Screen juga sama. Intinya kalo untuk mesin kita melihat dari durability sama spesifikasinya. Spek itu kan memperlihatkan kemampuan dia seperti apa. Untuk spek ini sendiri dilihat dari material, kemudian pembuatannya sama desainnya. Kalo misalnya desain sama pembuatannya bagus tapi materialnya jelek yang tetep juga akan bertahan lama kan. Nah mesin ini specnya tidak sesuai, desainnya juga, makanya kita modifikasi. Yang di UPK kan dari mesin crusher manual ke mesin screennya. Dari situ kita modifikasi yang di gunung sari udah langsung terhubung dari crusher ke screennya kan, pake belt conveyor. Tapi kita pahami lah, memang sering mesin itu pada kenyataannya tidak sesuai sama spesifikasinya, apalagi sampe rumah tangga itu kan materialnya khas ya, sifatnya basah, ada plastik, ada tali dan sebagainya.

Kemudian dari sisi uang, ternyata collecting fee dari masyarakat jumlahnya kurang. Kita ngitungnya begini, biaya operasional UPK itu 16 juta sebulan. sampah yang diolah 4 ton sehari kan, 4 ton kali 25 hari kan seratus ton. Jika dibagi per kg dibutuhkan sekitar 360 rupiah untuk mengolah setiap kg sampah. dari keluarga jika setiap harinya menghasilkan 5 kg sampah per orang. Dan dalam keluarga ada 4 orang, berarti 20 kg, berarti setiap bulannya menghasilkan sampah 600kg per bulan. Nah yang sampai ke kita itu cuma kurang lebih 1500 rupiah kan. Kamu dapetnya yang di UPK berapa?

5000 rumah kontrakan, 10000 rumah sendiri, itu juga juga semua masuk UPK

Iya, nah kasarnya 5000 dibagi 600 kg hanya berapa nilainya, bisa dihitung. Jadi gap antara iuran masyarakat dengan biaya produksinya jauh. Padahal lihat aja UU No 14 tahun 2003 tentang sampah, yang bertanggung jawab untuk sampah itu kan orang yang menghasilkannya. Nah kita juga koreksi ke diri kita sendiri. Udah tau pengolahan sampah butuh dana 360 rupiah, kita masih beli kan cuma 125. Nah karena ini, mau tidak mau kita masih subsidi yang dikeluarkan oleh ITP. Baik itu subsidi langsung berupa uang, ataupun subsidi tidak langsung berupa perbaikan, itu kan pada akhirnya kita yang mengelola. Untuk manajemennya, tanggung jawab UPK ini kan ada di pak RW sebagai manajer dan juga ada di kita, CSR. Bisa saja nanti hasil penelitian kamu kita dari indocementnya kurang kontrol, Pengelolaan tanggung jawabnya di CSR juga pak?

Sebenarnya kalo pengelolaan operasional itu kan ada di pak RW, Cuma dengan banyaknya kekurangan seperti yang terjadi kita turun tangan dan sekarang malah kelihatannya pak Fajar yang ngurus. Jadi kalo untuk pengolahan kalo nga kita pecah seperti ini nga bakal keliatan. Dari sisi mesin ada, manusianya ada, dari sisi uangnya juga ada.

Pak kalo yang masalah collecting fee dari masyarakat pernah ada usaha yang dilakukan nga pak untuk mengatasinya?

Dalam perbaikan UPK, ada disebutkan bahwa collecting fee dengan melakukan koordinasi dengan camat. Kita dari ITP tidak boleh langsung memanggil masyarakat untuk menyampaikan sosialisasi kenaikan iuran ini kan. Sudah dilakukan beberapa kali usaha. Melalui pak RW, dan kelurahan Puspanegara itu diadakan rapat untuk masyarakat diberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa untuk perlu mengolah sampah itu butuh biaya. Yang idelanya ditanggung juga oleh masyarakat. Cuma memang sampai saat ini dalam forum tersebut mereka iya-ya aja.

Ohh ITP nga boleh langsung terjun ke masyarakat ya pak?

Nga boleh kalau ITP langsung terjun ke masyarakat. kita tetap harus melewati penanggung jawab masyarakat. karena memang mereka memiliki struktur organisasi sendiri, camat, kelurahan, RW, RT. Itu kan strukturnya udah baku. ITP nga boleh langsung masuk kesini. Selalu kan problemnya itu kalau di petakan, ada warga, RT, RW. Di Puspanegara lebih rumit lagi pembukuannya. Yang sudah terbuka itu yang di gunung sari. Setiap warga itu kena 10 ribu. Dipecah lagi 6000 uang keamanan, 4000 uang kebersihan. Nah 20% nya nanti setor ke RT, 80% nya baru ke RW, RW begitu juga malah 30%. Kelurahan kalo disana udah engga nih. Nah bayangin aja yang sampai ke UPK Cuma berapa? Tetap angka yang masuk ke UPK itu tidak akan sama dengan angka yang keluar dari masyarakat. jadi kalau yang dari masyarakat dinaikkan lagi, tetap yang bakal nyampe juga nga banyak. Yang sekarang kita upayakan itu adalah mengurangi potongan dari RW/RT nya. Tapi setiap diajak berdiskusi selalu menghindar dan menghindar terus. Nah kalo yang di Puspanegara lebih rumit lagi nih, selain ada RT dan Rwnya, mereka juga memiliki karang taruna, atau premanya lah isitlahnya. Pola seperti ini memang cocoknya di perumahan-perumahan. Soalnya kita bisa negosiasi, dibayar sekian kita angkat, tidak dibayar tidak kita angkat. Sekarang ini sebenarnya kita jauh lebih sosial, karna jika dibandingkan dengan pemerintah daerah yang baru mau angkat kalo udah ada uang 350 per rit. Padahal itu tanggung jawab dinas kebersihan kabupaten bogor loh, udah tanggung jawab mereka melalui

DKP. Yang dia memiliki kewajiban untuk emberihkan area. Itupun harus pake uang, nga ada uang nga mereka angkat. ITP nga bisa seperti itu. Ada uang nga ada uang tetap harus diangkat. Karena memang ini juga program dari direksi. Jadi ini salah satu yang menghambat juga, struktur ini. Kalau kita bisa langsung ya bisa berjalan seperti badan usaha.

Emang bener-bener nga bisa ya pak?

Nga bisa, karna kita ITP ke masyarakat, mereka punya struktur sendiri. Lagian kita CSR, nga bisa memaksakan masyarakat. usaha kita adalah kita berikan subsidi untuk kegiatan pengolahan sampahnya. Inilah usaha kita untuk mengurani dan menutupi sistem dimasyarakat. Di pemda sendiri untuk kabupaten bogor, 3,5 miliar disubsidi pemda untuk masalah sampah ini. Dari masyarakat ada, tapi tetap saja sampah itu masih belum terkelola.

Saya pernah ditugaskan perusahaan untuk melihat bagaimana pengolahan sampah ini ke Jerman. Nga bisa kita samakan dengan yang diadakan disana. Mungkin disini, top majemennya menganggap bisa sama, tapi nga bisa diterapkan disini.

Kalo usaha untuk mengatasi masalah pengelolannya apa pak? Saya lihat dari hasil evaluasi itu kan termasuk yang diberikan point besar.

Jadi secara manajerial kita memang memberikna rangking terhadap masalah-masalah yang terjadi di UPK. yang tertinggi itu kan rangkinya ada di pengelolaan, penumpukan sampah sama uangnya, uang ini secara keseluruhan, jika iuran dari masyarakat memang belum cukup mau tidak mau ITP harus menutupi.

Kalau untuk pengelola, kita pernah melakukan beberapa upaya. Opsinya pertama tentu saja yang paling ekstrim mengganti ya. Kalau penilainnya sudah seperti tadi, opsinya memang mengganti ya. Diharapkan diganti dengan yang lebih baik, yang lebih baik, lebih fokus dan serius menangani UPK. ini pernah akan dilakukan dengan menggandeng karang taruna. Dulu itu karna ada pernah laporan dari masyarakat pak RW ini tidak serius menangani pengolahan sampah ini, sehingga sampah tidak terkelola baik. Mereka menawarkan seorang karang taruna untuk mengganti pak RW. Dan itu dalam forum rapat besar kita terima. Tapi sebelum terlaksana, pak RW ini kan dibawahnya ada pak RT dan yang lain-lain kan, kelompok-kelompok yang pola kesehariannya agak preman lah. Sehingga yang orang karang taruna ini diancam, sampai ada pemukulan. Melihat ini kita putuskan untuk tidak mengganti.

Kita putuskan juga untuk menggeser peran. Kita usahakan untuk menggeser perannya menjadi lebih besar, ke peran yang lebih strategis. Jadi misalnya pengelolaan UPK menjadi tanggung jawab pak RT misalnya. Tapi dulu itu kita tidak ganti pak RT karena memang mereka satu paket kan. Dulu kita ganti dengan orang dilur mereka, yanto namanya. Kita menempatkan seorang tenaga yang ditempatkan disana dan kita bayar. Tapi yantonya keluar, karna nga betah. Memang agak rumit nih, polanya. Aknirnya rencana yang kita buat sekarang itu pak Rwnya kita naikkan lagi. Karna memang pak RW itu dibalik berbagai kelemahannya dia mampu melobi, meyakinkan orang lain, dan juga kemampuan dalam tanda kutip kalo tidak di manage oleh ITP akan merepotkan ITP. Jadi sekarang itu pak RT jadi pengelola, dan taufik Ismail, yang dulu driver jadi pengawasnya.

Kita coba dulu berjalan seperti ini sembari perbaikan mesin yang sekarang sedang saya lakukan. Jadi kita coba dulu berjalan dan nanti kita evaluasi. Kalo pada akhirnya memang tidak bisa berjalan dengan baik juga, kemungkinan akan ditutup dan dialihkan ke housing 1. Disana ada tempat.

Namun dari manajemen melihat bahwa ini harus bisa berhasil. Mereka ingin kita bisa manage UPK ini sampai berhasil.

Ohh ini memang programnya top down ya pak?

Iya, jadi kan memang awalnya ini camat Citereup meminta kepada ITP untuk membantu mengelola sampah dan akhirnya di respon. Dari pihak manajemen kenal dengan Pak Rhenal Khasali dan akhirnya oke kita buat dengan menggunakan konsep Rumah Perubahan itu. Pak Camat yang waktu itu pak Zaenal, digandeng lah pak RW sebagai tokoh masyarakatnya. Awalnya pak RW kan juga aktif di penghijauan liangkungan. Kemudian camatnya kan ganti. Udah dua kali ganti kan sekarang. Pak Rwnya merasa camat yang sekarang tidak di delegasikan oleh camat sebelumnya. Jadi tidak mengakui lah dalam tanda kutip bahwa dulunya program ini juga diminta oleh pihak kecamatan. Sehingga tanggung jawabnya sepenuhnya dialihkan ke Indocement. Kita sih sudah mulai melakukan pendekatan ke camat baru. Ada respon namun memang belum optimal. Jadi selain dulunya memang permintaan dari masyarakat program ini juga top down. Di ITP kan yang top down itu ada dua, ini sampa jarak.

Sebenarnya dibelakang ini ada hal yang lebih besarnya. Disini saya buka dari masyarakatnya, sedangkan manajemen kan ingin mengurangi peenggunaan bahan bakar batu bara. Namun sekarang memang masih mahal sekali kan costnya.

Kalo dikaitkan dengan rencana strategis, UPK ini kan memang kenyataannya mundur. Seharusnya kita sudah sampai pada tahap intensifikasi program, namun malah mundur karna memang mengalami stagnasi, bukan stagnasi juga ya, karna kalalu stagnasi kita bergerak, berhenti trus maju, namun ini malah berhenti dan mundur lagi. Memang harus diakui kondisinya saat ini seperti itu.

Corporate itu fungsinya ada dua, untuk perencanaan umum sama kontroling. Target dari mereka misalnya UPK menghasilkan 47 ton, dan 10 ton kompos dan setengah ton barang pilahan, ini ditargetkan corporate nih. Untuk mencapai ini, pelaksanaannya di kita nih. Pengontrolannya juga melalui annual meeting. Makanya mereka terus-terusan mengeluarkan alat ukur, memastikan kita menggunakan alat ukur tersebut.

- **Pendukung Pelaksanaan Program**

Kita bisa flashback lagi ke belakang. karna memang sebagai bentuk tanggung jawab kita ke masyarakat. Setidaknya masyarakat bisa mendapatkan manfaat lah dengan keberadaan indocement di wilayah mereka. Di tambah lagi sampah kan memang menjadi masalah krusial di masyarakat.

Kembali lagi ke triple bottom line, selain itu kita juga berusaha mencari suatu sumber daya baru selain batu bara. Kita cari alternatif bahan bakar yang baru karna kamu juga tau kan pembakaran pake batu bara nga bagus. Sedangkan pabrik ini bergantung sekali pada pembakaran. Nah bagaimana indocement berkomitmen untuk mengurangi konsumsi batu bara itu. Bahkan disini ada divisi AF kan. Kita di CSR berusaha untuk ikut membantu hal tersebut, dengan pembakaran melalui jarak, boigass. Walaupun faktanya sekarang itu memang masih belum bisa menggantikan total seluruh pembakaran. Karna harus investasi yang luar biasa, risetnya juga harus luar biasa.

Kalo kelebihan gimana pak? Kenapa program itu masih ada sampai sekarang?

Han, kalo ini kita juga harus akui ya bahwa banyak perusahaan yang ingin masuk ke masalah sampah ini, dan kita dijadikan barometer, menjadi tempat bagi orang yang ingin melakukan survey. Jadi memang ada beberapa hal yang menyebabkan program-program kita termasuk UPK ini bertahan.

Yang pertama adalah sustainable development program, dari awalnya program-program yang disini memang dirancang untuk sustain. Untuk UPK dari lingkungannya sendiri memang sampah ini kan memang selalu ada, kedua masalah lingkungan yang terus akan dituntut oleh masyarakat. selanjutnya adalah masalah ekonominya. Triple bottom line lah, ada dari lingkungan, sosial dan ekonominya. Nah dalam hal ini ada dua hal yang langsung berkaitan dengan indocement. Pertama masalah lingkungan, ITP akan selalu di tuntun untuk mengurangi nilai SOK dan NOK. Jadi kalau ITP sudah membakar sekian banyak produk semen, yang menghasilkan SOK dan NOK (gas karbon), ITP diharapkan mengganti proses (pembakaran) yang diluar dengan mengalihkan ke ITP. Jadi polusi udara yang dihasilkan ITP dari hasil pembakaran batu bara

Ini juga sebenarnya ada kaitannya sama direksi, kalo direksi bilang saya nga mau lagi deh mengelola sampah, ya brenti nih UPK. komitmen dari direksi penting banget. Komitmen bahwa ini harus berjalan, pasti ini akan berjalan. Kemudian teknologinya. Kalo misalnya nga ada teknologi yang bisa ngolah air jadi bensin, ya nga bisa diolah. Untuk sampah kan sudah ada teknologinya. Kemudian tidak lupa juga harus ada organisasi yang menggerakkan. Dalam hal ini kita yang menggerakkan. Jadi kenapa ini berjalan adalah karena tiga hal ini. Ini menjadi kuncinya.

Kalau mau dilihat lagi komitmen indocement itu dilatarbelakangi apa? Saya akan berikan gambaran sederhana. ITP kan juga buka sata clause suka bagi-bagi hadiah. ITP pasti menginginkan sesuatu dari dana yang ia keluarkan. ITP itu kan mengeluarkan SOK dan NOK dari hasil produksi. Misalnya aja ITP mengeluarkan sebanyak 100 ton. ITP memiliki konsekuensi yang harus ditanggung heldeberg group di Jerman sana. Perusahaan-perusahaan helderberg itu mencemari lingkungan berapa? Tadi kita traoklah 100 ton. Nah kemudian di masyarakat melakukan pembakaran lagi kan. Sampah, kayu dan sebagainya. Akibatnya juga ada SOK dan NOK ke udara, misalnya 20 ton. Dari total SOK dan NOK yang dihasilkan di Citereup ini berarti 120 ya. ITP harus menggantikan ini, dengan menarik kegiatan penghasil SOK dan NOK di masyarakat. jadi ITP tetap melakukan pembakaran tapi yang dimasyarakat jadi hilang. Kemudian hasil dari ITP mereduksi berdasarkan Kyoto Protokol bahwa apabila suatu industri besar berhasil mengurangi emisi gas buang, dia akan mendapatkan kompensasi. Melalui kyoto protocol ini dijual kan. ITP itu melakukan pengurangan emisi gas buang setelah diakui dijual ke negara eropa, dan itu ada harganya, satu ton itu berapa. Makanya kalo di ITP itu, ini (yang dari UPK) masih kecil, yang besar itu waktu kita mengurangi emisinya pada proses pembuatan semen yang disebut PCC sement. PCC ini untuk menghasilkan 100 ton semen itu

semua dibakar dulu jadi klinker. Nah dengan menggunakan PCC, proses pembakaran ini di pecah jadi dua. Ditambahkan raw material untuk proses finishing. Jadi untuk PCC ini hanya 80% yang mengalami pembakaran dan 20%nya lagi tidak melalui pembakaran. Nah ini yang dijual dan jadi pendapatan juga. Melalui kegiatan seperti ini ITP ikut serta, kalau Eropa kan dia ikut ya, kalau Amerikan kan masih tarik ulur, di Eropa sudah wajib, mereka cepat sekali mewajibkan langkah-langkah penyelamatan dunia. Makanya nih udah tau saya anak buahnya pusing ngurusin masalah UPK, ketemua pak RW lagi-pak RW lagi. Ada sesuatu dibelakang ini.

Ohh gitu pak, saya baru tau

Iya memang tidak semuanya terbuka masalah ini, sebenarnya sudah harus disampaikan kepada masyarakat. ini juga bukan bentuk keserakahan, karna tida ada yang rugi, ini hanya suatu bentuk kecerdasan dalam mengelolan suatu perusahaan. Tapi hal ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan karena saya sudah lama bersama salim group dan helderberg ini banyak terobosan-terobosan cerdas dia yang ramah lingkungan dan juga menghasilkan uang. Kompensasi yang diberikan bisa dalam bentuk pengurangan pajak dan sebagainya. Sehingga terjawab sudah lah latar belakangnya kenapa komitmen ITP begitu kuatnya kan. Di negara barat sudah jelas regulasinya, dan setiap regulasi itu ada kompensasinya. Kalo di Indonesia ya paling yang pasti melaksanakan CSR BUMN kan, karna kalo engga direksinya bisa aja diganti. Karna politiknya, BUMN kan masih terkait dengan politik, jika dia tidak melaksanakan CSR, besok dia akan diganti. Kalau swasta apakah benar dia menjadi penyelamat masyarakat? tidak juga karna ada faktor ekomoni yang melatarbelakanginya. Tapi kalo juga berdampak positif terhadap masyarakat kenapa tidak.

Nah kan sekarang saya udah tau pak hal ini yang melatarbelakanginya dari sisi perusahaan, kalau dalam pelaksanaan programnya sendiri pak? Ada nga output yang ingin dihasilkan?

Jadi kalo kamu nanya hal ini kan ada hal basic lagi, ha lbasic yang harus disampaikan secara terbuka oleh perusahaan-perusahaan. Jadi sebenarnya dalam program CSR itu kan ada masyarakat ya, kamu pernah dapat kan waktu presentasi, kita merupakan perusahaan level tiga yang menjadikan CSR bagian dari proses. Itu kenapa dilakukan, apakah karna ITP memang sata kaluse yang memang membagi-bagikan hadiah? Jadi sebenarnya perusahaan kan membutuhkan keamanan dalam proses produksinya. Nah keamanan dan kelancaran produksi itu baru bisa terealisasi kalau didukung dengan hubungan baik dengan masyarakat. Liat aja freeport selalu terancam keamanan dan kelancaran produksinya. Kalau di freeport itu karna CSR internal juga. CSR kan ada ada internalnya juga. Harus berhubungan baik dengan stakeholder utama, karyawan misalanya. Di CSR karna terlalu fokus kepada masyarakat sekitar, kamu pernah denger kan, karyawan demo. Nah dari situ aja bisa diliat kalo tidak menjalin hubungan mbaik denganmasyarakat kelancaran produksinya bisa terancam. Jadi disitulah tugas saya dan tim untuk membuat kelancaran produksi ini. Kalo kita ingin menjamin keamanan dan kelancara produksi, kita harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat. jadi kita berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karna kalo diliat dari yang freeport, bulenya begitu hebat tetapi orang lokalnya begitu tertinggal membahayakan. Jadi kita, setiap perusahaan lah, bukan pembagi-bagi hadiah melainkan ingin menjamin keamanan dan kelancaran produksi. Jadi kita di SDP sama CD program-programnya harus jalan nih. Kalau sudah jalan kita berbuat lebih nih, misalnya pada level kita mengeluarkan uang 3 miliar saja masyarakat sudah aman, kita lebih dari itu.

Transkrip Wawancara Pihak ITP

Umum

- Identitas

Nama: Fj

Posisi dalam program: PIC Program, SDP Officer

Berapa lama bekerja di program: 2010, di SDP 2008

Pekerjaan Sebelumnya: CHRDI ITP

Latar Belakang Pendidikan: S1 Hukum Universitas Padjajaran

Tanggung Jawab Dalam Program:

Kalo di UPK saya PICnya (Person in Charge). Jadi yang bertanggung jawab ke program. Mensupervisi, mengawasi supaya programnya tetap jalan. Jadi kalau di SDP kan untuk setiap program ada yang bertanggung jawab. Nah setelah itu ada project leadernya juga. Khusus untuk P3M itu kita bahkan pakai yang dari IPB. Ditambah masyarakat yang bekerja disitu. Nanti project leadernya ngelapor ke PIC. Jadi Project leader, ngelapor ke PIC, PIC diatansya. Saya bertanggung jawab secara umum.

Tanggung jawabnya apa aja tuh?

Misalnya pelaporan SMW, kalo ada masalah, monitor. Kalo ada masalah bisa diselesaikan sendiri, selesaikan dulu. Kalo ada yang perlu keputusan pak ayi, tanya pak ayi dulu. Koordinasi tetep. Cuma kalo sekarang ada pak Ali juga. Dia yang monitor langsung disana. Selain itu secara umum kan saya juga bertanggung jawab pelaporan departemen. Sekretaris departemen. Yang fixnya SDP, yang 5 pilar saya tinggal koreksi aja.

Oiaa kalo bapak sendiri tanggung jawabnya apa nih?

Saya PIC, jadi yang monitoring lah seperti itu. Monitoring keberlangsungan di UPK, biar gimana kalo ada masalah dan butuh koordinasi, biar saya yang bantu. Kalo dulu sih sebelum ada pak Ali saya yang kesana. Jadi sekarang saya yang ngurusin di dalam, pak Ali yang memantau langsung. Saya yang ngehandle.

Khusus:

- Identitas Program

Latar belakang program

Kenapa Program itu berdiri?

Jadi untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di desa Puspanegara. Jadi tokoh masyarakatnya tuh pak Hery Syamsuri, Pak RW, ketua RW 01, termasuk tokoh masyarakat juga, yang pertama sih dia punya cita-cita ingin menangani masalah sampah yang ada. Kan disana sampah dibuang sembarangan karna tidak ada TPS. Di wilayah itu nga ada TPS, jadi sampah dibuang sembarangan. Ada yang dibuang ke kali, kan di dekat Karang Asem itu ada kali, ada yang dibuang disitu, trus ya ada juga sih yang dibuang ke wilayah Indocement. Disitu tuh, di pos 3. Makanya untuk mengatasi permasalahan sampah ini, sama ya seperti yang di Gunung Sari, mengatasi permasalahan sampah yang ada di masyarakat. Sekalian juga bantu pemerintah.

Itu jadi idenya datang dari masyarakat dulu baru Indocement menanggapi ya pak?

Iya, jadi kita pertama melihat dulu siapa yang bisa mengelola, pak RW Hery ini kelihatan menonjol. Yaa dia kan juga di wilayah situ punya pengaruh lah di desa Puspanegara, termasuk di Akrang Asem juga. Jadi ya kita ambil sebagai ketua pengelola.

Berarti pengagas programnya sebenarnya siapa? Pak RW Hery atau Indocement?

Ya Indocement, Cuma kita punya, istilahnya apa ya, tujuan yang sama dengan pak RW Hery. Kita punya tujuan mengoptimalkan pengelolaan sampah menjadi produk yang bermanfaat, memberikan penghasilan tambahan kepada masyarakat yang terlibat langsung dan masyarakat

luas pada umumnya dalam pengelolaan sampah tersebut serta membantu pemerintah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Jadi pertama kita ingin mengatasi sampah karna tidak adanya TPS, jadinya kita buat UPK. dulunya juga dari manajemen juga sih yang mengarahkan untuk membuat pengolahan sampah disitu

Manajemen maksudnya gimana?

Ya dari jajaran manajemen Indocement. Jadi saya masuknya kan 2007 ya, jadi saya sebatas tau ketika itu udah jadi, saya juga belum jadi timnya waktu itu. Saya baru 2009an lah di CSR.

Output yang diharapkan dari program

Ohh berarti outputnya kemandirian ya pak?

Iyaa kemandirian

- Perencanaan Program

- Pelaksanaan Program

Wilayah Pengambilan Sampah

Oiaa pak itu penentuan wilayahnya gimana?

Berdasarkan wilayah terdekat dari UPK, saya udah lupa, tapi 2009 itu ada datanya, sampah diambil dari RW 1 dan 2 Karang Asem, RW 4,5,6,8,10,11 Puspanegara, Pabrik Roti, Toko Material, Toko Meubel, sama Ruko Citereup. Ini sudah ada perluasan dari yang awal. Sebelumnya nga segini. Tenaga kerjanya pun seimbang antara sampah yang di ambil dengan sampah yang diolah. Dulu sih sempat kita ada pembuatan kompos juga ada. Dikirim untuk pohon jarak. Sampai yang terjadi overload itu, perluas pengambilan sampahnya, tapi kapasitas mesinnya nga sesuai.

Pelaksanaan

Awal-awal diwaktu pendirian itu, jobdesk Indocement sama pengelola itu bedanya apa?

Kalo dulu sih awal-awal mesinnya kita kerja sama sama CV. Mittran Alsintani Persada. Dia bergerak di bidang pembuatan mesin pengolahan sampah.

Jadi belum dibikin TSD pak?

Belum, jadi pertamanya kita pake mesin yang dari CV. Mittran ini, dia diluar Indocement. Dia dari presentasinya berhasil buat mesin pengolahan sampah. Nah setelah beberapa lama mesin itu kan ada kekurangannya, jadi dimodifikasi.

Sama?

Sama TSD di sini, di Indocement. Dimodifikasi, setelahnya karna overload, jebol, rusak itu mesinnya, kita modifikasi lagi. Jadi awalnya itu mesinnya kan pake solar, belum pake listrik. Trus jebol, dimodifikasi sama Indocement, jadi sekarang ya pake listrik sampe sekarang, jadi ya mau dimodifikasi lagi.

Ohh gitu, kaya yang digunakn di Gunung Sari ya pak?

Iyaaa

Jadi udah berapa kali ganti tuh pak mesinnya?

Iya, yang pertama yang dari CV. Mittran, yang pake solar, trus rusak, mesinnya diganti, trus diganti lagi mesin solarnya karna jebol, bolong itu.

Itu tahun berapa kejadiannya pak?

Pas saya 2008 apa 2009 gitu.

Sebelum menang CSR award apa setelah?

Pas menang CSR award itu mesinnya masih pake solar tapi sudah di modifikasi.

Perbaikan kedua ya pak?

Iya, soalnya setelah itu baru pake listrik, ampe benar-benar jebol

Dulu mesinnya crusher doang pak? Blum ada screen pak?

Ada tapi kecil, itu juga nga pake motor

Dari CV. Mittran juga pak?

Iya, tapi nga pake motor, manual, di puter tenaga manusia. Belum pake belt conveyor

Jadi dulu mesinnya masih simpel ya pak?

Iya, mesin crusher, dibawa ke screen, disana diputer, trus udah, komposnya dari hasil pemisahan screen aja.

Aku mikirnya kaya yang di Gunung Sari pak?

Itu adalah modifikasi dari yang di Puspa ini. Jadi yang di Gunung Sari itu hasil belajar kita dari yang di Puspanegara. Itu gennerasi ke dua. Jadi ohh ini perlu di rubah, ini harus dipake dan sebagainya.

Tapi dulu itu awal-awal itu produksinya gimana pak?

Itu lumayan, sebelum terjadi overload itu,

Sejak kapan sih pak?

Setelah menang, sebelumnya masih bisa di kontrol.

Tapi kenapa di perluas?

Kan untuk pekerjaanya kan semakin banyak, untuk operasional, sampahnya ditambah, ehh malah mesinnya yang nga kuat.

Itu dulu yang kerja disana berapa orang pak?

Awal sih itu 2007 9 orang, 2008 16 orang, 2009 12 orang, 2010 12 orang, 2011 13 orang, 2012 10 orang.

Puncaknya emang dia pas menang itu ya pak?

Iya, masalah intinya itu pas overload itu, kita coba alihkan, yang ngambil dari pos 3 kita coba alihkan ke GunungSari. Karna meang dia nga kuat mesinnya.

Oia pak, sistem pengambilannya itu gimana sih pak?

Dulu kan ada mesin operasional, yang awal dia punya sendiri tapi rusak, Indocement ngasih tapi lewat bantuan modal bergulir. Jadi sebenarnya dia sih harus ngembaliin, dipinjem modal truck dulu, itu yang kuning. Namun ternyata rusak. Sekarang kita kasih lagi yang biru tuh.

Berbariti dari rumah-rumah warga emang diambil dari truck?

Dulu, awal-awal itu kita juga ada motor yang rodanya tiga. Ada dua biji, tapi rusak juga. Trus ada juga yang ngambil pake truck. Waktu lagi banyak-banyaknya tuh. Sampe ya rusaknya itu sendiri. Satu sisi karna pemeliharaannya kurang. Sisi yang lain sampah semakin banyak. Nambah tahunnya sampahnya makin banyak. Penduduknya kan semakin banyak juga. Sebenarnya kita ada disini pemeliharaan, Cuma karna ini tanggung jawab mereka ya kita lepas. Namun disaat-sat mendesak ya kita turun tangan juga. Kita udah perbaikan bak nya (truck). Akhirnya kan tidak dirawat lagi jadi rusak. Kurang memang mereka untuk perawatan. Motor pun ya akhirnya rusak. 2010 lah ya kerusakannya. 2011 kita ganti yang baru. Jadi kita beli satu untuk Puspanegara, satu untuk Gunung Sari

Ohhh gitu, pas kesana aku liat juga ada yang pake gerobak-gerobak gitu pak?

Itu dulu nga kaya gitu. Ada gerobak sama truck sama motor. Gerobaknya itu kan juga ada yang dari bantuan Indocement, dari yang lain juga ada. Itu sekarang semuanya gerobak. Gerobak aja kalo sekarang. Ada juga satu pake mobil pick up, dari pabrik roti. Mereak ngirim sendiri. Berapa karung lah yang mereka kirim kesitu.

Katanya tiap bulan disubsidi ya pak?

Iya, tapi itu sudah berkurang, dulunya nga segitu. Sampai sekarang dikasih berkurang. Kita konsepnya mengurangi subsidi terus sampai mereka bisa berdiri sendiri. Jadi ya nantinya kita paling di mesinnya saja. Jadi tujuan akhirnya itu kemandirian, bagaimana supaya bisa menghidupi sendiri.

Tapi sampe sekarang belum?

Iya belum, sampai sekarang masih butuh subsidi. Makanya sekarang kita rombak lagi supaya dia bisa mandiri. Sama juga kaya yang digunung sari, konsepnya sampai ke kemandirian. Manajemen juga maunya seperti itu. Jadi kita ngasih starter awalnya saja, trus kita liat sampai dia bisa, baru kita lepas.

Kalo sekarang kan mesinnya udah rusak semua tuh disana, itu sejak kapan?

Itu pas tahun ini, ehh pertengahan 2011. Udah overload, jadi mesinnya rusak. Udah nga bisa diolah, mesinnya udah ketutupan sama sampah. Trus tenaga kerja, berkurang. Kita analisa, pengelolanya itu nga bisa stay terus. Karna dia da kesibukan yang lain jadi pekerjaanya tidak terawasi. Pekerja jadinya bekerja semaunya.

Disana emang nga ada tenaga administrasi ya?

Dulu sempat ada, sampai 2009. Itu masih ada. Setelah itu udah nga adalagi. Karna disana juga kan kita sampai ganti berkali-kali. Karna memang kan orangnya disana juga khas ya. Karakternya khas.

Khas gimana?

Iya khas, jadi yang disana haru benar-beanr kuat. Itu juga udah ganti berapa kali tuh.

Itu tenaga kerja masih tanggung jawab Indocement pak?

Engga, itu diserahkan ke pengelola. Kalau tenaga kerja ya kita serahkan ke dia

Menurut bapak gimana tuh pengelola yang sekarang?

Sekarang ya kita masih ngasih kesempatan, karena dia bilang dia akan mencoba untuk memperbaiki. Karna dia merasa punya tanggung jawab moral untuk perbaikan disana. Jadi kita liat, dia betul nga perbaikan disana.

Aku juga mau tanya deh pak, apa sih titik baliknya, oh yaudah ayo nih kita perbaikan nih, kita ganti mesinnya?

Itu ya karna kita tetap komitmen ke awal, kita coba lah ada cita-cita untuk mengatasi sampah. Dari manajemen sih arahnya seperti itu. Jadi inginnya tetap diarahkan ke situ. Kalau dari kita sebenarnya sudah menawarkan, mau di ini nga? Mau diganti nga pengelola. Tapi dari manajemen sih arahnya ya kita kasih kesempatan kepada pengelola yang ada supaya disana ada perbaikan.

Oia pak, itu pekerja yang pake gerobak itu, termasuk pekerja UPK?

Bukan, yang sepuluh itu termasuk tenaga keamanan, udah ada yang meninggal. Jadi tenaga keamanannya udah pada keluar. Kalo 2012 sih itung-itungan 10 orangnya itu sama pak RW sama pak RT. Yang masuk ya Cuma segitu

Aku Cuma nemu, pak RW, RT, driver, jahir karung.

Itu sih karna engga diawasin, jadi mereka semauanya.

Ohh jadi pengangkut sampah itu bukan digaji oleh UPK?

Engga, jadi kalo dia dapet uang dari collecting fee mereka dari masyarakat.

Tapi aku liat mereka tuh yang ngarungin kesana?

Nahh itu kan karna perintah dari pak RW Hery nih. Jadi tiap sampah yang masuk langsung dikarungin, biar rapih. Tadinya nga seperti itu, buang-buang aja disitu.

Ohh jadi seharusnya sampah yang dibuang dari gerobak itu yang ngerjain pegawai UPKnya ya pak?

Iyaa.

Jadi kan kita da rapat koordinasi, jadi hasilnya sampah yang masuk saat ini diusahakan untuk dikarungin. Tapi ya disana kalo karungnya nga ada juga nga dikarungin. Saya kemaren kesana juga ada sampah yang nga dikarungin. Karna lagi ada masalah yang mesin rusak itu.

Jadi masalahnya lebih ke teknis ya pak?

Iya, kadang-kadang mesin jahitnya juga, rusak, nga bisa bikin karung. Untuk karungnya sendiri kita kasih dari Indocement. Karung-karung yang reject, kita kasih kesana. Itu nga bisa dibawa keluar juga. Ntr dibakar di indocement untuk heating up, pemanasan di killen.

Oiaa pak aku masih bingung, itu yang bapak-bapak pake roda, collecting fee dari masyarakat dikasih ke mereka apa ke UPK sih pak?

Itu mereka narik sendiri. Jadi sampah itu dibagi-bagi. Ada yang ngasih ke RW Heri, ada yang ke RT Dedi, ada yang wilayahnya masuk ke Driver. Kalo yang gerobak itu nga ada urusannya sama UPK. kalo yang ditarik pak RW, RT sama Driver itu nantinya dimanfaatkan untuk gaji anak-anak UPK. jadi kalo yang pake gerobak itu Cuma naruh sampah aja. Kalo itu ya mereka narik sendiri. Dibantu dengan pengambilan dari sampah yang masih dijual. Itu daerahnya yang sekitar aja. Nga nyampe pasar. Kalo mau wawancara warga yang mereka ambil itu bisa

Kan sekarang lagi progres upgrading ya pak? Itu siapa saja ya pak yang terlibat?

Iya, CSR, bagian perbaikan mesin GECD, iya sama TSD (Technical Service Division). Jadi khusus perbaikan mesin di Indocement. Karna mesin itu hasil modifikasi kita. Jadi perbaikan ke merka. Kalo perencanaan mesin ke GECD (General Engineering Civil Division).

Jadi hasil rancangan yang pak Dedi liatin ke aku itu hasil rancangan GECD?

Itu terakhir tanggal 5 Maret nih kita rapat. GECD, TSD, CSR. CSR. Ada juga dari kecamatan sama DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) kabupaten (kerjasamanya baru sejak overload)

Untuk hasilnya ke Plant. Kalo pengiriman kan kita ke AFL,

Ada standarnya sendiri nga sih pak?

Ada, ada di SOP. Jadi kadar airnya harus dibawah 30%.

Jadi dikirm dulu ke AFL ya pak?

AFR (Alternative Fuel dan Raw Material Division), ntr baru ke Plant. Plant juga pernah protes, sampahnya bau. Alurnya kita ke AFL, AFL ke Plant. Tapi dulu juga kadang protesnya langsung ke kita. Sampai keluar surat bahwa kita bertanggung jawab sampai masalah pengiriman aja. Sebelumnya sih sempat saya koordinasi dengan plant langsung sebelum keluar surat itu.

Itu tanggung jawab pengiriman maksudnya gimana?

Jadi kita bertanggung jawab mengirim saja, kita mau ngirim nih kita koordinasi ke AFR,

Kalau ada komplain gimana?

Mereka ngadunya ke AFL, AFR juga akhirnya nyampein ke kita. Misalnya ini sampahnya masih basah, ininya begini. Kalo dulu kita langsung ngatasin plant.

Suratnya sejak kapan keluar pak?

2011 kalo nga salah, disitu ada tanda tangan manajer ya, bapak Iwan Sabar. Jadi kita tanggung jawab hanya sebatas pengiriman SMW saja. AFR yang berkoordinasi di Plant. Kita disitu harus menjaga kualitas SMW yang dikirim. Supayasesuai dengan yang diminta plan.

Suplay SMW ke Indocement

Pak kalo yang supply itu gimana tuh ceritanya?

Ceritanya apa nih?

Kan kita minta apa yang namanya agar supply itu bisa nerbitin supaya di penuhin sama UPK Citereup. Itu namanya PO, Purchase Order. Jadi dari kita, CSR, minta ke Supply supaya dibuatkan PR, Purchase Request.

Supply itu fungsinya sebenarnya buat apa sih pak?

Jadi dia departemen, yang mensuplai kebutuhan semua divisi. Kalo ada divisi yang membutuhkan sesuatu di minta ke divisi supplay. Bagian pengadaan barang kan supply divisi itu.

Kan bagian pengadaan barang ya pak? Kalo SMW masuk bukan pengadaan barang dong?

Iya, jadi kan SMW itu barang, barang dari lingkungan. Dibakar digunakan di plan.

Berarti sama aja kan kaya pengadaan batubara oleh plan ya pak?

Ya seperti itu, kalo itu kan dari plant, kalo yang ini dari kita. Nah setelah itu supply ntar nerbitin PO. Nah biasanya untuk SMW itu 50 ton satu bulan.

Itu diminta sama supply divisi?

Bukan, itu dikeluarkan oleh supply divisi atas permintaan kita. Kita sebulan minta 50. Jadi satu bulan itu UPK harus menyediakan 47,35

Aku masih belum ngerti, kan yang minta bapak, supaya di supplay 50 ke Indocement?

Iyaa, trus orang supplay nyampein PO ke UPK. Setelah UPK terima Ponya, dia harus menuhin.

Berarti kalo bapak yang minta, dikasihnya ke bapak dong?

Ya engga, kan yang make plan. Kalo kita sebagai untuk mengawasi aja sesuai nga spesifikasinya dengan yang diinginkan plan.

Kenapa nga plant yang minta, kan plant yang butuh?

Ini kan hasil program CSR, hahahha

Aku baru kali ini denger, masih belum ngerti.....

Jadi kan usernya itu plant. Udah ada koordinasi dulu sebelumnya. Kalo yang di plant itu yang tanggung jawab AFR. Dia yang bertanggung jawab untuk pembakarannya. Kalo ada masalah baru kasih tau ke kita. Misalnya "nih SMWnya basah nih". Jadi basahnya itu maksimal 30%. Kalo lebih dari itu nga bisa, malah menghambat proses pembakaran. Nah kita nanti koordinasi lagi ke UPK, gimana supaya nga lebih dari 30%. Yang konsumsi tetap plant. Kalo ke supplaynya tetap kita. Kita yang buatin Ponya.

50 ton itu permintaan dari CSRnyaya pak?

Iya, dia itu awalnya 100, Cuma biar lebih gampang bayarnya jadi dikurangin ampe 50. Kalo di Indocement itu kan sistemnya ke tiap suplier itu pembayarannya 3 bulan setelah pemenuhan administrasi.

Itu ke semua supplier lainnya juga kaya gitu pak?

Iya, jadi UPK itu dianggap sama sama supplier lainnya. Padahal kan dia program kita.

Ohh jadi CV yang di surat koordinasi itu maksudnya ini ya pak?

Iya, walalupun ini program CSR, namun prosedurnya memang seperti ini. Dari manajemen seperti ini peraturannya. Jadi ya kita ikutin aja. Kita usahakan supaya UPK bisa ngirimnya lewat CV.

Pak itu ntr yang bayar supliernya orang supply pak?

Bukan, mereka mah ngeluarin PO aja, yang bayar accounting.

Ohh gitu, ya pak, berarti accounting bayarnya 3 bulan setelah administrasi, administrasi itu maksudnya apa?

Barangnya masuk nih, administrasinya dipenuhin. Setelah itu ke accounting. Kalo nga ada masalah 3 bulan keluarnya.

Itu untuk semua divisi ya oak

Iya, jadi kalo ada kebutuhan, kita PR dulu ke supply, ntr supply PO ke luar buat suplier. Jadi ntr di yang nunjuk tender siapa yang menang. Setelah itu, barangnya di supplay, trus diselesaikan administasinya. Misalnya tanggal ini dimasukin, trus tanggal selanjutnya. Nah kalau udah ntr baru urusannya ke accounting. Accounting baru bayar 3 bulan selanjutnya.

Emang kaya gitu peraturannya ya pak?

Iya. Jadi dianggap sama UPK sama, sama suplier lainnya

Permintaan dari orang dalem ke supply divisi itu PR, ntr supply ngeluarin PO ke supplier. Kalo misalnya sanggup menuhin ayo masukin penawaran. Nanti supply divisi yang nentuin PO ini jatuh ke siapa. Jadi kan dia ada kriteria yang harus dipenuhi.

Setelah barang masuk urus admnisitrasi dulu di supply divisi. Setelah semua selesai baru ke accounting untuk pembayaran.

Nah iya, UPK juga sama, 3 bulan baru dibayar. Padahal operasional haru sjalan terus. Nah ini yang jadi masalah

Tapi seharusnya kalau manajemennya bagus bisa dong pak?

Nahh itu tolong jadi masukan yah, tolong di cantumin yah, sekarang kan memang kendalanya seperti itu, pelaporannya juga nga bagus. Disana memang kacau administrasinya. Nga da tenaga administrasi.

Saya pernah naya pak, tenaga administrasi nga ada karena nga ada uang buat bayar katanya?

Sebenarnya sih bisa aja kalau administrasinya lancar.

Iya ya pak, kalo uang subsidi itu buat apa pak?

Itu buat trasnportasi pak Dedi sama pak Rwnya termasuk didalam.

Cuma ya nga tau pengelolanya ini. Kita juga sudah pernah analisa gimana kalo pengelolanya diganti saja, tapi pihak manajemen bilang, pengelola yang sekarang dikasih kesempatan saja dulu

Komponen apa yang diinginkan ada di program tapi sekarang belum ada?

Terus komponen apa yang belum ada di program tapi masih dinginkan ada?

Pengolahan kompos, kalo sekarang kan ada perbaikan jadi kita upayakan ada pengolahan komposnya.

Bukannya dulu memang pernah ada pak?

Iya pernah pas awal-awal pernah ada komposnya. Cuma lama-lama vakum karna sampah yang overload itu.

- **Evaluasi Program**

Itu kalau evalusai ada nga pak?

Itu kita adain waktu rapat koordinasi.

Dalam jangka waktu beraoa?

Kita jadwalin sebulan sekali lah. Ya itu kalo melihat waktu. menyesuaikan

Yang ikut siapa aja pak?

Ketua pengeloa, trus dari tim sini, saya, pak Ayi. Terakhir seperti itu.

- **Kegiata lain**

Kegiatan lain yang dilakukan selain kegiatan inti pengolahan sampah?

Ada nga apak kegiatan yang dilakukan selain kegiatan inti pengolahan sampah?

Pendampingan, didampingi sambil diarahkan, dari situ dulu diajarkan dari hasil pilahan kan bisa dijual, mendapatkan tambahan, kalo engga pelihara, jadi dulu itu sempat disana pelihara lele, tapi Cuma sebentar. Jadi tidak hanya menggantungkan dari pengolahan sampah tetapi juga hal-hal kreatif lainnya. Lele itu dulunya disamping kantor tuh. Tapi sekarang engaa ada lagi karna ya itu pola pikir dan karakter mereka yang khas

Dengan kelemahan seperti itu ada nga pak upaya yang dilakukan?

Sebenarnya sih kalo pertama kali itu mereka dikasih training untuk menjadi pengusaha.

Pernah dapat pelatihan di Rumah Perubahan Renald Khasali, untuk merubah pola pikir mereka.

Selain itu juga dapat pelatihan dari kita gimana supaya beerkjanya itu aman. Nantinya kita kedepan mau ada arahan kepada mereka agar supaya mereka itu bisa sehat, jadi menerapkan

pola hidup bersih lah disana. Jadi kita coba rencanakan suatu pertemuan untuk menjelaskan penyuluhan kesehatan di tempat pengolahan sampah.

Itu dilaksanakannya rutin pak?

Kita pengennya rutin, namun kita menyesuaikan juga waktunya.

Ini khusus UPK aja pak?

Yang lain juga, tapi pionirnya kan UPK. biar mereka tau bagaimana menjaga kesehatan. Jadi walaupun bekerja dengan sampah tapi mereka tetap harus sehat juga

ada juga pelatihan tetngang SOP. Jadi mereka udah tau sopnya apa. Pelatihan tetngang enterpreneur juga, dulu pas kerumah perubahan. Dulu diawal pelaksanaan program. Disana juga dilaksanakan pelatihan bagaimana berwira usaha.

- **Penghambat pelaksanaan Program**

Sejauh ini apa kelemahan pelaksanaan UPK Pak?

Karakter orangnya

Orangnya itu siapa pak?

Pekerja, karakternya khas, kebiasaan karena dulunya itu yang diambil kan yang kebanyakan preman, jadi ya seperti bos, uang tinggal minta,. Jadi pola pikirnya masih ingin kerjanya yang gampang, trus dapat uang banyak. Sampai sekarang ya seperti itu. Itu yang jadi kelemahan. Pola pikir mereka itu harus dirubah. Jadi mereka jangan berpikir sebagai pekerja tapi pola pikir pengusaha. Jadi supaya dia bisa mandiri. Jadi tujuan awal hanya untuk trigger aja si UPK ini. Arahan bos subsidiya nanti pelan-pelan di stop.

Trus kelemahannya apalagi pak?

Kalo yang sekarang sih kaderisasi pengelolaan UPKnya masih kurang ya, maksudnya, kan pengelola yang sekarang belum tentu terud ada disana, soalnya dia juga banyak kesibukan kan. Kita pengennya dia menyiapkan kader kalau dia bener-bener nga bisa di UPK. nah sekarang nih setelah kita push juga baru ada satu tuh, dulu kan Cuma pengelola sama pengawas. Sekarang mulai sedikit, kita ingaktkan. Yang dikadernya pak taufik salim. Jadi dia kelihatannya loyal sama UPK. ada sih satu lagi udah dari awal bekerja di UPK, si zaenal. Kan dia udah lama disitu, bagus juga kerjanya. Sayangnya belum di kader. Jadi walaupun gokil itu sopir, tapi udah diajarkan.

Ohh gitu, kelemahan lainnya pak?

Ini pengelola itu dia mainnya langsung, tidak mengikuti prosedur yang ada. Mainnya langsung. Kemaren-kemaren itu dia langsung ke manager. Seharunya kan lewat saya sama pak ayi dulu. Udah pernah di kasih tau prosedurnya. Tapi kita terus coba arahkan, sudah mulai ada perubahan. Lewat saya dulu sama pak ayi. Karna dulunya itu mereka seperti dianakemaskan, bisa langsung ke atas. Kita nga tau apa-apa tiba-tiba dari atas langsung dapat kabar. Sekarang sudah mulai tidak

Kelemahan lainnya pak?

Trus ya manajemnya, pengelolanya kan terlalu banyak kesibukan, jadi jarang mengontrol kesana. Engga fokus.

Untuk yang tidak sesuai prosedur sudah coba kita atasi. Kita arahkan supaya dia sesuai prosedur. Kita kasih tau juga SOPnya, udah kita jelasin. Kalo ada apa-apa di UPK, nah udah kita jelasin semuanya. Kalo pengelola ya lewat rapat kita jelasin juga. Jadi kita liat komitmen pengelola untuk supaya dia ya terus kesana. Jadi supaya dia terus memonitor keadaan disana. Jadi kita bantu sampai dia mandiri.

Kalo pelatihan-pelatihan, belakangan ini pernah dilaksanakan lagi nga pak untuk pekerja UPK? Pelatihan sih sampai sekarang belum dilaksanakan. Terakhir itu dilaksanakan awal-awal, sama besok nih yang tentang kesehatan. Akan dilaksanakan bulan ini. Kita udah bikin surat tinggal menyesuaikan waktunya. Yang mengikuti karyawan UPK.

Kalo dari SDPnya pernah ada masalah nga pak?

Ada, yaaa jadi sosialisasi program CSR ke karyawan. Itu masih kurang, jadi yang lain masih menganggap program CSR itu urusannya departemen CSR. Informasi kepada karyawan yang lain masih kurang mengenai kegiatannya apa saja. Jadi masalahnya itu untuk UPK sendiri masih dianggap sama kaya supplier yang lain. Padahal ini kan berasal dari desa binaan. Harusnya diperlakukannya agak beda. Tapi diperlakukannya sama.

Ohh diwaktu pengiriman SMWnya ya pak?

Iya, jadi dimulai dari pembayaran disamakan sama yang lain, jadi kan lama pembayarannya. Disana kan nga bisa seperti itu. Jadinya ya masalah. Pembayaran lama, yang di plant pun masih sering menganggap hasil UPK itu masih memandang sebelah mata. Jadi masih memandang sebelah mata kepada kegiatan CSR. Kalo dari kita sih setiap rapat sudah kita jelaskan program kita apa aja. Cuma mungkin pelatihan mengenai CSR itu masih belum ada disini. Kita sudah pernah coba koordinasi sama bagian yang khusus mengenai training. Untup supaya ada peningkatan pengetahuan mengenai CSR di kalangan karyawan.

Menurut bapak apalagi nih, penghambat berjalannya program ini?

Kalo penghambat ya dari masyarakatnya ini nih, kesadaran masyarakatnya. Itu yang susah, jadi kesadaran masyarakat untuk membayar collecting fee. Kalau misalnya masyarakat sudah sadar untuk membayar collecting fee untuk pengolahan sampah itu, itu butuh biaya yang tidak sedikit kan, untuk mesinnya, pengelolaannya, tenaga kerjanya. Kalau kita kan mikirnya kita baung, ya habis perkara. Rata-rata sih gitu. Kalau misalnya dia nga buang pun, pola pikirnya selagi kita punya tanah, ya kita buang saja di tanah kita, atau buang di kali, habis perkara kan. Jadi masih merasa rugi kalau harus membayar besar. Padahal kan kalau ditempat lain tuh udah mulai mau bayar besar. Sebenarnya ini kan yang bisa support masalah pengolahan sampah ini. Sampai di Surabaya aja sekarang mau bayar 25ribu untuk sampah. Kalo disini masih kurang. Untuk naikin 1000 aja masih susah. Yang di Gunung Sari kejadian sama. Jadi kesadaran masyarakat itu masih kurang, pemahaman kepada masyarakat mengenai collecting fee pengolahan sampah dan juga kesadaran masyarakat untuk memilah-milah, antara sampah organik dan anorganik.

Nah itu gimana dong caramengatasinya?

Kalau dari kita sih udah diterapkan sekali tuh, kita udah coba di Gunung Sari. Kita kumpulin masyarakat, kita liatin pengolahan sampah seperti apa, pokonya sosialisasi

Di Puspanegara pernah pak?

Belum, itu kan karna programnya dari arahan manajemen. Timnya aja belum komplit, belum ada sosialisasi. Kalo menurut saya sih harusnya diadakan sosialisasi lagi bahawa dalam pengolahan sampah ini kita butuh biaya yang tidak sedikit. Dan juga kan mengolah sampa itu mengeluarkan tenaga. Mengeluarkan bahan bakar. Itu seharusnya ya sosialisasi lagi. Supaya mereka tau, kesadarannya tumbuh. Sekarang kan masih kurang. Ditambah lagi kebanyakan masyarakat disini kan pendatang. Sedikit sekali yang masih penduduk asli. Penduduk asli pun saya lihat ya cuek sola sampah. Dikali, tau-tau banjir aja.

- **Pendukung Pelaksanaan Program**

Kalo kelebihannya apa pak?

Kelebihan program ini bisa memberayakan masyarakat, jadi masyarakat diberdayakan. Mereka yang sebelumnya nga bekerja menjadi ada pekerjaan.

Terus jumlah sampah yang terus bertambah, itu yang bikin program terus ada. Terus juga penghargaan, kita sudah pernah dapat penghargaan pada 2008, untuk UPK Citereup CSR Award. Kalo misalnya kita stop ya banyak pengangguran lagi kan. Dengan adanya UPK kan

jadi dibutuhkan tenaga kerja. Jadi tidak hanya memberikan bantuan yang hanya bersifat sekali aja. Jadi kita berikan kailnya lah. Gitu.

Iyaa, nah kalo yang mendukung program ini tetap ada sampai sekarang apa menurut bapak? Yaa krana sampah itu selalu ada, dan tidak pernah berkurang, jadi bahan pabuknya selalu ada. Jadi dengan bertambahnya orang pasti sampahnya juga bertambah. Trus komitmen dari ini nih pengelolanya, idelais dari pengelolanya, jika dia seperti dulu, merasa ada tanggung jawab moral untuk pengolahan sampah bisa mendorong pengolahan sampah ini. Semangat keinignan untuk mengolah sampah

